

BUKU I



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA CIMAHI TAHUN 2022

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2021**



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan atas KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan APBD;
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa;

12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
15. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
16. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi; dan
17. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

Pasal 2

RKPD terdiri dari :

- a. bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022; dan
- b. bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

Bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022, serta

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

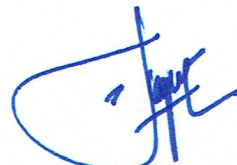
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 Agustus 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 630

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2022

I. UMUM

Maksud penetapan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan periode Tahun 2022 yang dimulai dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2022.

Tujuan penetapan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 adalah untuk :

- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
- e. mencapai hasil pelaksanaan pembangunan yang optimal, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPKD terdiri dari :

- a. bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022; dan
- b. bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 110

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Sejalan dengan hal ini pemerintah daerah wajib menyusun RKPD. Secara substansi dokumen ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Maksud penyusunan dokumen RKPD 2022 ini adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya KUA - PPAS ini setelah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA Perangkat Daerah ini akan dijadikan dasar untuk penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Dokumen RKPD ini memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2022.

Tim penyusunan RKPD Tahun 2022 menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen RKPD ini. Sangat disadari bahwa tanpa bantuan semua pihak dokumen RKPD ini tidak dapat terwujud.

Dokumen ini merupakan *living document* yang perlu disempurnakan, oleh karena itu mohon kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan dokumen RKPD di masa yang akan datang untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. LATAR BELAKANG I-1

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-6

1.3. HUBUNGAN RKPD KOTA CIMAHI DENGAN
DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA I-12

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN I-15

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD I-15

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi II-1

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .. II-1

2.1.1.2. Demografi II-12

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-20

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi II-20

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-44

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .. II-48

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-51

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib II-51

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan II-122

2.1.3.3. Fungsi Penunjang Lainnya II-137

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-147

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi
Daerah II-148

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/
Infrastruktur II-150

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-160
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-165
2.1.4.5. Indeks Daya Saing (IDSD)	II-168
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD	II-171
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020	II-171
2.2.2. Realisasi RPJMD	II-217
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-219
2.3.1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	II-222
2.3.1.1. Perencanaan	II-222
2.3.1.2. Keuangan	II-222
2.3.1.3. Kepegawaian dan Pendidikan Latihan	II-223
2.3.1.4. Pengawasan	II-224
2.3.1.5. Sekretariat Daerah	II-224
2.3.2. Angka Kriminalitas	II-224
2.4. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs KOTA CIMAHI ..	II-225
2.5. INOVASI DAERAH	II-257

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat	III-7
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Cimahi	III-9
3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2020	III-9
3.1.3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2022	II-20

3.1.3.3. Arah Kebijakan Perekonomian Kota Cimahi	II-21
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-23
3.2.1. Asumsi Dasar Kebijakan Keuangan Daerah	III-24
3.2.1.1. Asumsi Dasar dalam APBN	III-24
3.2.1.2. Lain-lain Asumsi	III-28
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-32
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-36
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-38
3.2.5. Struktur Keuangan Daerah	III-40

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH TAHUN 2022	IV-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-2
4.1.1.1. Tema Pembangunan Nasional	IV-5
4.1.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional ..	IV-5
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	IV-6
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi	IV-10
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022	IV-16
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional	IV-16
4.2.2. Tema Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	IV-17
4.2.3. Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Kota	IV-20
4.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022	IV-21
4.2.5. Pencegahan dan Penanganan Covid-19	IV-29
4.2.6. Percepatan Penurunan Stunting	IV-30

4.2.7. Strategi dan Kebijakan Pencapaian	
Tujuan SDGs	IV-32
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
TAHUN 2022	V-1
5.1. RINGKASAN ANGGARAN PERANGKAT	
DAERAH	V-3
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Kota Cimahi Berdasarkan Pembagian Kelurahan	II-3
Tabel 2.2.	Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi	II-4
Tabel 2.3.	Inventarisasi Sungai Kota Cimahi	II-5
Tabel 2.4.	Luas Wilayah Berdasarkan Tutupan di Kota Cimahi 2017	II-7
Tabel 2.5.	Kawasan rawan banjir Kota Cimahi Tahun 2019	II-11
Tabel 2.6.	Kabupaten/Kota dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Rendah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	II-14
Tabel 2.7.	Kepadatan Penduduk tahun 2018-2020	II-15
Tabel 2.8.	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	II-16
Tabel 2.9.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-21
Tabel 2.10.	Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persen)	II-22
Tabel 2.11.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Cimahi (%) Tahun 2016-2020	II-24
Tabel 2.12.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-25
Tabel 2.13.	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru Kota Cimahi	



	Tahun 2016–2020	II-33
Tabel 2.14.	Indeks Kesehatan dan Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-33
Tabel 2.15.	Kondisi Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-39
Tabel 2.16.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Kota Cimahi Tahun 2016–2020	II-45
Tabel 2.17.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kota Cimahi Tahun 2019	II-46
Tabel 2.18.	Prevalensi Kurang Gizi di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-48
Tabel 2.19.	Persentase kebudayaan yang dilestarikan di Kota Cimahi Tahun 2020	II-49
Tabel 2.20.	Persentase Sumber Daya Manusia Yang Terbina di Kota Cimahi Tahun 2017-2020 ..	II-49
Tabel 2.21.	Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kota Cimahi Tahun 2020	II-50
Tabel 2.22.	Data Sarana Olahraga Milik PEMKOT Cimahi Tahun 2020	II-50
Tabel 2.23.	Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-52
Tabel 2.24.	Rasio Guru Murid di Kota Cimahi Tahun 2016-2019	II-52
Tabel 2.25.	Data Balita Stunting Per Kelurahan di Kota Cimahi Tahun 2020	II-54
Tabel 2.26.	Prevalensi Kurang Gizi di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-55
Tabel 2.27.	Fasilitas Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2020	II-58
Tabel 2.28.	Statistik Transportasi Kota Cimahi Tahun 2016–2020	II-65
Tabel 2.29.	Tingkat Pelayanan Jalan/ <i>Level of Service</i> (LOS) di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-65



Tabel 2.30.	Karakteristik Tingkat Pelayanan	II-66
Tabel 2.31.	Rasio Luas Kawasan Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-69
Tabel 2.32.	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Tahun 2015-2020	II-70
Tabel 2.33.	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih Kota Cimahi Tahun 2015-2020	II-70
Tabel 2.34.	Kondisi Kolam Retensi Tahun 2020 Kota Cimahi	II-71
Tabel 2.35.	Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota Tahun 2017-2020	II-72
Tabel 2.36.	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-72
Tabel 2.37.	Kejadian Kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2015-2020	II-73
Tabel 2.38.	Daerah Evakuasi Bencana Kota Cimahi	II-74
Tabel 2.39.	Indikator Kebencanaan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-76
Tabel 2.40.	Jumlah PMKS Kota Cimahi Menurut Jenis PMKS Tahun 2020	II-77
Tabel 2.41.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-78
Tabel 2.42.	Jumlah DTKS Berdasarkan Ruta	II-81
Tabel 2.43.	Jumlah DTKS Berdasarkan ART	II-81
Tabel 2.44.	Data Pendidikan dan Pelatihan Kerja serta Hubungan Industrial Kota Cimahi Tahun 2018-2020	II-86
Tabel 2.45.	Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-87
Tabel 2.46.	Data Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	II-88
Tabel 2.47.	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG Kota Cimahi	



	Tahun 2017-2020	II-88
Tabel 2.48.	Ketersediaan Pangan Kota Cimahi	
	Tahun 2019	II-90
Tabel 2.49.	Konsumsi Pangan Rata-Rata di Kota Cimahi	
	Tahun 2019	II-91
Tabel 2.50.	Pola Pangan Harapan ketersediaan	
	Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-94
Tabel 2.51.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
	di Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020	II-98
Tabel 2.52.	Persentase Ruang Terbuka Hijau di	
	Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020	II-98
Tabel 2.53.	Persentase Pengelolaan Sampah di	
	Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020	II-99
Tabel 2.54.	Kepala Keluarga Di Kota Cimahi yang	
	Belum dan Sudah Memiliki Kartu Keluarga	
	SIAK Tahun 2020	II-100
Tabel 2.55.	Jumlah Penduduk dan Wajib KTP Di	
	Kota Cimahi Tahun 2020	II-100
Tabel 2.56.	Kepemilikan Akte Kelahiran Penduduk	
	kota Cimahi Tahun 2020	II-101
Tabel 2.57.	Jumlah Lembaga dan Kader Pembangunan	
	di Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.58.	Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif	
	Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-105
Tabel 2.59.	Rasio Akseptor KB mandiri dan Rasio	
	Akseptor KB di Kota Cimahi Tahun 2017-	
	2020	II-106
Tabel 2.60.	Persentase Angkutan Yang Layak Jalan di	
	Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-107
Tabel 2.61.	Persentase Jaringan Jalan Yang Terlayani	
	Angkutan Umum di Kota Cimahi Tahun	
	2017-2020	II-108
Tabel 2.62.	Persentase penurunan titik kemacetan di	
	Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-108

Tabel 2.63.	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak di Kota Cimahi Tahun 2017 – 2020	II-109
Tabel 2.64.	Indikator Bidang Koperasi Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2.65.	Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi Tahun 2017 – 2020 (Miliar Rp)	II-114
Tabel 2.66.	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM di Kota Cimahi dan Jumlah Jenis Izin yang Dapat Dilayani Sesuai Standar Pelayanan Tahun 2017-2020	II-114
Tabel 2.67.	Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-115
Tabel 2.68.	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-116
Tabel 2.69.	Data Cagar Budaya di Kota Cimahi yang Menjadi Target Hingga tahun 2022	II-118
Tabel 2.70.	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-125
Tabel 2.71.	Banyaknya Hotel/Penginapan, Kamar dan Tempat Tidur Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2019	II-125
Tabel 2.72.	Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016-2019	II-126
Tabel 2.73.	Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Kering Dirinci Menurut Jenis Pengairan di Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-127
Tabel 2.74.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Persen)	II-128
Tabel 2.75.	Nilai PDRB ADHB Sektor Pertanian Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	II-129

Tabel 2.76.	Jumlah Ternak Ayam Buras dan Ras Pedaging di Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-130
Tabel 2.77.	Jumlah dan Jenis Komoditas Ternak di Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-131
Tabel 2.78.	Produksi Hasil Peternakan dan Tanaman Padi di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-131
Tabel 2.79.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020	II-133
Tabel 2.80.	Jumlah Industri Sedang Besar dan Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020	II-134
Tabel 2.81.	Jumlah IKM yang Mendapatkan Fasilitas Tahun 2019 dan 2020	II-135
Tabel 2.82.	Jumlah Tenaga Kerja dan Realisasi Retribusi Daerah dari Tenant di BITc	II-136
Tabel 2.83.	Indikator Bidang Urusan Perencanaan di Kota Cimahi dan Capaiannya	II-138
Tabel 2.84.	Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2020	II-139
Tabel 2.85.	Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Golongan Tahun 2012 – 2020	II-140
Tabel 2.86.	Indikator Penelitian dan Pengembangan di Kota Cimahi Tahun 2018-2020	II-144
Tabel 2.87.	Indikator Pengawasan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-146
Tabel 2.88.	Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-146
Tabel 2.89.	Nilai SAKIP Kota Cimahi Tahun 2016-2019	II-147
Tabel 2.90.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita per Bulan di Kota Cimahi Tahun 2019	II-149
Tabel 2.91.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Pangan per Kapita per Bulan di Kota Cimahi Tahun 2019	II-150



Tabel 2.92.	Panjang Jalan di Kota Cimahi Menurut Tingkat Kewenangan Tahun 2019-2020	II-151
Tabel 2.93.	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi Tahun 2018-2020	II-151
Tabel 2.94.	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-152
Tabel 2.95.	Persentase Bangunan Berizin di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-152
Tabel 2.96.	Luas Wilayah Industri di Kota Cimahi 2018-2019	II-153
Tabel 2.97.	Jumlah Keluarahan yang Mengalami Kebanjiran Tahun 2018-2020	II-153
Tabel 2.98.	Luas Lahan Kering Tahun 2020	II-154
Tabel 2.99.	Jenis dan Jumlah Bank di Kota Cimahi Tahun 2019-2020	II-156
Tabel 2.100.	Jumlah Rumah Makan/Restoran/Cafe Tahun 2018-2020	II-156
Tabel 2.101.	Jumlah Akomodasi Penginapan di Kota Cimahi Tahun 2018-2020	II-157
Tabel 2.102.	Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Tahun 2020	II-157
Tabel 2.103.	Jumlah Daya Listrik yang Disalurkan Setiap Bulan di Kota Cimahi Tahun 2020	II-158
Tabel 2.104.	Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2020	II-159
Tabel 2.105.	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Seluler Tahun 2018-2019	II-160
Tabel 2.106.	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2017 - 2020	II-161
Tabel 2.107.	Demonstrasi Tahun 2020	II-161
Tabel 2.108.	Jenis Pajak Daerah Kota Cimahi	II-162
Tabel 2.109.	Jenis dan Macam Retribusi Daerah	

	Kota Cimahi	II-163
Tabel 2.110.	Jenis dan Macam Retribusi Daerah Kota Cimahi	II-165
Tabel 2.111.	Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi Tahun 2015- 2020	II-166
Tabel 2.112.	Rasio Ketergantungan di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-167
Tabel 2.113.	Jumlah Program dan Kegiatan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020 Kota Cimahi ...	II-172
Tabel 2.114.	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020	II-173
Tabel 2.115.	Realisasi Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	II-174
Tabel 2.116.	Realisasi Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	II-189
Tabel 2.117.	Realisasi Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	II-207
Tabel 2.118.	Nilai Capaian IKU Wali Kota Cimahi Tahun 2019	II-218
Tabel 2.119.	Tabel Distribusi Kasus Covid-19 Berdasarkan Umur	II-219
Tabel 2.120.	Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Golongan Tahun 2016 – 2020	II-223
Tabel 2.121.	Lokasi Rawan Konflik di Kota Cimahi	II-225
Tabel 2.122.	Evaluasi Indikator SDGs Tahun 2019	II-226
Tabel 2.123.	Indikator Penelitian dan Pengembangan di Kota Cimahi Tahun 2018-2020	II-260
Tabel 3.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2020-2024	III-7
Tabel 3.2.	Proyeksi Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2018-2023	III-8

Tabel 3.3.	Target Indikator Makro Jawa Barat 2022 ...	III-9
Tabel 3.4.	Target Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2021- 2022	III-10
Tabel 3.5.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persen)	III-10
Tabel 3.6.	PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Miliar Rp) ..	III-11
Tabel 3.7.	Realisasi Investasi berdasarkan LKPM Kota Cimahi Tahun 2016-2020	III-16
Tabel 3.8.	Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral 2016 – 2021	III-26
Tabel 3.9.	Capaian Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah Tahun 2017-2020	III-33
Tabel 3.10.	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2020	III-33
Tabel 3.11.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 – 2022	III-35
Tabel 3.12.	Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2020	III-37
Tabel 3.13.	Kebijakan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2020	III-38
Tabel 3.14.	Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 – 2022	III-40
Tabel 3.15.	Perkiraan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022	III-40
Tabel 4.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	IV-8
Tabel 4.2.	Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	IV-14
Tabel 4.3.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis	IV-19

Tabel 4.4.	Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Kota Cimahi ..	IV-20
Tabel 4.5.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi	IV-25
Tabel 5.1.	Rekapitulasi Belanja Program pada Anggaran Tahun 2022	V-4
Tabel 5.2.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2022	V-8
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
Tabel 6.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VI-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Tahapan Tata Cara Penyusunan RKPD	I-5
Gambar 1.2.	Bagan Hubungan RKPD Kota Cimahi dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-13
Gambar 1.3.	Korelasi antar dokumen perencanaan spasial dan a-spasial	I-14
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kota Cimahi	II-2
Gambar 2.2.	Peta Tutupan Lahan Kota Cimahi	II-8
Gambar 2.3.	Peta Rawan Bencana Kota Cimahi	II-12
Gambar 2.4.	Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-13
Gambar 2.5.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-14
Gambar 2.6.	Piramida Penduduk	II-17
Gambar 2.7.	Komposisi Penduduk Kota Cimahi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2020	II-18
Gambar 2.8.	Perkembangan Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2015, 2017-2020	II-19
Gambar 2.9.	Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020	II-20
Gambar 2.10.	Kontribusi 17 Sektor Terhadap Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2020	II-23
Gambar 2.11.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..	II-27
Gambar 2.12.	Perkembangan Inflasi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	II-28
Gambar 2.13.	Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-20120	II-30

Gambar 2.14.	Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi dengan Kota/Kabupaten Sekitar Tahun 2015-2018	II-31
Gambar 2.15.	Capaian IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	II-32
Gambar 2.16.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020	II-34
Gambar 2.17.	Harapan Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	II-35
Gambar 2.18.	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	II-36
Gambar 2.19.	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	II-37
Gambar 2.20.	Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	II-38
Gambar 2.21.	Garis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-39
Gambar 2.22.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cimahi 2016-2020	II-40
Gambar 2.23.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020	II-42
Gambar 2.24.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020	II-43
Gambar 2.25.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 4-6 Tahun Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-44
Gambar 2.26.	Rasio Kematian Bayi dan Ibu Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-47
Gambar 2.27.	Persentase Kualifikasi Guru SD di Kota Cimahi Tahun 2016-2019	II-53

Gambar 2.28.	Persentase Kualifikasi Guru SMP di Kota Cimahi Tahun 2016-2019	II-53
Gambar 2.29.	Grafik Penemuan Pasien TB BTA Positif Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-56
Gambar 2.30.	Total Kumulatif Kasus HIV/AIDS Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-57
Gambar 2.31.	Cakupan Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang Ditangani Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-57
Gambar 2.32.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2016-2020	II-59
Gambar 2.33.	Cakupan Pelayanan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-60
Gambar 2.34.	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2016-2020	II-61
Gambar 2.35.	Posyandu Aktif Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-62
Gambar 2.36.	Kunjungan Puskesmas Tahun 2016-2020 ..	II-63
Gambar 2.37.	Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit di Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-64
Gambar 2.38.	Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi	II-68
Gambar 2.39.	Skor PPH Penduduk per Golongan Pengeluaran di Kota Cimahi Tahun 2019 ...	II-92
Gambar 2.40.	Persentase Rumah Tangga dirinci Menurut Status Kepemilikan Lahan Tahun 2019	II-95
Gambar 2.41.	Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020	II-96
Gambar 2.42.	Indeks Kualitas Air Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020	II-97
Gambar 2.43.	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2020	II-104
Gambar 2.44.	Produksi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-122
Gambar 2.45.	Jenis Ikan Hias yang dikembangkan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-123

Gambar 2.46.	Tingkat Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-124
Gambar 2.47.	Sebaran Aktivitas Sektor Perdagangan	II-132
Gambar 2.48.	IKM/UKM Yang Mengikuti Promosi Di Level Lokal, Regional Dan Nasional di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-133
Gambar 2.49.	Tenaga Kerja Industri Sedang Besar dan Nilai Tambah Industri Pengolahan Kota Cimahi Tahun 2015 – 2019	II-135
Gambar 2.50.	Peta Administrasi Kota Cimahi	II-155
Gambar 3.1.	PDRB Perkapita Kota Cimahi Tahun 2016-2020	III-12
Gambar 3.2.	Inflasi Kota Perhitungan IHK Jabar TW II 2020	III-14
Gambar 3.3.	Inflasi Kota Perhitungan IHK Jabar TW IV 2020	III-15
Gambar 3.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020	III-18
Gambar 3.5.	Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	III-19
Gambar 4.1.	Target Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2022	IV-6
Gambar 4.2.	Fokus Pembangunan Tahun 2022	IV-17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kelanjutan tahapan perencanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya. Dokumen yang dimaksud memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Beberapa nilai penting dari dokumen RKPD ini adalah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD. Selain itu dengan adanya dokumen RKPD ini maka masing-masing Perangkat Daerah memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 75 bahwa penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 juga dilakukan melalui tahap penyesuaian dengan berbagai kebijakan Pembangunan Nasional yang sedang disusun dengan mempertimbangkan Rancangan RPJMN 2020-2024, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dengan berpedoman pada RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Selain itu dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 sudah harus melaksanakan amanat yang ada dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)*, yang merupakan kelanjutan dari program *Millennium Development Goals (MDG's)*.

Proses penyusunan RKPD dilakukan secara sistematis dan tanggap terhadap perubahan dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. Terdapat 4 (empat) pendekatan yang berorientasi proses dalam penyusunan RKPD yaitu :

1. Pendekatan teknokratik; dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Perangkat Daerah Kota Cimahi lainnya;
2. Pendekatan partisipatif; melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah;
3. Pendekatan politis; mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan yang ditunjukkan dengan diakomodirnya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi setelah dibahas bersama; dan

4. Pendekatan atas-bawah/*top up* (pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah) dan bawah-atas/*bottom up* (pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan, Kecamatan, Pra Musrenbang, dan Musrenbang Kota.

Selain berorientasi proses, penyusunan perencanaan daerah pun berorientasi pada substansi dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan holistik-tematik; mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Pendekatan integratif; menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
3. Pendekatan spasial; dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

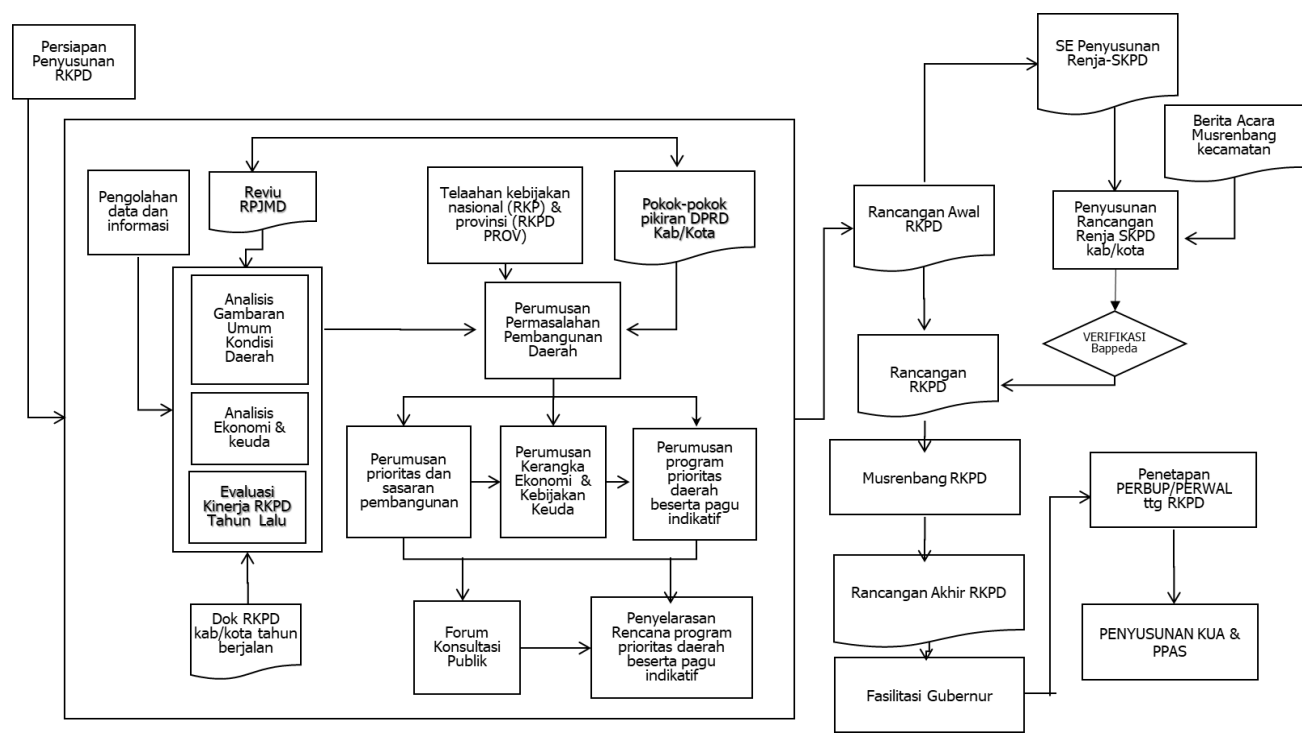
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah;

2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan daerah dan kesatuan Nasional;
5. Rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan kepada pemilihan strategi dan program serta kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia; dan
6. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dilaksanakan dalam satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD 2021 ini, mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu : persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bagan alir tahapan penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Tata Cara Penyusunan RKPD



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2017

Sebagaimana diketahui bahwa Pandemi Covid-19 merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia, dan saat ini Pemerintah Kota Cimahi juga masih menghadapi tantangan dalam penanganan Pandemi Covid-19. Diprediksi bahwa pada tahun 2022 pandemi ini masih ada di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Kota Cimahi memprioritaskan pembangunan daerah di tahun 2022 pada penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan akibat dari dampak Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) selain prioritas pembangunan lainnya.

Untuk Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam merumuskan perencanaan pembangunannya akan terus memperhatikan perkembangan global dan Nasional berkaitan dengan Pandemi Covid-19 beserta dampak yang timbul. Adapun tema pembangunan Kota Cimahi yang sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah

“Melanjutkan Pemulihan Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera yang didukung dengan Infrastruktur Berkelanjutan”.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Meghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 27. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
39. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 505);
40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
41. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189-Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);

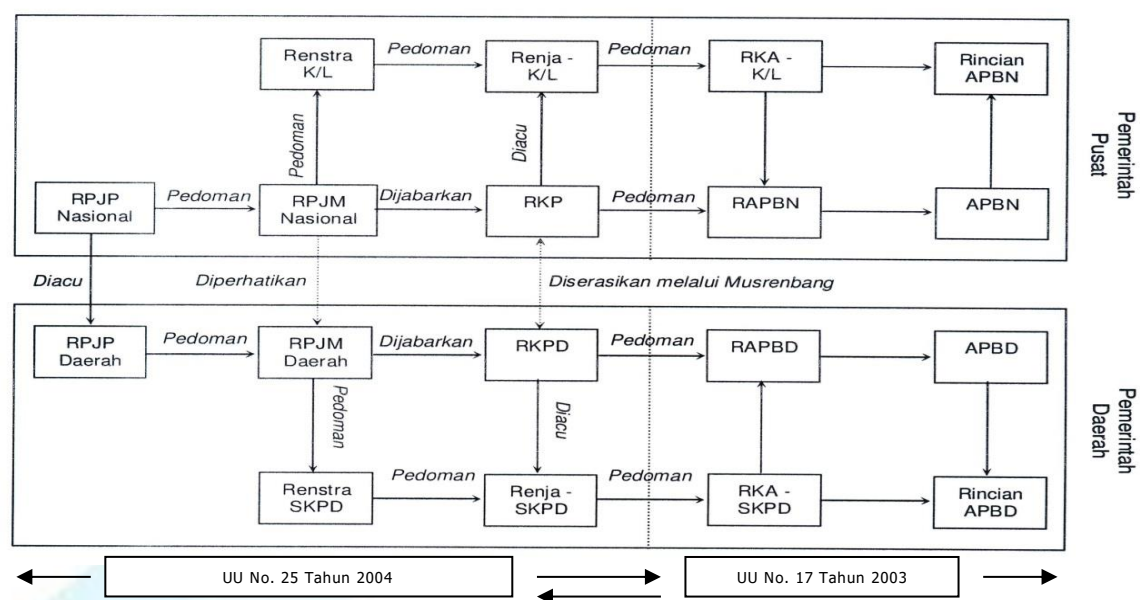
44. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
48. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
49. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);

1.3. HUBUNGAN RKPD KOTA CIMAHI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan antar dokumen perencanaan

merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

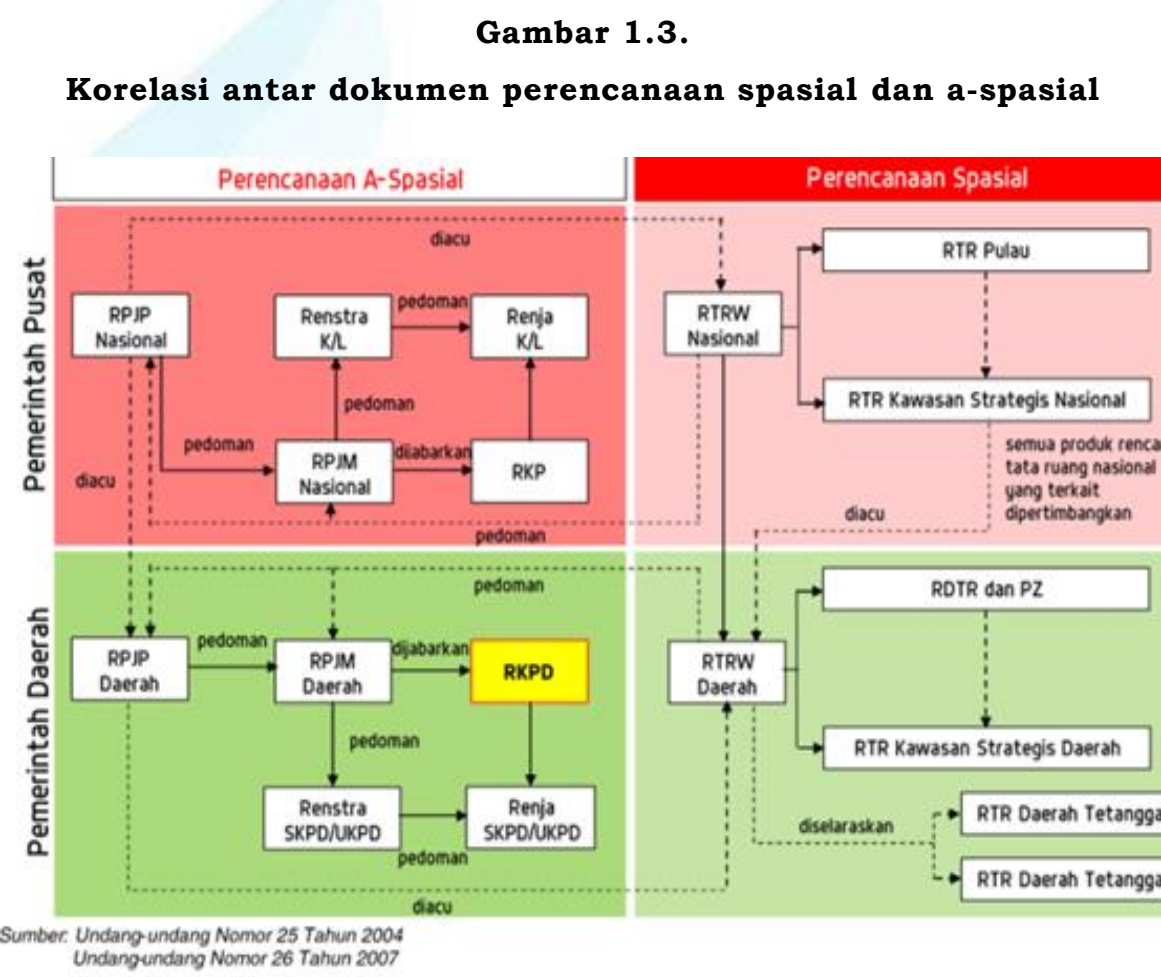
Gambar 1.2.
Bagan Hubungan RKPD Kota Cimahi dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional. Dokumen RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sebagaimana telah disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD.

Dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat a-spasial perlu disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, seperti dokumen RTRW daerah, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ), serta RTR (Rencana Tata Ruang) Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, sebaiknya perlu juga diselaraskan dengan dokumen keruangan RTR dari wilayah tetangga. Posisi penyusunan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan berpedoman dengan RPJPD. Dan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD tersebut adalah dokumen RTRW daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJPD dan RPJMD, yang sama-sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial, sebagaimana dijabarkan di atas dapat dilihat pada gambar berikut :



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen rancangan akhir RKPD Tahun 2022 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Adapun tujuan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2022 adalah :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Cimahi;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
3. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui Musrenbang;
4. Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
5. Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022;
6. Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah; dan
7. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan pemerintah daerah lainnya.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat dan menjelaskan Gambaran Umum, Maksud, dan Tujuan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi

panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Tahun 2022 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut dapat menginformasikan sejauh mana kemajuan dan keberhasilan kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam mendukung tujuan pembangunan.

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, luas Kota Cimahi secara keseluruhan mencapai 4.248,10 Ha dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir Kota Bandung;
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Margaasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung dan Kulon Kota Bandung; dan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Wilayah Kota Cimahi meliputi 3 (tiga) kecamatan, dengan rincian pembagian wilayah beserta luasnya sebagai berikut :

- a. Kecamatan Cimahi Utara yang terdiri atas 4 (empat) kelurahan, 83 (delapan puluh tiga) RW dan 418 (empat ratus delapan belas) RT;

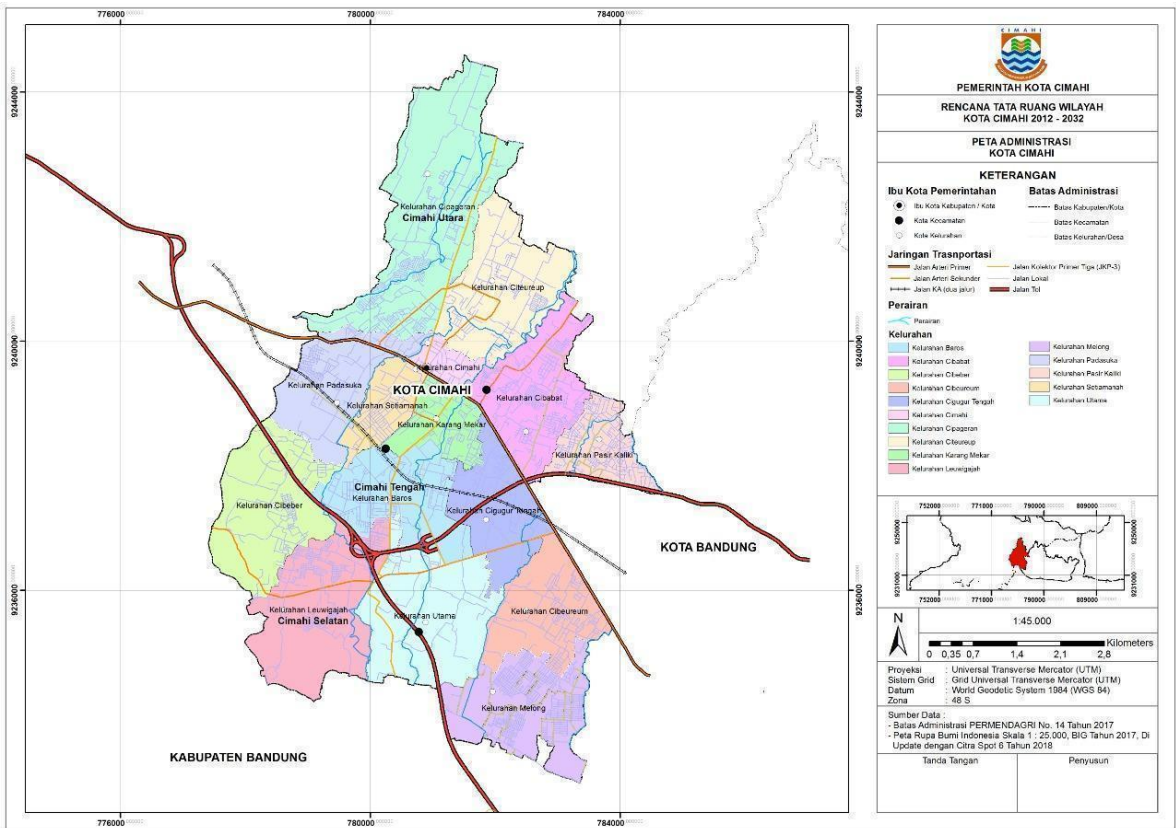
- b. Kecamatan Cimahi Tengah yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 107 (seratus tujuh) RW dan 413 (empat ratus tiga belas) RT; dan

c. Kecamatan Cimahi Selatan yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan, 111 (seratus sebelas) RW dan 628 (enam ratus dua puluh delapan) RT.

Berdasarkan penegasan batas wilayah administrasi tersebut di atas, maka luas wilayah Kota Cimahi adalah 4248,10 Ha. Secara tabulasi luas wilayah Kota Cimahi berdasarkan kelurahan disajikan pada Tabel 2.1 dan secara grafis wilayah administrasi Kota Cimahi disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Kota Cimahi



Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032



Tabel 2.1.
Luas Kota Cimahi Berdasarkan Pembagian Kelurahan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (HA)
1.	Cimahi Selatan	Melong	294.78
		Cibeureum	25942
		Utama	416.08
		Leuwigajah	402.3
		Cibeber	367.8
	Kecamatan Cimahi Selatan		27422.96
2.	Cimahi Tengah	Baros	285.79
		Cigugur Tengah	249.01
		Karang Mekar	121.63
		Setiamanah	112.23
		Padasuka	273.55
		Cimahi	57.65
	Kecamatan Cimahi Tengah		1099.86
3.	Cimahi Utara	Pasirkaliki	168.27
		Cibabat	286.68
		Citeureup	343.81
		Cipageran	610.02
	Kecamatan Cimahi Utara		1408.78

Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

2. Letak Geografis dan Astronomis

Letak astronomis wilayah Kota Cimahi berdasarkan penegasan batas-batas wilayah yakni berada di 107°30’37”-107°34’34” Bujur Timur dan 6°49’38” - 6°55’58” Lintang Selatan.

Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang berfungsi menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi – Padalarang – Purwakarta, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta. Berdasarkan letak geografis Kota Cimahi sangat strategis

karena terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibukota Jawa Barat yang sangat dinamis.

3. Kondisi Topografi

Secara topografi Kota Cimahi terletak pada elevasi +600 m hingga +1.000 m diatas permukaan laut, kondisi tersebut berdampak pada sebagian wilayah Kota Cimahi menjadi bagian Kawasan Bandung Utara (KBU), kegiatan pembangunan di kawasan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang menunjang fungsi lindung kawasan tersebut. Dilihat dari kemiringan lerengnya, Kota Cimahi memiliki kemiringan lereng yang cukup bervariasi yaitu daerah yang memiliki kemiringan lereng 0–2 persen dengan dominan terletak di Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan, daerah yang memiliki kemiringan lereng 2-15 persen dominan terletak di wilayah Kecamatan Cimahi Utara, daerah yang memiliki kemiringan lereng 15-25 persen, 25 – 40 % dan lebih besar 40% dominan di wilayah Cimahi Utara dan Selatan. Secara rinci, luasan wilayah Kota Cimahi per kecamatan berdasarkan kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total (Km ²)
		0 – 2%	2 – 15%	15 –25%	25– 40%	>40%	
1.	Cimahi Selatan	9,75	3,03	0,82	0,97	0,29	14,86
2.	Cimahi Tengah	10,33	2,89	0,14	0,11	0,02	13,48
3.	Cimahi Utara	2,61	9,85	1,06	0,51	0,12	14,14
	Total (ha)	22,69	15,77	2,01	1,59	0,43	42,48

Sumber : Peta Dasar Validasi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

4. Kondisi Geologi

Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, morfologi wilayah Kota Cimahi dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Satuan Morfologi Dataran Satuan morfologi dataran ini adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif

datar dengan kisaran kemiringan lereng antara 0-2 persen. Bentuk bentang alam ini mendominasi wilayah Kota Cimahi dengan luas sekitar 2.269 ha; dan

- b. Satuan Morfologi Perbukitan Bentang alam perbukitan di wilayah Kota Cimahi terdiri atas perbukitan landai dengan kemiringan berkisar antara 2-15 persen seluas 1.577 Ha, perbukitan sedang dengan kemiringan berkisar antara 15-40 persen seluas 201 Ha, dan perbukitan terjal dengan kisaran kemiringan lebih dari 40 persen seluas 43 Ha.

5. Kondisi Hidrologi

Hidrologi Kota Cimahi yang ditandai dengan air permukaan berupa sungai, merupakan sungai-sungai orde ketiga dari Sungai Citarum. Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cilember dan Sungai Cibeureum adalah 5 (lima) sungai utama yang mengalir melalui Kota Cimahi. Adapun kondisi sungai-sungai tersebut, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Inventarisasi Sungai Kota Cimahi

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1.	Cisangkan Hulu-Hilir	16.91	-	-	-		0,49
	Cisangkan Hulu	-	2	2	0.20	0.75	-
	Cisangkan Tengah	-	3	3	0.30	1.16	-
	Cisangkan Hilir	-	6	6	0.70	0.9	-
2.	Cilember Hulu-Hilir	35.04	-	-	-		0,20
	Cibaligo Hulu	-	3	3	1.20	1.64	-
	Cibaligo Tengah	-	2.5	2.5	0.5	1.54	-
	Cibaligo Hilir	-	3	3	0.65	1.14	-
3.	Cibabat Hulu-Hilir	35.04	-	-	-		0,20
	Cibabat Hulu	-	1.5	1.5	0.20	1,77	-
	Cibabat Tengah	-	4	4	0.60	1.12	-
	Cibabat Hilir	-	2	2	0.30	1.19	-
4.	Cibeureum Hulu-Hilir	24.66	-	-	-		0,20
	Cibeureum Hulu	-	4	4	0.75	1.19	-
	Cibeureum Tengah	-	6	6	0.50	1.32	-
	Cibeureum Hilir	-	8	8	0.50	1	-

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
5.	Cimahi Hulu-Hilir	18.61	-	-	-		0,38
	Cimahi Hulu	-	6	6	0.3	1.13	-
	Cimahi Tengah	-	4	4	0.5	1.21	-
	Cimahi Hilir	-	7	7	1	1.18	-

Sumber : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017

Sungai Cimahi berhulu di puncak lereng barat Gunung Tangkuban Perahu tepatnya Situ Lembang, melintasi Kelurahan Citeureup, Cibabat, Baros, Utama dan Karang Mekar. Sungai Cisangkan melintasi Kelurahan Citeureup, Padasuka, Baros, Leuwigajah/Utama. Sungai melintasi Kelurahan Cibabat, Cibeureum, dan Melong. Sungai Cibeureum berasal dari bagian barat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung melintasi perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung. Sungai ini melintasi Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong.

6. Kondisi Klimatologi

Kota Cimahi dan sekitarnya memiliki iklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Juni – September serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober – Mei. Rata-rata curah hujan tahunan pada setiap wilayah di sekitar Kota Cimahi bervariasi tergantung dari elevasi permukaan tanah. Pada elevasi ±700-850 mdpl, curah hujan bervariasi antara 1.700-3.000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi > 850 mdpl hingga puncak pegunungan (+3.000 m) curah hujan mencapai 3.000-4.000 mm/tahun. Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan September, dan maksimum 83 % pada bulan April. Rata-rata temperatur udara berkisar 22,7°C- 23,2°C Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar 0,6°C setiap kenaikan elevasi 100 m. Evapotranspirasi bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan atau rata-rata 1.572 mm per tahun.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Oldeman (Lakitan 2002), iklim di Kota Cimahi termasuk dalam iklim tipe B2. Jenis tanaman pertanian yang cocok untuk tipe iklim tersebut adalah tanaman padi yang dapat ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dan palawija yang dapat ditanam baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Dengan curah hujan berkisar antara 1.700 – 4.000 mm per tahun dan luas wilayah 4.249 ha, Kota Cimahi memiliki potensi volume air hujan sebesar 68,90 – 162,12 juta m3 per tahun. Selain sebagai sumber air untuk pertanian, dengan sentuhan teknologi air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan eksisting Kota Cimahi berdasarkan peta tutupan lahan yang menjadi lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 2.4. Porsi penggunaan lahan terbesar adalah permukiman dan tempat kegiatan, disusul oleh tegalan, sawah dan semak belukar. Informasi ini juga ditampilkan dalam bentuk peta, seperti dibawah ini :

Tabel 2.4.
Luas Wilayah Berdasarkan Tutupan di Kota Cimahi 2017

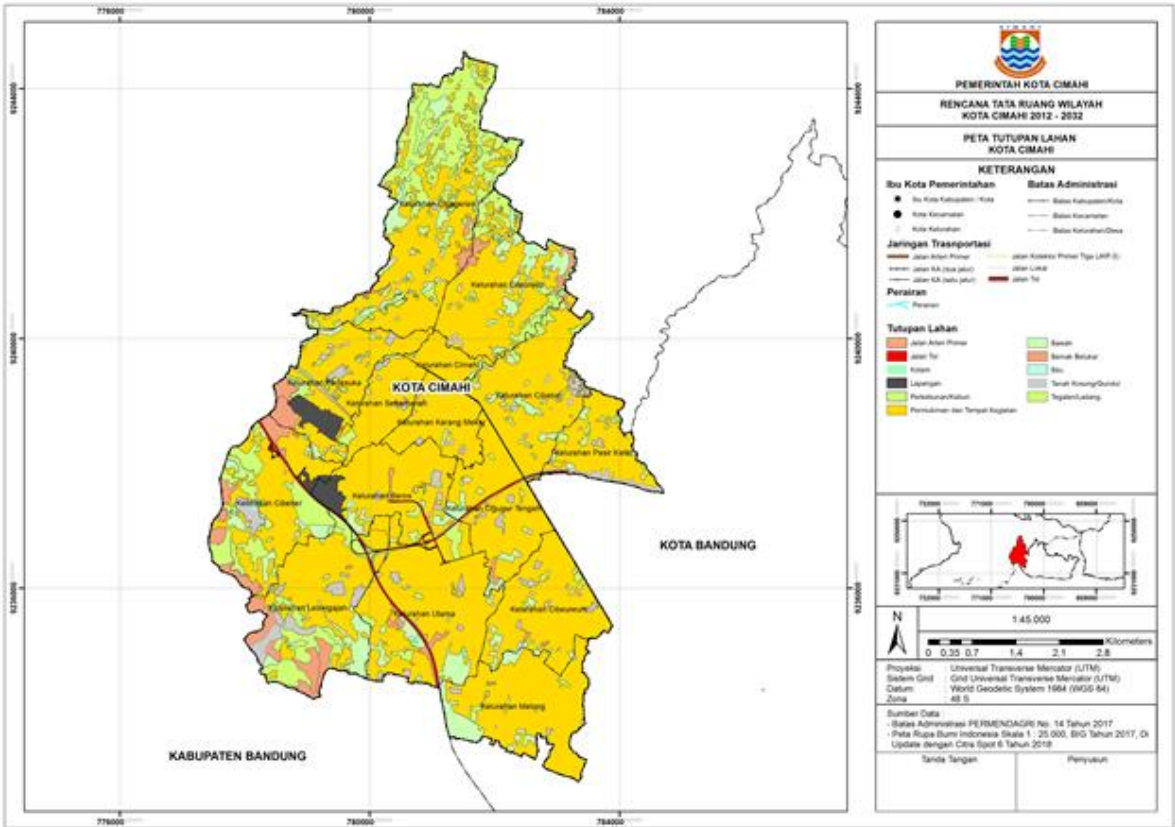
Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Jalan Arteri Primer	5.57
Jalan Tol	29.35
Kolam	5.72
Lapangan	56.27
Perkebunan/Kebun	135.83
Permukiman dan Tempat Kegiatan	2957.20
Sawah	323.63
Semak Belukar	158.50



Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Situ	0.63
Tanah Kosong/Gundul	129.78
Tegalan/Ladang	445.64
Total	4248.10

Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

Gambar 2.2.
Peta Tutupan Lahan Kota Cimahi



Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

8. Potensi Pengembangan Wilayah
- Potensi pengembangan wilayah Kota Cimahi diarahkan pada 3 (tiga) aspek pengembangan strategis meliputi pengembangan kawasan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kota Cimahi menjadi bagian Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai Kota Inti dari kawasan perkotaan Cekungan Bandung dengan fungsi kegiatan utama meliputi : pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat

industri (ekonomi kreatif dan industri non polutif), pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan sistem angkutan umum dan penumpang regional serta pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Potensi pengembangan wilayah Kota Cimahi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya kota adalah kawasan wilayah kota yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pengembangan wilayah di Kota Cimahi diarahkan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Hal ini tertuang dalam Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032, meliputi :

a. Kawasan Perumahan

- 1) Pengembangan perumahan diarahkan pada intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan kepadatannya, meliputi perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Karangmekar; perumahan kepadatan sedang diarahkan di Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, Kelurahan Baros dan sebagian Kelurahan Setiamanah; dan perumahan Kepadatan rendah diarahkan di sebagian Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat, sebagian Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cimahi dan sebagian Kelurahan Setiamanah;
- 2) Pengembangan hunian vertikal di Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan sebagian Kecamatan Cimahi Utara; dan
- 3) Penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur di bantaran sungai di Kecamatan Cimahi Tengah dan Selatan.

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan modern, toko dan ritel modern, pendidikan, kesehatan dan perdagangan dan jasa lainnya, yang saat ini sebagian besar berpusat di wilayah Cimahi Tengah, Selain itu, Wilayah Cimahi Selatan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan perdagangan dan jasa dengan adanya akses ke Tol Baros.

Adanya rencana pembentukan Sentra Perdagangan dan Jasa merupakan salah satu upaya dalam pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa.

9. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kota Cimahi, meliputi rawan tanah longsor, rawan banjir, dan rawan aliran lahar gunung berapi. Kawasan rawan tanah longsor mencakup kawasan di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan, terutama wilayah dengan kemiringan diatas 15 persen (lima belas persen) seluas 147 (seratus empat puluh tujuh) ha. Bencana tanah longsor di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir tidak ada korban jiwa, melainkan kerugian materi sebesar Rp. 535 Juta.

Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana untuk kawasan rawan longsor dilakukan dengan menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor dan menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan.

Bencana kebakaran terjadi di Tahun 2016 dengan luas total lahan terbakar adalah 0,2 Ha. Kerugian materi mencapai Rp. 2,8 M. Pada Tahun 2015 kebakaran lahan terjadi lebih besar yaitu di 5 lokasi (5 kelurahan) luas total adalah 0,8 Ha, kerugian mencapai Rp. 9,45 M.

Kawasan rawan banjir adalah wilayah yang berpotensi banjir. Banjir yang terjadi di Kota Cimahi terjadi di setiap Kecamatan dengan total area terendam adalah 41,959 Ha (DPKP, 2019), seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.5.

Kawasan rawan banjir Kota Cimahi Tahun 2019

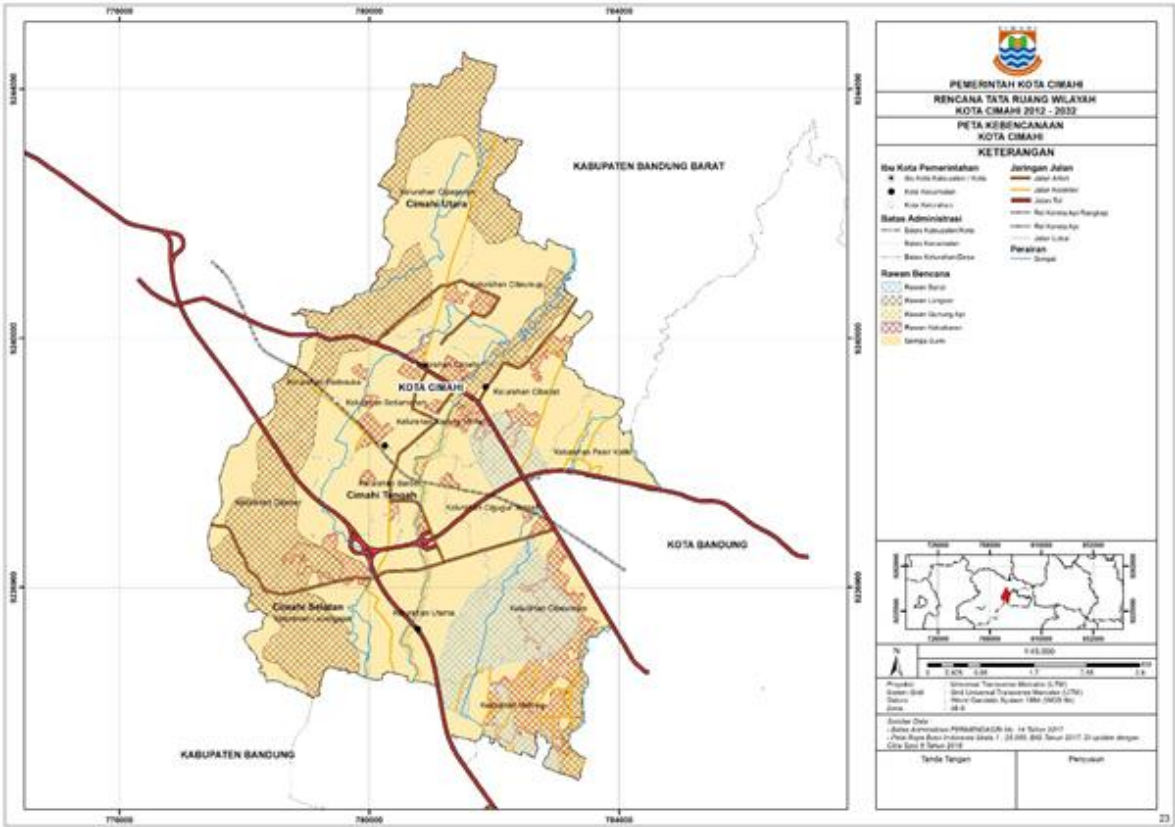
No	Lokasi Banjir	Wilayah Administrasi		Luas Genangan (Ha)	Daerah Aliran Sungai (DAS)
		Kelurahan	Kecamatan		
B1	RW 03	Pasirkaliki	Cimahi Utara	0.3	DAS Cilember
B2	RW 12	Pasirkaliki	Cimahi Utara	0.2	DAS Cilember
B3	RW 05 (Batas Cipageran)	Padasuka	Cimahi Tengah	0.133	DAS Cimahi
B4	RW 05	Utama	Cimahi Selatan	1.44	DAS Cilember
B5	RW 07	Setiamanah	Cimahi Tengah	1.54	DAS Cimahi
B6	RW 12-08 Padasuka (batas)	Setiamanah	Cimahi Tengah	7.19	DAS Cimahi
B7	RW 14	Setiamanah	Cimahi Tengah	1.5	DAS Cimahi
B8	RW 06	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	0.7	DAS Cilember
B9	Jl. Amir Mahmud - Cimindi	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	0.1	DAS Cilember
B10	RW 08	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	5	DAS Cilember
B11	RW 18-10-13 (batas Cibeber)	Leuwigajah	Cimahi Selatan	1.4	DAS Cimahi
B12	RW 13 (Darussurur-& H. Waryat)	Utama	Cimahi Selatan	0.3	DAS Cimahi
B13	RW 09-08 (jl. Industri-Cibodas)	Utama	Cimahi Selatan	0.19	DAS Cimahi
B20	RW 12-11	Utama	Cimahi Selatan	8.33	DAS Cimahi
B14	RW 02	Melong	Cimahi Selatan	10.7	DAS Cilember
B15	RW 14 (Mancong)	Utama	Cimahi Selatan	1	DAS Cimahi
B16	RW 03	Melong	Cimahi Selatan	0.42	DAS Cilember
B17	RW 32	Melong	Cimahi Selatan	0.42	DAS Cibeureum
B18	RW 34	Melong	Cimahi Selatan	0.6	DAS Cibeureum
B19	RW 29	Melong	Cimahi Selatan	0.496	DAS Cilember
TOTAL				41.959	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

Wilayah yang berpotensi/rawan banjir tidak hanya di Cimahi Selatan, tetapi wilayah yang dilintasi 4 sungai (anak Sungai Cihaur, Sungai Cimahi, Sungai Cilember, Sungai Cibeureum). Wilayah yang paling rawan adalah wilayah Cimahi Selatan yang menjadi wilayah hilir sebelum sungai-sungai tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat sebelum bermuara ke Sungai Citarum. Hal ini merupakan permasalahan yang tidak dapat secara langsung tertangani oleh Kota Cimahi sendiri, karena kewenangan kota/kabupaten hanya sebagai pendukung dari pelaksanaan penuntasan banjir wilayah DAS Citarum yang dilaksanakan oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum.

Sedangkan Kawasan rawan aliran lahar gunung berapi mencakup daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu seluas 98 Ha. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana untuk kawasan rawan aliran gunung berapi dengan menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan, memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi serta mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara.

Gambar 2.3.
Peta Rawan Bencana Kota Cimahi



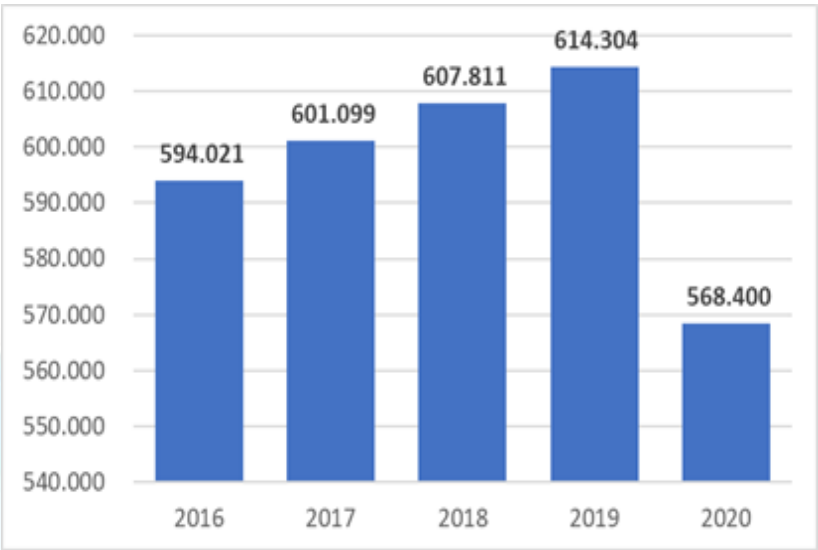
Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

2.1.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Kota Cimahi yang banyak, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kota Cimahi kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk

menanggulangnya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dari tahun 2016 sampai dengan 2019, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 594.021 jiwa di tahun 2016 terus meningkat menjadi 614.304 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah ini terkoreksi menjadi 568.400 jiwa. Terkoreksinya data ini terjadi karena pada tahun 2020 data yang digunakan adalah data riil hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, sementara data tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah data proyeksi dari BPS.

Gambar 2.4.
Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2016-2020



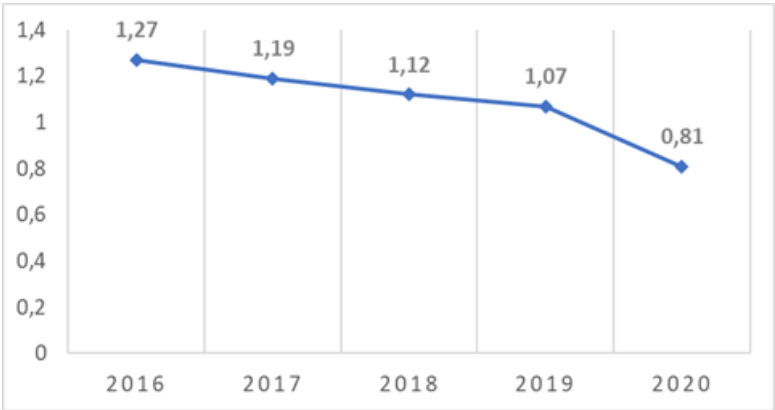
Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 hingga tahun 2019, laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 0,81 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perlu menjadi catatan pula bahwa metode perhitungannya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sedikit berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 LPP dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan penduduk dalam 10 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, sedangkan untuk LPP dari tahun 2016 sampai dengan 2019 menggunakan metode



perhitungan setiap tahunnya. Penurunan LPP dapat menunjukkan adanya upaya pengendalian pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup berpengaruh dari tahun ke tahunnya.

Gambar 2.5.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2021

Laju pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan dan diantisipasi supaya tidak menjadi masalah di kemudian harinya. Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain yang ada di Jawa Barat maka laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi tergolong sedang. Sebagai perbandingan laju penduduk, maka berikut ini disajikan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan laju pertumbuhan penduduk rendah.

Tabel 2.6.
Kabupaten/Kota dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Rendah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Cianjur	0,32	0,25	0,18	0,11	1,29
Kabupaten Tasikmalaya	0,36	0,29	0,23	0,16	1,04
Kota Bandung	0,37	0,29	0,23	0,17	0,20
Kota Tasikmalaya	0,32	0,27	0,20	0,12	1,16
Kota Banjar	0,28	0,27	0,24	0,16	1,34

Sumber : BPS Jawa Barat Tahun, 2021, diolah

- Distribusi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Cimahi sebanyak 568.400 jiwa pada Tahun 2020 tersebar di 3 (tiga) kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 240.990 jiwa. Walau Kecamatan Cimahi Selatan memiliki penduduk terbanyak, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 16.000 jiwa/km². Kepadatan ini bahkan berada di atas kepadatan penduduk Kota Cimahi yaitu 14.080 jiwa/km².

Tabel 2.7.
Kepadatan Penduduk tahun 2018-2020

No	Kecamatan	2018		2019		2020	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Cimahi Selatan	265.854	15.731	269.072	15.921	240.990	14.226
2.	Cimahi Tengah	174.457	17.446	175.945	17.594	161.758	16.000
3.	Cimahi Utara	167.500	12.594	169.287	12.728	165.652	12.436
Kota Cimahi		607.811	15.120	614.304	15.281	568.400	14.080

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021, BPS, diolah

Sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata akan menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lain.

Laju pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi yang sebesar 0,81 persen mempunyai konsekuensi dalam pemenuhan fasilitas umum dan pelayanan dasar bukan hanya dari kuantitas tapi juga kualitas, terlebih lagi dengan persebaran penduduk yang tidak merata berdampak pada kemacetan di waktu waktu tertentu karena mobilitas penduduk yang tinggi dengan kondisi wilayah yang terbatas. Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2020 berada di angka 0,81 persen. hal ini mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya sebesar 1,07 pada tahun 2019.

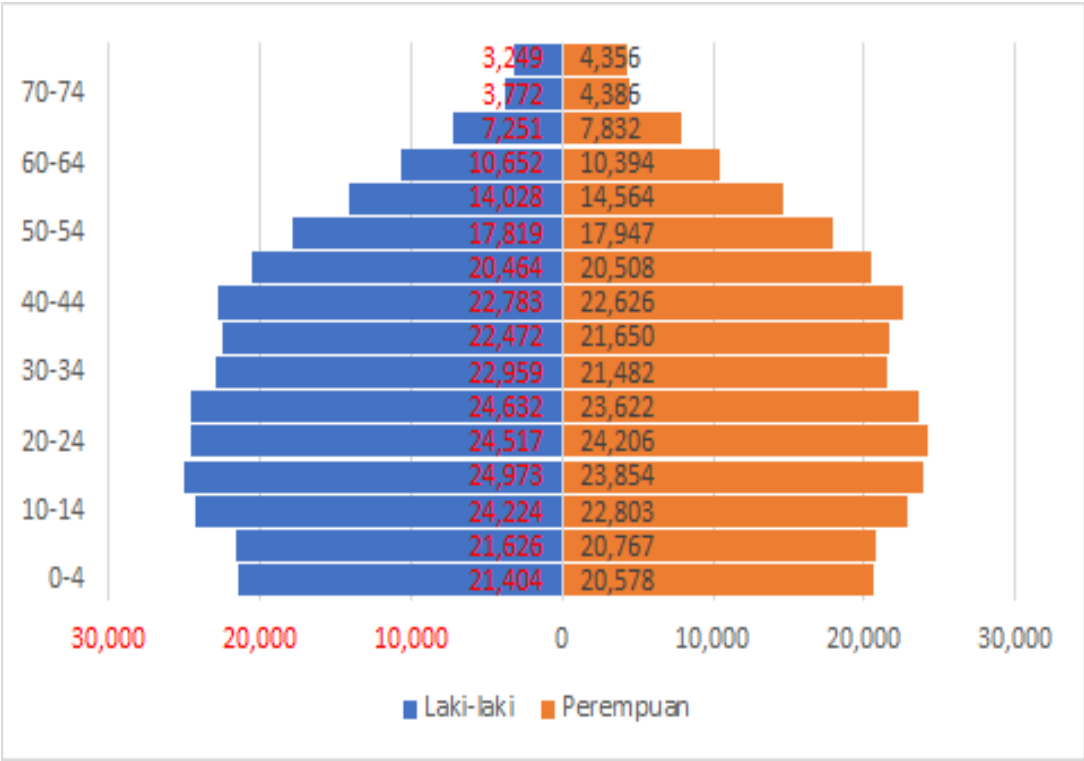
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
- Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2020 yang mencapai 71,46% (406.152 jiwa) dari total jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan. Secara rinci, jumlah dan persentase penduduk kelompok umur tahun 2020, tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.8.
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	%
0-4	21,404	20,578	41,982	7.39
5-9	21,626	20,767	42,393	7.46
10-14	24,224	22,803	47,027	8.27
15-19	24,973	23,854	48,827	8.59
20-24	24,517	24,206	48,723	8.57
25-29	24,632	23,622	48,254	8.49
30-34	22,959	21,482	44,441	7.82
35-39	22,472	21,650	44,122	7.76
40-44	22,783	22,626	45,409	7.99
45-49	20,464	20,508	40,972	7.21
50-54	17,819	17,947	35,766	6.29
55-59	14,028	14,564	28,592	5.03
60-64	10,652	10,394	21,046	3.70
65-69	7,251	7,832	15,083	2.65
70-74	3,772	4,386	8,158	1.44
75+	3,249	4,356	7,605	1.34
Jumlah Total	286,825	281,575	568,400	100

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021, BPS, diolah

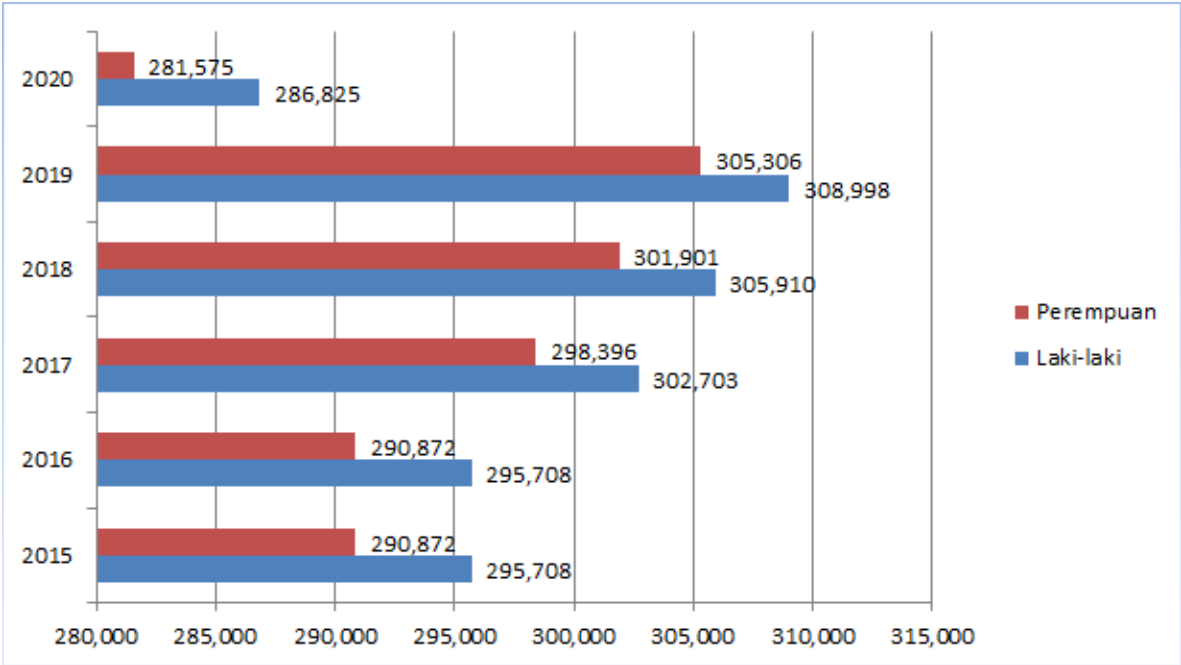
Gambar 2.6.
Piramida Penduduk



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021, BPS, diolah

Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah kota melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (human capital investment) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

Gambar 2.7.
Komposisi Penduduk Kota Cimahi Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2015-2020

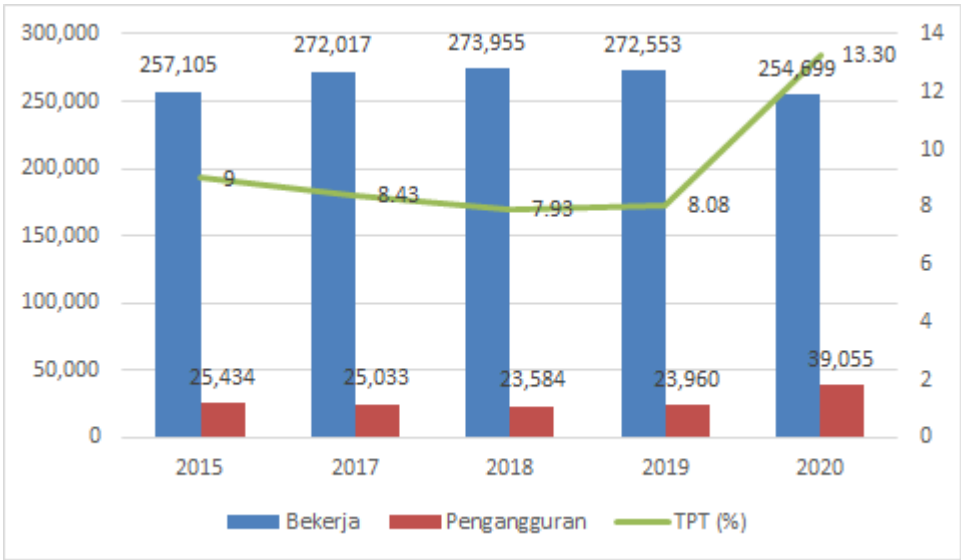


Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021, BPS, diolah

Komposisi penduduk Kota Cimahi menurut jenis kelamin selama periode tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih banyak daripada penduduk perempuan.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja
- Berdasarkan gambar 2.7 dapat diketahui angkatan kerja di Kota Cimahi setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 0,91% selama periode 2015-2019. Pada tahun 2015, angkatan kerja di Kota Cimahi tercatat sebanyak 282.539 tenaga kerja dan meningkat menjadi 293.754 tenaga kerja di tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi mengalami peningkatan dimana di tahun 2015 sebesar 9%, meningkat menjadi 13,30% di tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Februari 2020 sebesar 6,26% berada pada posisi lebih tinggi, begitu pun dengan Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi berada pada posisi lebih tinggi juga, untuk Provinsi Jawa Barat TPT nya sebesar 10,46 % di tahun 2020.

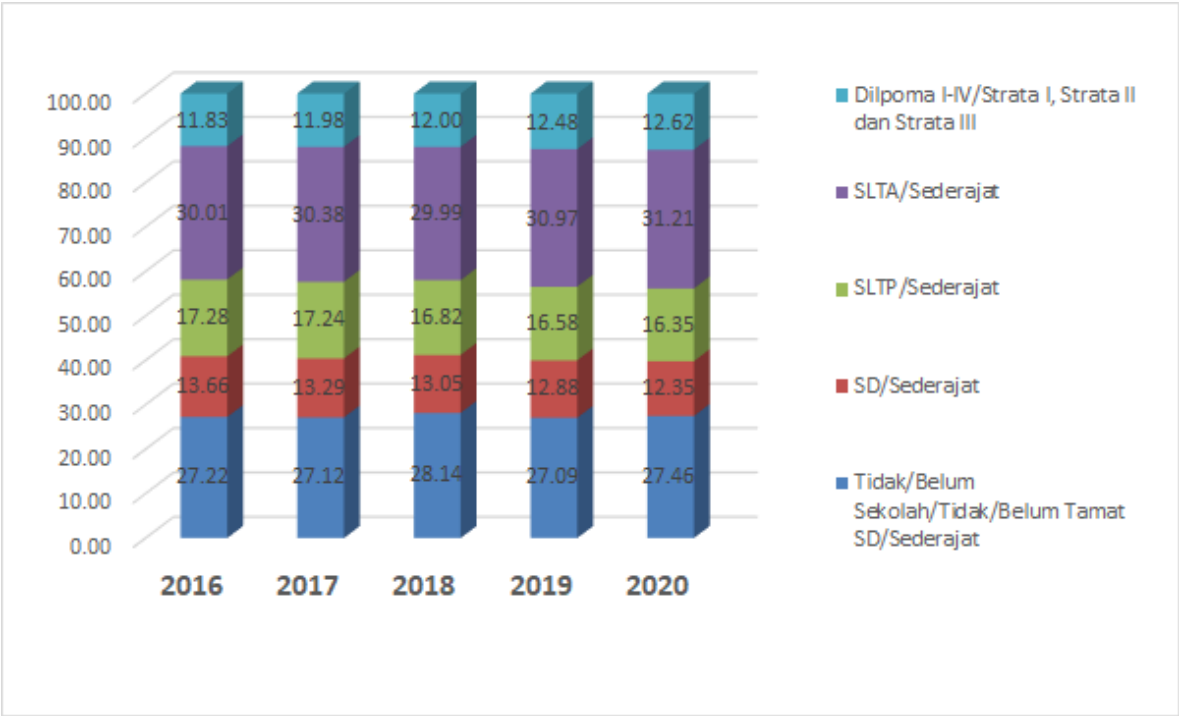
Gambar 2.8.
Perkembangan Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2015, 2017-2020



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021, BPS, diolah

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Pada tahun 2016 penduduk Kota Cimahi yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak/Belum Tamat SD/Sederajat sebesar 27,22%, mengalami peningkatan sedikit menjadi 27,46% di tahun 2020. Sementara untuk SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat mengalami penurunan dari 2016 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 1,31% untuk SD/Sederajat dan 0,89% untuk SLTP/Sederajat. Untuk SLTA/Sederajat mengalami fluktuasi tapi pada kondisi akhir di 2020 mengalami peningkatan. Kenaikan terus menerus terjadi pada persentase penduduk yang lulus perguruan tinggi dari diploma hingga doktoral, yaitu dari 11,83% di tahun 2016 menjadi 12,62% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan masyarakat Kota Cimahi setiap tahunnya mengalami peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, hal ini juga perlu ditunjang dengan kebijakan pemerintah untuk terus melakukan peningkatan pembangunan di Bidang Pendidikan.

Gambar 2.9.
Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020



Sumber : Disdukcapil Kota Cimahi (DKB Semester II 2020), diolah

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Kinerja perekonomian Kota Cimahi secara makro ditunjukkan oleh pencapaian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau total Nilai Tambah Bruto Nilai PDRB. Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Cimahi.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi periode 2016-2019 menunjukkan peningkatan namun mengalami penurunan di tahun 2020. PDRB

ADHB Cimahi Tahun 2020 mencapai 32.210,68 miliar rupiah, yang artinya mengalami kontraksi sebesar -1,31% persen dibanding tahun sebelumnya. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan Rp. 428,86 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 32.639,54 miliar rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha akibat adanya pandemi Covid-19.

Lebih rinci mengenai nilai PDRB ADHB Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.9.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Cimahi Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
		(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	56.678,44	58.533,77	60.598,6	65.074,7	66.491,2
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	11.449.722,7	12.199.201,3	13.639.673,8	15.828.437,0	15.377.218,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	73.928,1	84.634,7	96.173,2	100.030,5	98.359,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.739,10	16.093,81	18.286,9	17.982,2	19.368,7
F	Konstruksi	3.030.124,4	3.366.031,4	3.777.636,4	4.086.435,2	3.871.427,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.274.509,74	4.571.454,73	4.838.006,5	5.170.267,3	4.853.607,4
H	Transportasi dan Pergudangan	976.057,23	1.059.736,86	1.143.208,1	1.261.650,9	1.256.980,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	323.315,32	357.225,24	394.864,7	434.279,9	427.496,8
J	Informasi dan Komunikasi	1.153.803,5	1.312.679,70	1.429.517,6	1.515.338,0	2.023.179,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	752.630,51	842.443,70	922.501,2	962.327,8	973.824,3
L	Real Estate	219.146,3	238.555,3	262.198,8	286.184,4	291.122,0
M.N	Jasa Perusahaan	42.697,3	47.005,0	52.185,9	59.822,8	50.347,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	639.473,0	681.899,5	725.980,3	749.951,9	728.654,8
P	Jasa Pendidikan	931.434,60	1.053.928,40	1.122.805,9	1.274.081,9	1.377.372,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	238.848,8	266.216,2	293.173,8	319.576,8	307.392,2
R,S,T,U	Jasa Lainnya	387.701,9	424.436,0	463.221,3	508.100,7	487.907,0
Produk Domestik Regional Bruto ADHB		24.563.109,8	26.580.075,6	29.240.033,0	32.639.542,1	32.210.686,6

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021, BPS

Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pergeseran struktur lapangan usaha sebagian penduduk Kota Cimahi, dapat terlihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka lapangan usaha yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kota Cimahi pada tahun 2020 adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real estate; dan Jasa Pendidikan. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan kontribusinya adalah Industri Pengolahan; Kontruksi, Perdagangan besar dan eceran; Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan; dan Jasa Kesehatan. Sedangkan sektor lainnya memberikan nilai kontribusi yang konstan dibandingkan tahun sebelumnya.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cimahi pada tahun 2020 tetap dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, yaitu mencapai 47,74 persen. Selanjutnya disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 15,07 persen, sektor usaha Konstruksi sebesar 12,02 persen, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 6,28 persen. Sementara peranan sektor lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Tabel 2.10.

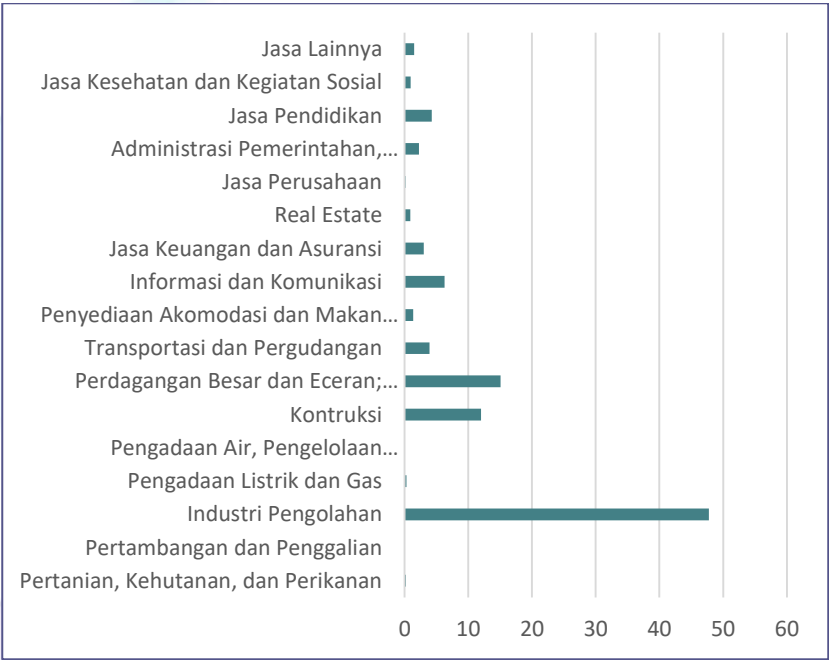
Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,23	0,22	0,21	0,20	0,21
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	46,61	45,90	46,65	48,49	47,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,30	0,32	0,33	0,31	0,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	12,34	12,66	12,92	12,52	12,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,40	17,20	16,55	15,84	15,07
H	Transportasi dan Pergudangan	3,97	3,99	3,91	3,87	3,90

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,32	1,34	1,35	1,33	1,33
J	Informasi dan Komunikasi	4,70	4,94	4,89	4,64	6,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	3,17	3,15	2,95	3.02
L	Real Estate	0,89	0,90	0,90	0,88	0,90
M.N	Jasa Perusahaan	0,17	0,18	0,18	0,18	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,60	2,57	2,48	2,30	2,26
P	Jasa Pendidikan	3,79	3,97	3,84	3,90	4,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	1,00	1,00	0,98	0,95
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,58	1,60	1,58	1,56	1,51
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021, BPS
Keterangan :
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Gambar 2.10.
Kontribusi 17 Sektor Terhadap Perekonomian Kota Cimahi
Tahun 2020



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2021, diolah

Berdasarkan data tahun 2016-2020, pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi mengalami fluktuatif, pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan namun kembali naik di tahun 2018 dan

tahun 2019. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi kembali mengalami kontraksi hingga -2,26%, menurun sebesar 10,11 point dari tahun sebelumnya (2019) yaitu 7,85%. Kontraksi ini terjadi sebagai dampak perekonomian global akibat adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2.11.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Cimahi (%) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.33	0.82	0.54	2.38	1.32
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4.31	4.13	7.7	11.56	-4.96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.91	2.82	5.72	2.59	-1.01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.78	6.52	5.16	-7.93	6.88
F	Konstruksi	4.87	7.02	7.1	4.56	-5.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.67	4.32	2.91	3.76	-8.05
H	Transportasi dan Pergudangan	8.5	5.2	5.3	6.69	-1.1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.68	6.42	6.57	6.67	-7.42
J	Informasi dan Komunikasi	14.21	11.8	9.14	7.06	32.79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.12	6.81	7.13	2.51	1.65
L	Real Estate	5.78	7.28	8.44	8.46	1.24
M.N	Jasa Perusahaan	7.72	8.13	8.01	6.91	-17.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.84	4.01	1.35	2.88	-3.66
P	Jasa Pendidikan	8.23	8.37	4.17	4.14	4,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.57	7.57	7.24	6.56	-5.75
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.34	7.46	5.68	6.29	-5.73
Produk Domestik Regional Bruto		5.63	5.43	6.46	7.85	-2.26

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021, BPS

Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Hampir seluruh sektor lapangan usaha di Kota Cimahi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi bahkan nilainya hingga minus seperti yang tergambar dalam Tabel 2.11 terkecuali di tiga sektor yaitu Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; Informasi dan komunikasi, dan Jasa Pendidikan. Sejak adanya Pandemi Covid-19 di triwulan I tahun 2020 maka masyarakat Kota Cimahi beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan baru dari Pemerintah seperti *Work From Home (WFH)*, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pola kebiasaan baru tersebut diduga menjadi pemicu meningkatnya laju pertumbuhan di ketiga sektor tersebut. Masyarakat cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah daripada tempat kerja/sekolahnya sehingga pemakaian internet meningkat secara signifikan untuk mendukung pola kebiasaan baru tersebut, sedangkan di sektor lainnya terjadi perlambatan. Dampak terbesar dari adanya Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi di Kota Cimahi terjadi pada sektor Jasa Perusahaan yaitu sebesar -17,11 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Secara keseluruhan Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi berkontraksi sebesar -2,26%, namun angka ini telah melampaui target LPE Kota Cimahi di tahun 2020 dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kota Cimahi (RPJMDP), dan masih berada diatas angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Tabel 2.12.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kota Cimahi Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016 (Miliar Rupiah)	2017 (Miliar Rupiah)	2018* (Miliar Rupiah)	2019* (Miliar Rupiah)	2020** (Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.366,21	32.632,8	32.808,2	33.588,5	34.031,8
B	Pertambangan dan	-	-	-	-	-

Lapangan Usaha		2016 (Miliar Rupiah)	2017 (Miliar Rupiah)	2018* (Miliar Rupiah)	2019* (Miliar Rupiah)	2020** (Miliar Rupiah)
	Penggalian					
C	Industri Pengolahan	8.626.902,5	8.983.519,1	9.675.440,1	10.794.186,2	10.258.472,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	50.785,7	52.217,9	55.204,6	56.634,4	56.063,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.542,9	11.230,1	11.809,9	10.873,2	11.620,9
F	Konstruksi	2.431.021,3	2.601.749,6	2.786.348,3	2.913.314,2	2.747.119,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.345.759,70	3.490.134,2	3.591.571,5	3.726.618,8	3.426.655,4
H	Transportasi dan Pergudangan	662.305,4	696.741,3	733.662,8	782.735,2	774.160,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	233.377,3	248.355,1	264.666,4	282.310,8	261.353,5
J	Informasi dan Komunikasi	1.215.106,3	1.358.466,5	1.482.689,2	1.587.341,7	2.107.772,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	577.640,4	616.995,0	661.015,9	677.616,7	688.786,1
L	Real Estate	166.928,1	179.072,4	194.181,2	210.604,5	213.221,4
M,N	Jasa Perusahaan	32.071,9	34.678,4	37.455,7	40.042,7	33.189,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	405.235,2	421.466,2	427.170,5	439.464,0	423.376,1
P	Jasa Pendidikan	668.251,2	724.215,4	754.436,9	785.654,7	819.252,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154.854,1	166.574,8	178.632,3	190.344,1	179.395,7
R,S,T,U	Jasa Lainnya	269.007,0	289.081,6	305.510,7	324.712,4	306.090,2
Produk Domestik Regional Bruto		18.882.155,2	19.907.130,3	21.192.603,8	22.856.042,1	22.340.561,7

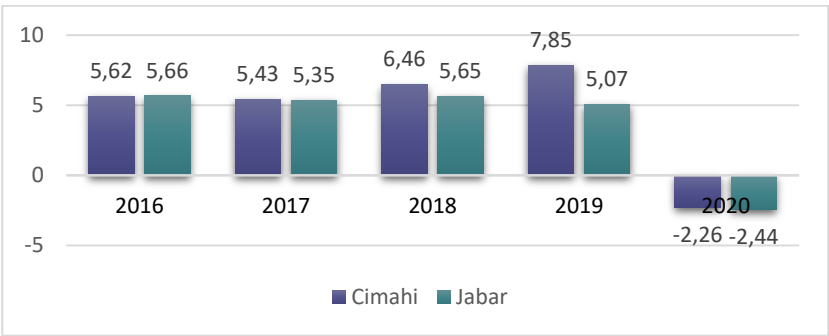
Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021, BPS
Keterangan :
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Cimahi pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Penurunan nilai PDRB ADHK tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Cimahi tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 22.340,56 miliar rupiah. Angka tersebut turun sebesar 515,48 miliar dari 22.856,04 miliar rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi perlambatan ekonomi sebesar -2,26 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 7,85 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 didorong oleh perlambatan beberapa lapangan usaha, seperti Industri Pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; konstruksi, Perdagangan besar dan eceran; transportasi dan

pergudangan; penyediaan akomodasi dan makanan minuman; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Tiga lapangan usaha yang tetap tumbuh di tahun 2020 berdasarkan data PDRB ADHK yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate dan jasa pendidikan.

Gambar 2.11.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2020



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka dan Jawa Barat Dalam Angka (BPS, 2021)

Perekonomian Kota Cimahi pada tahun 2020 terkontraksi sebesar - 2,26 persen, angka ini berada diatas nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat di tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -2,44 persen. Nilai LPE Kota Cimahi tersebut menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 128,78 persen. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2020 ini sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Triwulan I 2020. Hal ini menyebabkan penurunan aktivitas produksi di berbagai lapangan usaha. Khususnya industri pengolahan yang menjadi bagian terbesar dari pembentuk PDRB Kota Cimahi.

2. Laju Inflasi

Laju Inflasi merupakan suatu cerminan interaksi antar *agregat supply* dan *demand* yang dapat menggambarkan kinerja moneter pada suatu daerah. Kota Cimahi tidak melakukan penghitungan

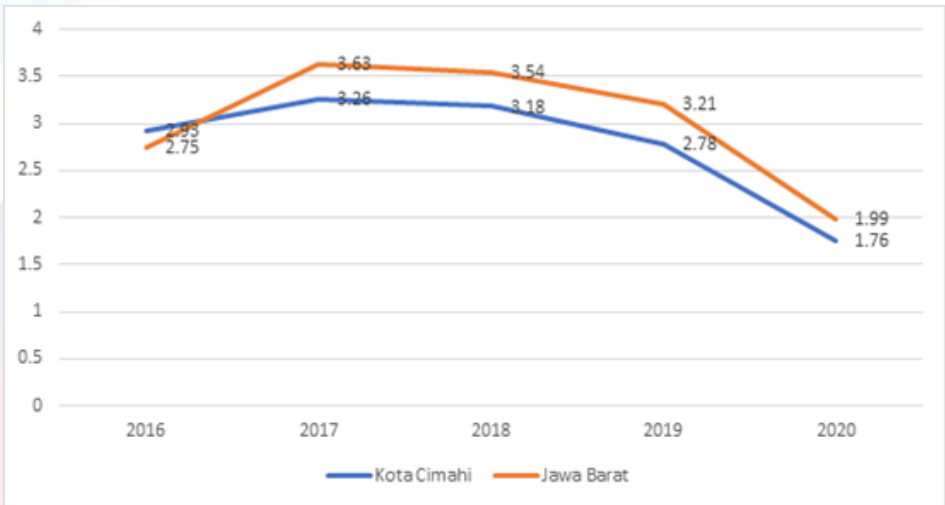


inflasi tersendiri tetapi mengikuti angka inflasi Kota Bandung, dengan berasumsi bahwa kondisi Kota Cimahi tidak terlalu berbeda dengan Kota Bandung.

Di tahun 2020 Kota Bandung yang menjadi acuan nilai inflasi Kota Cimahi mengalami laju inflasi sebesar 0,26%. Diantara 7 kota/Kabupaten yang menjadi pantauan IHK di Jawa Barat, Kota Bandung merupakan kota yang mengalami nilai inflasi terendah dibandingkan 7 kota/Kabupaten lainnya di Jawa Barat. Pada bulan November 2020 seluruh IHK kota di Jawa Barat mengalami inflasi. Nilai ini berada dibawah nilai gabungan IHK Jabar Tahun 2020 yaitu sebesar 0,29%. Nilai inflasi Kota Bandung berdasarkan tahun ke tahun (*year on year*) November 2019-November 2020 adalah 1,76, sedangkan nilai inflasi Jawa Barat pada bulan November 2020 (*yoy*) yaitu sebesar 1,99.

Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat November 2020 seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kota Bogor sebesar 0,32 persen; Kota Sukabumi sebesar 0,35 persen; Kota Bandung sebesar 0,26 persen; Kota Cirebon sebesar 0,33 persen; Kota Bekasi sebesar 0,28 persen; Kota Depok sebesar 0,32 persen; dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,27 persen.

Gambar 2.12.
Perkembangan Inflasi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2020



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Jabar, Desember 2020

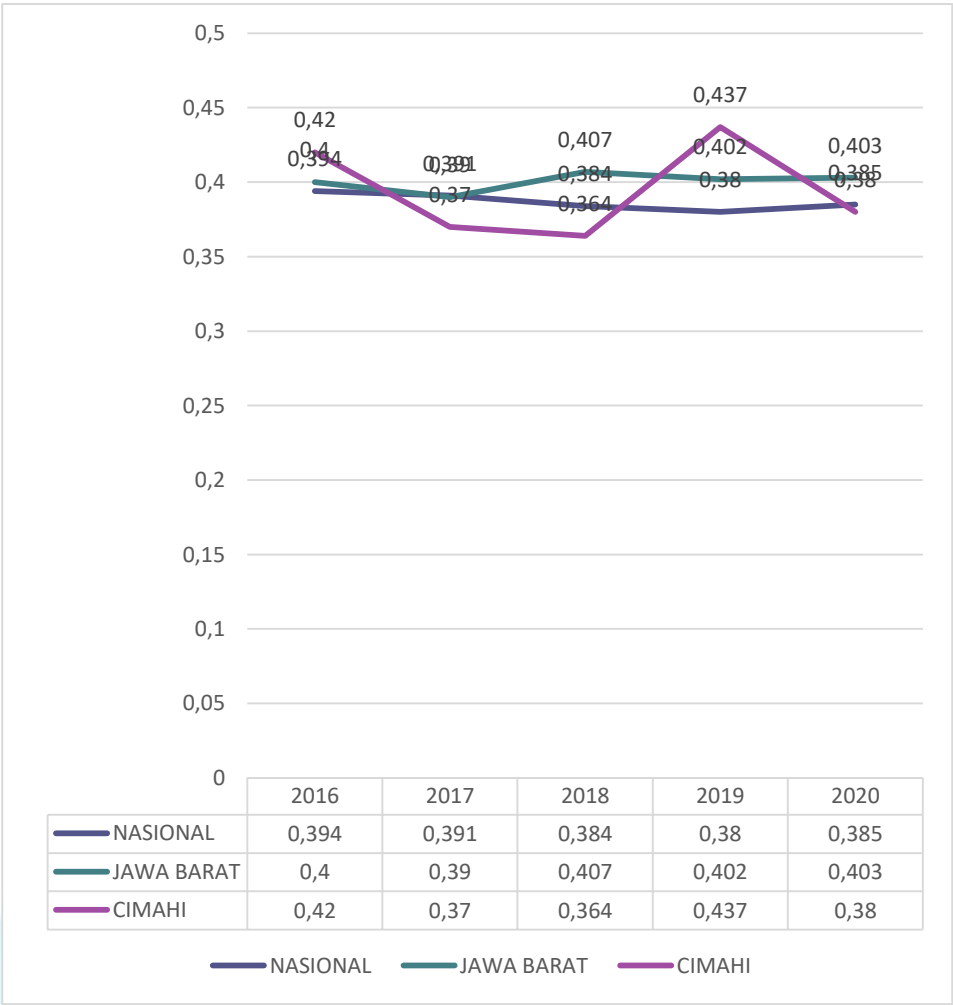
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai inflasi Kota Cimahi di November 2020 merupakan nilai terendah yang dicapai. Tekanan permintaan yang berkurang karena kondisi perekonomian yang berkontraksi akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, dan terjaganya pasokan pangan pangan strategis akan mendorong laju inflasi yang cenderung rendah di Kota Cimahi.

3. Indeks Gini

Distribusi pendapatan/ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dijelaskan salah satunya dengan menggunakan Indeks Gini. Kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi memiliki kecenderungan meningkat. Selama periode 2015-2016 indeks gini Kota Cimahi menurun sebesar 0,021 poin, yang semula 0,41 di tahun 2015 menjadi 0,42 di tahun 2016. Selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan 2018 indeks gini Kota Cimahi terus mengalami penurunan, dan meningkat kembali di tahun 2019 hingga mencapai 0,437 di tahun 2019 dan menurun kembali di tahun 2020 menjadi 0.380. Dengan kecenderungan penurunan indeks gini ini, dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi semakin merata. Hal ini sejalan dengan persentase penduduk miskin di Cimahi yang beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Penurunan indeks gini juga terjadi diduga sebagai dampak dari keberhasilan program-program bantuan sosial dan subsidi yang digulirkan oleh Pemerintah pusat, provinsi dan kota Cimahi terhadap golongan masyarakat berpendapatan rendah di Kota Cimahi.



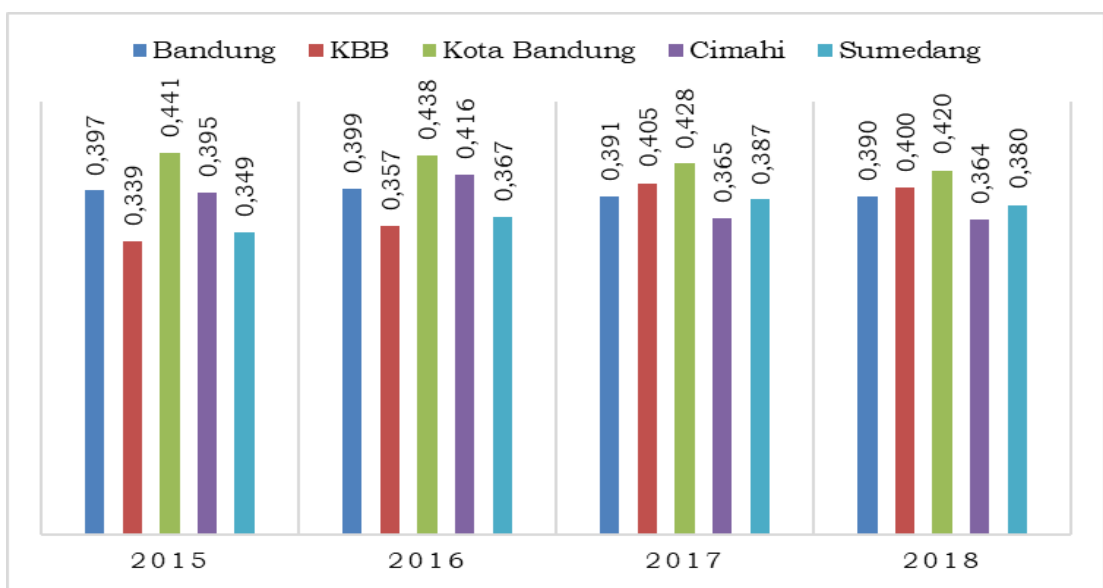
Gambar 2.13.
Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BRS BPS (2021) diolah

Bila dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka Indeks Gini Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berada dibawah Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa Cimahi memiliki kesenjangan pendapatan yang lebih kecil dibanding Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 2.14.
Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi dengan Kota/Kabupaten
Sekitar Tahun 2015-2018



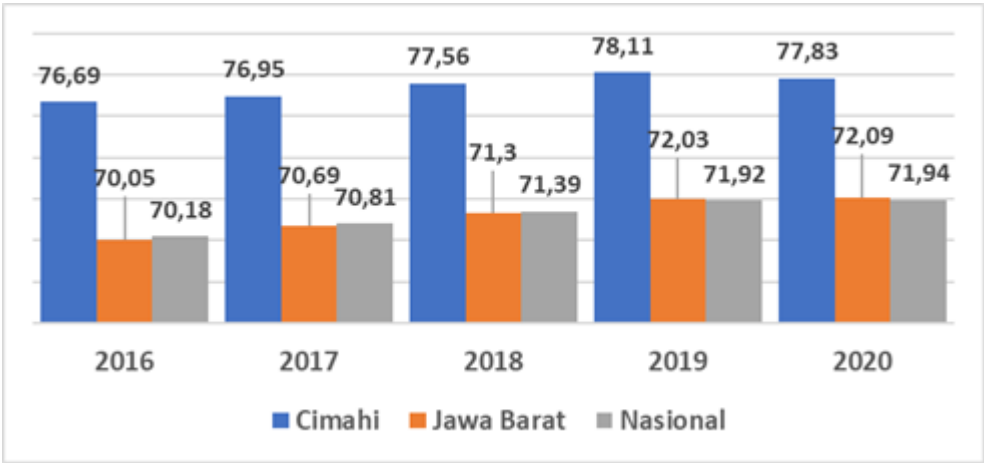
Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2018 dan 2019, BPS

Nilai indeks gini Kota Cimahi pada tahun 2017 dan 2018 selalu paling rendah bila dibandingkan dengan nilai indeks gini kabupaten/kota di sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran pendapatan di Cimahi relatif lebih kecil dibandingkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dan menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kota Cimahi relatif lebih baik dari pada Kota/Kabupaten tersebut.

4. Indeks Pembangunan Manusia
- Kualitas hidup manusia di Kota Cimahi terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi. Pada tahun 2020, IPM Kota Cimahi telah mencapai 77,83 yang sudah mencapai kategori tinggi.
- Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka IPM Kota Cimahi pada kurun waktu tahun 2016-2020 selalu berada diatas angka IPM Jawa Barat dan

Nasional. Peningkatan IPM tahun 2020 merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM. Tahun 2020 menunjukkan IPM Cimahi mencapai 77,83 sementara IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 72,09 dan 71,94. Perbandingan IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan nasional disajikan pada gambar berikut ini :

Gambar 2.15.
Capaian IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2016–2020



Sumber : BPS RI, 2021, diolah

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. Secara umum, capaian pembangunan manusia di Kota Cimahi lebih baik sejak pemekaran. Seluruh dimensi pembangunan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan komponen IPM selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu selama periode 2016-2020, walaupun ada sedikit penurunan pada tahun 2020.

Tabel 2.13.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

Kota Cimahi Tahun 2016–2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Harapan Hidup/AHH (Tahun)	73,59	73,61	73,75	73,89	74,03
2.	Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)	13,75	13,76	13,77	13,79	13,8
3.	Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)	10,89	10,93	10,94	10,95	10,96
4.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP) Kota Cimahi (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)	11.141	11.353	11.921	12.448	12.025

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2021, diolah

Indeks pembangunan manusia Kota Cimahi selama periode 2016-2019 mengalami peningkatan, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, hal ini terjadi sebagai hasil perhitungan dari indikator pembentuknya. Data lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan indikator komponen IPM terkait indeks kesehatan dan indeks pendidikan. Indeks kesehatan Tahun 2020 sebesar 83,12 sementara indeks pendidikan sebesar 74,87.

Tabel 2.14.

Indeks Kesehatan dan Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2016-2020

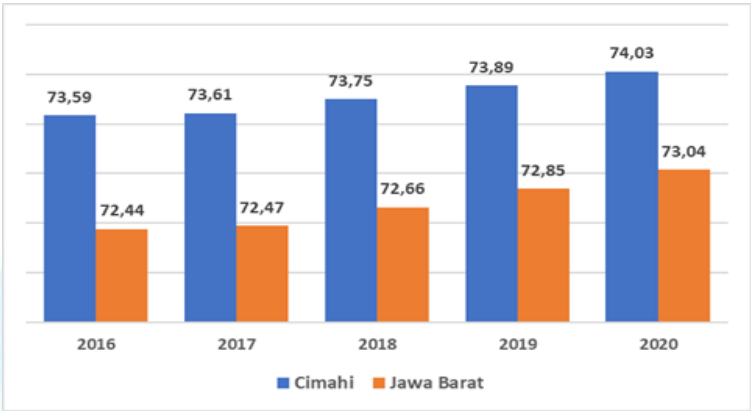
URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kesehatan	82,45	82,48	82,69	82,91	83,12
Indeks Pendidikan	74,49	74,66	74,72	74,81	74,87

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021, diolah

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Peningkatan kualitas kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2020 AHH Kota Cimahi mencapai 74,03 tahun meningkat 0,14 poin dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 73,89 tahun. Ini berarti pada Tahun 2020, setiap bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 74,03 tahun, lebih lama 0,14 tahun dari tahun sebelumnya. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar 2.16.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cimahi
Tahun 2016 – 2020

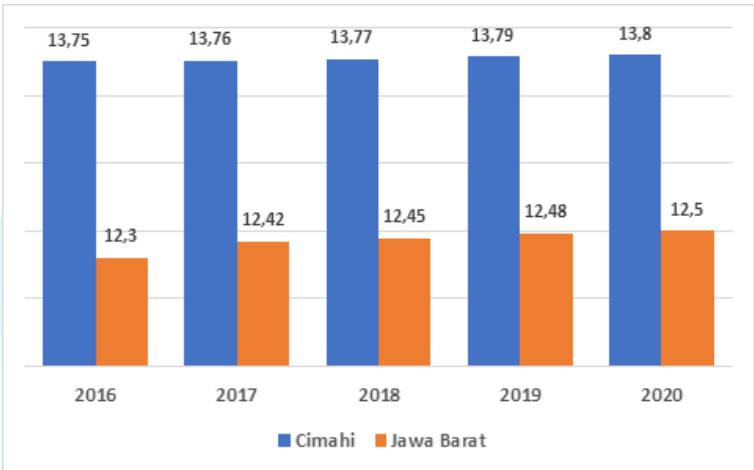


Sumber : BPS Kota Cimahi 2021, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa kenaikan AHH Kota Cimahi cenderung meningkat walaupun mengalami perlambatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat, maka selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Angka Harapan Hidup Kota Cimahi selalu berada diatas Provinsi Jawa Barat. Dimana pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup Kota Cimahi sebesar 74,03, sedangkan Provinsi Jawa Barat berada pada 73,04 tahun.

- b. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
- Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah terus meningkat tiap tahunnya. Di tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi telah mencapai 13,8 yang berarti naik 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian Harapan Lama Sekolah 2020 memberikan gambaran bahwa anak-anak usia 7 tahun di Cimahi memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau D2. Berikut disajikan data Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020.

Gambar 2.17.
Harapan Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016–2020

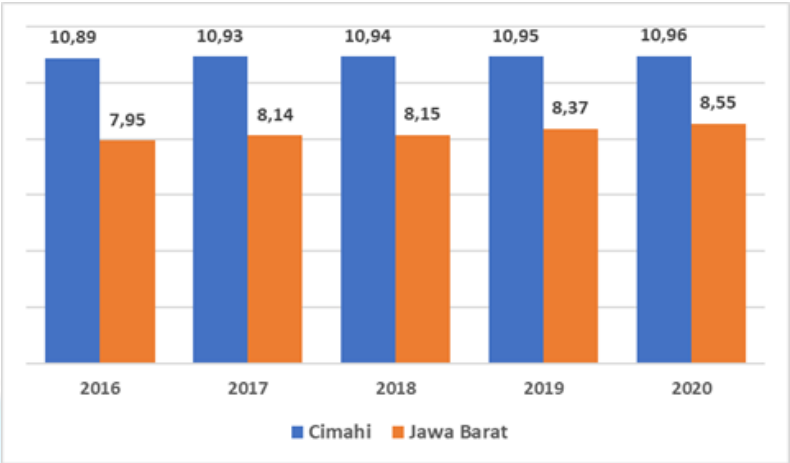


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2021, diolah.

Dari gambar di atas diketahui bahwa angka Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu berada di atas angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2020 harapan lama sekolah Kota Cimahi sebesar 13,8 tahun, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama angkanya adalah sebesar 12,5 tahun. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar

penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cimahi terus bertambah selama periode 2016 hingga 2020. Hingga tahun 2020, secara rata-rata penduduk Kota Cimahi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMA. Berikut disajikan angka rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016-2020.

Gambar 2.18.
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016–2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2021, diolah

Sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 juga selalu berada diatas rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar diatas, dimana pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi sebesar 10,96, sedangkan di Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama sebesar 8,55.

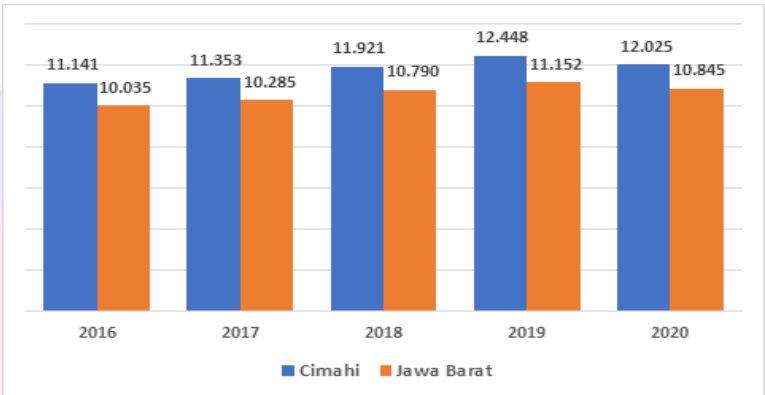
- c. **Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan**
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur standar hidup layak (*decent standard of living*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah nilai

pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity/ppp*). Rata-rata pengeluaran perkapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012, sedangkan penghitungan PPP menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas non makanan.

Perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Cimahi selama periode 2016-2020 cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada Tahun 2020 mencapai 12.025 Ribu Rupiah/Orang, yang berarti turun sebesar 3,40% dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 12.448 ribu rupiah/orang.

Apabila dibandingkan dengan perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Cimahi selalu berada di atas apa yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2020 pengeluaran per kapita Kota Cimahi yang mencapai 12.025 Ribu Rupiah/Orang lebih tinggi daripada angka Provinsi Jawa Barat yang berada pada angka 10.845 Ribu Rupiah/Orang. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.19.
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016–2020



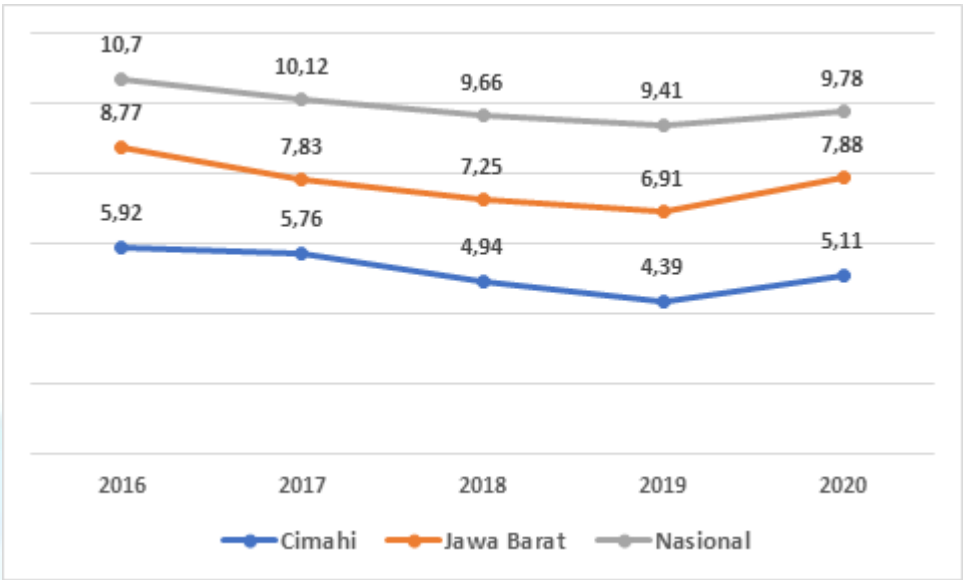
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2021, diolah



5. Kemiskinan

Penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren menurun selama periode 2016-2019, namun Kembali meningkat pada tahun 2020. Pada Tahun 2016 Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi sebesar 5,92 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 5,76 persen, 4,94 persen di tahun 2018, dan 4,39 persen di tahun 2019, namun meningkat Kembali menjadi 5,11 persen di tahun 2020.

Gambar 2.20.
Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



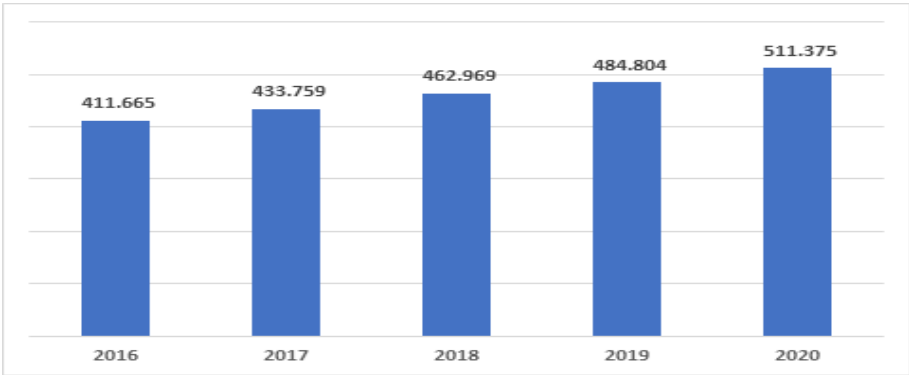
Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020

Dari gambar diatas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kota Cimahi pada periode 2016 sampai dengan 2020 selalu berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kota Cimahi sebesar 5,11 persen, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama angkanya sebesar 7,88 persen dan nasional 9,78 persen.

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2016-2020, tahun 2016 sebesar Rp. 411.665 dan di tahun 2020 sebesar Rp. 511.375.

Gambar 2.21.
Garis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2016-2020
(Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020

Secara umum kondisi kemiskinan di Kota Cimahi terus mengalami perbaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dimana baik jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan pada periode tersebut, namun kondisi ini melemah pada tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kondisi kemiskinan secara umum di Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut :

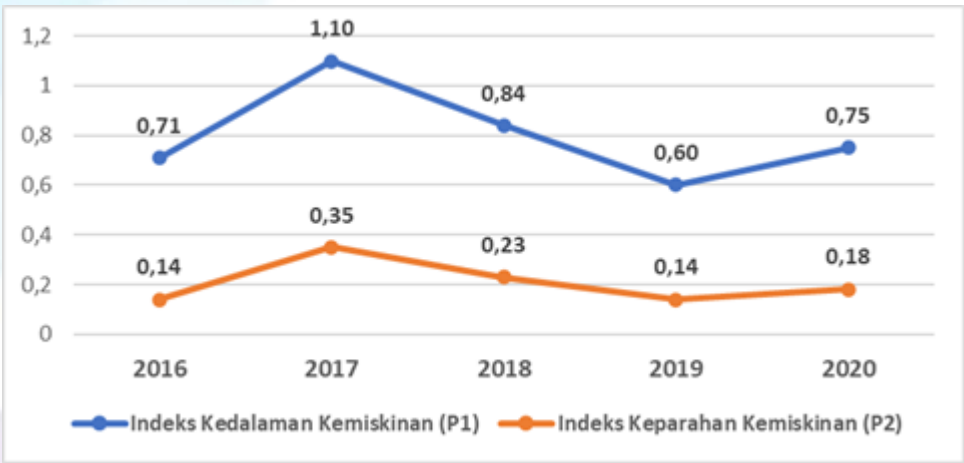
Tabel 2.15.
Kondisi Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	411.665	433.759	462.969	484.804	511.375
Jumlah Penduduk Miskin	Orang	35.070	34.530	29.940	26.910	31.640
Tingkat Kemiskinan	Persen	5,92	5,76	4,94	4,39	5,11

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020

Selain garis kemiskinan dan jumlah serta persentase penduduk miskin, indikator lain yang dipergunakan untuk mengukur kondisi kemiskinan adalah Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) dan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2016–2020 P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2016 sebesar 0,71, dan mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 1,10. Kemudian di tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 0,84 dan 0,60, namun meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 0,75. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Gambar 2.22.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cimahi 2016-2020



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami fluktuasi, dimana pada periode tahun 2016

sebesar 0,14, dan naik di tahun 2017 menjadi 0,35, turun menjadi 0,23 di tahun 2018 dan 0,14 di tahun 2019, namun meningkat Kembali di tahun 2020 menjadi 0,18. Penurunan dan kenaikan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

6. Aspek Kesempatan Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

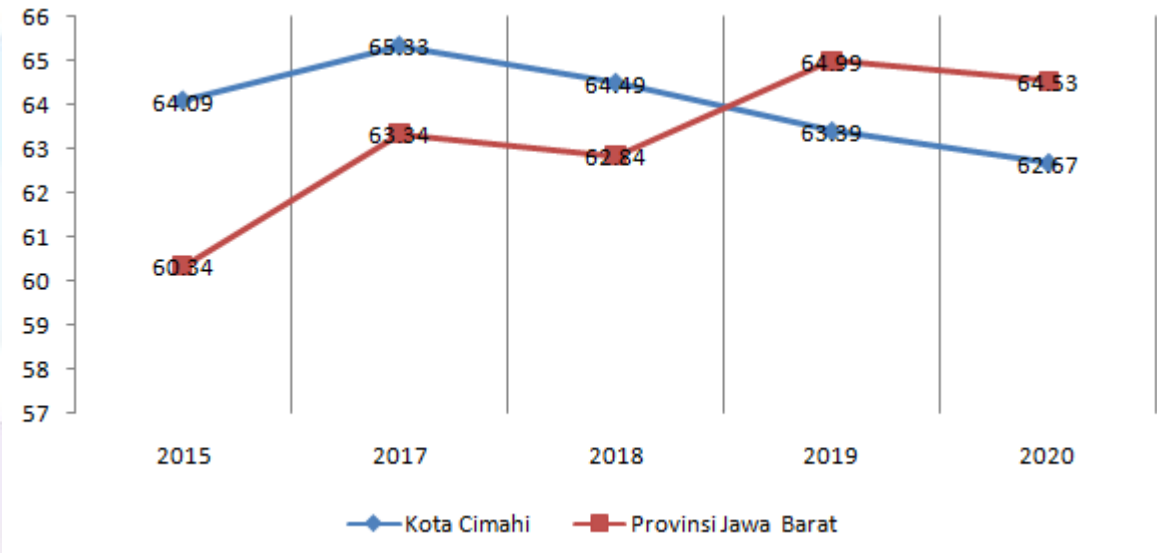
Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Cimahi pada Tahun 2020 sebanyak 468.747 orang, bertambah sebanyak 1.005 orang dibandingkan tahun 2019. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran)

pada 2019 sebanyak 296.513 orang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami pengurangan menjadi 293.754. Angkatan kerja sebanyak 293.754 orang terbagi menjadi bekerja sebanyak 254.699 orang dan pengangguran sejumlah 39.005 orang. Adapun pengertian bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Berdasarkan gambar dibawah, diketahui bahwa TPAK Kota Cimahi pada tahun 2015 sebesar 64,09 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 65,33 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Cimahi terus mengalami penurunan hingga menjadi 62,67 persen di akhir tahun 2020.

Gambar 2.23.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020



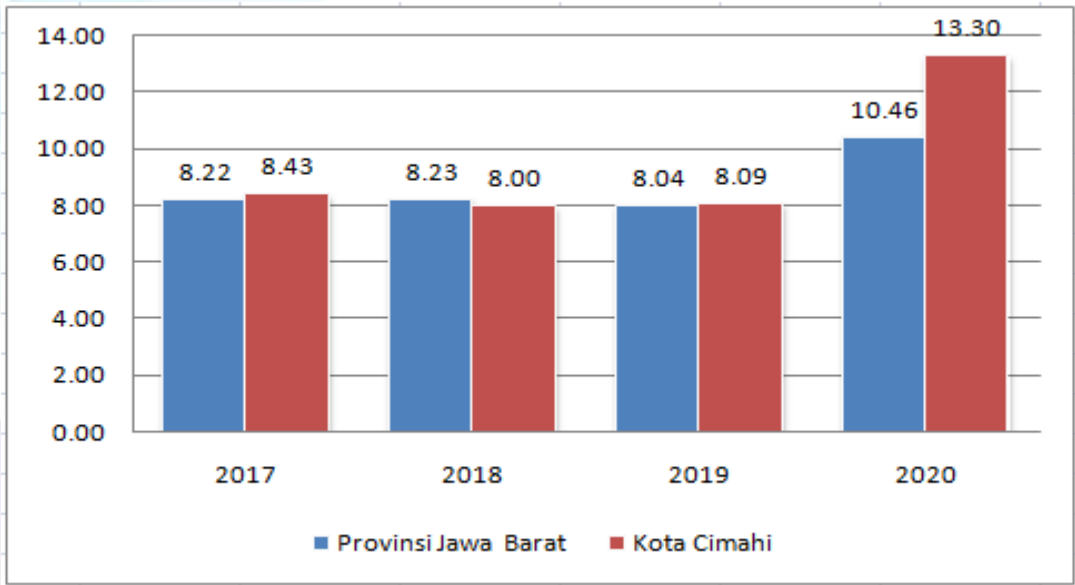
Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2021, diolah



Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa selama periode Tahun 2015-2020 TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keadaan tahun 2020 TPAK laki-laki di Kota Cimahi mencapai 79,02 persen sedangkan TPAK perempuan 46,19 persen.

Sementara itu, TPT di Kota Cimahi pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 memiliki kecenderungan penurunan, namun pada Tahun 2019 mengalami peningkatan. Bahkan Pada Tahun 2020 TPT Cimahi terjadi peningkatan yang sangat signifikan angkanya menjadi 13,30 persen. Begitu juga terjadi peningkatan signifikan di tingkat provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020 menjadi 10,46 persen. Adapun TPT di Kota Cimahi dan Jawa Barat Tahun 2017-2020 disajikan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.24.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi dan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020

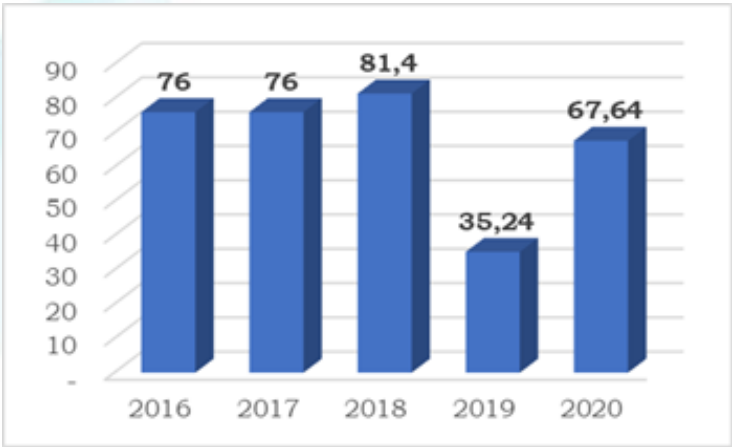


Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2021, diolah

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

- 1. Aspek Pendidikan
 - a. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun dengan prioritas anak usia 4-6 tahun. Capaian APK PAUD selama kurun waktu 2016-2018 cenderung meningkat dari 76% di tahun 2016 menjadi 81,4% di tahun 2018, namun pada tahun 2019 APK PAUD di Cimahi mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 35,24%, namun kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 67,64%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.25.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 4-6 Tahun Kota Cimahi
Tahun 2016–2020



Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2020

- b. Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota meliputi Jenjang Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MTs), lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.16.
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP
Kota Cimahi Tahun 2016–2020

No	APK/ APM	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	106,91	101,69	95,22	102.54	95.57
2.	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	89,28	88,73	79,74	96.29	91.27
3.	Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI	77,98	95.73	89,67	96.45	93.25
4.	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	73	75.29	77,41	78.81	83.03

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 106,91 di tahun 2016 menjadi 95,57 di tahun 2020. Sedangkan untuk jenjang SMP mengalami kenaikan, dari yang semula 89,28 persen di tahun 2016 menjadi 91.27 persen di tahun 2020.

Selanjutnya, untuk Angka Partisipasi Murni SD mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2016 sebesar 77,98 persen menjadi 93,25 persen di tahun 2020. Untuk Angka Partisipasi Murni SMP mengalami kenaikan dari 73 persen di tahun 2016 menjadi 83,03 persen di tahun 2020.

- c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan
- Pengelompokan penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan menghasilkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) terlihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.17.
Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kota Cimahi Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019
		Persentase
1.	Tidak /Tamat SD	14.11
2.	SMP	16.39
3.	SMA	25.39
4.	SMK	21.94
5.	DI, DII, DIII	5.88
6.	Perguruan Tinggi	16.29

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah, selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Sesuai dengan data dari BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak atau menamatkan SD sebesar 14,11, tamat SLTP sebesar 16,39%, tamat SLTA sebesar 47,33%, dan tamat Diploma dan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 22,17%. Bila dicermati hampir setengahnya dari penduduk Kota Cimahi yang berusia 15 tahun ke atas, memiliki ijazah SLTA (SMA dan SMK).

2. Aspek Kesehatan

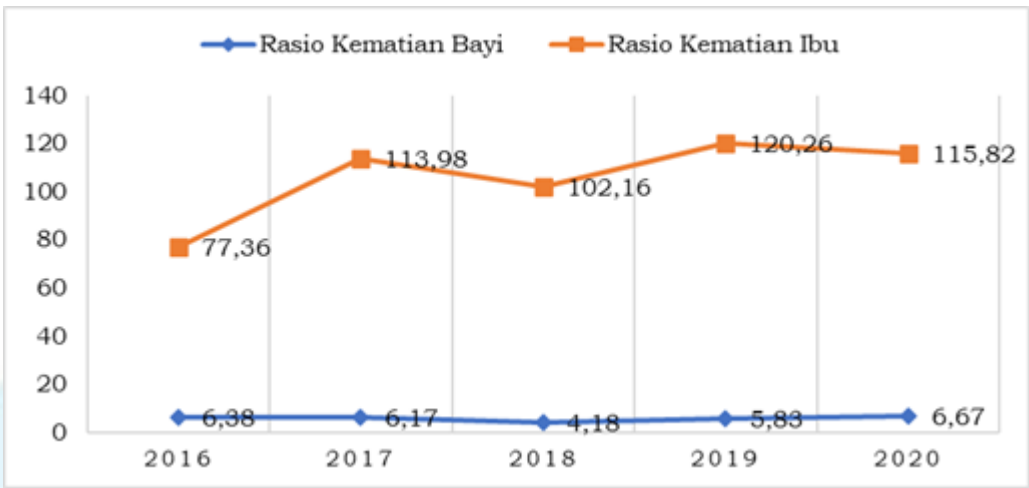
a. Rasio Kematian Ibu dan Bayi

Rasio Kematian Ibu merupakan indikator yang menjadi masalah utama pembangunan kesehatan di setiap daerah. Rasio Kematian Ibu dihitung dengan melihat jumlah kematian ibu

pada setiap 100.000 kelahiran hidup (KH), sedangkan Rasio Kematian Bayi dihitung dengan melihat jumlah kematian bayi pada setiap 1000 kelahiran hidup (KH). Rasio Kematian Ibu di Kota Cimahi mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 berada pada angka 77,36 yang kemudian mengalami peningkatan secara fluktuatif hingga pada 2020 berada pada angka 115,82 Sementara untuk Rasio Kematian Bayi Kota Cimahi pada tahun 2016 berada pada angka 6,38 yang kemudian berfluktuatif pada tahun-tahun berikutnya hingga naik kembali di tahun 2020 menjadi 6,67.

Gambar 2.26.

Rasio Kematian Bayi dan Ibu Kota Cimahi Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2021, diolah

b. Prevalensi Kurang Gizi

Balita kurang gizi (*underweight*) merupakan suatu kondisi status gizi balita kurang dan sangat kurang dengan indikator status gizi BB/U (perbandingan berat badan dan usia). Capaian untuk indikator prevalensi kurang gizi di tahun 2020 sebesar 7,70% atau ada 2.497 balita kurang gizi dari 32.354 balita yang datang dan di timbang di posyandu pada saat Bulan Penimbangan Balita (BPB) serta hasil sweeping yang dilakukan oleh kader. Bila dibandingkan dengan capaian di tahun 2019 sebesar 5.58%,

hasil capaian indikator prevalensi kurang gizi tahun 2020 ini mengalami peningkatan.

Tabel 2.18.
Prevalensi Kurang Gizi di Kota Cimahi Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Prevalensi kurang gizi	6,91	6,29	5,58	7,70

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021, diolah

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pencapaian pembangunan dalam bidang seni budaya dan olahraga di Kota Cimahi perlu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkepribadian tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan. Upaya tersebut telah menghasilkan adanya komunitas adat di Cipageran dan Kampung Hukum Adat Cireundeu sehingga Kota Cimahi memiliki keberagaman budaya dan kearifan lokal. Kehidupan Kampung Hukum Adat Cireundeu memegang teguh budaya leluhur seperti pola konsumsi pangan non beras (singkong) dan mengedepankan pelestarian lingkungan.

Kampung Hukum Adat Cireundeu secara rutin menyelenggarakan acara adat Seren Taun (Tutup Tahun sebagai penanda pergantian tahun Saka Sunda. Acara itu digelar sebagai bentuk syukur atas segala karunia yang didapat selama setahun. Seren Taun Cireundeu telah diakui sebagai salah satu warisan budaya non benda.

Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik diantaranya menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengapresiasi karya seninya.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga fokus dalam melestarikan kebudayaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin

meningkatnya Persentase kebudayaan yang dilestarikan, dengan persentase pada tahun 2017 baru mencapai 24 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 52 persen.

Tabel 2.19.
Persentase kebudayaan yang dilestarikan di Kota Cimahi Tahun 2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24	29,63	45	52

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2020, diolah

Selanjutnya untuk cakupan pembinaan olahraga, persentase pembinaan olahraga sumber daya manusia yang terbina (atlet) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebesar 18,18 persen dan pada tahun 2020 naik menjadi 50,91 persen. Sama halnya dengan persentase sumber daya manusia yang terbina (atlet), persentase sumber daya manusia yang terbina (pelatih) dan sumber daya manusia yang terbina (pembina) juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 mencapai untuk pelatih 49,14 persen, pembina 3,03 persen dan pada tahun 2020 naik menjadi 76,62 persen untuk pelatih dan 36,4 persen untuk pembina. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20.
Persentase Sumber Daya Manusia Yang Terbina di Kota Cimahi Tahun 2017-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase sumber daya manusia yang terbina (atlit)	18,18	32,73	37,27	50,91
2.	Persentase sumber daya manusia yang terbina (pelatih)	49,14	58,97	68,80	76,62
3.	Persentase sumber daya manusia yang terbina (pembina)	3,03	n/a	21,20	36,4

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2020, diolah

Untuk Sarana dan Prasarana Olahraga yang ada di Kota Cimahi sebagai berikut :

Tabel 2.21.
Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kota Cimahi Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Buah)	Kondisi
1.	Lapangan Bola Kaki dilengkapi lintasan Atletik	6	Baik
2.	Lapangan Basket	14	Baik
3.	Lapangan Bola Volly	52	Baik
4.	Lapangan Tennis	39	Baik
5.	Kolam renang	10	Baik
6.	Lapangan/Gor Bulutangkis	49	Baik
7.	Lapangan Futsal	17	Baik
8.	Meja tenis Meja	41	Baik
9.	Lapangan bola/sepak bola	26	Baik
10.	Lapangan Driving Golf	1	Baik
11.	Fitness	3	Baik
12.	Wall climbing	2	Baik
13.	Lapangan/ gor serbaguna	11	Baik

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi 2020

Keterangan : Fasilitas sarana dan prasarana dikelola oleh berbagai stakeholder yaitu pemerintah, TNI/POLRI, Swasta, Masyarakat, dan sekolah.

Tabel 2.22.
Data Sarana Olahraga Milik PEMKOT Cimahi Tahun 2020

No	Uraian	Kondisi	Keterangan
1.	Stadion Sangkuriang	Rusak Berat	PEMKOT (Bagian Aset)
2.	Gor Sangkuriang	Rusak Ringan	PEMKOT (Bagian Aset)
3.	Lapangan Portal	Baik	PEMKOT (Bagian Aset)
4.	Lapangan Cibaligo	Rusak	PEMKOT (Bagian Aset)

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi 2020

Dilihat dari tabel sarana dan prasarana di atas Kota Cimahi memiliki sarana olahraga yang cukup banyak, tetapi yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi hanya 4 sarana dan itupun kondisi 3 sarana dinyatakan rusak. Sebagian besar sarana olahraga adalah milik TNI, jadi akibat kurangnya sarana olahraga yang dimiliki Pemkot Cimahi kurang setiap ada *event* olahraga tingkat Kota maupun provinsi Dinas Pemuda dan olahraga harus menyewa sarana olahraga kepada pihak TNI sehingga biaya untuk sewa tempat membengkak.

Oleh karena itu untuk peningkatan sarana prasarana olahraga yang ada di Kota Cimahi perlu adanya pembangunan ataupun revitalisasi. Salah satu aset yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi yaitu stadion sangkuriang kondisinya sekarang rusak berat, perlu diketahui stadion sangkuriang dulunya menjadi kebanggaan warga Cimahi dimana stadion sangkuriang merupakan homebase perserikatan Kota Cimahi, Persatuan Sepakbola Kota Cimahi (PERSEKOCI) yang masuk divisi III sampai 2006, serta menjadi lokasi kompetisi sepakbola antar sekolah. Untuk mengembalikan citra stadion sangkuriang sebagai Stadion legenda yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Cimahi perlu di usahakan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki atau revitalisasi Stadion Sangkuriang Cimahi.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

a. Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di Bidang Pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan data yang tersedia, angka putus sekolah baik jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Cimahi

dalam beberapa tahun terakhir fokus terhadap pendidikan di Kota Cimahi. Berikut disajikan data Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2017-2019.

Tabel 2.23.
Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

Tahun	SD (%)	SMP (%)
2017	0,075	0,275
2018	0,085	0,323
2019	0,015	0,019

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2017, 2018 dan 2019.

- b. Rasio Guru terhadap Murid
- Data Rasio Guru terhadap Murid pada Tahun 2016-2019 disajikan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Rasio guru-murid untuk jenjang SD pada tahun 2019 yaitu 1:25 dan SMP 1:21.

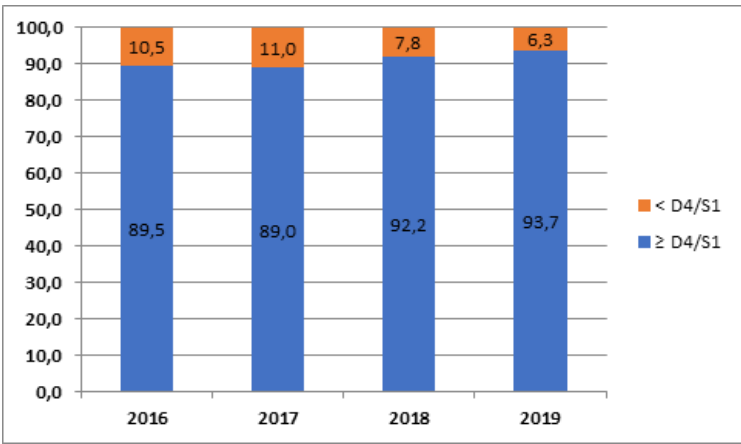
Tabel 2.24.
Rasio Guru Murid di Kota Cimahi Tahun 2016-2019

Tahun	SD	SMP
2016	1:26	1:23
2017	1:24	1:21
2018	1:28	1:22
2019	1:25	1:21

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2016,2017,2018 dan 2019.

- c. Persentase Kualifikasi Guru SD dan SMP
- Pada jenjang SD, persebaran kualifikasi guru disajikan dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.27.
Persentase Kualifikasi Guru SD di Kota Cimahi Tahun 2016-2019

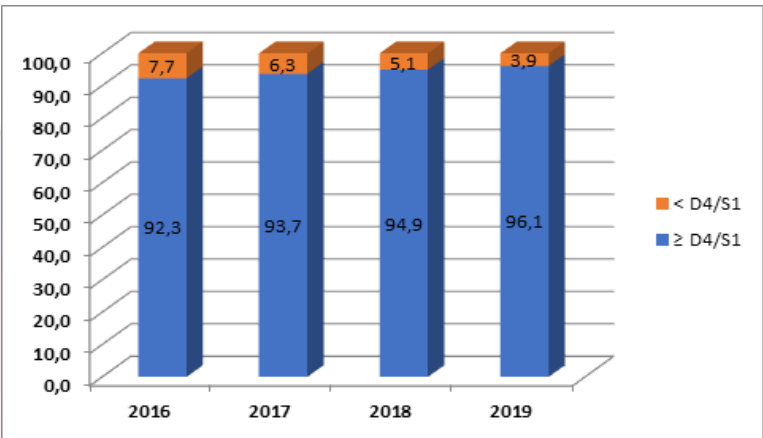


Sumber : Neraca Pendidikan Tahun 2016-2019

Persentase kualifikasi guru SD di Kota Cimahi yang lulusan sarjana strata 1 pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 angkanya sebesar 89.5% persen dan mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 89 persen. Namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan masing-masing menjadi 92,2 persen dan 93,7 persen.

Untuk jenjang pendidikan SMP, persebaran kualifikasi guru disajikan dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.28.
Persentase Kualifikasi Guru SMP di Kota Cimahi Tahun 2016-2019



Sumber : Neraca Pendidikan Tahun 2016-2019

Persentase kualifikasi guru SMP di Kota Cimahi yang lulusan sarjana strata 1 pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami fluktuasi peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 92,3 persen dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan hingga menjadi 96,1 persen.

2. Kesehatan

Layanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan terkait dengan pelaksanaan urusan ini. Pertama terkait dengan upaya pencegahan dan penurunan Balita Stunting. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Adapun hasil rekapitulasi kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB) Berdasarkan TB/U (perbandingan tinggi badan dan usia) Tahun 2020 yang dapat menunjukkan angka balita stunting di Kota Cimahi pada tahun 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.25.
Data Balita Stunting Per Kelurahan di Kota Cimahi Tahun 2020

KELURAHAN/KECAMATAN	JUMLAH BALITA	SANGAT PENDEK	PENDEK	STUNTING	% STUNTING
Cibabat	2785	6	187	193	6,93%
Cipageran	2955	39	167	206	6,97%
Citeureup	2339	221	392	613	26,21%
Pasirkaliki	1027	76	168	244	23,76%
KEC. CIMAHI UTARA	9106	342	914	1256	13,79%
Cimahi	685	40	107	147	21,46%
Karang Mekar	713	36	103	139	19,50%



KELURAHAN/KECAMATAN	JUMLAH BALITA	SANGAT PENDEK	PENDEK	STUNTING	% STUNTING
Padasuka	2383	17	270	287	12,04%
Setiamanah	1270	1	66	67	5,28%
Cigugur	3220	50	348	398	12,36%
Baros	1010	10	65	75	7,43%
KEC. CIMAHI TENGAH	9281	154	959	1113	11,99%
Utama	2186	9	85	94	4,30%
Leuwi gajah	2663	63	276	339	12,73%
Cibeber	1605	49	201	250	15,58%
Cibeureum	3910	11	239	250	6,39%
Melong	3580	23	195	218	6,09%
KEC. CIMAHI SELATAN	13944	155	996	1151	8,25%
KOTA CIMAHI	32331	651	2869	3520	10,89%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Stunting di Kota Cimahi pada Tahun 2020 mencapai 10,89 persen. Adapun kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Cimahi Selatan yaitu sebesar 8,25 persen, dan Kecamatan yang paling banyak adalah Kecamatan Cimahi Utara yaitu sebesar 13,79 persen.

Selanjutnya untuk angka prevalensi kurang gizi di Kota Cimahi pada Tahun 2017 sebesar 6,91 persen dan mengalami penurunan di Tahun 2018 menjadi 6,29 persen. Kemudian, pada Tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 5,58 persen. Namun kondisi ini meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 7,70 persen.

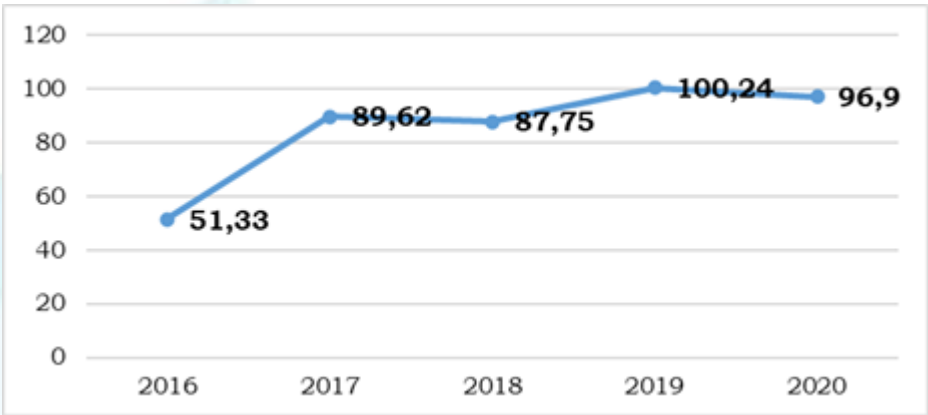
Tabel 2.26.
Prevalensi Kurang Gizi di Kota Cimahi Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Prevalensi kurang gizi	6,91	6,29	5,58	7,70

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021, diolah

Selain itu, kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari aspek angka kesakitan menurut penyakit tertentu. Indikator ini menunjukkan tingkat kemungkinan menderita penyakit tertentu per 100 penduduk sehingga dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan penduduk di suatu daerah. Semakin banyak penduduk yang mengalami penyakit tertentu berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Pada konteks Kota Cimahi, angka kesakitan dapat dilihat dari prevalensi hipertensi, prevalensi Diabetes Melitus (DM), prevalensi kanker, jumlah kasus Tuberkulosis (TB), persentase penemuan kasus TB Basil Tahan Asam (BTA) positif, total kumulatif kasus HIV/AIDS, cakupan penemuan penderita Demam Berdarah *Dengue* (DBD).

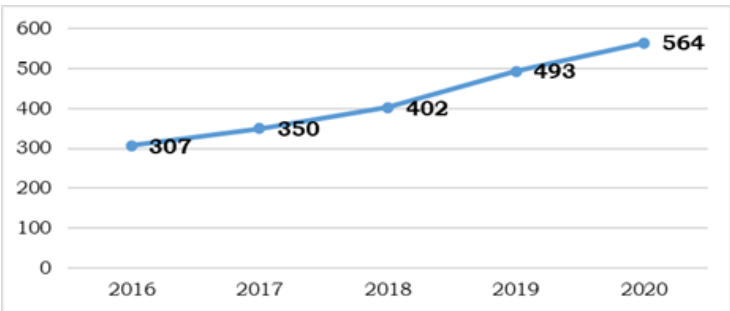
Gambar 2.29.
Grafik Penemuan Pasien TB BTA Positif Kota Cimahi
Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020, diolah

Penemuan kasus TB BTA Positif di Kota Cimahi dalam kurun waktu 2016-2020 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 TB BTA Positif sebesar 79,9 sempat turun menjadi 51,33 di tahun 2016, namun meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 89,62. Selanjutnya pada tahun 2018 turun menjadi 87,75, namun pada tahun berikutnya meningkat kembali menjadi 100,24 dan akhirnya meningkat kembali menjadi 96,9 persen di tahun 2020.

Gambar 2.30.
Total Kumulatif Kasus HIV/AIDS Kota Cimahi Tahun 2016-2020

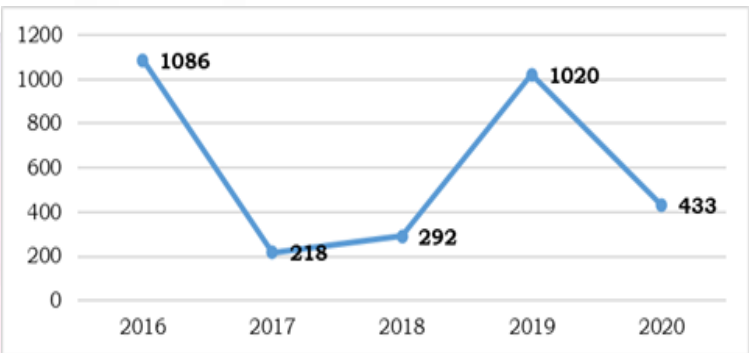


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2021, diolah

Kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi secara kumulatif mengalami tren peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 307 kasus dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2020 menjadi 564 kasus. Kondisi tersebut menggambarkan tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi.

Di samping HIV/AIDS, Demam Berdarah *Dengue* (DBD) juga merupakan penyakit yang berbagai masyarakat. DBD merupakan salah satu penyakit yang masih sering ditemukan di Kota Cimahi. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Cakupan penemuan penderita DBD merupakan indikator yang berfungsi untuk mengetahui persebaran penyakit DBD di suatu daerah.

Gambar 2.31.
Cakupan Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang Ditangani Kota Cimahi Tahun 2016-2020



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cimahi 2016-2020, diolah



Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa penemuan kasus DBD di Kota Cimahi pada tahun 2016 sebanyak 1086 kasus, kemudian turun drastis menjadi hanya 218 kasus pada tahun 2017, namun meningkat kembali menjadi 292 kasus pada tahun 2018, kemudian melonjak drastis menjadi 1.020 kasus pada tahun 2019 dan akhirnya menurun tajam kembali menjadi 433 kasus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, sarana dan prasarana kesehatan di Kota Cimahi terdiri dari 1 (satu) Rumah Sakit Pemerintah, 1 (satu) Rumah Sakit TNI-AD, dan 5 (lima) Rumah Sakit Swasta. Puskesmas di Kota Cimahi berjumlah 13 Puskesmas yang terdiri dari 1 Puskesmas rawat inap dan 12 Puskesmas non rawat inap, sedangkan Puskesmas pembantu berjumlah 2 unit. Selain itu terdapat pula pelayanan klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya.

Tabel 2.27.
Fasilitas Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2020

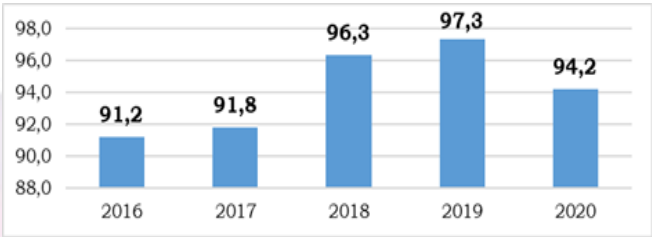
NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
RUMAH SAKIT		
1.	RUMAH SAKIT UMUM	6
2.	RUMAH SAKIT KHUSUS	1
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA		
1.	PUSKESMAS RAWAT INAP	1
2.	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	12
3.	PUSKESMAS KELILING	-
4.	PUSKESMAS PEMBANTU	2
SARANA PELAYANAN LAIN		
1.	KLINIK PRATAMA	42
2.	KLINIK UTAMA	7
3.	PRAKTEK DOKTER BERSAMA	4
4.	PRAKTEK DOKTER UMUM PERORANGAN	126
5.	PRAKTEK DOKTER GIGI PERORANGAN	62
6.	PRAKTEK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN	27

NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
7.	PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL	257
8.	LABORATORIUM KESEHATAN	5
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN		
1.	INDUSTRI FARMASI	3
2.	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	2
3.	PEDAGANG BESAR FARMASI	5
4.	APOTEK	72
5.	TOKO OBAT	9
6.	TOKO ALKES	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2021

Ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung kesehatan di Kota Cimahi berdampak pada cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan kunjungan neonatal pertama ibu hamil, dan cakupan kunjungan bayi. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Cimahi merupakan salah satu bagian deskripsi perkembangan layanan kesehatan dari pemerintah Kota Cimahi bagi ibu hamil.

Gambar 2.32.
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Tahun 2016-2020



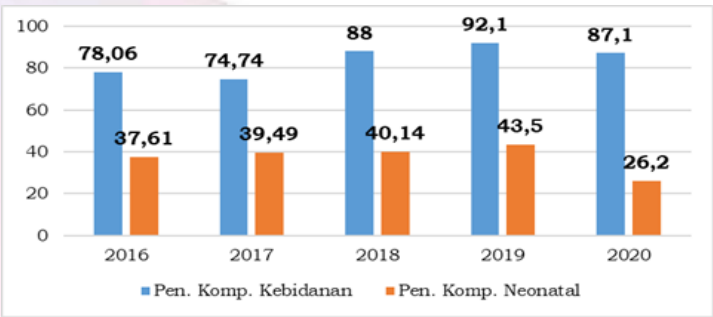
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi 2021

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Cimahi mengalami tren yang meningkat, dimana pada tahun 2016

angkanya sebesar 91,2 persen dan terus meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 97,3 persen pada tahun 2019. Namun tren ini terputus pada tahun 2020 yang justru mengalami penurunan menjadi 94,2 persen.

Komplikasi pada proses kehamilan, persalinan dan nifas juga merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi maka dilakukan pelayanan/ penanganan komplikasi kebidanan. Pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, atau nifas untuk memberikan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui indikator cakupan penanganan komplikasi kebidanan (Cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal dari tahun 2016 hingga 2020 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.33.
Cakupan Pelayanan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal
Kota Cimahi Tahun 2016-2020

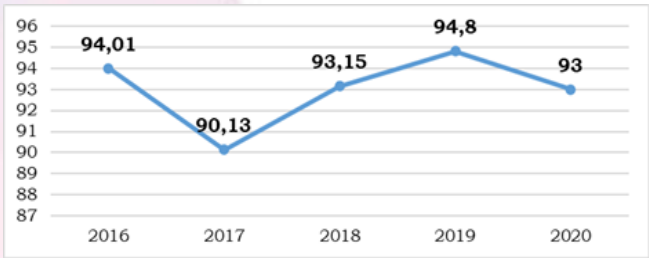


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2021, diolah

Gambar di atas memperlihatkan bahwa secara umum cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kota Cimahi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun sampai tahun 2017, kemudian meningkat lagi sampai tahun 2019 lalu turun kembali di tahun 2020. Capaian pada tahun 2016 sebesar 78,06 persen menurun menjadi 74,74 persen pada tahun 2017, kemudian meningkat kembali menjadi 88 persen di tahun 2018 dan 92,1 persen pada tahun 2019 yang akhirnya turun menjadi 87,1 persen di tahun 2020. Sedangkan pada penanganan komplikasi neonatal juga mengalami fluktuasi dari angka 37,6 persen di tahun 2016 lalu meningkat terus hingga menjadi 43,5 persen pada tahun 2019, namun turun kembali menjadi 26,2 persen di tahun 2020.

Kondisi pelayanan kesehatan di Kota Cimahi juga berdampak pada cakupan pelayanan kesehatan bayi. Capaian cakupan kunjungan bayi dapat menggambarkan seberapa besar jumlah bayi di Kota Cimahi yang mendapat pelayanan kesehatan. Apabila jumlah kunjungan bayi semakin meningkat, maka kualitas kesehatan bayi di Kota Cimahi dapat ditingkatkan. Kunjungan bayi di Kota Cimahi cenderung berfluktuasi bila ditinjau 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2016 cakupan kunjungan bayi sebesar 94,01, mengalami perlambatan menjadi 90,13 pada tahun 2017, meningkat di tahun 2018 menjadi 92,15 persen dan 94,8 persen pada tahun 2019, namun menurun kembali di tahun 2020 menjadi 93,0 persen.

Gambar 2.34.
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2016-2020

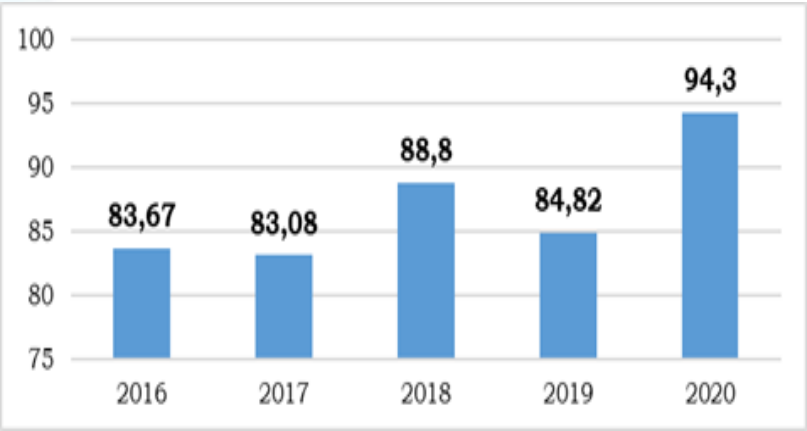


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2021, diolah

Untuk menangani kunjungan bayi yang cenderung mengalami peningkatan dimaksud, maka pemerintah Kota Cimahi melakukan penambahan Posyandu yaitu Posyandu Aktif. Posyandu aktif adalah penambahan dari posyandu purnama dan mandiri, dimana posyandu madya yang cakupan kelima kegiatan pokoknya lebih dari 50%, mampu melaksanakan program tambahan dan sudah memperoleh sumber pembiayaan dari dana Sehat yang dikelola masyarakat yang jumlah peserta masih terbatas yakni kurang dari 50% kepala keluarga (KK) di wilayah kerja posyandu. Sedangkan Posyandu Mandiri merupakan posyandu purnama yang sumber pembiayaannya diperoleh dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat dengan jumlah peserta lebih dari 50% KK di wilayah kerja posyandu.

Berdasarkan gambar di bawah, diketahui bahwa jumlah posyandu aktif di Kota Cimahi pada tahun 2016 sebesar 83,67 persen dari total posyandu yang terdaftar. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 83,08. Namun pada tahun berikutnya persentase posyandu aktif kembali meningkat menjadi 88,8 persen, namun kembali turun ke 84,82 persen pada tahun 2019, dan pada akhirnya kembali naik menjadi 94,3 persen pada tahun 2020.

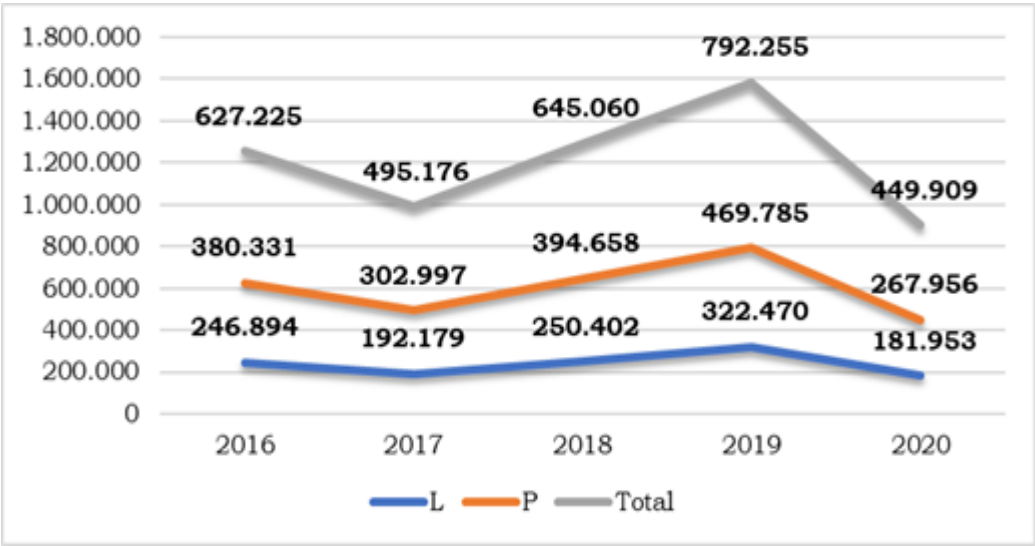
Gambar 2.35.
Posyandu Aktif Kota Cimahi Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2021

Dalam memberikan pelayanan kuratif kepada Masyarakat Kota Cimahi dan sekitarnya, kunjungan rawat jalan di Puskesmas Kota Cimahi pada tahun 2019 mencapai 792.255 kunjungan. Pada tahun 2019 apabila dilihat dari trend tahun sebelumnya kunjungan mengalami peningkatan.

Gambar 2.36.
Kunjungan Puskesmas Tahun 2016-2020



Sumber : Profil Kesehatan Kota Cimahi 2016-2020, diolah

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa kunjungan Puskesmas pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung berfluktuatif, dimana pada tahun 2016 jumlah kunjungan Puskesmas sebesar 627.225 kunjungan, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga menjadi 495.176 kunjungan, namun kondisi ini membaik di tahun 2018 dimana jumlah kunjungan Puskesmas kembali meningkat cukup signifikan menjadi 645.060 kunjungan yang kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 menjadi 792.255 kunjungan, namun pada tahun 2020 jumlah kunjungan turun menjadi 449.909 kunjungan.

Gambar 2.37.
Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit di Kota Cimahi
Tahun 2016-2020



Sumber : Profil Kesehatan Kota Cimahi 2016-2020, diolah

Kunjungan rawat jalan Rumah Sakit pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Data pada tahun 2016 menunjukkan jumlah kunjungan sebesar 819.112 kunjungan, meningkat menjadi 948.903 kunjungan pada tahun 2017, turun pada tahun 2018 menjadi 822.939 kunjungan, kemudian turun kembali menjadi 799.742 kunjungan pada tahun 2019, kemudian kembali turun cukup jauh menjadi 588.985 kunjungan pada tahun 2020.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan di Kota Cimahi pada akhir tahun 2020 adalah 118,873 km. Angka ini sama dengan tahun sebelumnya, dimana jika dirinci menurut pengelolanya maka sebesar 3,63 persen dari total panjang jalan merupakan jalan nasional, 7,87 persen merupakan jalan provinsi, dan sisanya sebesar 88,49 persen merupakan jalan kota. Jalan kota sepanjang 105,193 km menurut kondisi jalan terdiri dari 83,496 km atau 79,374 persen dalam kondisi baik, 20,541 km atau 19,527 persen kondisi sedang, atau 6,619 km atau 6,292 persen kondisi rusak. Pada tahun 2020 persentase jalan kota dengan kondisi rusak berat tidak ada.

Tabel 2.28.

Statistik Transportasi Kota Cimahi Tahun 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jalan Raya					
Panjang Jalan (km)	118.873	119.000	118.873	118.873	118.873
Panjang Jalan (%)					
Nasional	3,63*	3,74*	3,63*	3,63*	3,63*
Provinsi	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*
Kota	88,49*	88,39*	88,49*	88,49*	88,49*
Kondisi Jalan Kota (%)					
Baik	74,06*	53,32*	50,28*	53,29*	79,374*
Sedang	22,88*	45,18*	42,60*	40,67*	19,527*
Rusak	3,06*	1,50*	7,12*	5,76*	6,292*
Rusak Berat	0	0	0	0,29*	0

Sumber : Kota Cimahi dalam Angka 2021, diolah
*) Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2021, diolah

- b. Tingkat Pelayanan Jalan/ *Level of Service* (LOS)
- Di bidang bina marga, diketahui bahwa Tingkat Pelayanan Jalan/*Level of Service* (LOS) di Kota Cimahi pada tahun 2017 berada di Kategori D dan pada tahun 2018, 2019 serta tahun 2020 berada di Kategori C. Hal Tersebut sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.29.

Tingkat Pelayanan Jalan/ *Level of Service* (LOS) di Kota Cimahi Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pelayanan Jalan/ <i>Level of Service</i> (LOS)	D	C	C	C

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah

Berdasarkan hasil *Traffic Counting* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi di tahun 2020, terhadap tingkat pelayanan jalan (Level of Services / LOS) di beberapa ruas jalan di Kota Cimahi didapatkan hasil rata-rata yaitu nilai C (LOS C) dan nilai rata-rata *Volume Capacity Ratio* (VCR) = 0,72 (Arus stabil; kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan; Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan).

Tabel 2.30.

Karakteristik Tingkat Pelayanan

TINGKAT PELAYANAN	KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK	KECEPATAN (KM/JAM)	BATAS LINGKUP (V/C) RATIO
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	>50	0.00 - 0.20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk pengemudi memilih kecepatan	40-50	0.21 – 0.44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	32-40	0.45 – 0.74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dapat ditolerir	27-32	0.75 – 0.84
E	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas. Arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti	24-27	0.85 – 1.00
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume di bawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	<24	>1.00

Pada awal tahun perencanaan yaitu pada tahun 2017 kondisi LOS di Kota Cimahi dengan nilai D, namun pada tahun 2019 meskipun capaian tingkat pelayanan pada tahun 2019 sama dengan capaian pada tahun 2018 yaitu nilai C, namun batas lingkup VCR mengalami penurunan dari 0,59 pada tahun 2018 menjadi 0,64 pada tahun 2019, dikarenakan ada titik-titik kemacetan dimana kapasitas jalan di Kota Cimahi tidak bertambah sejak tahun 2017, serta akibat dari meningkatnya

jumlah kendaraan setiap tahunnya. Walaupun, target RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu LOS C di Kota Cimahi telah tercapai di tahun 2019, tetapi masih ada beberapa titik kemacetan di ruas-ruas jalan Kota Cimahi yang harus diatasi dan terus diupayakan untuk lancar.

Kondisi LOS di Kota Cimahi dipengaruhi juga oleh Rasio antara Volume Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan, apabila semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Cimahi, dan tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan, maka nilai VCR setiap ruas jalan akan semakin rendah, tentu hal tersebut akan mempengaruhi nilai LOS di Kota Cimahi. Adapun saat ini di beberapa ruas jalan di Kota Cimahi belum didukung dengan fasilitas perlengkapan jalan seperti trotoar, drainase jalan, jalur sepeda dan fasilitas penyandang cacat.

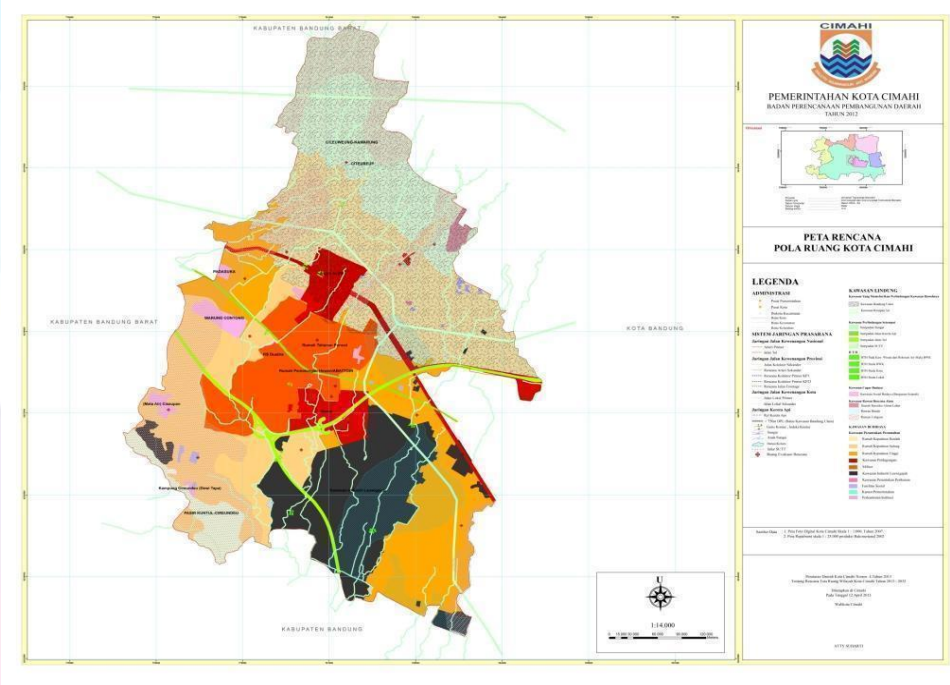
c. Penataan Ruang

Kinerja penataan ruang di Kota Cimahi belum optimal, dimana masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam aspek pola ruang. Hal ini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kota Cimahi yang cepat dan sangat dinamis. Kondisi ketidaksesuaian tata ruang umumnya terjadi pada kawasan lindung seperti kawasan resapan air dan sempadan sungai.

Ruang terbuka hijau di Kota Cimahi diarahkan pada pencapaian target pemenuhan luasan ruang terbuka hijau 30 persen yang terdiri dari RTH publik sebesar 20 persen dan RTR Privat sebesar 10 persen dari luas wilayah kota. Sampai saat ini, RTH yang dimiliki seluas 40,89 ha atau 0,96 persen dari luas kota, lebih kecil dari hitungan sebelumnya yaitu sebesar 11,16 persen. Hal ini disebabkan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan RTRW bahwa sempadan sungai dan sempadan jalan yang semula dihitung sebagai RTH menjadi tidak masuk dalam hitungan RTH (*Sumber: DLH dan DPKP Kota Cimahi, 2019*).

Terbitnya kebijakan baru menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian atau revisi terhadap penataan ruang wilayah seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yakni pelaksanaan Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang melewati wilayah Kota Cimahi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun yakni penetapan luas lahan pertanian berkelanjutan di Kota Cimahi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan Kota Cimahi serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kota Cimahi. Adapun Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi disajikan pada gambar di bawah :

Gambar 2.38.
Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi



Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi, Bappeda Kota Cimahi

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Pada aspek perumahan, kondisi perumahan yang ada di Kota Cimahi terdiri dari perumahan teratur dan perumahan tidak teratur. Secara umum perumahan yang tidak teratur identik dengan kepadatan dan kekumuhan, sehingga sering dijumpai rumah atau lingkungan/ kawasan permukiman yang tidak layak huni. Berikut data rasio luas kawasan kumuh di Kota Cimahi.

Tabel 2.31.
Rasio Luas Kawasan Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2017-2020

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020
Rasio Luas Kawasan Kumuh	3,64	1,88	0,65	0,18

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2020, diolah

Selain ditinjau dari aspek utama yaitu rasio luas kawasan kumuh, kinerja sektor perumahan dan Kawasan permukiman juga dilihat dari aspek cakupan layanan air limbah domestik, cakupan layanan air bersih, dan luas genangan yang terjadi.

Persentase cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 Persentase cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi sebesar 68,17 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 76,50 sedangkan Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 72,70 persen. Pada tahun 2019 Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik mengalami peningkatan kembali menjadi 75,98 persen, namun pada Tahun 2020 terjadi penurunan kinerja cakupan layanan, hal ini disebabkan Tahun 2020 terkendala ketersediaan lahan, sehingga jumlah unit IPAL yang di bangun tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.30 berikut :

Tabel 2.32.

Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Tahun 2015-2020

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	68,17	n/a	76,50	72,70	75,98	75,83

Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2020

Akses air bersih/minum penduduk di Kota Cimahi dipenuhi melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan berasal dari PDAM Tirta Raharja yang dimiliki Kabupaten Bandung, pelayanan UPT Air Minum, dan sumur-sumur artesis yang dikelola oleh KP2A (Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air). Sedangkan sistem non perpipaan berupa sumur penduduk yang terlindungi, mata air yang dikelola oleh masyarakat, depot air minum dan sumur artesis dari industri.

Persentase cakupan pelayanan air bersih di Kota Cimahi pada tahun 2015 sebesar 62,73 persen dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 menjadi 70,35 persen. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi cakupan layanan bersih sebesar 1,01%, hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan air bersih dimana keterbatasan sumber air baku Kota Cimahi yang menjadi penyebabnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.33.

Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih Kota Cimahi
Tahun 2015-2020

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase cakupan pelayanan air bersih	62,73	68,83	69,17	69,34	70,35	69,82

Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2020

Karena adanya keterbatasan sumber air baku di Kota Cimahi, sumber daya air yang dimanfaatkan sebagai air baku selain sungai adalah kolam retensi. Di Kota Cimahi terdapat 6 (enam) buah kolam penampungan yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup, dan di Kelurahan Setiamanah.

Kolam retensi dapat dimanfaatkan sebagai sarana publik untuk rekreasi, kegiatan olahraga masyarakat bahkan budidaya ikan khususnya ikan hias/konsumsi.

Tabel 2.34.
Kondisi Kolam Retensi Tahun 2020 Kota Cimahi

No	Lokasi				Dimensi	
	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW	Luas (m)	Volume (m3)
1	Cimahi Utara	Citeureup	3	9	199.5	798
	Cimahi Utara	Citeureup	3	9	178.5	535.5
2	Cimahi Utara	Cibabat	1	3	608	3,040.00
3	Cimahi Tengah	Padasuka-Setiamanah	9	8	401.5	1,204.50
4	Cimahi Selatan	Leuwigajah	8	2	1080	6,480.00
5	Cimahi Selatan	Leuwigajah	4	4	804	4,020.00
6	Cimahi Selatan	Cibeureum-Melong	8	27	1056	6,336.00
Total/rerata					4,328	22,414

Sumber : DPKP Kota Cimahi 2020

Genangan di Kota Cimahi merupakan kondisi drainase yang terganggu baik oleh pola masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan maupun terhalangnya aliran drainase oleh bangunan. Persentase luasan genangan terhadap luas kota di Kota Cimahi kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 persentase luasan genangan terhadap luas kota mencapai 0,38 persen dan mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019 masing-masing 0,14 persen dan 0,07 persen dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan luas genangan menjadi 0,069 persen.Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35.
Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota Tahun 2017-2020

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020
Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0,38	0,14	0,07	0,069

Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2020, diolah

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a. Keamanan dan Ketertiban Umum

Selain itu, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering muncul dan berpotensi berkembang adalah konflik antara buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan upah minimum kota (UMK). Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan industri yang melibatkan masyarakat sebagai pegawainya.

Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2020 yaitu 100 persen.

Tabel 2.36.
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase Penanganan Gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kota Cimahi, 2021, diolah

- b. Kebencanaan

Kota Cimahi termasuk menjadi wilayah yang rentan mengalami bencana. Bencana yang berpotensi besar melanda wilayah Kota Cimahi adalah tanah longsor dan banjir. Berdasarkan peta



rawan bencana Kota Cimahi sebagaimana dimuat pada bagian awal bab ini, menunjukkan bahwa wilayah Kota Cimahi mengalami rawan bencana tanah longsor berada di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan. Wilayah tanah longsor terjadi pada wilayah dengan kemiringan diatas 15 persen. Sementara itu, wilayah yang berpotensi banjir berlokasi di Cimahi Selatan. Bencana banjir dapat disebabkan adanya banjir bandang atau banjir akibat luapan sungai.

Kota Cimahi juga dihadapkan dengan bencana aliran lahar gunung berapi dan kebakaran. Wilayah rawan bencana aliran lahar gunung berapi berlokasi di daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Berdasarkan data, diketahui bahwa Indeks Risiko Bencana di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berada pada Kategori Kelas Resiko Sedang.

Sementara itu, kepadatan penduduk dan bangunan yang ada di Kota Cimahi menyebabkan Kota Cimahi seringkali menghadapi bencana kebakaran. Kondisi tersebut dapat digambarkan dalam data terkait dengan jumlah bencana kebakaran Kota Cimahi berikut ini :

Tabel 2.37.
Kejadian Kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2015-2020

NO	TAHUN	Kejadian Kebakaran	Korban Jiwa	Kerugian Materi (Rp)
1.	2015	50 Kejadian	2 meninggal, 2 luka bakar	9.805.000.000
2.	2016	38 Kejadian	-	5.795.100.000
3.	2017	5 Kejadian	-	210.000.000
4.	2018	90 Kejadian	-	11.656.050.000
5.	2019	68 Kejadian	1 meninggal, 2 luka sedang	433.200.000
6.	2020	49 Kejadian	-	4.315.500.000

Sumber : Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021, data diolah



Data tersebut menunjukkan bahwa potensi bencana kebakaran di Kota Cimahi masih tinggi serta menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran sehingga bencana yang muncul tidak mendapat penanganan yang cepat karena harus menunggu petugas dari pemerintah Kota karena selama ini masyarakat belum disiapkan dalam menghadapi bencana paling tidak untuk mengambil tindakan awal penanggulangan bencana.

Kota Cimahi telah memiliki daerah evakuasi bencana dan rencana mitigasi bencana. Daerah evakuasi bencana di Kota Cimahi dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.38.
Daerah Evakuasi Bencana Kota Cimahi

No	Kelurahan	Kecamatan	Daerah Evakuasi Bencana
1.	Cipageran	Cimahi Utara	Stadion Sangkuriang, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
2.	Citeureup	Cimahi Utara	Komplek Perkantoran Pemerintah Kota, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
3.	Cibabat	Cimahi Utara	Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
4.	Pasirkaliki	Cimahi Utara	Kawasan ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
5.	Padasuka	Cimahi Tengah	Velodrome, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
6.	Setiamanah	Cimahi Tengah	Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
7.	Cimahi	Cimahi Tengah	Alun-alun Kota, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
8.	Karangmekar	Cimahi Tengah	Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
9.	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	Rusunawa Cigugur Tengah, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
10.	Baros	Cimahi Tengah	Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
11.	Cibeber	Cimahi Selatan	Kawasan ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
12.	Leuwigajah	Cimahi Selatan	Rusunawa Leuwigajah, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
13.	Utama	Cimahi Selatan	SMK Negeri 1 Kota Cimahi, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan



No	Kelurahan	Kecamatan	Daerah Evakuasi Bencana
14.	Cibeureum	Cimahi Selatan	ruang terbuka, dan gedung atau bangunan terdekat
15.	Melong	Cimahi Selatan	Rusunawa Melong, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan

Sumber : RTRW Kota Cimahi 2012-2032

Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki daerah evakuasi bencana di semua kelurahan dan kecamatan. Daerah evakuasi bencana di Kota Cimahi direncanakan lebih difokuskan di ruang terbuka, seperti alun-alun, gedung, dan kawasan yang terbuka.

Kota Cimahi melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana dengan melakukan tiga aspek mitigasi bencana pada kawasan rawan longsor, yaitu : menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor, dan menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai ruang terbuka hijau (RTH) pengaman lingkungan. Sementara itu, pemerintah Kota Cimahi melakukan tiga aspek mitigasi bencana pada kawasan rawan aliran gunung berapi, yaitu menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan, memindahkan bangunan yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi, dan mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara.

Untuk Indeks Risiko Bencana di Kota Cimahi dibatasi pada bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup banjir, gempa, longsor, puting beliung, kekeringan, vulkanologi, dan kebakaran.

Beberapa indikator kebencanaan di Kota Cimahi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik. Adapun rinciannya disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.39.

Indikator Kebencanaan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019
1.	Indeks resiko bencana	Kategori	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
2.	Waktu tanggap bencana	Menit	15	15	15
3.	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Persen	100	100	100
4.	Persentase luasan banjir terhadap luas kota	Persen	0,38	0,14	0,07
5.	Jumlah kejadian bencana yang ditangani	Kejadian	130	151	222

Sumber : BPBD Kota Cimahi, 2020, diolah

6. Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan kepanjangan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan dalam memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota mendefinisikan Standar Teknis sebagai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam



implementasinya kesejahteraan sosial memang tidak dapat diwujudkan hanya dengan intervensi-intervensi sosial saja namun membutuhkan campur tangan dari penyelenggaraan urusan lainnya. Dalam prakteknya urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak-dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS memiliki 26 kriteria mulai dari anak terlantar, difabel, hingga pada keluarga Bermasalah Sosial Psikologis. Adapun kondisi PMKS di Kota Cimahi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.40.
Jumlah PMKS Kota Cimahi Menurut Jenis PMKS Tahun 2020

NO	JENIS PMKS	TOTAL
1.	Anak Bayi Terlantar	38
2.	Anak Terlantar	570
3.	Anak yang berhadapan dengan Hukum	5
4.	Anak Jalanan	66
5.	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	278
6.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	26
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	5
8.	Lanjut usia terlantar	2614
9.	Penyandang disabilitas	1144
10.	Tuna susila	0
11.	Gelandangan	29
12.	Pengemis	2
13.	Pemulung	70
14.	Kelompok Minoritas	38
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	18
16.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	74
17.	Korban <i>Trafficking</i>	4
18.	Korban tindak kekerasan	7
19.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	3



NO	JENIS PMKS	TOTAL
20.	Fakir Miskin	10214
21.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	129
	Jumlah PMKS	115.334

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Cimahi, 2020

Data diatas menunjukkan bahwa variasi PMKS didominasi oleh fakir miskin dan lanjut usia terlantar. Tingginya fakir miskin di Kota Cimahi juga dapat dilihat dari adanya 128.792 penduduk Kota Cimahi yang berpenghasilan rendah (Dinas Sosial Kota Cimahi).

Hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya pemerataan hasil pembangunan sehingga masih menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Adapun untuk data tuna susila di Kota Cimahi tidak ada baik secara realita kondisi aktual maupun juga secara data.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Cimahi telah meningkatkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.41.
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan
di Kota Cimahi Tahun 2017-2020

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	0,76	23,59	37,93	97,11

Sumber : Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebanyak 0,76 persen dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2018 hingga menjadi

23,59 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 37,93 persen. Pada tahun 2020, penerima bantuan sosial tidak hanya pada PMKS namun juga masyarakat terdampak pandemi Covid-19 (DTKS dan Non DTKS) yaitu sebanyak 112.007 orang, atau 97,11 % dari jumlah seluruh PMKS.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS membutuhkan pengelolaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial sehingga PMKS dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial diperlukan efektifitas sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta program kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak negatif dari berbagai bencana sosial dan kebijakan ekonomi.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sosial, pemerintah perlu menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat,

mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga agar tidak mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin diwujudkan dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, pemberian jaminan sosial dan peningkatan kualitas manajemen kelembagaan sosial masyarakat. Perlu dicermati khusus bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial seharusnya dapat meningkatkan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak terlantar termasuk anak jalanan, lanjut usia (lansia) terlantar, penyandang cacat terlantar, korban bencana alam dan sosial (pengungsi), dan kelompok rentan lainnya dapat dicapai. Upaya pemberdayaan, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun didorong peran aktif dan ketahanan sosial masyarakat serta stakeholder lainnya.

Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan aneka masalah sosial yang dihadapi Kota Cimahi perlu kegiatan lanjutan dan terobosan antara lain dengan meningkatkan SLRT dan PUSKESOS yang ada di setiap kelurahan serta kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan dan motivasi, sehingga PMKS memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dan dapat mengakses berbagai pelayanan sosial dasar secara mandiri.

Tabel 2.42.
Jumlah DTKS Berdasarkan Ruta

JUMLAH DTKS BERDASARKAN RUTA				BULAN		Jumlah Data
KDKEC	KDDESA	KECAMATAN	KELURAHAN	AGUSTUS	DESEMBER	Bertambah / Berkurang
010	001	CIMAHI SELATAN	MELONG	3539	3544	-5
	002		CIBEUREUM	4031	3763	268
	003		UTAMA	1899	1890	9
	004		LEUWIGAJAH	2705	2666	39
	005		CIBEBER	1965	1954	11
020	001	CIMAHI TENGAH	BAROS	1109	1039	70
	002		CIGUGUR TENGAH	2850	2827	23
	003		KARANGMEKAR	848	841	7
	004		SETIAMANAH	1398	1388	10
	005		PADASUKA	2210	2200	10
	006		CIMAHI	941	937	4
030	001	CIMAHI UTARA	PASIRKALIKI	782	779	3
	002		CIBABAT	2940	2926	14
	003		CITEUREUP	2285	2283	2
	004		CIPAGERAN	3113	3097	16
TOTAL				32615	32134	481

Tabel 2.43.
Jumlah DTKS Berdasarkan ART

JUMLAH DTKS BERDASARKAN ART				BULAN		Jumlah Data
KDKEC	KDDESA	KECAMATAN	KELURAHAN	AGUSTUS	DESEMBER	Bertambah / Berkurang
010	001	CIMAHI SELATAN	MELONG	13370	13258	112
	002		CIBEUREUM	14572	13292	1280
	003		UTAMA	6213	6157	56
	004		LEUWIGAJAH	9765	9418	347
	005		CIBEBER	6761	6665	96
020	001	CIMAHI TENGAH	BAROS	4084	3650	434
	002		CIGUGUR TENGAH	10407	10235	172
	003		KARANGMEKAR	2773	2742	31
	004		SETIAMANAH	5089	5039	50
	005		PADASUKA	7780	7682	98
	006		CIMAHI	3462	3427	35
030	001	CIMAHI UTARA	PASIRKALIKI	2825	2795	30
	002		CIBABAT	11055	10956	99
	003		CITEUREUP	8715	8657	58
	004		CIPAGERAN	11453	11324	129
TOTAL				118324	115297	3027

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka tahun 2020 mencapai 5,11% dari jumlah penduduk sekitar 568.400 jiwa. Pemerintah sendiri telah melakukan beberapa upaya dalam melakukan

pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) serta beberapa program lainnya.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan sebagai sumber data untuk program-program tersebut. Sehingga program apapun dalam rangka penanganan fakir miskin harus berpedoman kepada DTKS. DTKS adalah kepanjangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Masyarakat yang termasuk dalam daftar DTKS terdiri dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Rumah tangga dalam DTKS dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut DESIL. Desil adalah kelompok per-sepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga. Pengelompokan Desil rumah tangga dalam DTKS adalah sebagai berikut :

- a. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1- 10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional;
- b. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11- 20 % dihitung secara nasional;
- c. Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21- 30 % dihitung secara nasional; dan
- d. Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31- 40 % dihitung secara nasional.

DTKS berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan mulai dari yang paling terendah.

DTKS hanya berisikan 40% rumah tangga karena cakupan 40% dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Cakupan 40% juga meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin. Sedangkan rumah tangga yang berada pada kelompok 40% ke atas

sudah dianggap mapan dan sudah mampu memberdayakan dirinya sendiri.

DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial, membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Data rumah tangga dalam BDT diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode Proxy-Means Testing (PMT). PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan lain-lain.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial menampilkan keseluruhan data prelist DTKS dan juga kepesertaan program-program lainnya (PKH, BSP, PIS). Aplikasi SIKS adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan proses verifikasi dan validasi 3 data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program-program Kementerian Sosial RI. Modul pada aplikasi SIKS telah digunakan oleh Kabupaten/Kota yang secara aktif melaksanakan verifikasi dan validasi (verivali) Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pemerintah Kota Cimahi dalam hal pengentasan angka kemiskinan melalui DinsosP2KBP3A menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang telah menerapkan modul aplikasi SIKS. Aplikasi SIKS yang digunakan oleh 15 Kelurahan di Kota Cimahi. memiliki PUSKESOS (Pusat Kesejahteraan Sosial) yang bertugas melakukan verivali dan kemudian menginput hasil verivali ke aplikasi SIKS. Hasil proses verivali yang sudah selesai dilakukan oleh operator dikumpulkan ke DinsosP2KBP3A Kota Cimahi sebagai supervisor untuk direkap dan dikirim ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Pusdatin Kesos) melalui web SIKS.

Permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS membutuhkan pengelolaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial sehingga PPKS dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial diperlukan efektifitas sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta program kompensasi bagi masyarakat miskin. Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin perlu diwujudkan dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, pemberian jaminan sosial dan peningkatan kualitas manajemen kelembagaan sosial masyarakat dengan mendorong peran aktif dan ketahanan sosial masyarakat serta stakeholder lainnya.

7. Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat

pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta masalah perselisihan tenaga kerja dengan perusahaan merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah pada urusan tenaga kerja. Oleh karena itu Pemerintah Kota Cimahi terus berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di atas melalui peningkatan kompetensi pencari kerja dan peningkatan hubungan industrial.

Peningkatan kompetensi pencari kerja yang termasuk dalam angkatan kerja Kota Cimahi dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Pemagangan dan Sertifikasi Kerja. Sasaran dari kegiatan ini adalah angkatan kerja yang terdaftar sebagai pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan secara swakelola bekerja sama dengan beberapa LPK di Kota Cimahi yang telah bersertifikat. Meskipun secara kuantitas perkembangan jumlah peserta pelatihan ada pengurangan tetapi secara kualitas ditingkatkan dengan menambah jam pelatihan sesuai standar dan pemberian sertifikat. Pelaksanaan sertifikat kerja bagi pencari kerja yang telah memiliki keterampilan kerja dilakukan dengan lembaga sertifikasi yang diakui secara nasional. sedangkan pemagangan diberikan kuota oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkan peserta magang. Selain dari APBD, Kota Cimahi juga mendapatkan kuota peserta pelatihan dari APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja yang bekerja sama dengan BBLK. Hubungan Industrial berkaitan erat dengan hubungan tenaga kerja yang dapat diwakili oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan perusahaan dan pemerintah daerah. Peningkatan Hubungan Industrial dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan berkurangnya angka perselisihan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui pemberian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta perlindungan kerja melalui adanya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).



Tabel 2.44.
Data Pendidikan dan Pelatihan Kerja serta Hubungan Industrial
Kota Cimahi Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
I	Pendidikan dan Pelatihan Kerja			
1.	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mengikuti Pelatihan (APBD)	500	160	100
2.	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mengikuti Pelatihan (APBD Provinsi/APBN)	0	118	175
3.	Jumlah Peserta Pelatihan Yang ditempatkan/Bekerja	110	92	96
4.	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Pemagangan (APBN)	40	20	0
5.	Jumlah Peserta Pemagangan Yang ditempatkan (APBN)	20	7	0
6.	Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat (LSP/BNSP)	0	118	175
7.	Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat (LSP/BNSP) Yang ditempatkan	0	3	0
II	Hubungan Industrial			
1.	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	36	36	43
2.	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	11	5	4
3.	Jumlah SP / SB	6	6	6
4.	Jumlah Lembaga Bipartit	10	9	9
5.	Perusahaan peserta jamsostek aktif	120	241	276
6.	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	56.286	53.448	51.203
7.	Jumlah Perusahaan	595	619	619
8.	Jumlah Perusahaan Tata Kelola Layak	n/a	233	253
9.	Jumlah Tenaga Kerja	47.812	59.007	60.068
10.	Perselisihan			
	-Jumlah Kasus Didaftarkan	23	24	42
	-Jumlah Kasus Selesai dengan PB	17	18	18
11.	Upah Minimum Kota (UMK)	2.678.028,45	2.893.074,13	3.139.274,74

Sumber data : Disnaker Kota Cimahi, 2021



8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peranan perempuan dalam pembangunan di Kota Cimahi cukup strategis, baik perorangan maupun melalui organisasi-organisasi perempuan. Dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 pelatihan Manajemen Berusaha diberikan kepada PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di 15 kelurahan di Kota Cimahi dan 36 organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kemampuan organisasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Pembinaan Posyandu dan Pokjanal dilakukan melalui pelatihan-pelatihan bagi kader posyandu dan penyelenggaraan lomba posyandu serta pembinaan kepada Kader PKK.
- Sama halnya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi juga pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 73,38 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 menjadi 77,21. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 74,14.
- Selanjutnya, untuk keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 24 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 29,87 persen. dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 45,38 persen.

Tabel 2.45.
Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen di Kota Cimahi
Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen	24	26	29,87	45,38

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Tabel 2.46.

Data Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

NO	TAHUN	TINDAK KEKERASAN		JUMLAH
		TERHADAP ANAK	TERHADAP PEREMPUAN	
1.	2017	18	6	24
2.	2018	20	9	29
3.	2019	20	10	30
4.	2020	8	9	17

Sumber : Dinsosp2kbp3a 2020

Berdasarkan data di atas, untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2017 hingga 2019 setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan kasus. Dari 24 kasus pada 2017 menjadi 30 pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020, mengalami penurunan kasus menjadi hanya 17 kasus, hal ini tentunya merupakan progress yang positif bagi masyarakat dan lembaga penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, untuk Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG di Kota Cimahi juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 70 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 96,43 persen, dan pada tahun 2020 menjadi 100 persen, yang berarti seluruh perangkat daerah telah melakukan PPRG dalam pelaksanaan program kegiatannya.

Tabel 2.47.

Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG
Kota Cimahi Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	70	79	96,43	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Berdasarkan data presentasi capaian IPG dan IDG di atas, dapat dianalisa bahwa peran serta keterlibatan dan keaktifan masyarakat terutama kaum perempuan (gambar 2.40 dan tabel 2.38 dan tabel 2.39), hal ini sempat mengalami fluktuatif, hal ini tidak terlepas dari kondisi situasi sosial, ekonomi dan politik daerah saat itu. Hanya pada tahun 2019, kesadaran perangkat dinas pada Pemerintah Kota Cimahi yang telah mengimplementasikan PPRG meningkat dari 79% pada tahun 2018 menjadi 96,43% pada tahun 2019. Hal ini cukup signifikan dalam capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi.

9. Pangan

a. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal (UU No.18 Tahun 2012).

Ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang merupakan 2 (dua) komponen utama yang harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Adapun situasi Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2019 berdasarkan data Susenas BPS (2018) yang diolah Dispangtan Kota Cimahi adalah sebagai berikut :



Tabel 2.48.
Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2019

Kelompok Pangan	Gram/Kap/hari	Energi			Protein		Skor PPH	
		kkl/kap/hari		%AKE	gram/kap/hari	%AKP**)		
		aktual	ideal				Aktual	Ideal
Padi-padian	413.8	1450	1200	60.4	36.6	58.1	25.0	25.0
Umbi-umbian	38	38	144	1.6	0.00	0.40	0.8	2.5
Pangan Hewani	284	284	288	11.9	19.00	30.70	23.7	24.0
Minyak dan Lemak	280	240	240	11.7	0.20	0.40	5.0	5.0
Buah/biji berminyak	1.4	3	72	0.1	0.00	0.00	0.1	1.0
Kacang-kacangan	86	86	120	3.6	8.90	14.10	7.2	10.0
Gula	15.4	57	120	2.4	0.10	0.10	1.2	2.5
Sayur dan Buah	145	145	144	6.0	65.20	103.50	30.0	30.0
Lain-lain	0	0	72	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
Total		2342	2400	97.6	130.6	207.3	92.9	100

Sumber : BPS dan Dispangtan, 2019
Ket : *) Angka Kecukupan Energi (AKE):2400 kkal/kap/hari
**) Angka Kecukupan Protein (AKP):63gr/kap/hari

Berdasarkan data tersebut skor PPH Ketersediaan Kota Cimahi Tahun 2018 yaitu sebesar 92,9 poin, sedangkan target PPH Ketersediaan Kota Cimahi untuk tahun 2018 yaitu sebesar 96,4 point (tidak tercapai). Berdasarkan data tersebut juga dapat dijelaskan bahwa ketersediaan untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, dan gula masih belum ideal di Kota Cimahi.

Selain ketersediaan pangan, Pemerintah Kota Cimahi juga wajib meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kota Cimahi. Penganekaragaman konsumsi pangan diukur melalui pencapaian nilai PPH Konsumsi, Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Situasi Konsumsi Pangan rata-rata penduduk Kota Cimahi Tahun 2019 berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2018 dan diolah oleh Dispangtan Kota Cimahi digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.49.

Konsumsi Pangan Rata-Rata di Kota Cimahi Tahun 2019

No	Kelompok Pangan	Gram/Kap /hari	Energi (kkl/kap /hr)	%AKE Aktual	Protein (g/kap/hr)	%AKP Aktual	Skor PPH Ideal	Skor PPH Aktual
1.	Padi-padian	301.5	1,288	59.9	29.4	51.7	25	25.0
2.	Umbi-umbian	35.2	35	16	0.4	0.7	2.5	0.8
3.	Pangan Hewani	121.4	266	12.4	21.1	37.1	24	24.0
4.	Minyak dan Lemak	28.2	250	11.6	0.1	0.2	5	5.0
5.	Buah/biji berminyak	1.8	11	0.5	0.3	0.4	1	0.2
6.	Kacang-kacangan	27.3	59	2.8	6.3	11.1	10	5.5
7.	Gula	12.8	51	2.4	0.2	0.3	2.5	1.2
8.	Sayur dan Buah	216.3	95	4.4	3	5.3	30	22.0
9.	Lain-lain	100.8	67	3.1	1.2	2.2	0	0.0
Total			2.123	98.80	62.1	109.0	100.0	83.8

Sumber : BPS dan Dispangtan, 2020, diolah

Ket : *) Angka Kecukupan Energi (AKE):2400 kkal/kap/hari

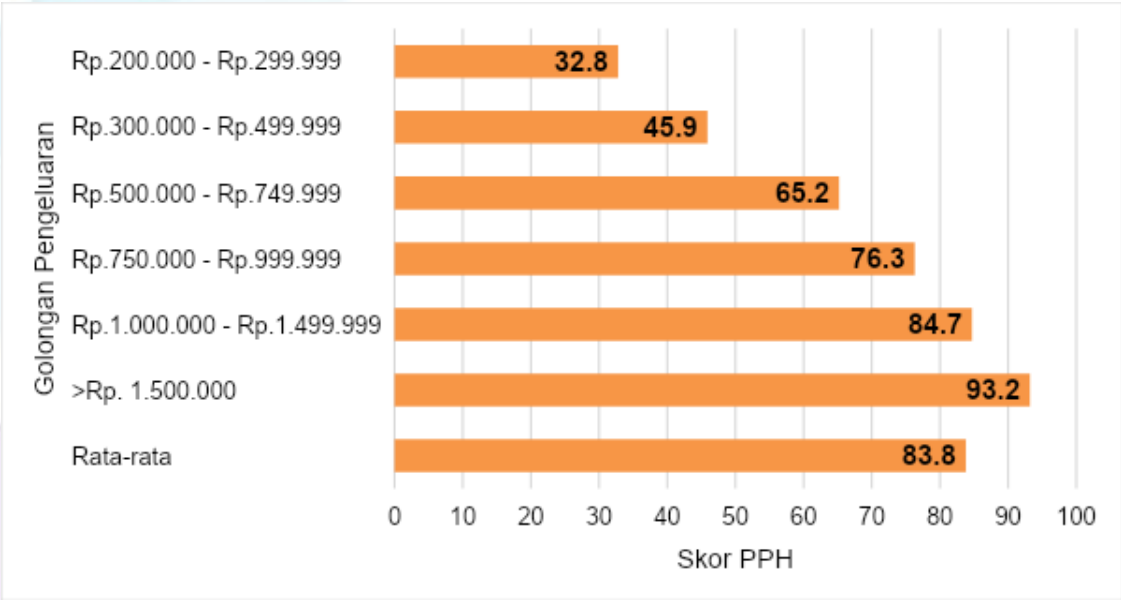
**) Angka Kecukupan Protein (AKP):63gr/kap/hari

Berdasarkan tabel diatas konsumsi kelompok pangan masyarakat Kota Cimahi secara kuantitas sudah cukup, namun kualitas/keragaman konsumsi pangan penduduk Kota Cimahi masih belum optimal. Pencapaian skor PPH Konsumsi Kota Cimahi baru sebesar 83,8 poin. Capaian tersebut terpaut 16,2 poin dari skor PPH ideal yaitu 100. Adapun kelompok pangan yang skor PPH nya masih kurang yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah; karena skor PPH untuk komoditi pangan tersebut berada dibawah angka ideal. Sementara itu, kelompok pangan padi-padian, pangan hewani serta minyak dan lemak sudah mencapai skor maksimal.

Skor PPH penduduk akan semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya pengeluaran pangan. Berdasarkan gambar dibawah ini, terdapat kesenjangan PPH Konsumsi yang cukup tinggi antara golongan penduduk dengan pengeluaran rendah dengan penduduk berpengeluaran tinggi. Penduduk yang tergolong pengeluaran pangan kurang dari Rp. 1,500,000 memiliki skor PPH 93,2 sedangkan penduduk yang tergolong pengeluaran

pangan Rp. 200,000 – Rp. 299,999 memiliki skor PPH 32,8. Penduduk dengan pengeluaran pangan kurang dari Rp. 500,000 bahkan masih belum cukup konsumsi padi-padiannya. Akan tetapi, konsumsi umbi-umbian pada kelompok pendapatan Rp. 200.000 – Rp. 299.999 merupakan yang tertinggi di antara kelompok pendapatan lainnya, meskipun tetap tergolong rendah jika dibandingkan standar ideal. Konsumsi umbi tersebut terutama pada singkong dan talas. Konsumsi protein hewani, protein nabati (kacang-kacangan), minyak dan lemak serta sayur dan buah cenderung meningkat seiring peningkatan pengeluaran pangan. Jika dibandingkan dengan konsumsi ideal, konsumsi protein hewani serta sayur dan buah hanya ideal pada kelompok pendapatan > Rp. 1.500.000. Sementara itu, konsumsi protein nabati di semua golongan pengeluaran masih kurang. Adapun konsumsi buah/biji berminyak tetap rendah di semua golongan pengeluaran.

Gambar 2.39.
Skor PPH Penduduk per Golongan Pengeluaran
di Kota Cimahi Tahun 2019



Sumber : Dispangtan, 2020, diolah

b. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi

Pencapaian skor PPH merupakan salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan rakyat yang diukur untuk menghitung keberhasilan penyelenggaraan pangan di suatu daerah. Berdasarkan data pada tabel dibawah ini, skor PPH Ketersediaan Kota Cimahi belum memenuhi target baik di tahun 2018 maupun di tahun 2019, bahkan realisasi di Tahun 2018 berada dibawah capaian Tahun 2017. Oleh karenanya pada penyusunan laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan Kota Cimahi (2018) direkomendasikan untuk ditetapkan sasaran baru. Dengan adanya kesenjangan antara angka target dan realisasi PPH Ketersediaan tersebut maka diperlukan perencanaan ketersediaan pangan yang baik di Kota Cimahi. Pada tahun 2020 indikator kinerja program terkait diversifikasi dan ketahanan pangan dalam dokumen RPJMD Perubahan berubah, yang semula PPH Ketersediaan menjadi Rata-rata ketersediaan energi dan protein. Capaian ketersediaan energi di Kota Cimahi berdasarkan data BPS (2020) adalah mencapai 2.342 kkal/kapita/hari dari target 2.400 kkal/kapita/hari atau persentase kinerja mencapai 97,6 persen. Sedangkan Capaian ketersediaan protein Kota Cimahi di tahun 2020 adalah 130,6 gram/kapita/hari dari target 63 gram/kapita/hari atau persentase kinerja mencapai 207,3 persen.

Disisi lain, indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa skor PPH Konsumsi Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 PPH Ketersediaan sebesar 96,2, dan mengalami penurunan pada

tahun 2018 menjadi 93,4 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 92,9. Indikator Program terkait konsumsi pangan dalam RPJMD Perubahan Kota Cimahi juga mengalami perubahan, yang semula PPH Konsumsi menjadi rata-rata konsumsi energi dan Protein. Capaian konsumsi energi per kapita Kota Cimahi di tahun 2020 berdasarkan data BPS (2020) adalah 2.132 kkal/kapita/hari dari target 2.150 kkal/kapita/hari atau persentase kinerja mencapai 98,9%; sedangkan konsumsi protein perkapita kota Cimahi di tahun 2020 adalah 62,1 gram/kapita/hari dari target 57 gram/kapita/hari atau persentase kinerja mencapai 109 persen.

Tabel 2.50.
Pola Pangan Harapan ketersediaan Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Pola Pangan Harapan ketersediaan	96,2	93,4	92,9
Pola Pangan Harapan Konsumsi	82,1	79,1	83,8

Sumber : Dispangtan Kota Cimahi, 2020, diolah

Berdasarkan evaluasi pencapaian skor PPH Konsumsi Kota Cimahi, berdasarkan data 2019 didapatkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,7 poin. Pencapaian target ini perlu dipertahankan dan dioptimalkan hingga tahun 2022 (akhir periode RPJMD) mendatang melalui sinergitas program dan kegiatan pangan dan gizi lintas perangkat daerah mulai dari sektor hulu hingga hilir. Untuk meningkatkan skor PPH Konsumsi maka sasaran program lintas sektoral dengan tujuan akhir perbaikan konsumsi pangan harus diutamakan pada penduduk dengan golongan pengeluaran <Rp 750.000/bulan karena merupakan kelompok rentan dengan jumlah dan mutu konsumsi yang masih rendah.

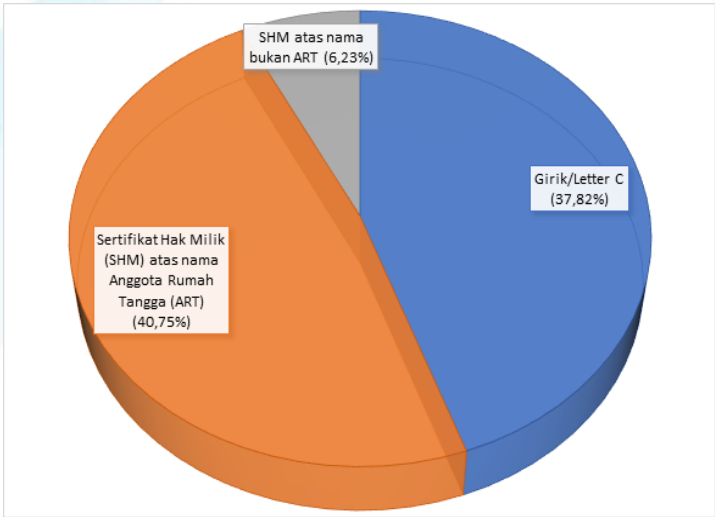
10. Pertanian

Sejak Kota Cimahi berdiri tahun 2001 aset tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung ke Pemerintah Kota Cimahi di

tambah dari hasil pembelian tanah berjumlah 259 bidang yang tersebar di 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Pada tahun 2015 dari 259 bidang tanah semuanya telah dinilai dan yang baru tersertifikasi mencapai 137 bidang tanah dan sisanya yang berjumlah 122 bidang tanah dalam proses sertifikasi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum direncanakan akan dilaksanakan pembelian tanah untuk kepentingan umum dalam lima tahun ke depan. Permasalahan yang timbul adalah keterbatasan lahan wilayah Kota Cimahi sehingga untuk pembelian lahan terutama dengan luasan yang besar sulit untuk terealisasi ditambah lagi dengan faktor lain seperti harga tanah, kesesuaian dengan tata ruang dan kepemilikan lahan yang sering terjadi sengketa antar beberapa pihak.

Gambar 2.40.
Persentase Rumah Tangga dirinci Menurut Status Kepemilikan Lahan Tahun 2019



Sumber : Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, BPS

Mayoritas rumah tangga memiliki lahan dengan SHM atas nama ART (49%), meskipun demikian terkait dengan kepemilikan masih ada 8% rumah tangga yang tidak memiliki status atas kepemilikan lahan dan 32% dengan surat bukti lainnya (girik, leter c).



Kepemilikan status atas lahan ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan bidang pertanahan.

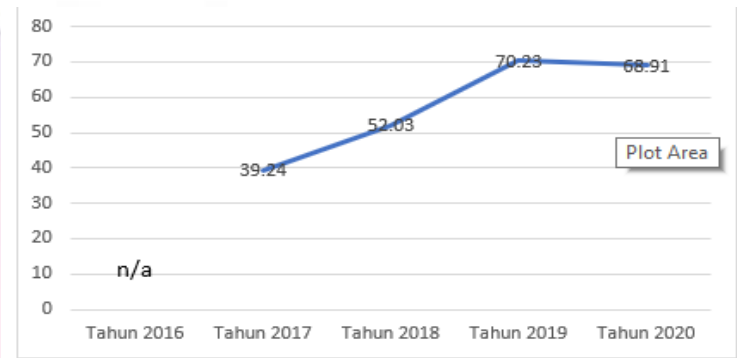
11. Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan di Kota Cimahi terjadi pada lingkungan air dan udara. Pencemaran air ditunjukkan dengan menurunnya kualitas lingkungan air sungai yang di sampling yaitu di Sungai Cisangkan, Sungai Cimahi, Sungai Cibaligo, Sungai Cilember dan Sungai Cibeureum. Secara umum kualitas air di lima sungai menunjukkan besarnya pengaruh kegiatan manusia, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan industri dan rumah tangga. Kota Cimahi termasuk ke dalam zona kritis muka air tanah yang dikategorikan ke zona merah oleh Provinsi Jawa Barat sehingga dibutuhkan program pemulihan air baku, antara lain dengan program biopori dan sumur resapan.

a. Indeks Kualitas Udara

Pada tahun 2016, Indeks Kualitas Udara belum dihitung sehingga data belum tersedia. Berdasarkan data tahun 2017-2019, Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 mencapai 39,24 poin dan pada tahun 2019 naik menjadi 70,23 poin. Namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan walaupun semua parameter uji masih memenuhi baku mutu. Pada Tahun 2020 turun menjadi 68,91 poin. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.41.
Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi Tahun 2016 - 2020

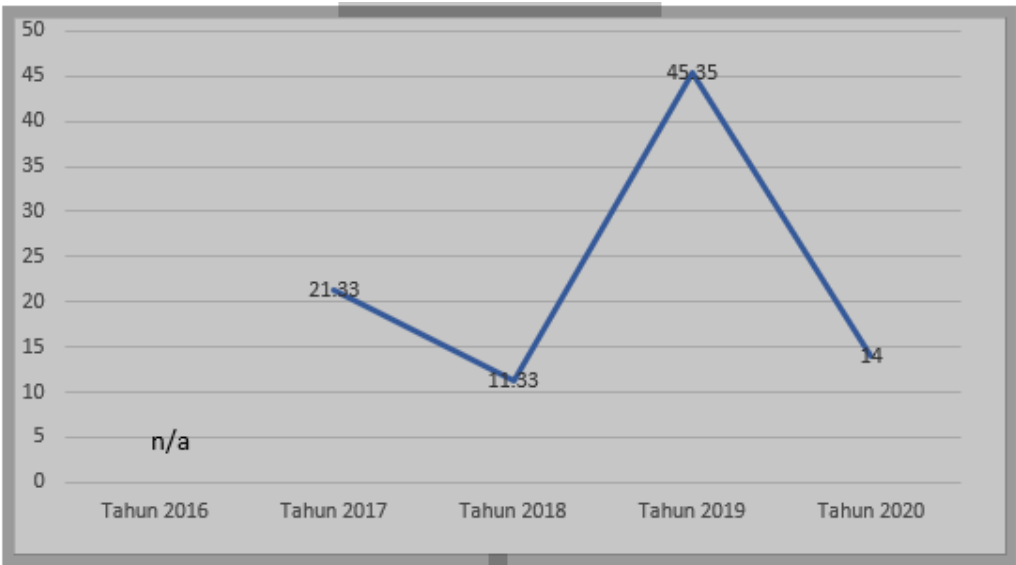


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2021

b. Indeks Kualitas Air

Untuk Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 38,8 poin dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 11,33 poin, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 45,35 poin. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.42.
Indeks Kualitas Air Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2021

c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Cimahi pada tahun 2016 juga belum dihitung karena dasar perhitungannya adalah dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan. Pada tahun 2017 IKLH mencapai 31,83 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 46,80. Pada tahun 2020 IKLH mengalami penurunan menjadi 38,2 yang berarti klasifikasi predikat waspada. Hal ini berkaitan dengan hasil pemantauan kualitas air di lima sungai Kota Cimahi yang diuji kualitas airnya, hasilnya tercemar berat akibat limbah domestik yang belum terkelola dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.51.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Cimahi

Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	n/a	31,83	32,67	46,80	38,2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi 2021

- d. Persentase Ruang Terbuka Hijau
- Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 11,15 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 11,65 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 11,16 persen, hal ini disebabkan terjadinya alih fungsi lahan yang semula terbuka menjadi bangunan maupun areal tertutup lainnya.
- Ruang terbuka hijau di Kota Cimahi diarahkan pada pencapaian target pemenuhan luasan ruang terbuka hijau 20 persen RTH publik dari luas wilayah kota. Hasil identifikasi RTH tahun 2020 RTH yang dimiliki seluas 40,89 ha atau 0,96 persen dari luas kota, lebih kecil dari hitungan tahun 2019 yaitu sebesar 11,16 persen. Hal ini disebabkan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan RTRW bahwa sempadan sungai dan sempadan jalan yang semula dihitung sebagai RTH menjadi tidak masuk dalam hitungan RTH.

Tabel 2.52.

Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Ruang Terbuka Hijau	n/a	11,15	11,65	11,16	0,96

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi 2021

e. Persentase Pengelolaan Sampah

Untuk pengelolaan sampah di Kota Cimahi secara umum sudah dikategorikan baik, melalui program pengurangan dan penanganan sampah, karena sistem pengelolaan yang dilakukan tidak hanya mengandalkan pembuangan ke TPA, namun pengelolaan sampah melalui 3R, komposting dan pembuatan biogas. Dari data yang tersedia diketahui bahwa persentase pengelolaan sampah di Kota Cimahi dari tahun 2017 sebesar 87 persen terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 97,61 persen. Hal ini didukung dengan program pengelolaan sampah di hulu atau sumber dan pengelolaan sampah di hilir secara terpadu.

Tabel 2.53.
Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pengelolaan Sampah	n/a	87	95	96,06	97,61

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi 2021

12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki dokumen Kependudukan sebagai bukti keberadaan dan identitas penduduk yang bersangkutan dan diakui secara legal oleh negara. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial bidang kependudukan kepada masyarakat. Kartu Keluarga merupakan kartu identitas yang menunjukkan hubungan kekerabatan dalam keluarga dan yang dimaksud dengan keluarga disini tidak selalu identik dengan rumah atau tempat tinggal, dalam satu rumah bisa terdiri dari lebih satu Kepala Keluarga.

Tabel 2.54.

Kepala Keluarga Di Kota Cimahi yang Belum dan Sudah Memiliki Kartu Keluarga SIAK Tahun 2020

Kelurahan/ Kecamatan	Belum Memiliki KK SIAK	Sudah Memiliki KK SIAK	Jumlah Total
MELONG	4.515	15.885	20.400
CIBEUREUM	4.911	14.471	19.382
UTAMA	2.376	8.884	11.260
LEUWIGAJAH	3.081	11.478	14.559
CIBEBER	2.042	7.216	9.258
Cimahi Selatan	16.925	57.934	74.859
BAROS	1.729	5.341	7.070
CIGUGUR TENGAH	4.170	10.858	15.028
KARANGMEKAR	1.427	3.967	5.394
SETIAMANAH	2.113	5.431	7.544
PADASUKA	3.366	9.549	12.915
CIMAHI	1.163	3.244	4.407
Cimahi Tengah	13.968	38.390	52.358
PASIRKALIKI	1.207	4.724	5.931
CIBABAT	3.836	13.402	17.238
CITEUREUP	2.930	9.832	12.762
CIPAGERAN	3.311	12.375	15.686
Cimahi Utara	11.284	40.333	51.617
KOTA CIMAHI	42.177	136.657	178.834
PERSENTASE	23,58	76,42	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, 2021

Tabel 2.55.

Jumlah Penduduk dan Wajib KTP Di Kota Cimahi Tahun 2020

Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Penduduk	Wajib KTP
MELONG	64.328	47.009



Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Penduduk	Wajib KTP
CIBEUREUM	60.889	43.847
UTAMA	34.138	24.352
LEUWIGAJAH	45.673	33.207
CIBEBER	28.822	20.823
Cimahi Selatan	233.850	169.238
BAROS	20.609	15.389
CIGUGUR TENGAH	47.067	33.886
KARANGMEKAR	16.362	12.208
SETIAMANAH	23.404	17.019
PADASUKA	40.232	28.988
CIMAHI	13.232	9.736
Cimahi Tengah	160.906	117.226
PASIRKALIKI	18.601	13.806
CIBABAT	54.414	39.611
CITEUREUP	40.121	29.121
CIPAGERAN	50.019	36.446
Cimahi Utara	163.155	118.984
KOTA CIMAHI	557.911	405.448
Persentase		72,67

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, 2021

Tabel 2.56.
Kepemilikan Akte Kelahiran Penduduk kota Cimahi Tahun 2020

Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Penduduk	Yang Memiliki Akte Kelahiran	%
MELONG	64.328	27.760	43,15
CIBEUREUM	60.889	26.027	42,74
UTAMA	34.138	14.280	41,83
LEUWIGAJAH	45.673	22.518	49,3
CIBEBER	28.822	15.392	53,4
Cimahi Selatan	233.850	105.977	45,32



Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Penduduk	Yang Memiliki Akte Kelahiran	%
BAROS	20.609	10.785	52,33
CIGUGUR TENGAH	47.067	24.203	51,42
KARANGMEKAR	16.362	8.792	53,73
SETIAMANAH	23.404	12.486	53,35
PADASUKA	40.232	21.309	52,97
CIMAHI	13.232	7.153	54,06
Cimahi Tengah	160.906	84.728	52,66
PASIRKALIKI	18.601	8.631	46,4
CIBABAT	54.414	25.909	47,61
CITEUREUP	40.121	19.323	48,16
CIPAGERAN	50.019	24.221	48,42
Cimahi Utara	163.155	78.084	47,86
KOTA CIMAHI	557.911	268.789	48,18

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, 2021

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan keberdayaan masyarakat dilakukan melalui optimalisasi institusi/organisasi masyarakat di tingkat kelurahan seperti LPM, PKK, Posyandu, serta melalui sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, pengelolaan kebersihan lingkungan dan kegiatan EKPM serta lomba-lomba. Setiap kelurahan di Kota Cimahi memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Berikut ini gambaran tentang keberdayaan masyarakat Kota Cimahi :

Tabel 2.57.
Jumlah Lembaga dan Kader Pembangunan di Kota Cimahi
Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	LPM	19	19	19	19	19
2.	PKK	19	19	19	19	19
3.	Posyandu	398	402	403	402	405
4.	Kader Pembangunan (tulisan warna merah sedang dikonfirmasi ulang ke p3e)	325	325	325	325	325
5.	Swadaya masyarakat dalam pembangunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

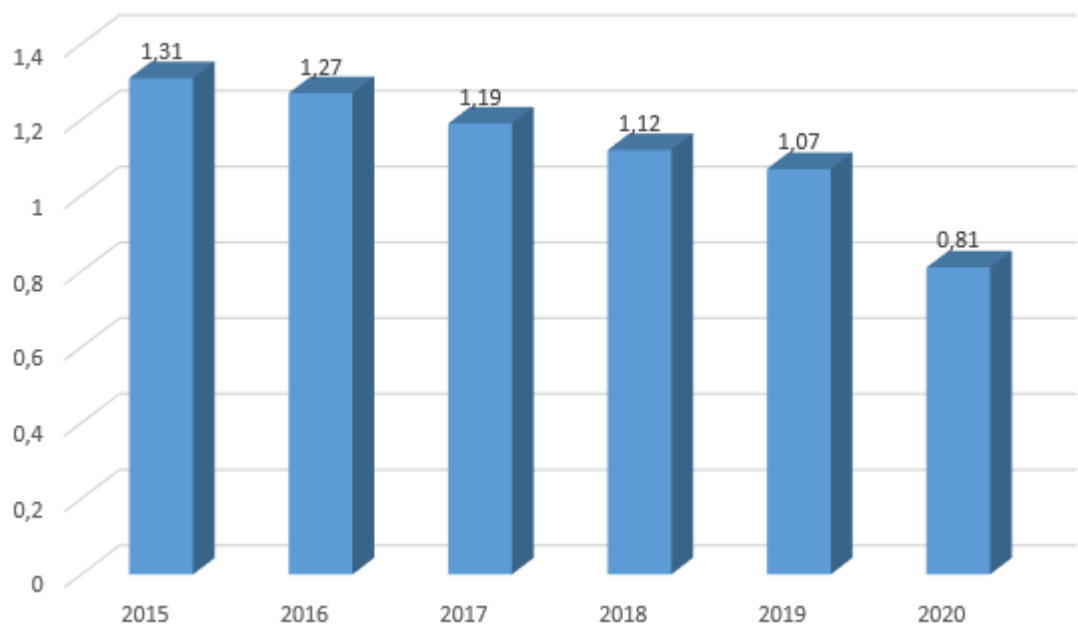
Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2020

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai sejak tahun 2004 silam serta terus dilakukan upaya-upaya untuk mendorong agar partisipasi dan gotong royong masyarakat terus tumbuh berkembang sehingga masyarakat akan ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu untuk efektifitas dan efisiensi pembangunan di dorong dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pengawasan. Dukungan Pemerintah Kota Cimahi dalam pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan baiknya kondisi kantor kelurahan dan kecamatan. Semua kantor tersebut pada saat ini dalam kondisi baru terbangun beberapa tahun dan dapat digunakan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi pada tahun 2019 adalah sebesar 1,07 persen, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2015 yang angkanya sebesar 1.31. Laju Pertumbuhan

Penduduk Kota Cimahi pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.43.
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020, diolah

Seperti yang telah disampaikan pada data halaman sebelumnya pada gambar grafik 2.43, maka Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2020 berada di angka 0,81 persen. Hal ini mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya sebesar 1,07 pada tahun 2019.

Tren penurunan laju pertumbuhan pendudukan dapat merupakan kontribusi dari keberhasilan program Keluarga Berencana. Angka Cakupan Peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS.

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi

tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

Tabel 2.58.
Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif Kota Cimahi
Tahun 2017-2020

Capaian Peserta KB	2017	2018	2019	2020
KB Baru	5434 / 63,53%	4328 / 47,02%	3123/35,57%	3249/37,01%
KB Aktif	73.209/78,51%	72.491/78,98%	72.897/78,89%	74290/79,06%

Sumber : Profil Kesehatan 2017, diolah

Berdasarkan gambar 2.43 diatas, maka jumlah Peserta KB baru dan KB aktif tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah peserta KB Baru mencapai 9,7% dan mengalami kenaikan pada pada tahun 2016 menjadi 10,3%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 5,8%. Selanjutnya, untuk peserta KB Aktif tahun 2015 mencapai 77,7% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 78,2, namun pada tahun 2017 turun kembali hingga menjadi 75,9%. Sedangkan pada tahun 2018 untuk KB baru turun menjadi 47,02% dan KB aktif naik menjadi 78.98%. sedangkan pada tahun 2019 KB Baru turun lagi lebih rendah menjadi 35,57% dan untuk KB Aktif pada 78,89%, relatif stabil pada angka 78 an. Tahun 2020 peserta KB Baru mengalami peningkatan atau kenaikan menjadi 3.249 peserta atau 37,01% dan pada KB Aktif menjadi 74.290 atau 79,06%.

Sebagian besar peserta KB baru maupun KB aktif memilih suntikan dan IUD sebagai alat kontrasepsi. Kedua jenis alat kontrasepsi ini dianggap mudah diperoleh dan digunakan oleh pasangan usia subur. Namun demikian perlu diperhatikan tingkat efektivitas suntikan dan IUD dalam pengendalian kehamilan dibandingkan jenis kontrasepsi lainnya.

Untuk Rasio Akseptor KB Mandiri dan Rasio Akseptor KB pada tahun 2017-2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.59.
Rasio Akseptor KB mandiri dan Rasio Akseptor KB
di Kota Cimahi Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Rasio Akseptor KB mandiri	80	82	79,92	80%
Rasio Akseptor KB	78,51	78,99	78,89	79,06%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio Akseptor KB mandiri di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 80 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 82 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 79,92 persen. Pada Tahun 2020 terdapat kenaikan menjadi 80% untuk Rasio Akseptor KB Mandiri dan 79,06% untuk Rasio Akseptor KB.

15. Perhubungan

a. Persentase Angkutan Yang Layak Jalan

Dalam rangka memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dengan akreditasi B, dan menerima pelayanan pemeriksaan kendaraan (uji KIR) baik kendaraan berdomisili di Kota Cimahi dan kendaraan yang berdomisili di luar wilayah Kota Cimahi. Adapun kondisi Persentase Angkutan yang Layak jalan di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 65 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 100 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 53 persen. Ini menunjukkan bahwa target angkutan yang seharusnya

melakukan KIR pada tahun 2019 tidak tercapai. Pada tahun 2020 telah tercapai 83,24 persen. Hal tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.60.
Persentase Angkutan Yang Layak Jalan di Kota Cimahi
Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase Angkutan Yang Layak Jalan	65	100	53	83,24

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah

- b. Persentase Jaringan Jalan Yang Terlayani Angkutan Umum
- Saat ini, di Kota Cimahi terdapat 3 (tiga) trayek angkutan umum, yaitu terdiri dari trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), trayek perbatasan, dan trayek lokal dalam kota, pada tahun 2019 telah dilakukan pengembangan trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, yaitu berupa penambahan trayek baru untuk mengakomodir wilayah yang belum dilalui oleh angkutan umum. Pemerintah Daerah Kota Cimahi menambahkan trayek baru dengan rute yang dilalui yakni Citeureup - Jalan Sangkuriang - Encep Kartawiria - Kamarung - Permana Barat - Permana Timur, Sukarasa, Ciawitali - Demang Hardjakusuma - Daeng Ardiwinata - Jati - Pesantren - Amir Mahmud - Mahar Martanegara - dan Terminal Cimindi. Penambahan rute ini akan diperlukan pengadaan armada, namun tanpa menambah jumlah armada yang sudah ada di Kota Cimahi. Armada yang ada di distribusikan guna mengakomodir rute baru terdiri dari 3 (tiga) trayek yang sudah ada yaitu trayek Cimindi-Pasar Antri, Cibeber-Pasar Antri via Contong dan Cibeber-Pasar Antri via Leuwigajah. Trayek baru selanjutnya adalah trayek yang menghubungkan Terminal Pasar Antri ke Pasar Atas melalui Padasuka dengan rute jalan Amir Mahmud berdasarkan *flyover* Padasuka.

Berdasarkan data, diketahui bahwa persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 angkanya mencapai 56 persen, tahun 2018 mencapai 46,92 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 78,09 persen, dan pada tahun 2020 angka tersebut tidak akan bertambah/sama dengan angka 2019, seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.61.
**Persentase Jaringan Jalan Yang Terlayani Angkutan Umum
di Kota Cimahi Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase Jaringan Jalan Yang Terlayani Angkutan Umum	56	46,92	78,09	78,09

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah

- c. Persentase penurunan titik kemacetan
- Adapun penurunan titik kemacetan yang ada di Kota Cimahi dari tahun 2017 sebanyak 15 titik kemacetan, dan secara bertahap sampai dengan tahun 2020 telah tertangani 9 titik kemacetan, sebagaimana dijelaskan dalam gambar dan tabel berikut ini :

Tabel 2.62.
**Persentase penurunan titik kemacetan di Kota Cimahi
Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase penurunan titik kemacetan	55	100	20	13,33

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah



d. Persentase Fasilitas Lalu Lintas Yang Layak

Melalui strategi meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan penyediaan fasilitas lalu lintas yang layak, seperti : Penerangan Jalan Umum (PJU), rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, adalah dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak dan melalui pengadaan/ pembangunan baru. melalui kebijakan tersebut diharapkan ketersediaan fasilitas lalu lintas yang layak dapat menekan tingkat kecelakaan di sektor transportasi. Namun, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas lalu lintas tersebut masih terkendala oleh terbatasnya kemampuan pembiayaan Pemerintah. Kondisi fasilitas lalu lintas di Kota Cimahi, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.63.
Persentase fasilitas lalu lintas yang layak di Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	65	100	71,40	76,92

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah

16. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan komunikasi dan informasi diterapkan pada jaringan dan Sistem Informasi pada beberapa Perangkat Daerah, yaitu pembangunan jaringan komunikasi informasi berbasis internet, pembangunan SIAK untuk pelayanan kependudukan, pembangunan jaringan SIK di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta pembangunan Baros *Information Technology Creative* (BITC) sebagai sentral pengembangan pengelolaan kawasan klaster industri telematika. Pembangunan sistem informasi ditingkatkan dan diperluas, serta diarahkan pada pengembangan dan

penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi berbasis IT, diantaranya melalui kegiatan pengembangan dan operasi *website* www.cimahikota.go.id, pesan penduduk (*pesduk*), siaran radio, televisi, jumpa pers, *release* berita, serta pembangunan *technopark*. Pemerintah Kota Cimahi telah mengembangkan *e-Government* Kota Cimahi yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Pembangunan Infrastruktur Jaringan yang menghubungkan seluruh SOPD baik di lingkungan Internal Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun SOPD yang ada di luar Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi (DPRD, RSUD Cibabat, 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan serta pembuatan Aplikasi-*Government* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota meliputi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIMM) Pelayanan Publik dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan antara lain :

- a. SIM PPTSP (Pelayanan Publik bidang Perizinan);
- b. SIM Kelurahan (Pelayanan Publik di Kelurahan);
- c. SIM Puskesmas (Pelayanan Publik di Puskesmas);
- d. SIM-RS Cibabat (Pelayanan Publik di RS. Cibabat);
- e. SIM PKB (Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor);
- f. SIMPada (Pelayanan Publik di bidang Pendapatan Daerah);
- g. SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- h. SIM Perpustakaan/ *e-Library* (Pelayanan Perpustakaan);
- i. SIM Kearsipan / *e-Arsip* (Pelayanan di bidang Kearsipan);
- j. *Website* www.cimahikota.go.id;
- k. SIM PESDUK (Pesan Singkat Penduduk) melalui SMS ke 081221700800;
- l. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah);
- m. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);
- n. BPHTB online SAPK JDIH (Jaringan dan Informasi Hukum) bisa diakses melalui <http://jdih.cimahikota.go.id>;
- o. E-reporting E-PAD SIM PENDIDIKAN;
- p. SIMRENDAL (Sistem Perencanaan Daerah);

- q. Simpus;
- r. PMKS;
- s. Sirup;
- t. Sipinter;
- u. UPT Pasar;
- v. *Open Data*; dan
- w. *Smart City*.

Pembangunan Aplikasi SIM terintegrasi dan Integrasi Database diantaranya :

- a. SIM terintegrasi/Portal Kota Cimahi yang dapat diakses melalui <http://portal.cimahikota.go.id>;
- b. Data *warehouse* SIM Terintegrasi (Data Kependudukan, Data Kepegawaian, Data Siswa, Data Rumah Tangga Sasaran, Data Kesehatan, Data Kependidikan, dll); dan
- c. Aplikasi *Executive Dashboard* (<http://dashboard.cimahikota.go.id> yang merupakan Aplikasi untuk menyajikan informasi berupa analisis dari SIM terintegrasi yang ditujukan untuk Pemangku Kepentingan.

17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Jumlah Koperasi di Kota Cimahi pada periode tahun 2016 – 2019 terus mengalami penurunan dari 420 koperasi menjadi 259 koperasi dan mengalami sedikit penambahan di Tahun 2020 sebanyak 3 koperasi. Hal ini disebabkan adanya koperasi-koperasi yang dibubarkan karena dinilai sudah tidak sehat dan tidak aktif. Yang dimaksud dengan koperasi aktif adalah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan

RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Sedangkan yang dimaksud dengan koperasi sehat adalah koperasi yang selalu mengadakan RAT tepat waktu.

Berdasarkan kriteria di atas, jumlah koperasi aktif di Kota Cimahi pada periode tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan dari 80 koperasi aktif di tahun 2016 menjadi 105 koperasi di tahun 2019, akan tetapi jumlahnya turun drastis ke angka 70 koperasi di tahun 2020. Untuk jumlah koperasi sehat di Kota Cimahi periode tahun 2016 - 2019 menunjukkan kecenderungan meningkat walaupun tidak dalam jumlah banyak, tetapi menurun juga di tahun 2020. Sehingga hanya 11 koperasi saja yang tergolong dalam koperasi sehat di tahun 2020.

Beberapa indikator yang berkaitan dengan koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.64.
Indikator Bidang Koperasi Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Koperasi	420	340	317	259	262
2.	Koperasi Yang melaksanakan RAT (Koperasi Aktif)	76	89	103	105	70
3.	Koperasi Sehat	30	33	36	40	11
4.	Total Anggota Koperasi	46.103	50.137	43.909	51.402	52.740
5.	Modal Sendiri	98.952.391.356	104.790.668.344	190.821.281.867	190.293.684.179	216.854.093.652
6.	Modal Luar	26.594.970.972	106.725.450.190	133.131.698.017	141.490.036.366	148.308.833.901
7.	Jumlah Aset	186.868.181.856	269.618.733.813	308.973.217.173	331.660.159.344	365.034.221.903
8.	Volume Usaha	160.832.260.343	232.233.875.528	223.626.012.002	196.750.706.437	223.156.932.580
9.	Sisa Hasil Usaha (SHU)	14.552.991.625	18.734.009.256	17.422.475.171	18.480.542.645	19.815.193.565

Sumber : Disdagkoperin Kota Cimahi, 2021, diolah

b. Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pengembangan UMKM ini kedepannya akan dilakukan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Klaster dan Sentra Bisnis. Dari data Sensus Ekonomi tahun 2015 terdapat potensi 4 (empat) klaster industri unggulan di Kota Cimahi yaitu :

- a. Klaster industri makanan dan minuman;
- b. Klaster industri tekstil dan produk tekstil;
- c. Klaster industri kerajinan; dan
- d. Klaster industri telematika.

Sebagai strategi dari pengembangan klaster-klaster tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra UKM yang diharapkan dapat menghasilkan produk-produk unggulan di Kota Cimahi. Sentra-sentra UMKM ini merupakan prasyarat dikembangkannya klaster-klaster dengan mengintegrasikan aktivitas hulu-hilir. Diharapkan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) ini akan mampu mendongkrak usaha masyarakat dan mampu menjadi pusat pengembangan produk-produk unggulan tiap wilayah di Kota Cimahi.

Selanjutnya, untuk jumlah WUB (Wirausaha Usaha Baru) di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 15 WUB dan pada tahun 2018 menurun menjadi 2 WUB.

18. Penanaman Modal

Sektor usaha dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Cimahi adalah Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, informasi dan

komunikasi serta transportasi dan pergudangan. Sektor-sektor tersebut berpotensi untuk meningkatkan investasi di Kota Cimahi. Berdasarkan data yang tersedia diketahui bahwa Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai Rp. 8.953.319.609.542, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi Rp. 24.410.560.302.066. hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.65.
Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi
Tahun 2017 - 2020 (Miliar Rp)

Indikator	2017	2018	2019	2020
Realisasi Investasi (PMA/PMDN) (Miliar Rp)	Rp.8.953,32	Rp.9.744,43	Rp.24.410,56	Rp 5.785,63

Sumber : DPMPTSP Kota Cimahi, 2020, diolah

Adapun Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) pada tahun 2017 yaitu sebesar 125 perusahaan, dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 185 perusahaan. Sedangkan Jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan pada tahun 2017 yaitu 2 Jenis, jumlah ini meningkat di tahun 2020 menjadi 4 jenis. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.66.
Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM di Kota Cimahi dan
Jumlah Jenis Izin yang Dapat Dilayani Sesuai Standar Pelayanan
Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	125	178	141	185
Jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	2	2	3	4

Sumber : DPMPTSP Kota Cimahi, 2020, diolah

Diharapkan pelayanan izin usaha akan menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan pelayanan terintegrasi di MPP (Mall Pelayanan Publik) dengan menggunakan sistem informasi yang baik sehingga bisa lebih cepat dan meminimalkan interaksi langsung dengan pemohon perizinan.

19. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, serta mempererat persatuan dan kesatuan.

Perkembangan aktivitas kepemudaan dan olahraga di Kota Cimahi hingga saat ini cukup dinamis. Namun jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan, namun dari 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan walaupun cuma 1% (dengan catatan data 2019 dan 2020 menggunakan persentase). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.67.
Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan di Kota Cimahi
Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan	200	50	10%	11%

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2019, diolah

Terkait dengan urusan kepemudaan, antusiasme kepemudaan di Kota Cimahi cukup baik, hal ini dapat dilihat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase Organisasi Kepemudaan yang

aktif yaitu sekitar 60 persen pada tahun 2020, yang semula hanya 50 persen di tahun 2017.

Tabel 2.68.
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif di Kota Cimahi
Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	50	52	55	60

Sumber : *Disbudparpora Kota Cimahi, 2020, diolah*

20. Statistik

Untuk penyediaan data statistik dasar Bappeda Kota Cimahi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi seperti penyediaan dan penyusunan data dan indikator pembangunan, seperti dalam bentuk Kota Cimahi Dalam Angka (KCDA), Profil Pemerintahan Kota Cimahi, dan penyusunan Indikator Ekonomi Daerah dalam bentuk dokumen PDRB Kota Cimahi, survey dan analisis IPM dan dokumen lainnya. Selain penyusunan dokumen data statistik daerah, pelaksanaan urusan statistik sektoral dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah dengan melakukan pengambilan data lapangan seperti pengambilan data sekunder yang bersumber dari perangkat daerah Kota Cimahi.

Penyediaan data statistik pun semakin sempurna dengan adanya sistem data dan statistik terintegrasi yang dapat diakses pada link <https://data.cimahikota.go.id/>.

21. Persandian

Keamanan Sistem Informasi sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam menjamin ketepatan dan keakuratan penyampaian informasi. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, *online*, dan *real time*, SIPD menjadi penting karena merupakan media akuntabilitas publik yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam

mengevaluasi kinerja, program pembangunan, serta mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Hingga saat ini, 60 % Perangkat Daerah (17 dari 28) telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi antar Perangkat Daerah di Kota Cimahi.

22. Kebudayaan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan. Upaya tersebut telah menghasilkan adanya komunitas adat di Cipageran dan Kampung Hukum Adat Cireundeu sehingga Kota Cimahi memiliki keberagaman budaya dan kearifan lokal. Kehidupan Kampung Hukum Adat Cireundeu memegang teguh budaya leluhur seperti pola konsumsi pangan non beras (singkong) dan mengedepankan pelestarian lingkungan.

Kampung Hukum Adat Cireundeu secara rutin menyelenggarakan acara adat Seren Taun (Tutup Tahun) sebagai penanda pergantian tahun Saka Sunda. Acara itu digelar sebagai bentuk syukur atas segala karunia yang didapat selama setahun. Seren Taun Cireundeu telah diakui sebagai salah satu warisan budaya non benda.

Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik diantaranya menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengapresiasi karya seninya. Hal ini timbul karena keterbatasan lahan dalam pembangunan gedung kesenian dimaksud. Pengembangan budaya lokal (tradisional) berupa kesenian/tarian dan sastra dapat menjadi potensi wisata di Kota Cimahi.

Pengembangan kebudayaan masih belum optimal seperti masih perlu ditindaklanjuti penggalian nilai-nilai sejarah dan arsitektur pada bangunan-bangunan bersejarah (*heritage*) di Kota Cimahi untuk mendukung Cimahi sebagai kota wisata sejarah (*heritage*) dan wisata kesehatan.

Potensi budaya yang ada bisa dikembangkan melalui berbagai upaya baik penggalian potensi alam, nilai-nilai kesenian maupun sarana-prasarana yang perlu disiapkan sehingga diharapkan pelaku-pelaku

budaya dan kesenian dapat mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

Tabel 2.69.
Data Cagar Budaya di Kota Cimahi yang Menjadi Target Hingga
ahun 2022

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI	STATUS
1.	PO2020100600001	SDN Baros Mandiri 4	Jl. Baros no.6 Rt.01 Rw.15	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
2.	PO2020091700001	SDN Karang Mekar Mandiri 1	Jl. Jend. Amir Mahmud no 505	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
3.	PO2020091600004	Makam Embah Nurkarim	Jl. Cigugur Tengah Rt02 Rw05	Situs	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
4.	PO2020090400001	Makam Mbah Tumpang	Jln. Gandawijaya	Situs	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
5.	PO2020090300003	Hotel Tjimahi	Jl. Jend. H. Amir Machmud No.465	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
6.	PO2020090300002	Pesawat Dakota C-47 Cimahi	Jln gatot subroto no. 6	Benda	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
7.	PO2020072700003	Rumah Petinggi Belanda No 11	jln. Sriwijaya No. 11	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
8.	PO2020072700002	Kolam Renang Katak Riang (Tirta Yudha)	jln. Pasir kumeli No. 39	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
9.	PO2020072700001	SMP Negeri 1 Cimahi	Jalan Raden Embang Artawidjaja No. 12	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
10.	PO2020072400002	SMP Negeri 2 Cimahi	jalan Sudirman no. 152	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI	STATUS
11.	PO2020071500001	Gereja Imanuel	jalan pasir kumeli 149 A	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
12.	PO2020071300003	Rumah Kediaman Amir Machmud	Jalan Ibu Sangki RT 3 Rw 13	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
13.	PO2019111100001	EREVELD LEUWIGAJAH (Makam Kehormatan Belanda)	Jl. Kerkhof Gang Kurba Miharja Leuwigajah	Situs	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
14.	PO2019082100014	Rumah Van Blommestein/ Gedung Anom/ rumah Kebon Kopi Cibeureum	Jl. Jend. H. Amir Machmud No.89	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
15.	PO2019082100008	Masjid Agung Tjimahi	Jl. Kaum No. 2	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
16.	PO2019053100011	Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cimahi / Abattoir	Jalan Sukimun, RT 03 RW 04	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
17.	PO2019053100010	Masjid Masjid Baiturrokhmah (Masjid KH.Usman Dhomiri)	jalan KH. Rd. Usman Dhomiri No. 133 RT.04 RW 08	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
18.	PO2019052900058	Loji (Pos Penjagaan) Cimahi	Jl. Alun - alun Timur No. 634	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
19.	PO2019041600003	Kolam Renang Berkleus	Jl. Sukimun RT 1 RW 4	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
20.	PO2019041500002	GEDUNG RIO X.Nter (Eks Bioskop Rio)	Jl. Pabrik Aci	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
21.	PO2019041100822	Stasiun Tjimahi (Stasiun Kereta Api Cimahi)	Jl. Stasiun No. 1	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
22.	PO2019041100637	Penjara Militer Poncol (MASMIL)	Jl. Poncol Selatan No. 24	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI	STATUS
23.	PO2019041100482	Gereja Santo Ignatius Cimahi	Jl. Raya Baros No. 8	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
24.	PO2019041000016	Gedung The Historich X' Gedung Sudirman	Jl. Gatot Subroto No. 19 Baros	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
25.	PO2015061200050	Rumah Sakit Dustira	Jl. dr. Dustira No.1	Bangunan	TELAH TER VERIFIKASI OLEH SISTEM REGISTER NASIONAL
26.	0	Gardu Listrik Taman Kartini	Jl. Baros Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah	Bangunan	belum terverifikasi
27.	0	Menara Air RS Dustira	R.S Dustira Jl. Ahmad Yani / Jl. Dustira Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah	Bangunan	belum terverifikasi
28.	0	Rumah Dinas RS Dustira	Jl. Urip Sumohardjo Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah	Bangunan	belum terverifikasi
29.	0	Ruko Toko Djohor	Jl. Jend. H Amir Machmud Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah	Bangunan	belum terverifikasi
30.	0	Gedung Pertemuan Soegijapranata	Jl. Raya Baros Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah	Bangunan	belum terverifikasi
31.	0	Pusdik Gumil & Tih Pangmilum	Jl. Gatot Subroto Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah	Bangunan	belum terverifikasi
32.	0	Pura Agung Wira Loka Natha	Jl. Sriwijaya Raya Blok D.11 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah	Bangunan	belum terverifikasi
33.	0	Pusat Perniagaan Pecinan Lama Pasar Atas	Jl. Pasar Atas / H Djulaeha Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah	Bangunan	belum terverifikasi
34.	0	Pusdik Bekang	Jl. Gatot Subroto Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah	Bangunan	belum terverifikasi
35.	0	Korem 062 Tarumanegara / KODIM 0609	Jl. Gatot Subroto Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah	Bangunan	belum terverifikasi

23. Perpustakaan

Perpustakaan Daerah Kota Cimahi sebagai pembina perpustakaan yang ada di Cimahi, baik perpustakaan umum maupun perpustakaan khusus. Pemerintah Daerah Kota Cimahi terus mengupayakan peningkatan minat baca dan pelayanan perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling 2 (dua) unit, 1

(satu) Perpustakaan Umum Daerah dan sudut baca tersebar di kelurahan. Sejak tahun 2014 Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Cimahi beroperasi dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan pemustaka secara signifikan.

Pada tahun 2020, perpustakaan di Kota Cimahi dikunjungi sebanyak 10.249 orang, dimana jumlah judul buku yang tersedia sebanyak 15.193 judul buku dan jumlah buku yang tersedia sebanyak 27.443 buku, yang tersebar di 281 perpustakaan yang disiapkan untuk melayani semua warga Kota Cimahi yang berjumlah 557,911 orang.

Secara umum dalam pelaksanaan pemberian pelayanan terdapat beberapa kendala antara lain adalah adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dibidang perpustakaan, sarana prasarana yang memadai baik yang berupa bahan bacaan maupun ruang layanan yang ada. Pada tahun 2018 Perpustakaan Umum Daerah Kota Cimahi telah mengembangkan melalui pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (*e-library*), yang sangat berguna dalam pelayanan di saat pandemi covid 19 melanda Indonesia pada sekitar Bulan Maret 2020.

24. Kearsipan

Pembangunan pengelolaan pengelolaan arsip di setiap organisasi perangkat daerah akan menjadi sumber informasi bagi para pengambil kebijakan. Untuk mewujudkan pendayagunaan arsip secara efektif dan efisien, diantaranya adalah pengadaan sarana dan prasarana terutama untuk pengadaan depo arsip, penyusunan pedoman kearsipan berupa jadwal retensi arsip di setiap Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk melakukan penyusutan arsip sehingga perkembangan fisik dan informasi arsip yang dihasilkan dapat dikendalikan, peningkatan pemahaman dan pengetahuan tata kearsipan termasuk tentang penyusunan jadwal retensi arsip. Kondisi pada tahun 2019, baru 50 % Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tata kearsipan terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia di

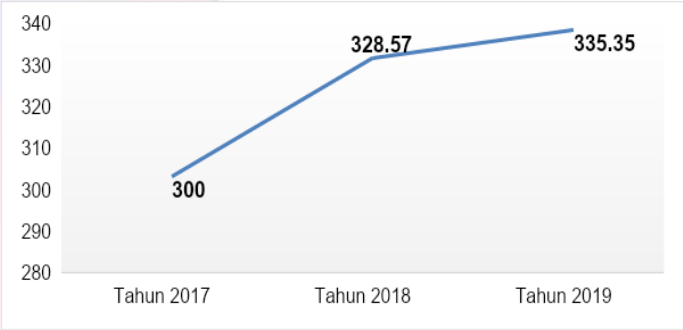
bidang kearsipan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, masih terbatasnya tenaga profesional di bidang kearsipan; Secara kualitatif, arsiparis yang ada belum memiliki standar profesi yang ideal, serta belum dimilikinya sarana depo arsip yang memadai untuk menampung dokumen dokumen pemerintah daerah. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah telah dilaksanakannya Bimbingan Teknis bagi para pengelola arsip Perangkat Daerah sebanyak 2 kali.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

- 1. Kelautan dan Perikanan
 - a. Sub Sektor Perikanan

Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian di Kota Cimahi sangat kecil. Persoalan tersebut dikarenakan secara topografi wilayah yang bukan daerah pantai serta terbatasnya lahan untuk budidaya ikan konsumsi. Produksi perikanan hanya disumbang dari perairan umum dan budidaya kolam. Jika dibandingkan dengan daerah lain atau di Provinsi Jawa Barat, tingkat produksi perikanan tergolong rendah. Akan tetapi pemerintah Kota Cimahi terus meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi, dimana pada tahun 2017 Jumlah produksi perikanan budidaya baru mencapai 300 ton, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 335,35 ton.

Gambar 2.44.
Produksi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

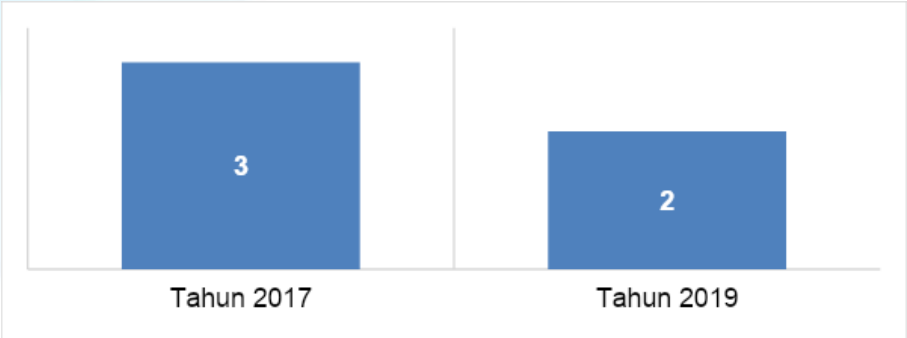


Sumber : Dinas Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020, diolah

Selain perikanan budidaya, di Kota Cimahi juga terdapat potensi usaha perikanan yang memiliki nilai tambah (*added value*) yang besar dan tidak terlalu memakan lahan dan akan cocok bila dikembangkan di wilayah perkotaan yaitu pengembangan ikan hias. Dengan karakteristik wilayah perkotaan dan sangat dekat dengan Ibukota Provinsi maka target pasar ikan hias masih sangat terbuka. Saat ini usaha tersebut sudah mulai dirintis melalui Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) untuk membantu masalah bibit. Akan tetapi strategi tersebut belum optimal karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Kedepan, Kota Cimahi diharapkan dapat mulai melirik usaha ikan hias berbasis kerakyatan berupa sentra ikan hias.

Di Kota Cimahi sendiri pada tahun 2017 baru terdapat 3 jenis ikan hias yang dikembangkan, dan itu juga mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi hanya 2 jenis.

Gambar 2.45.
Jenis Ikan Hias yang dikembangkan di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

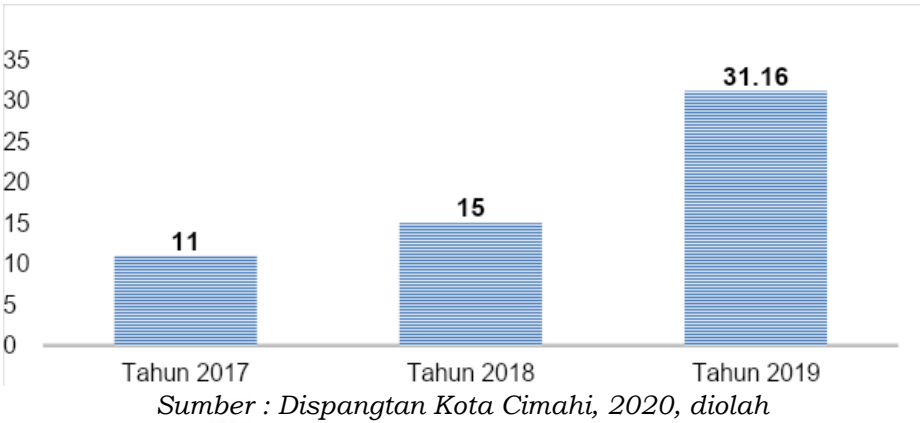


Sumber : Dinas Pertanian Kota Cimahi, 2020, diolah

- b. Konsumsi Ikan
- Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat menjadi alternatif di tengah permasalahan yang dihadapi dalam produksi daging. Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 mencapai 11

Kg/Kap/Thn, dan meningkat di tahun 2019 menjadi 31,16 Kg/Kap/Thn. Adapun data Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2017-2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Gambar 2.46.
Tingkat Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019



2. Pariwisata

Pariwisata di Kota Cimahi di dominasi oleh pariwisata berbasis kreativitas manusia dan budayanya. Sektor pariwisata di Kota Cimahi belum memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian kota. Di Kota Cimahi telah terdapat 3 event tingkat kota bahkan internasional diantaranya *Baros International Animation Festival (BIAF)*, *Gatsoe Street Carnival (GATREEC)*, dan pekan Seren Taun Cireundeu. Event - event ini berpotensi menjadi bangkitan ekonomi lokal dan dapat menjadi wadah ekspresi kreativitas warga Kota Cimahi. Selain itu, Kota Cimahi memiliki 2 bus sakoci yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk tur keliling Kota Cimahi. Meskipun demikian, perlu ditingkatkan kembali manajemen, fungsi dan manfaat dari Sakoci tersebut agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi perekonomian kota.

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Cimahi masih terbilang rendah, dimana pada tahun 2017 baru mencapai

546 Wisatawan, dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 392 wisatawan. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan hingga menjadi 899 wisatawan. Untuk Jumlah wisatawan nusantara (wisnus) di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 3.526 Wisatawan, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 hingga menjadi 43.707 wisatawan.

Tabel 2.70.
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Di Kota Cimahi
Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Jumlah Wisatawan Mancanegara (wisman)	546	392	899	91
Jumlah Wisatawan Nusantara (wisnus)	3.526	5.852	43.707	65.610

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2020, diolah

Untuk fasilitas Hotel/Penginapan pada tahun 2019, Total keseluruhan Hotel/Penginapan di Kota Cimahi sebanyak 8 buah (Hotel berbintang/Non Bintang/Penginapan) dengan jumlah kamar seluruhnya yaitu 193 kamar dengan kapasitas tempat tidur berjumlah 308 tempat tidur.

Tabel 2.71.
Banyaknya Hotel/Penginapan, Kamar dan Tempat Tidur
Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH HOTEL/PENGINAPAN	KAPASITAS	
			KAMAR	TEMPAT TIDUR
1.	Cimahi Selatan	1	61	114
2.	Cimahi Tengah	5	103	161
3.	Cimahi Utara	2	29	33
	Total Kota Cimahi	8	193	308

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2020, diolah

Selanjutnya untuk Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Cimahi pada tahun 2019 sejumlah 54 buah, jumlah tersebut masih sama dengan jumlah pada tahun 2018.

Tabel 2.72.
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Cimahi
Tahun 2016-2019

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019
1.	Cimahi Selatan	n/a	n/a	3	3
2.	Cimahi Tengah	n/a	n/a	29	29
3.	Cimahi Utara	n/a	n/a	22	22
	Total Kota Cimahi	n/a	n/a	54	54

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2020, diolah

Pada tahun 2018 dan 2019 melalui inovasi *gastrodiplomacy* Pemerintah Kota Cimahi bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi diantaranya UNPAD, UNPAR maupun ISBI dan Uni Eropa telah mengembangkan kewirausahaan sosial di 20 *homestay* di Cireundeu, Meskipun demikian, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian kota. Hal ini disebabkan wisata yang dikembangkan merupakan hal yang sakral dan tidak boleh dikomersialkan serta keterlibatannya pun sangat terbatas pada kelompok warga tertentu. Untuk itu perlu didorong inovasi pengembangan pariwisata profan yang dapat dikomersialkan tetapi masih tetap bercirikhaskan wilayah Cireundeu atau masih terkait dengan budaya konsumsi Rasi seperti seni pertunjukan dan ekowisata (*tracking dan camping*).

3. Pertanian

a. Sub sektor pertanian

Sektor pertanian bukan merupakan sektor unggulan untuk perekonomian Kota Cimahi. Meskipun demikian harus tetap dilakukan upaya pengembangan pada sector ini. Melihat luas lahan yang ada di Kota Cimahi, Berdasarkan data dari Badan Pusat Stastistik (BPS) Kota Cimahi, terdapat 106,42 hektar lahan sawah yang menggunakan irigasi setengah teknis pada tahun 2015 dan 2016, serta 119 hektar pada tahun 2017 hingga 2019. Hal tersebut sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.73.

Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Kering Dirinci Menurut Jenis
Pengairan di Kota Cimahi Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)		Total (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)			
	Irigasi Setengah Teknis	Tadah Hujan		Pekarangan/Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya	Tegal/Kebun / Ladang/Huma	Kolam Tebat	Lainnya
2016	106,42	28	134,42	247,32	264	n/a	n/a
2017	119	17	136	n/a	n/a	n/a	n/a
2018	119	17	136	n/a	184	5	2
2019	119	17	136	n/a	184	-	-
2020	119	17	136	n/a	189	5,74	n/a

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka (BPS, 2021)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kota Cimahi memiliki ketersediaan lahan yang terbatas. Terbatasnya lahan di Kota Cimahi berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas hasil pertanian. Angka produktivitas pertanian di Kota Cimahi terbilang cukup rendah. Produk-produk pertanian pangan seperti padi, palawija dan hortikultura masih menjadi produk dominan yang dihasilkan Kota Cimahi, namun demikian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ketiganya mengalami tren penurunan hasil produksi.

Untuk produksi padi selama periode tahun 2015 – 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan data BPS (Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2018 – 2020) Produksi padi di Kota Cimahi Tahun 2015 sebesar 2.242 ton dan mengalami penurunan menjadi 406,54 ton di tahun 2019. Dengan luas panen yang menurun tajam dari 325 Ha menjadi 70,93 Ha, produktivitasnya pun mengalami penurunan dari 6,70 Ton/Ha menjadi 5,73 Ton/Ha. Di tahun 2020 produktivitas padi di Kota Cimahi mengalami peningkatan menjadi 6,8 ton/ha (GKG), dengan produksi sebanyak 1387,2 ton dan luas panen 204 ha , luas tanam 219 ha. Namun apabila melihat upaya selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2018 - 2019, produksi padi di Kota Cimahi mengalami peningkatan dari 393,82 ton menjadi 406,54 ton dan produktivitasnya pun meningkat dari

5,55 ton/ha menjadi 5,73 ton/ha. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya pengembangan pola penanaman pertanian yang ada di Kota Cimahi. Selain itu pada tahun 2020 Kota Cimahi juga melakukan inovasi pemanfaatan jamu penyubur Biogro untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 50-100%, meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan, meningkatkan ketahanan padi terhadap hama penyakit tanaman sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

Tantangan besar dalam sektor pertanian di Kota Cimahi antara lain adanya alih fungsi lahan pertanian di Kota Cimahi, rendahnya kapasitas SDM petani, terbatasnya penerapan teknologi pertanian, masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung produksi hasil pertanian di Kota Cimahi serta manajemen pengelolaan hasil pertanian yang masih kurang.

Sektor pertanian di Kota Cimahi tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi dan cenderung menurun seperti yang terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.74.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Cimahi
Tahun 2016-2020 (Persen)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan (%)	0,23	0,22	0,21	0,20	0,21

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2021

Sektor pertanian hanya menyumbangkan sekitar 0,21 persen dari total PDRB ADHB Kota Cimahi yang mencapai 66.491,2 milyar rupiah pada Tahun 2020. Nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 65.074,7 milyar rupiah seperti yang terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.75.

Nilai PDRB ADHB Sektor Pertanian Kota Cimahi
Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB ADHB sektor pertanian (Pangan, Pertanian, Peternakan) terhadap PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	56.678,44	58.533,77	60.598,6	65.074,7	66.491,2

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2021, diolah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai PDRB ADHB sektor pertanian mengalami tren peningkatan selama periode tahun 2016 - 2020. Namun angka tersebut masih jauh dibawah capaian sektor lain. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan sektor pertanian diantaranya dengan pemanfaatan teknologi, yakni dengan penggunaan bibit dan pupuk berkualitas untuk menghasilkan produktivitas produk pertanian yang lebih tinggi walaupun jumlah lahan pertanian di Kota Cimahi terjadi penurunan.

Selain upaya di atas, untuk mengatasi beberapa keterbatasan di sektor pertanian, strategi pengembangan rantai nilai pada klaster/sentra produk pertanian menjadi sasaran kerja sektor. Adapun strategi tersebut antara lain pembentukan sentra ikan hias di Cibabat; sentra susu sapi dan tauge di Cipageran; dan pengembangan produk pertanian diantaranya adalah pengembangan buah Durian Kamajaya. Ke depannya akan dikembangkan pula tanaman herbal dan produk turunannya serta madu dan lebah di beberapa lokasi agroforestri di Bukit Padakasih Cibeber, Cimenteng, Legok Jawa, dan ex-TPA Leuwigajah. Strategi pengembangan rantai nilai (hilirisasi) produk pertanian tersebut dapat dilakukan untuk dapat mendorong lahirnya usaha mikro, kecil dan menengah (UKM).

- b. Sub Sektor Peternakan
- Pada sub-sektor peternakan, unggas merupakan ternak yang paling banyak dibudidayakan di Kota Cimahi, beberapa komoditi unggas yang dibudidayakan di Kota Cimahi diantaranya adalah

ayam buras, ayam ras pedaging, ayam petelur , burung puyuh, merpati dan itik. Selain itu terdapat hewan ternak lain yang juga dibudidayakan seperti sapi potong, kerbau, domba, kambing, sapi perah dan kuda.

Tabel 2.76.

Jumlah Ternak Ayam Buras dan Ras Pedaging di Kota Cimahi
Tahun 2016-2020

No	Jenis Unggas	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ayam Buras	36.088	-	16.524	-	14.712
2.	Ayam Ras Pedaging	106.759	-	37.694	37.694	37.758
3.	Ayam Petelur	1.130	-	-	-	-
4.	Itik	11.953	-	1.823	2515	n/a

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2021

Ternak domba adalah salah satu komoditas ternak terbanyak. Selain ternak domba, Kota Cimahi juga memiliki jumlah ayam pedaging yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah. Secara lebih rinci data pada Tabel 2.74 memuat jumlah dan jenis komoditas unggas di Kota Cimahi pada tahun 2020. Sedangkan untuk komoditas unggas, jenis ayam pedaging adalah komoditas ternak unggas yang paling mendominasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya beberapa potensi yang dapat dikembangkan dari sub-sektor peternakan. Tabel 2.77. menunjukan di tahun 2016-2020, di tengah keterbatasan lahan yang menjadi kendala sektor pertanian di Kota Cimahi, terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan dari sub sektor peternakan terutama di Kecamatan Cimahi Utara yang merupakan wilayah paling potensial untuk dapat dioptimalkan sub sektor peternakannya. Komoditas ternak ternak sapi potong, domba, dan sapi perah mengalami fluktuasi produksi, sedangkan untuk komoditas kerbau dan kambing mengalami tren penurunan pada tahun 2016-2020.

Tabel 2.77.
Jumlah dan Jenis Komoditas Ternak
di Kota Cimahi Tahun 2016-2020

No	Jenis Ternak	Tahun (Jumlah ekor)			
		2016	2018	2019	2020
1.	Sapi Potong	125	219	210	332
2.	Kerbau	21	13	6	5
3.	Domba	13,757	3,183	3,183	2,873
4.	Kambing	162	108	108	90
5.	Sapi Perah	867	464	358	552

Sumber : Cimahi Dalam Angka 2017-2021, diolah

Tabel 2.78. menjelaskan bahwa hasil produksi peternakan (daging) di Kota Cimahi pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 produksi nya mencapai 100 ton, dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018 menjadi 1.004 ton, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 712,44 ton.

Tabel 2.78.
Produksi Hasil Peternakan dan Tanaman Padi di Kota Cimahi
Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Produksi Hasil Peternakan Daging (Kg)	100	1.004	712,44	673,04
Produksi Hasil Peternakan Susu (liter)	750	823	757,857	1.374.304
Produksi hasil tanaman padi (ton)	1.674,13	1.559,4	1.693,2	1387,2

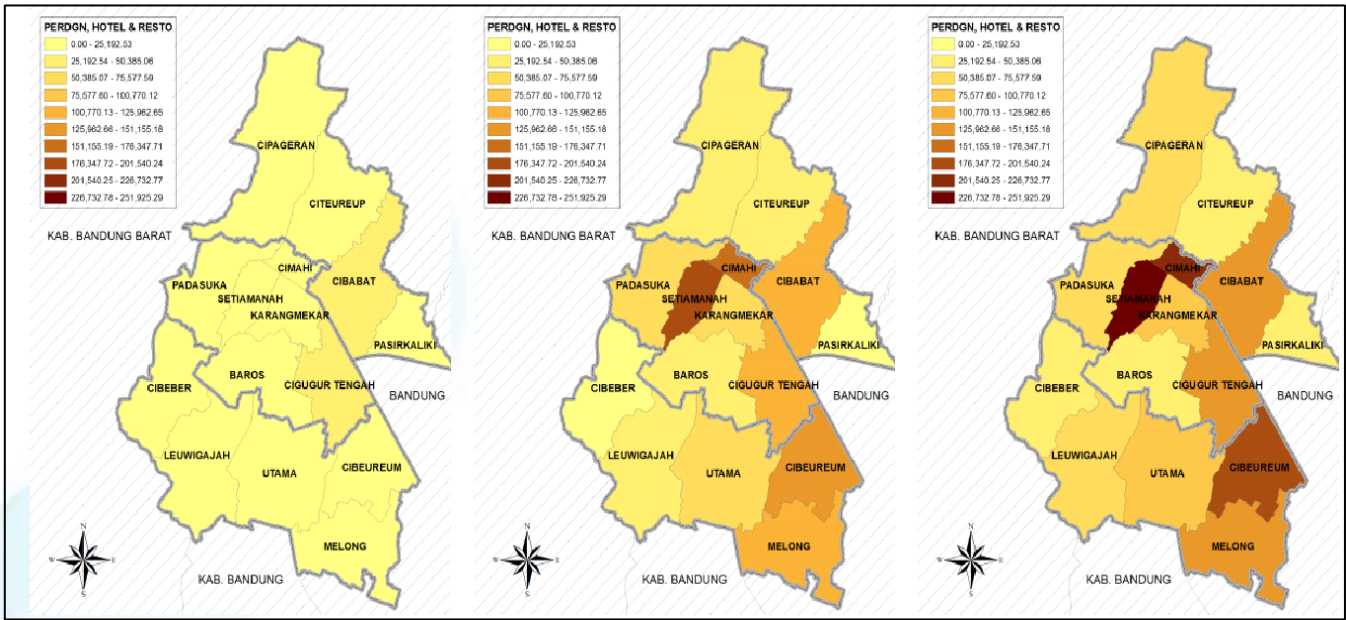
Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, 2021 diolah

4. Perdagangan
- Kontribusi sektor perdagangan dan jasa menempati posisi ketiga sekaligus juga mendukung sektor utama perekonomian yaitu sektor industri pengolahan. Perkembangan sektor perdagangan di

Kota Cimahi dalam periode tiga tahun terakhir terlihat cukup signifikan. Aktivitas sektor ini menyebar di semua wilayah, tetapi pertumbuhan paling pesat berada di Cimahi Tengah. Berdasarkan fakta diatas, kita dapat mengambil pola tingkah laku aktivitas perdagangan di Kota Cimahi, yaitu aktivitas perdagangan di Kota Cimahi akan berada di daerah pusat kota, dan akan mengikuti aktivitas kegiatan lain, yaitu aktivitas industri dan aktivitas pemerintahan.

Gambaran pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Cimahi sebagai berikut :

Gambar 2.47.
Sebaran Aktivitas Sektor Perdagangan

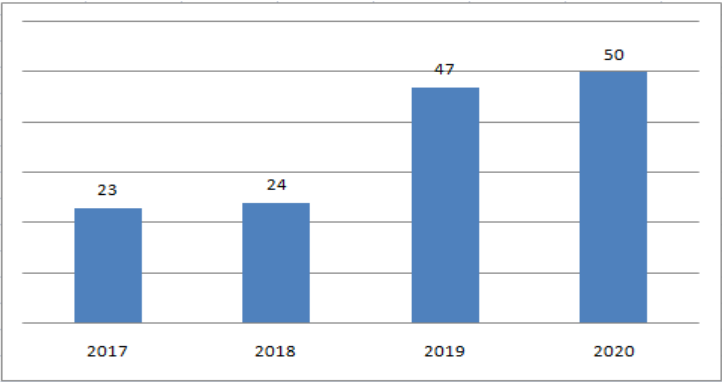


Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2017

Pengembangan di sektor perdagangan diantaranya dilakukan melalui pengembangan pasar tradisional dan promosi produk IKM/UKM. Peningkatan kualitas pasar tradisional diwujudkan dengan menciptakan pasar yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) di mana pada tahun 2020 baru ada 1 dari 8 pasar tradisional (4 di antaranya dikelola oleh pemerintah kota) yang telah sesuai dengan SNI. Adapun untuk promosi produk UKM/IKM, Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional

dan nasional juga masih terbilang rendah meskipun mengalami peningkatan di tahun 2020 yang berjumlah 50 IKM/UKM.

Gambar 2.48.
IKM/UKM Yang Mengikuti Promosi Di Level Lokal, Regional Dan Nasional di Kota Cimahi Tahun 2017-2020



Sumber : Disdagkoperin Kota Cimahi, 2021, diolah

5. Perindustrian

Sektor industri menjadi *leading* sektor ekonomi Kota Cimahi. Sektor ini mampu menyumbang lebih dari 45 persen terhadap total PDRB. Pertumbuhan sektor industri terbesar terdapat pada industri pengolahan, terutama industri tekstil. Walaupun menyumbang kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah data tentang pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Tabel 2.79.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	46,61	45,88	45,69	47,81	47,74

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2021, diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat pada Tahun 2019 dan terjadi sedikit penurunan pada Tahun 2020. Sektor Industri Pengolahan mendominasi struktur perekonomian Kota Cimahi selama beberapa tahun terakhir, bahkan jauh di atas sektor lainnya.

Selain memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian kota, Sektor Industri Pengolahan terutama Industri Sedang Besar juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Akan tetapi seiring dengan menurunnya jumlah industri di Kota Cimahi, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pun mengalami penurunan setiap tahunnya seperti yang tergambar pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.80.
Jumlah Industri Sedang Besar dan Tenaga Kerja Kota Cimahi
Tahun 2016 - 2020

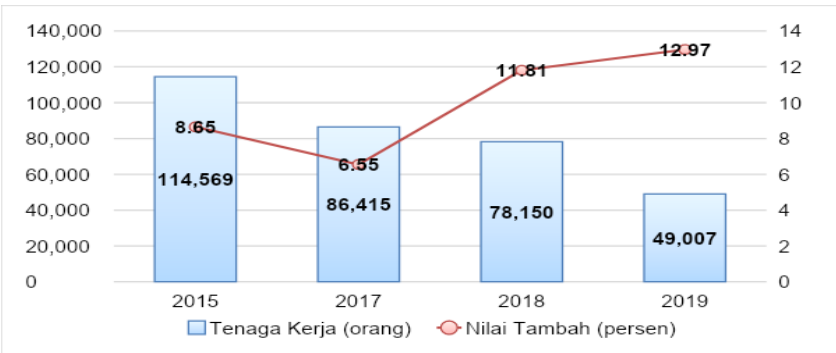
URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Industri	593	275	595	619	691
Tenaga Kerja (orang)	83.085	62.868	81.920	59.007	60.068

Sumber : Disnaker Kota Cimahi, 2021, diolah

Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri di Tahun 2018 - 2019 setelah sebelumnya mengalami perlambatan sangat berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cimahi. Akan tetapi peningkatan laju pertumbuhan sektor industri tersebut tidak bisa serta merta meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.49 jumlah tenaga kerja pada industri sedang besar tahun 2019 mengalami penurunan 37,29 persen dari tahun sebelumnya di saat nilai tambah bruto sektor industri pengolahan mengalami peningkatan.

Gambar 2.49.

Tenaga Kerja Industri Sedang Besar dan Nilai Tambah Industri
Pengolahan Kota Cimahi Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terbatas pada Industri Kecil Menengah (IKM). IKM di Kota Cimahi juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberikan beberapa program fasilitasi terhadap IKM agar dapat meningkatkan standar mutunya sehingga bisa meningkatkan kapasitas dan kualitasnya sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dan bersaing dengan IKM dari daerah lainnya.

Tabel 2.81.

Jumlah IKM yang Mendapatkan Fasilitasi Tahun 2019 dan 2020

NO	JENIS FASILITASI	Jumlah IKM	
		2019	2020
1.	Uji Nilai Gizi dan Kadaluarsa Produk IKM Klaster Makanan dan Minuman Kota Cimahi	66	60
2.	Desiminasi dan Cetak Desain Merk dan Kemasan Produk IKM Klaster Makanan dan Minuman	56	-
3.	Festival Seleksi <i>Food Ethnic</i> dan Makanan & Minuman Halal Tingkat Kota Cimahi	147	-
4.	<i>Workshop</i> Diversifikasi Olahan Pangan	104	-
5.	<i>Workshop Good Manufacturing Practices</i> (GMP)	25	-
6.	Peningkatan Standar Mutu Produk bagi Pelaku IKM Makanan dan Minuman (PIRT, Sertifikat Halal, HAKI)	115	-
7.	<i>Workshop</i> Teknologi Industri di Bidang Pengolahan Pangan	-	-
8.	Pelatihan Teknis Pembuatan Faceshield	-	50
9.	Pelatihan PMT (<i>Production Motivation Training</i>) untuk IKM Craft, Fashion dan Makan-Minuman	-	200
10.	Pelatihan Produksi Bersih untuk IKM <i>Craft</i> , Fashion dan	-	200

NO	JENIS FASILITASI	Jumlah IKM	
		2019	2020
	Makanan-Minuman		
11.	Pelatihan Optimalisasi Sosmed untuk IKM <i>Craft, Fashion</i> dan Makanan-Minuman	-	100
12.	Pelatihan Inkubasi Bisnis	-	30
13.	Sosialisasi dan bintek SIINAS	-	25

Sumber : Disdagkoperin Kota Cimahi, 2021, diolah

Selain potensi pada sektor industri pengolahan, saat ini pun di Kota Cimahi sedang dikembangkan pula sektor industri digital kreatif yang merupakan salah satu sektor industri potensial yang bertumpu pada kreatifitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu sektor industri digital kreatif ini tentu saja sangat selaras dengan tujuan pembangunan industri nasional yang mengarah pada revolusi industri 4.0 sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan mendukung konsep *green industry* (industri hijau), yang berkontribusi signifikan terhadap sektor perekonomian, namun sangat ramah lingkungan dan minim polusi.

Gedung *Baros Information Technology Creative Centre* (BITC) sebagai bagian dari Kawasan Cimahi Techno Park saat ini menjadi salah satu kawasan pusat pengembangan sektor industri digital kreatif di Kota Cimahi dan telah menjadi salah satu percontohan nasional kawasan perkantoran bersama (*co working space*) yang dikelola oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dikelola oleh UPT *Cimahi Techno Park*).

Pada Gedung BITC saat ini, terdapat aktifitas bisnis para *start up* pelaku industri digital kreatif dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.82.
Jumlah Tenaga Kerja dan Realisasi Retribusi Daerah
dari Tenant di BITc

Jumlah Tenant	Jumlah Tenaga Kerja	Realisasi Kontribusi PAD (Retribusi Daerah) [Rp]		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
16 perusahaan industri digital kreatif	94 orang	278.897.500	529.683.500	488.063.150

Sumber : Disdagkoperin Kota Cimahi, 2020

Selain data di atas, *multiplier effect* yang timbul dengan adanya Gedung BITC di kawasan Baros Cimahi Tengah tersebut adalah mulai menggeliatnya sektor perekonomian di sekitar gedung hal ini terindikasi dengan mulai maraknya warung makan, toko dan kost-kostan yang ada di sekitar kawasan.

6. Transmigrasi

Program transmigrasi di Kota Cimahi bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat memiliki penghasilan yang tetap. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Angka Kesempatan Kerja di Kota Cimahi pada tahun 2017 sejumlah 273.616 orang dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 273.955 orang. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 272.553 orang.

Akan tetapi, pelaksanaan Program Transmigrasi di Kota Cimahi dinilai tidak efektif. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengiriman beberapa keluarga ke daerah tujuan transmigrasi, dari 5 KK yang dikirimkan ada 2 KK yang kembali pulang. Meskipun masih ada keluarga yang tetap bertahan di daerah transmigrasi masih memerlukan dukungan finansial dari Pemerintah Kota Cimahi. Monitoring terhadap keluarga transmigran terakhir dilaksanakan Tahun 2018. Pada Tahun 2019 terjadi perubahan kebijakan dari pusat bahwa untuk Program Pengiriman Transmigran dilakukan dengan *sharing* biaya, sedangkan pengiriman sebelumnya biaya pengiriman berasal dari pusat. Meskipun sudah ada 2 KK calon transmigran hasil sosialisasi, Kota Cimahi tidak jadi mengirimkan berdasarkan dari hasil evaluasi ketidakefektifan program transmigrasi ini.

2.1.3.3. Fungsi Penunjang Lainnya

1. Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.83.
Indikator Bidang Urusan Perencanaan di Kota Cimahi dan
Capaiannya

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	STATUS
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
4.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Jumlah program RKPD Tahun berkenaan Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan x100%	Ada
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Jumlah program RKPD Tahun berkenaan Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan x100%	Ada
7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang doku;men RTRW x100%	Ada

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021

2. Keuangan

a. Penetapan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Kota Cimahi dan Peraturan Walikota tentang

Penjabaran APBD Kota Cimahi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

- b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Salah satu indikator penting untuk menilai pengelolaan keuangan sebuah institusi pemerintah yaitu Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Upaya untuk merealisasikan pembangunan harus diawali dengan penataan internal pemerintahan Kota Cimahi baik dalam konteks penataan organisasi pemerintahan maupun dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cimahi. Penataan tersebut termasuk di dalamnya adalah pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi sampai dengan 30 Desember 2020 jumlah total PNS sebanyak 4.291 orang. Terdiri dari Laki-laki berjumlah 2.570 orang dan perempuan 1.721 orang. Jadi jumlah PNS berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan PNS perempuan.

Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, PNS Kota Cimahi sebesar 53.6 % berlatar belakang S.1 dan 1.28 berlatar belakang S-2. Adapun secara lengkap tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.84.
Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2020

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	JUMLAH PNS
SD	28
SMP	39
SMA	635
D1	5

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	JUMLAH PNS
D2	84
D3	564
D4	74
S.1	2300
S.2	555
S.3	6

Sumber : BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2020

Jumlah PNS Daerah di Kota Cimahi berdasarkan golongan selama 9 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.85.
Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Golongan
Tahun 2012 – 2020

TAHUN	GOLONGAN			
	I	II	III	IV
2012	107	1.422	1.924	2.460
2013	105	1.126	2.031	2.423
2014	100	1.144	2.127	2.348
2015	97	1.113	2.100	2.371
2016	100	1.144	2.127	2.348
2017	62	849	2010	1655
2018	52	780	2003	822
2019	49	755	2224	1505
2020	41	673	2288	1289

Sumber : BPS tahun 2012-2020 & BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2020

Berdasarkan jumlah PNS Kota Cimahi baik secara kuantitas maupun kualitas belum merata, namun demikian kinerja aparatur sudah relatif baik yang dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Cimahi. Perencanaan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah harus tetap diperhatikan mengingat kondisi dan persoalan pembangunan ke depan yang menuntut kinerja aparatur pemerintah yang lebih baik, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis.

4. Penelitian dan Pengembangan
- Bidang urusan penelitian dan pengembangan di Kota Cimahi baru secara spesifik ditangani dan dikoordinasikan oleh sebuah Bidang

Litbang di Bappeda Kota Cimahi pada tahun 2019. Penatalaksanaan dan pembinaan urusan ini diarahkan kepada 3 hal yaitu penelitian untuk penyusunan kebijakan pembangunan dan kerjasama kelitbangan, pengemabngan atau penelitian yang bersifat terapan dan pengembangan inovasi dan teknologi. Masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penelitian untuk penyusunan kebijakan pembangunan dan kerjasama penelitian dan pengembangan baik dalam maupun luar negeri.

Fokus penelitian (kajian) di bidang litbang adalah untuk memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan pembangunan. Kegiatan penelitian masih bisa dilakukan dalam tema yang lebih bersifat fundamental (grounded) jika dinilai perlu dan tersedia sumber daya manusia penelitiannya. Salah satu penelitian mendasar yang dilakukan adalah pengemabngan kultur jaringan dan DNA Durian Kamajaya Kota Cimahi bekerja sama dengan UNPAD.

Sebagai sebuah bidang urusan maka perlu dilakukan penataan dan koordinasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang urusan penelitian, pengemabngan, inovasi dan teknologi yang dilaksanakan di berbagai SKPD. Untuk kegiatan penelitian (kajian) dan pengembangan di Kota Cimahi akan dilaksanakan pada 3 kelompok tugas yaitu penelitian/kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyusunan kebijakan, penelitian/kajian bagi perencanaan pembangunan dan kajian teknis seperti *feasibility studies* (FS) maupun DED. Kajian bagi penyusunan kebijakan pembangunan (termasuk Indeks Inovasi Daerah/IID, Indeks Daya Saing Daerah/IDSD dan indeks pengelolaan keuangan daerah/IPKD) dan pengembangn ilmu pengetahuan dilakukan oleh Bidang Litbang Bappeda, sementara kajian penyusunan perencanaan pembangunan oleh bidang – bidang perencanaan di Bappeda dan yang lebih teknis oleh SKPD terkait.

Kerjasama internasional pada tahun 2020 telah dituntaskan melalui program Inspire + Kewirausahaan Sosial dari Uni Eropa melalui hibah riset terapan Gastrodiplomasi Cireundeu dan juga *Value-chain Capacity Building Network* (VCBN). Selain itu diperoleh juga hibah penelitian berupa Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT) dari Kemenristek/BRIN bekerjasama dengan UNPAR Bandung selama 3 tahun yaitu 2019 - 2021 untuk mendukung pengembangan *virtual tourism* (360o Cireundeu) dan *exit strategy* Gastrodiplomacy Cireundeu. Selain itu kerjasama internasional juga dilakukan dalam bidang pengembangan kapasitas inovasi ASN Kota Cimahi dan umum bekerjasama dengan *Faculty of Engineering National University of Singapore* (NUS) dan UNPAR.

- b. Pengembangan atau penelitian yang bersifat terapan/implementatif.

Jenis penelitian terapan ini dilakukan dengan membuat *prototype*, pemodelan atau *pilot project*. Pada tahun 2020 Telah dilaksanakan beberapa *project* percontohan melalui kolaborasi dengan stakeholder terkait di antaranya :

- a. Pengembangan *agroforestry* yang mengintegrasikan budidaya dan konservasi Durian Kamajaya durian asli dataran tinggi Kota Cimahi yang bersama dengan Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Terdapat dua lokasi pilot project yaitu di Bukit Padakasih Kelurahan Cibeber dan Hutan Kota Kelurahan Cipageran. *Pilot project* ini didampingi oleh UNPAD dan IPB. Pengembangan lebah trigona belum dapat dilaksanakan karena kendala Covid 19. Diharapkan dapat diteruskan pada tahun 2021 dan 2022;
- b. Pengembangan kewirausahaan sosial melalui pemanfaatan larva *maggot* BSF untuk mengolah sampah organik dengan DLH Kota Cimahi di Kelurahan Padasuka bersama Universitas Muhammadiyah Bandung (UMBdg). Pengembangan produk kesehatan dari larva BSF belum

dapat dilakukan karena rasionalisasi anggaran dan kendala tata laksana karena Covid 19. Diharapkan dapat diteruskan pada tahun 2021 dan 2022;

- c. Pengembangan padi Organik antara komunitas petani dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
 - d. Pendampingan kewirausahaan melalui kegiatan kuliah kerjanya nyata (KKN) Tematik kepada 50 UMKM bekerjasama dengan Disdagkoperin, UKM serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI); dan
 - e. Pengemabngan konsep pengolahan air Kota Cimahi bekerjasama dengan ITB, BP2D Jabar, *Manchester University* dan DPKP Kota Cimahi.
- c. Pengembangan inovasi dan teknologi.
- Untuk sub-bidang urusan inovasi dilakukan melalui penyusunan dan monev SIDA, pengukuran pengukuran indeks daya saing (IDSD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan koordinasi bidang inovasi lainnya. Pada tahun 2020 dalam sub-bidang urusan teknologi yang dapat dilaksanakan baru dalam bentuk sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat. Terdapat kendala tidak adanya SDM fungsional perekayasa di Kota Cimahi.
- Terjadinya pandemi Covid 19 mendorong dilaksanakannya rasionalisasi anggaran untuk urusan dan program kelitbangan. Walaupun demikian program dan kegiatan masih dapat dilaksanakan karena mendapatkan sumber bantuan dana hibah dalam dan luar negeri khususnya untuk pelaksanaan penelitian terapan. Oleh karenanya bidang urusan kelitabangan dapat dilaksanakan dengan baik bahkan memperoleh prestasi yang tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan prestasi tahun 2019.
- Untuk mendorong peningkatan kapasitas inovasi organisasi dan sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bidang pelayanan publik di Kota Cimahi akan dikembangkan konsep *corporate university* (CorpU). Pelaksanaan CorpU bisa dilakukan

melalui kerjasama dengan Kantor Pemerintahan lainnya (Kementrian atau provinsi), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta baik nasional maupun internasional atau dengan lembaga training lainnya.

Kinerja bidang urusan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi ditunjukkan oleh indikator persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.86**, yaitu pada tahun pada tahun 2018 sebesar 75%, tahun 2019 adalah 75% dan tahun 2020 sebesar 75%.

Tabel 2.86.
Indikator Penelitian dan Pengembangan di Kota Cimahi
Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1.	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan (%)	75	75	75

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021, diolah

Sejak dikelolanya bidang urusan kelitbangan pada tahun 2019 Kota Cimahi telah menerima banyak penghargaan tingkat nasional dalam bidang penelitian, pengembangan dan inovasi diantaranya :

- 1) Juara I (tahun 2019) dan juara III (tahun 2020) tingkat nasional untuk perkotaan dengan indeks daya saing tertinggi (Budhipraja) dari Kemenristek/BRIN;
- 2) Juara 5 Kota dengan indeks inovasi tertinggi di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri (tahun 2019) dan memperoleh apresiasi berupa Dana Insentif Daerah (DID);
- 3) Masuk Top 99 dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik melalui *gastrodiplomacy* Cireundeu dari Kementerian PAN dan RB

(tahun 2019) dan memperoleh apresiasi berupa Dana Insentif Daerah (DID); dan

- 4) Menerima Penghargaan sebagai Kota Sangat Inovatif pada tahun 2020 dari Kemendagri.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Cimahi dalam kompetisi *Innovative Government Award* (IGA) tahun 2020 di Kementerian Dalam Negeri diketahui bahwa jumlah inovasi kota Cimahi dinilai masih rendah walaupun tingkat kematangannya cukup tinggi. Rata-rata jumlah inovasi dari 12 kota yang masuk tahap final adalah 100 buah, sementara itu Kota Cimahi jumlahnya jauh lebih kecil yaitu 58 buah. Tingkat kematangan inovasi yang tinggi dan relatif kecilnya jumlah inovasi di Kota Cimahi telah mengindikasikan kecenderungan mulai masuknya fase atau tahap kejenuhan dalam siklus inovasi sebuah produk atau layanan (*innovation cycle*). Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk menumbuhkan kembangkan iklim dan budaya berinovasi di Kota Cimahi.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui penyelenggaraan kompetisi inovasi antar SKPD, kelurahan, puskesmas, umum dan perguruan tinggi melalui kegiatan Kompetisi Inovasi Cimahi Motekar Award (ChiMA). Cara ini diharapkan tidak hanya akan memunculkan inovasi-inovasi dan inovator-inovator baru tetapi juga mendorong perluasan cakupan kerja bidang urusan kelitbangan. Kendala dalam mengoptimalkan sub-bidang urusan inovasi dan teknologi di Kota Cimahi diantaranya adalah terbatasnya SDM fungsional peneliti, perekayasa dan analis kebijakan.

5. Pengawasan

Kinerja pengawasan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.87.

Indikator Pengawasan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2017	2018	2019
1.	Nilai AKIP	60,68	63,99	66,00
2.	Persentase PD dengan hasil evaluasi LAKIP kategori BB	n/a	n/a	3,57%
3.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
4.	Nilai Maturitas SPIP	1,268	1,268	1,268

Sumber : Inspektorat Kota Cimahi, 2020, diolah

6. Fungsi Penunjang Lainnya
- a. Survei Kepuasan Masyarakat
- Survei kepuasan masyarakat merupakan data otentik tentang respon masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun nilai atau predikat Survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kota Cimahi mengalami peningkatan. Hasil survei tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.88.

Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi

Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Survey Kepuasan Masyarakat	76	80,99	80,75

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 76 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 80,99 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 80,75 persen.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat

penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hasil penilaian dari laporan LAKIP Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dari CC di Tahun 2016 menjadi B mulai Tahun 2017 sampai dengan 2019. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 2.89.
Nilai SAKIP Kota Cimahi Tahun 2016-2019

URAIAN	2016	2017	2018	2019
Nilai SAKIP Kota Cimahi	50,27 (CC)	60,68 (B)	63,99 (B)	66 (B)

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2020, diolah

Sementara itu, Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Cimahi juga meningkat, yaitu tahun 2017 CC (52,09), tahun 2018 CC (52,09) dan tahun 2019 B (60,01). Hal ini cukup menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi hingga saat ini terus berupaya memperbaiki diri demi tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Aspek daya saing merupakan salah satu factor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi daerah Kota Cimahi dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan yang berkelanjutan. Aspek daya saing menggambarkan keunggulan suatu daerah. Terdapat empat indikator Aspek daya saing daerah yaitu kemampuan ekonomi daerah,

fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam aspek daya saing menggambarkan kapasitas ekonomi daerah sebagai daya tarik bagi pihak luar untuk memanankan modalnya/investasi yang dapat meningkatkan aktifitas ekonomi di Kota Cimahi sehingga dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kota. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap empat indikator, yaitu :

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan.

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga

peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.90.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita per Bulan di Kota Cimahi Tahun 2019

GOLONGAN PENGELUARAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
< 300.000	290.430
300.000 – 499.999	431.022
500.000 -749.999	624.975
750.000 – 999.999	875.896
1.000.000 – 1.499.000	1.231.698
>1.500.000	3.121.137
Rata-rata	1.095.860

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi, 2020

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan kelompok barang. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kota Cimahi sebesar Rp. 1.095.860.

2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita
 Komponen Pengeluaran non pangan di Kota Cimahi pada tahun 2019 rata-rata mencapai Rp.568.696, dimana golongan dengan pengeluaran lebih besar dari Rp.1.500.000 memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan terbesar, yaitu sebesar Rp. 2.036.726.

Tabel 2.91.
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Pangan per Kapita
per Bulan di Kota Cimahi Tahun 2019**

GOLONGAN PENGELUARAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
< 300.000	63.651
300.000 – 499.999	143.385
500.000 -749.999	232.001
750.000 – 999.999	364.330
1.000.000 – 1.499.000	572.081
>1.500.000	2.036.726
Rata-rata	568.696

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi, 2020

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur dalam baik dalam sektor pekerjaan umum maupun transportasi akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan wilayah Kota Cimahi, terutama pada aspek aksesibilitas dan mobilitas. Infrastruktur Jalan merupakan kebutuhan utama dalam rangka memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kondisi fasilitas infrastruktur harus tetap dipelihara dengan baik dan terus ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi fasilitas infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya ekonomi tinggi sehingga pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat yang akan meningkatkan daya saing daerah. Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap 17 indikator, yaitu :

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Panjang jalan di Kota Cimahi pada akhir tahun 2020 adalah 118,873 km. Angka ini sama dengan tahun sebelumnya, dimana jika dirinci menurut pengelolanya maka sebesar 4,32 km dari total panjang jalan merupakan jalan nasional, 9,36 km merupakan jalan provinsi, dan sisanya sebesar 105,193 km merupakan jalan kota. Sedangkan jumlah kendaraan bermotor di kota Cimahi pada

tahun 2020 adalah 293.563. Sehingga rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Cimahi adalah 0,405.

Tabel 2.92.
Panjang Jalan di Kota Cimahi Menurut Tingkat Kewenangan
Tahun 2019-2020

KELAS JALAN	2019	2020
Jalan Nasional (km)	4,32	4,32
Jalan Provinsi (km)	9,36	9,36
Jalan kota (km)	105,193	105,193
Jumlah (km)	118,873	118,873

Sumber : Dinas PUPR Kota Cimahi, 2021

Tabel 2.93.
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi Tahun 2018-2020

JENIS	2018	2019	2020
Mobil Penumpang	47.446	49.134	45.916
Bus	273	270	264
Truk	7.465	7.378	6.741
Sepeda Motor	260.741	264.283	240.642

Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

2.

Ketaatan terhadap RTRW
 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diindikasikan dengan beberapa indikator, yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, dan Persentase Bangunan Berizin. Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Cimahi, persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dan mencapai 60,92% pada Tahun 2019, hal ini menunjukkan semakin baiknya pemahaman dan ketaatan seluruh masyarakat Kota Cimahi dalam mematuhi peraturan tata ruang.

Tabel 2.94.

Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang di Kota Cimahi Tahun 2017-2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	58,82%	64,71%	76,47%	78,02%

Sumber : Dinas PUPR Kota Cimahi, 2021, diolah

Sementara indikator persentase bangunan berizin belum optimal pencapaiannya walaupun trennya meningkat setiap tahun. Pada Tahun 2020, persentase bangunan berizin mencapai 30,82 %.

Tabel 2.95.

Persentase Bangunan Berizin di Kota Cimahi Tahun 2017-2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
Persentase Bangunan Berizin	29,60%	29,84%	30,50%	30,82%

Sumber : Dinas PUPR Kota Cimahi, 2021, diolah

- Luas wilayah industri

Sektor Industri Pengolahan mendominasi struktur perekonomian Kota Cimahi selama beberapa tahun terakhir, bahkan jauh diatas sektor lainnya. Selain memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian kota, Sektor Industri Pengolahan terutama Industri Sedang Besar juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Penggunaan lahan untuk industri sebesar 11,6 persen dari luas kota Cimahi atau sekitar 468,401 Ha. Selama periode 2018-2019 terlihat kontribusi industri yang meningkat dalam perekonomian Kota Cimahi. Sejalan dengan animo penduduk luar untuk bekerja di Kota Cimahi tetap tinggi, implikasinya terjadi peningkatan penggunaan lahan industri.

Tabel 2.96.

Luas Wilayah Industri di Kota Cimahi 2018-2019

JENIS PENGGUNAAN	2018	2019
Industri	468,401 Ha	468,401 Ha

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

4. Luas wilayah banjir
- Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya genangan di Kota Cimahi salah satunya adalah kondisi drainase yang terganggu baik oleh pola masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan maupun terhalangnya aliran drainase oleh bangunan. Terdapat 5 kecamatan yang mengalami banjir pada tahun 2020.

Tabel 2.97.

Jumlah Keluarahan yang Mengalami Banjir Tahun 2018-2020

KECAMATAN	2018	2019	2020
Cimahi Selatan	4	3	0
Cimahi Tengah	2	2	3
Cimahi Utara	1	2	2
KOTA CIMAHI	7	7	5

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2021

5. Luas wilayah kekeringan
- Luas lahan kering terjadi di seluruh kecamatan di Kota Cimahi, yang menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki bahaya kekeringan pada kelas rendah yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Pada tahun 2020 terdaapat 189 Ha lahan kering yang terdapat di area tegal, kebun, lahan, dan huma di Kota Cimahi.

Tabel 2.98.

Luas Lahan Kering Tahun 2020

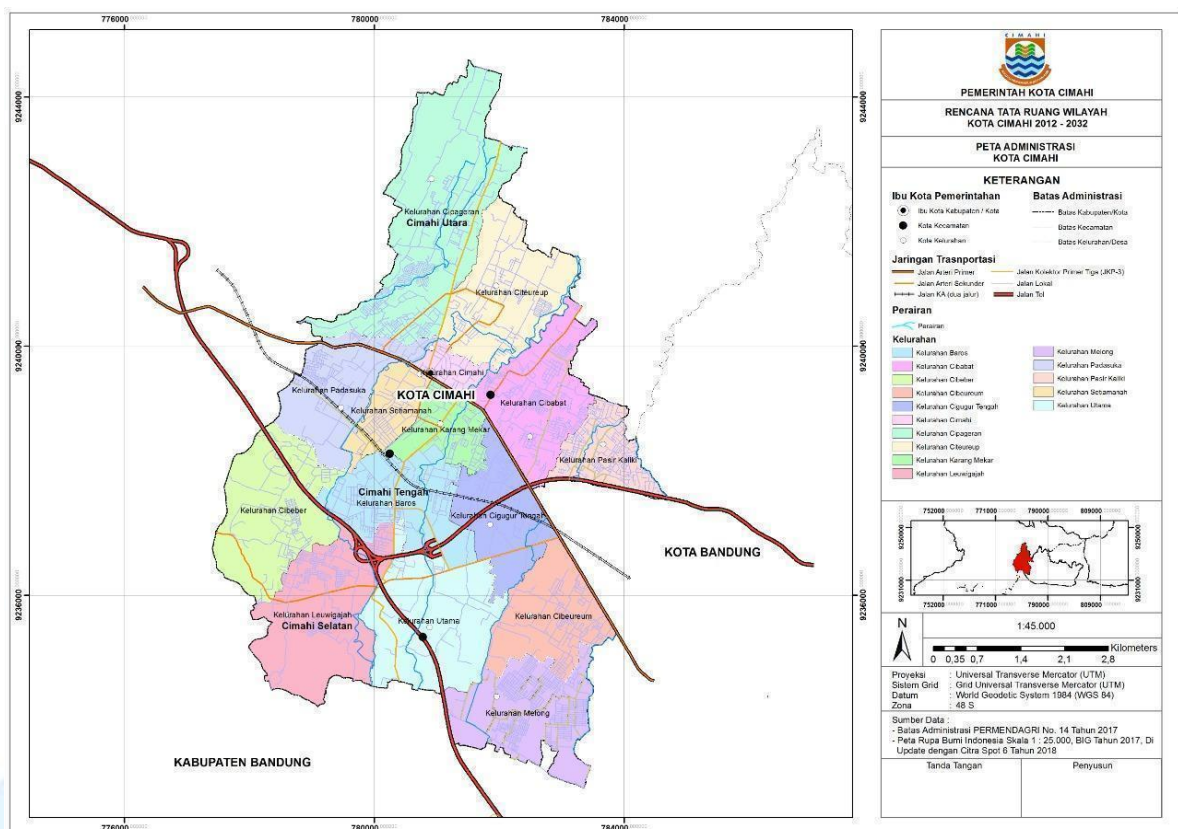
KECAMATAN	LUAS LAHAN KERING TEGAL/KEBUN/LAHAN/HUMA (Ha)
Cimahi Selatan	60
Cimahi Tengah	39
Cimahi Utara	85
KOTA CIMAHI	189

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2021

6. Luas wilayah perkotaan
- Semenjak Kota Administrasi Cimahi melepas dari Kabupaten Bandung menjadi Kota Otonom tersendiri pada tahun 2001, Kota Cimahi memiliki 3 wilayah Kecamatan dan 15 wilayah kelurahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi bahwa Kota Cimahi memiliki luas wilayah sebesar 4.025,73 Ha.
- Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kota Cimahi, maka batas administrasi wilayah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :
- sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
 - sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Andir Kota Bandung;
 - sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Margaasih, dan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung; dan
 - sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan penegasan batas wilayah administrasi tersebut di atas, maka luas wilayah Kota Cimahi adalah 4248,10 Ha. Adapun, secara lebih detail Wilayah Administrasi Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.50.
Peta Administrasi Kota Cimahi



Sumber : Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2019 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kota Cimahi dan peta dasar Kota Cimahi berdasarkan validasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

7. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Jumlah bank yang terdapat di Kota Cimahi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada Tahun 2019 jumlah Kantor Cabang sebanyak 5 unit, Kantor Cabang Pembantu 51 unit, dan kantor kas sebanyak 34 unit.

Tabel 2.99.

Jenis dan Jumlah Bank di Kota Cimahi Tahun 2019-2020

Kelompok Bank	2019				2020			
	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas
Persero	0	2	30	24	0	2	30	24
BPD	0	1	5	8	0	0	0	0
Bank Swasta	0	1	12	2	0	1	12	2
Bank Asing	0	0	0	0	0	0	0	0
Bank Umum Syariah	0	1	4	0	0	1	3	1
BUS-BPD	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Cimahi	0	5	51	34	0	4	45	27

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2021

8.
- Jenis, kelas dan jumlah rumah makan
- Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Cafe hingga pencatatan bulan September 2020 adalah sebanyak 58 buah.

Tabel 2.100.

Jumlah Rumah Makan/Restoran/Cafe Tahun 2018-2020

Jenis Rumah Makan	2018	2019	2020
Restoran	15	17	N/A
Rumah Makan	80	80	N/A
Cafe	19	19	N/A
Total Kota Cimahi	114	116	58*

*Catatan : Pencatatan hingga bulan September 2020

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2021

9.
- Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel
- Fasilitas Hotel Bintang 3, Hotel Melati dan Hotel non Melati pada tahun 2020 terdapat 8 Sedangkan Guest House terdapat 4, dan *Home Stay* terdapat 24.

Tabel 2.101.

Jumlah Akomodasi Penginapan di Kota Cimahi Tahun 2018-2020

Jenis Akomodasi	2018		2019		2020	
	Jumlah Akomodasi	Kamar	Jumlah Akomodasi	Kamar	Jumlah Akomodasi	Kamar
Hotel Bintang 3	1	60	1	63	8	N/A
Hotel Melati	2	60	9	122		
Hotel Non Melati	5	84	5	84		
Penginapan Remaja	2	120	2	120	N/A	N/A
Pondok Wisata	5	84	16	22	N/A	N/A
Guest House	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A
Home Stay	N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A

*Catatan : Data Tahun 2020 tidak dipisahkan antara hotel bintang, melati, dan non melati

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2021

10. Jumlah Pelanggan yang menggunakan air bersih
- Pelayanan dasar lain yang juga berhubungan dengan sektor perumahan dan kawasan permukiman adalah pelayanan air bersih/ minum. akses air bersih/minum penduduk di Kota Cimahi dipenuhi melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan berasal dari PDAM Tirta Raharja yang dimiliki Kabupaten Bandung, pelayanan UPT Air Minum, dan sumur-sumur artesis yang dikelola oleh KP2A (Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air). sedangkan sistem non perpipaan berupa sumur penduduk yang terlindungi, mata air yang dikelola oleh masyarakat, depot air minum dan sumur artesis dari industri. Untuk jumlah pelanggan air bersih pada tahun 2020 mencapai 15.473 pelanggan dengan volume air yang disalurkan ke pelanggan mencapai 2.408.213 m³.

Tabel 2.102.

Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Tahun 2020

Jumlah Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
15.473	2.408.213	18.606.687.600

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2021

11. Ketersediaan daya listrik

Listrik merupakan sumber energi yang memegang peranan vital bagi setiap kegiatan kehidupan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi. Kota Cimahi tidak memproduksi listrik namun hanya mendistribusikan listrik yang dipasok dari luar Cimahi. Pada tahun 2020. Pada tahun 2020 daya listrik yang disalurkan mencapai 4.623.153.072 Mwh/VA.

Tabel 2.103.
Jumlah Daya Listrik yang Disalurkan Setiap Bulan di Kota Cimahi
Tahun 2020

BULAN	DAYA LISTRIK (kwh)
Januari	377.818.056
Februari	379.511.256
Maret	380.294.956
April	381.234.856
Mei	381.768.006
Juni	381.979.256
Juli	383.215.356
Agustus	386.479.606
September	389.788.606
Oktober	392.168.506
November	393.594.006
Desember	395.300.606
KOTA CIMAHI	4.623.153.072

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2021

12. Rumah tangga yang menggunakan listrik

Berdasarkan data rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2020, dimana jumlah pelanggan listrik pasca bayar listrik mencapai 86.221, sedangkan pelanggan pra bayar listrik mencapai 177.800 pelanggan.

Tabel 2.104.

Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2020

Daya Listrik (watt)	Pasca Bayar	Pra Bayar
450	17.079	21.169
900	40.386	78.572
1300	17.252	47.581
2200	7.179	18.447
3500	1.221	8.256
4400	707	1.307
5500	574	1.433
6600	283	258
7700	136	72
10600	370	209
11000	0	6
13000	0	47
13200	235	143
16500	213	139
23000	214	97
33000	120	53
41500	52	1
53000	40	1
66000	52	0
76000	1	0
82500	26	0
105000	58	0
131000	12	0
147000	11	0
Kota Cimahi	86.221	177.800

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2021

13.
- Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon seluler

Persentase penduduk yang berusia di atas 5 tahun, yang menggunakan HP atau telepon seluler di Kota Cimahi, pada tahun 2019 adalah sebesar 95,16%.

Tabel 2.105.
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Seluler
Tahun 2018-2019

INDIKATOR	2018	2019
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP / telepon seluler	84.36	95.16

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2021

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu factor penting dalam mendorong dan menggerakkan ekonomi suatu daerah. Terutama investasi padat karya yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan daya saing.

Analisis atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap enam indikator, yaitu :

1. Angka kriminalitas

Isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi salah satu isu yang penting untuk diselesaikan karena berkaitan dengan keamanan. Angka kriminalitas di Kota Cimahi menjadi salah satu fokus perhatian baik oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Berdasarkan data Tahun 2016 dari kepolisian resort Kota Cimahi terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di Kota Cimahi, yaitu : Pesantren, Cimahi Utara; Sentral, Cimahi Utara; Permana, Cimahi Utara; Cipageran, Cimahi Utara; Setiamanah, Cimahi Tengah; Padasuka, Cimahi Tengah; Leuwigajah, Cimahi Selatan; Cimindi, Cimahi Tengah; Contong, Cimahi Tengah; dan Nanjung, Cimahi Selatan.

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Cimahi masih terdapat potensi konflik dan rawan terjadi tindak kriminal. Dengan demikian diperlukan upaya peningkatan kesiapan dalam pengelolaan[3], terlebih posisi Kota Cimahi sebagai daerah perlintasan area metropolitan. Selain itu, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering muncul dan berpotensi berkembang adalah konflik antara

buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan upah minimum kota (UMK). Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan industri yang melibatkan masyarakat sebagai pegawainya.

Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2020 yaitu 100 persen.

Tabel 2.106.
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2017 - 2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase Penanganan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kota Cimahi, 2021. Data diolah

2. Jumlah demonstrasi
- Pada tahun 2019 menurut data dari Satpol PP Cimahi terdapat delapan aksi demonstrasi dengan berbagai tuntutan. Adapun rincian demonstrasi tersebut dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.107.
Demonstrasi Tahun 2020

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1.	10 maret 2020	Pelaksanaan kegiatan Pengamanan Unjuk rasa/Audensi dari AGRESI Aliansi Gerakan Rakyat Seluruh Cimahi (SPSI, SBSI'92, SPN, SPMI, KASBI & GMNI) menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Cimahi terkait penolakan Tenaga Outsourcing.
2.	12 maret 2020	Pelaksanaan kegiatan Pengamanan Unjuk rasa/Audensi dari AGRESI Aliansi Gerakan Rakyat Seluruh Cimahi (SPSI, SBSI'92, SPN, SPMI, KASBI & GMNI) menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Cimahi terkait penolakan Tenaga Outsourcing.

NO	TANGGAL	KEGIATAN
3.	12 Desember 2020	Pelaksanaan kegiatan pengamanan unjuk rasa dalam pengawasan dan pengendalian massa yang akan mengikuti unjuk rasa / demo di gedung DPRD. Massa berasal dari ormas Islam se-Kota Cimahi

Sumber : Satpol PP & Damkar, 2021, data diolah

3.
Lama proses perizinan
- Dalam rangka perkembangan iklim investasi di Kota Cimahi, maka dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Waktu penyelesaian izin ditetapkan paling lama 14 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan benar terpenuhi. Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industri 3-5 hari kerja, di dukung di dalam File Standar Pelayanan Minimal DPMPTSP Kota Cimahi. DPMPTSP Kota Cimahi melayani 64 jenis perizinan dan non perizinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah[4] , pemerintah daerah hanya diperkenankan menarik retribusi dari 3 (tiga) jenis objek yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
4.
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
- Sektor Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) terbesar untuk Kota Cimahi. Ada 9 (sembilan) jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda). Adapun rincian jenis pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.108.
Jenis Pajak Daerah Kota Cimahi

NO	JENIS PAJAK	URAIAN
1.	Pajak Hotel	Hotel Melati Satu
		Hotel Bintang Dua
		Losmen /Rumah Penginapan /Pesanggrahan /Hoste /Rumah Kos

NO	JENIS PAJAK	URAIAN
2.	Pajak Restoran	Rumah Makan
		Katering
3.	Pajak Hiburan	Tontonan Film/Bioskop
		Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
		Permainan Ketangkasan
		Kolam Renang
4.	Pajak Reklame	Reklame Papan/ Bill Board/ Videotron/ megatron
		Reklame Kain
		Reklame Melekat/Stiker
		Reklame Berjalan
5.	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan PLN
		Pajak Non PLN/Gen Set
6.	Pajak Parkir	Pajak Parkir
7.	Pajak Air	Pajak Air
8.	Pajak BPHTB	Pajak BPHTB
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Pajak PBB

Sumber : Bapenda Kota Cimahi, 2020, diolah

Selain pajak, retribusi juga menjadi salah satu sumber PAD terbesar untuk Kota Cimahi. Ada 3 (tiga) jenis dan 12 (dua belas) macam retribusi yang diberlakukan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.109.
Jenis dan Macam Retribusi Daerah Kota Cimahi

NO	JENIS	MACAM	URAIAN
1.	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rawat Jalan
			Spesialistik THT
			UGD
			Tindakan Medis
			Laboratorium/ Radiologi
			Pemeriksaan kesehatan (keuring)
			Buta Warna
			Pembinaan Haji
			Tes Kebugaran
			Jamkesmas
			JKN Non Kapitasi
			JKN
		Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Persil
			Pertokoan
			Pasar
			Industri
		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Rumah Sakit
			Pemakaman Jenazah
			Perpanjangan Waktu Pemakaian Tanah
			Pemindahan Kerangka Tanah Cadangan

NO	JENIS	MACAM	URAIAN
		Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	Mobil Barang
			Kendaraan Roda Dua
			Roda Empat
			Mobil Box
		Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pasar
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Uji Pertama / Uji Awal
			Mobil Barang/ Khusus
			Bus/Mobil Penumpang
			Uji Berkala
			Mobil Barang/ Khusus
			Bus/Mobil Penumpang
			Pemeriksaan Teknis
			Mobil Barang/ Khusus
			Bus/ Mobil Penumpang
			Kendaraan Bermotor Roda 2
			Denda Keterlambatan
			Mobil Barang
			Mobil Bus
			Buku Uji
			Tanda Uji
			Tanda Samping Kendaraan
			Cat
			Stiker
			Uji Asap tebal (Smoke)/ Uji Emisi (CO/HC)
			Penerbitan Surat Ket. Rubah Bentuk Kendaraan
			Perubahan thd bak Muatan
			Perubahan thd Karoseri KB
			Surat Keterangan Penilaian Teknis
			Surat Keterangan Rubah Status
			Dari Umum ke tidak Umum
			Dari tidak Umum ke Umum
			Surat Keterangan numpang uji keluar daerah
			Surat Keterangan mutasi keluar
			Penggantian buku uji yang hilang/ rusak
			Penggantian tanda samping
			Cat
			Stiker
		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2.	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Terminal	Kendaraan Umum
			Non Bus
			Ret. Kios
			Sewa Kios
			Ret. MCK
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rusunawa Cigugur Tengah
			Rusunawa Melong
			Rusunawa Leuwigajah
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Sampai Dengan 10 Meter
			11 Sampai Dengan 20 Meter
			21 Sampai Dengan 30 Meter
			31 Sampai Dengan 40 Meter
			41 Sampai Dengan 50 Meter

NO	JENIS	MACAM	URAIAN
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rumah Tinggal
			Industri/Perusahaan
			Sosial
		Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	Ijin Trayek & Kartu Pengawasan

Sumber : Bapenda Kota Cimahi, 2020, diolah

5. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha
- Hingga tahun 2020 terdapat 5 peraturan daerah yang mendukung iklim usaha dengan sasarannya adalah untuk menciptakan investasi yang kondusif. Salah satu trobosan adalah dengan adanya Mall Pelayanan Publik (MPP), diharapkan iklim investasi di Kota Cimahi akan menjadi lebih efisien karena penggunaan sistem yang terintegrasi.

Tabel 2.110.
Jenis dan Macam Retribusi Daerah Kota Cimahi

NO	PERDA	URAIAN
1.	Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2003	Pajak Reklame di Kota Cimahi
2.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011	Pajak Daerah
3.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014	Perubahan atas Peraturan Daerah No.9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014	Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
5.	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018	Penanaman Modal

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM manausia sangat erat kaitannya dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Artinya semakin tinggi tingkat Pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka akan semakin baik pula kulaitas tenaga kerjanya. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan daya saing suatu

daerah. Tingginya kualitas SDM menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu kota.

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap dua indikator yaitu :

- Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kota Cimahi termasuk kota yang memiliki angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang sangat besar yang seharusnya menjadi modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi, sesuai dengan arah prediksi dari bonus demografi. Peningkatan kuantitas tenaga kerja diharapkan dapat berbanding lurus dengan kualitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja di Kota Cimahi salah satunya dapat terlihat dari latar belakang pendidikan pencari kerja.

Menurut data pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan paling banyak memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA/ SMK. Jumlah pencari kerja paling banyak pada urutan kedua adalah jenjang pendidikan S1/S2, seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.111.
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Kota Cimahi Tahun 2015-2020

Tahun	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	S1/S2	
2015	17	143	2.208	138	1.478	1.491	5.475
2016	20	149	1.714	16	317	443	2.659
2017	6	110	1.705	20	172	244	2.257
2019	11	82	2.339	212		402	3.046
2020	4	56	1.620	261			1.941

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, 2010, diolah

Kondisi yang diharapkan ternyata belum bisa terwujud karena kemungkinan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara

karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik jenis pekerjaan yang ada. Latar belakang pendidikan saja belum menjadi syarat cukup untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan dan keahlian yang bersertifikasi telah menjadi syarat penting bagi tenaga kerja untuk dapat memasuki pasar kerja. Kurangnya sinergi antara para pelaku industri seperti perusahaan, Apindo, Balai Latihan Kerja (BLK) mengenai kesesuaian kompetensi dan penyerapan langsung tenaga kerja yang telah siap pakai juga menjadi salah satu penyebab kurangnya penyerapan tenaga kerja di Kota Cimahi.

2. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)
- Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi pula beban yang ditanggung, begitu pula sebaliknya. Indikator ini dihitung dengan rumus formula jumlah penduduk usia tidak produktif (usia <15 tahun + usia >64 tahun) dibagi jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64) dan dikalikan 100.

Tabel 2.112.
Rasio Ketergantungan di Kota Cimahi Tahun 2015-2019

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Ketergantungan	18,54	18,58	18,59	18,49	15,23

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rasio ketergantungan di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Walau demikian, di tahun 2016 dan 2017 sempat terjadi perlambatan penurunan. Setelah tahun 2017, rasio ketergantungan kembali menurun dan bahkan cukup signifikan turun pada tahun 2019 menjadi 15,23 persen. Ini berarti 1 penduduk usia produktif di Cimahi menanggung beban 15 orang tidak produktif.

2.1.4.5. Indeks Daya Saing (IDSD)

Analisis deskriptif daya saing Kota Cimahi berdasarkan hasil pengukuran indeks daya saing (IDSD) Kota Cimahi tahun 2020. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2020 dilakukan melalui pengisian kuesioner dan penyusunan laporan analisis yang diselenggarakan Ditjen Penguatan Inovasi, Direktorat Sistem Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia.

Indeks Daya Saing Daerah mempresentasikan tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Sehingga keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan Kota Cimahi yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif. Selain itu, IDSD diharapkan pula dapat menjadi komponen dalam merumuskan dan menetapkan model indeks daya saing nasional serta menjadi alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) terdiri dari empat aspek, yaitu Aspek Penguat/ *Enabling Environment*, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pasar dan Aspek Ekosistem Inovasi. Keempat aspek tersebut selanjutnya didukung oleh 12 pilar, 23 dimensi data dan 97 indikator. Hasil capaian skor IDSD akan dapat menunjukkan indeks daya saing daerah Kota Cimahi Tahun 2020 dan akan memberikan gambaran ringkas mengenai potensi serta gap daya saing Kota Cimahi bagi pencapaian tujuan pembangunan yaitu integrasi ke dalam laporan RPJMD Kota Cimahi. Kota Cimahi, sebagaimana daerah lainnya, diharapkan untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan daya saing dengan mengintervensi unsur-unsur yang paling lemah serta mengarahkan dan mensinergikan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki stakeholder terkait dengan didukung kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) Kota Cimahi pada tahun 2020 menggunakan data tahun 2018 dan 2019 menunjukkan angka sebesar 3,8196. Dengan demikian Kota Cimahi tergolong sebagai daerah dengan indeks daya saing daerah (IDSD) sangat tinggi menurut Kemenristek/BRIN. Adapun nilai masing - masing aspek (faktor) adalah Sumber Daya Manusia/*Human Capital* (3.2292), Faktor Penguat/*Enabling Environment* (3.5972), Faktor Pasar/*Market* (3.9583) dan Ekosistem Inovasi (4.4938).

Perbandingan tiap aspek dan komponen pendukungnya akan dilakukan dengan membandingkan tiap nilai komponen terhadap nilai indeks daya saing daerah (IDSD). Aspek ekosistem menempati komponen tertinggi atau terkuat yang menunjukkan bahwa ekosistem inovasi di Kota Cimahi sudah sangat baik sekali dengan indeks sebesar 4,4938. Hal ini bisa terjadi karena Kota Cimahi telah memiliki lembaga *technopark* pada tingkat pengelola UPT Cimahi Technopark dengan akreditasi Madya. Selain itu tingginya aspek ini karena telah tumbuhnya beberapa sentra produk unggulan dan Kota Cimahi dan juga telah memiliki pengampu bidang urusan kelitbangan pada level Eselon III di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tingginya nilai ekosistem inovasi juga dapat mencerminkan telah efektifnya kolaborasi riset dan teknologi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi lokal, komunitas dan media. Data ini konsisten dengan hampir sepenuhnya indeks Pilar Kesiapan Teknologi (5,0000) dan Pilar Kapasitas Inovasi (4,8148). Akan tetapi, masih terdapat pekerjaan rumah yaitu belum optimalnya Kinerja Dinamika Bisnis (3,6667).

Upaya peningkatan dinamika bisnis yang telah dilakukan diantaranya melalui pemanfaatan teknologi yang lebih tinggi dalam *e-marketing* serta peningkatan kualitas produk dan standarisasi produk yang dihasilkan oleh sentra-sentra produk unggulan di Kota Cimahi. Pengembangan inkubasi bisnis untuk *technopreneurship* juga akan terus dilakukan termasuk di lokus – lokus sentra produk unggulan, sehingga mampu menciptakan pelaku usaha baru dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Aspek pasar merupakan komponen kedua tertinggi. Aspek ini didukung oleh Pilar Efisiensi Pasar Produk, Pilar Ketenagakerjaan, Pilar Akses Keuangan, dan Pilar Ukuran Pasar. Ukuran pasar Kota Cimahi memiliki nilai sebesar 4,3333 dan sudah termasuk sangat baik karena kegiatan ekonomi Kota Cimahi sudah mampu melakukan *export* produknya ke luar negeri khususnya produk-produk tekstil. Keuntungan absolut berupa posisi geografis yang dekat dengan ibu kota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung memberikan peluang besar bagi penjualan produk-produk daerah Kota Cimahi. Pemanfaatan IT dalam bidang *e-commerce* pun cukup tinggi karena memang didukung oleh tingkat melek internet (*internet literacy*) yang tinggi di kalangan UKM di Kota Cimahi.

Aspek keuangan Kota Cimahi sudah termasuk sangat tinggi dengan indeks sebesar 4,0000. Berhasilnya pengembangan *technopreneurship* dan pengembangan klaster-klaster (sentra ekonomi) mendorong pemanfaatan kredit untuk modal usaha. Kelebihan lainnya adalah bahwa pengembangan kewirausahaan baik kewirausahaan konvensional maupun kewirausahaan sosial telah didukung oleh *angel investor* khususnya bagi pelaku usaha animasi dan IT di Kota Cimahi. Pemanfaatan CSR pun telah cukup baik dilakukan oleh *startups* kewirausahaan sosial.

Efisiensi Pasar Produk di Kota Cimahi memiliki indeks sebesar 3,8333. Upaya meningkatkan efisiensi pasar dilakukan dengan memberikan fasilitas perizinan usaha dengan cepat dan pemanfaatan IT. Kota Cimahi sedang mengembangkan *Mall* Pelayanan Publik yang diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pelayanan publik. Selain meningkatkan rantai nilai produk lokal di klaster-klaster ekonomi yang ada, perlu juga dilakukan upaya pemangkasan jalur distribusi barang agar dapat sampai ke konsumen, sehingga harga produk bisa menjadi lebih kompetitif. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan *marketplace* oleh para UKM/pedagang/petani di Kota Cimahi.

Pilar Ketenagakerjaan merupakan komponen terendah dari Faktor Pasar/Market. Rendahnya indeks ini disebabkan masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Cimahi yaitu sebesar 7,935% pada

tahun 2018 dan 8,08% pada tahun 2019. Belum optimalnya sertifikasi tenaga kerja dan masih terdapatnya *asymmetrical information* bagi pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang tersedia. Cimahi perlu meningkatkan *skill* angkatan kerjanya sesuai permintaan industri dan menerapkan sertifikasi serta menjembatani akses informasi lowongan pekerjaan melalui pengoptimalan sistem informasi Sistem *Link & Match* (SILIMA).

Aspek *Enabling*/Penguat menempati komponen ke-3 dengan indeks sebesar 3,5972. Sangat disayangkan aspek penguatan ini belum optimal di Kota Cimahi. Aspek ini didukung oleh Pilar Kelembagaan dengan nilai 3,8750 kemudian Pilar Perekonomian Daerah dengan nilai 3,5000 dan Pilar Infrastruktur dengan nilai 3,4167. Aspek Sumber Daya Manusia ternyata menjadi aspek terendah. Aspek ini berasal dari Pilar Pendidikan & Keterampilan dengan nilai 3.5833 dan Pilar Kesehatan dengan nilai 2.8750.

Terjadinya persaingan global dan juga antar daerah mendorong upaya bagi peningkatan indeks daya saing. Perhatian sebaiknya diberikan pada upaya meningkatkan kinerja aspek, pilar dan komponen yang memiliki nilai yang rendah dibandingkan nilai total indeks daya saing daerah (IDSD). Diharapkan strategi ini akan mampu mendongkrak nilai indeks daya saing Kota Cimahi kedepannya.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD diperoleh dari hasil rekap evaluasi renja PD di lingkungan Kota Cimahi pada tahun 2020. Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat capaian kinerja program dan tingkat capaian penyerapan anggaran. Pada tahun 2020 dari 180 program dan 1.216 kegiatan terealisasi 169 program dan 926 kegiatan dengan total anggaran Rp 687.640.512.627,00 dan terealisasi Rp 511.336.316.772,00 atau 74,36%.

Tabel 2.113.

Jumlah Program dan Kegiatan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020

Kota Cimahi

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2020		Jumlah Program/Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan Triwulan IV Thn 2020			
		Prog	Keg	Prog	%	Keg	%
1.	Bag. Adbang	1	2	1	100,00	2	100,00
2.	Bag. Adm. Kesra	1	7	1	100,00	7	100,00
3.	Bag. Hukum	1	5	1	100,00	5	100,00
4.	Bag. Organisasi	1	3	1	100,00	3	100,00
5.	Bag. Pemerintahan	6	7	6	100,00	7	100,00
6.	Bag. Pengadaan Barang Dan Jasa	1	3	1	100,00	3	100,00
7.	Bag. Perekonomian	3	4	2	100,00	4	100,00
8.	Bag. Tata Usaha	2	11	2	100,00	7	100,00
9.	Bag. Umum Dan Protokol	2	22	2	100,00	20	100,00
10.	BAPENDA	4	28	4	100,00	26	100,00
11.	BAPPEDA	5	38	4	100,00	30	100,00
12.	BKPSDMD	4	32	3	100,00	26	100,00
13.	BPBD	4	34	4	100,00	21	100,00
14.	BPKAD	4	47	4	100,00	38	100,00
15.	DINKES	6	66	6	100,00	58	100,00
16.	DINSOSPP	7	47	7	100,00	32	100,00
17.	DISBUDPARPORA	7	57	7	100,00	31	100,00
18.	DISDIK	6	98	6	100,00	56	100,00
19.	DISDUKCAPIL	4	31	4	100,00	21	100,00
20.	DISHUB	6	41	5	100,00	33	100,00
21.	DISKOMINFO	8	53	8	100,00	39	100,00
22.	DISNAKER	5	35	4	100,00	23	100,00
23.	DISPANGTAN	7	42	5	100,00	28	100,00
24.	DISPENMOPTSP	4	44	3	100,00	26	100,00
25.	DLH	11	44	11	100,00	38	100,00
26.	DPKP	8	40	8	100,00	32	100,00
27.	DPKUKMP	12	49	12	100,00	39	100,00
28.	DPUPR	8	34	8	100,00	28	100,00
29.	INSPEKTORAT	3	35	3	100,00	26	100,00
30.	KEC CIMAHI SELATAN	9	58	9	100,00	53	100,00
31.	Kec Cimahi Tengah	9	66	9	100,00	54	100,00
32.	Kec Cimahi Utara	9	52	9	100,00	45	100,00
33.	Kesatuan Bangsa	6	26	4	100,00	17	100,00
34.	RSUD Cibabat	1	2	1	100,00	2	100,00
35.	SATPOLPP DAMKAR	5	27	5	100,00	21	100,00
36.	SETWAN	4	27	4	100,00	26	100,00
	Jumlah	180	1216	169	100,00	926	100,00

Sumber : Bappeda, data diolah (2020)

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2020 pengolahan data, diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada RKPD Kota Cimahi tahun 2020 sebesar 232,30 angka ini masuk dalam kategori sangat tinggi; dan

2. Rata-rata capaian kinerja penyerapan anggaran pada RKPD Kota Cimahi pada tahun 2020 sebesar 74,36 persen dan masuk dalam kategori sedang.

Berikut ini rata-rata tingkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran menurut perangkat daerah.

Tabel 2.114.
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Kinerja		Anggaran	
		%	Kategori	%	Kategori
1.	Bag. Adbang	100,00	Sangat Tinggi	95,18	Sangat Tinggi
2.	Bag. Adm. Kesra	78,91	Tinggi	52,79	Rendah
3.	Bag. Hukum	98,56	Sangat tinggi	83,59	Tinggi
4.	Bag. Organisasi	25,00	Sangat Rendah	71,00	Sedang
5.	Bag. Pemerintahan	70,04	Sedang	79,34	Tinggi
6.	Bag. Pengadaan Barang Dan Jasa	100,00	Sangat Tinggi	96,44	Sangat Tinggi
7.	Bag. Perekonomian	46,67	Sangat Rendah	62,92	Rendah
8.	Bag. Tata Usaha	54,32	Rendah	78,82	Tinggi
9.	Bag. Umum Dan Protokol	101,77	Sangat Tinggi	80,74	Tinggi
10.	BAPENDA	262,38	Sangat Tinggi	81,04	Tinggi
11.	BAPPEDA	59,94	Rendah	90,98	Tinggi
12.	BKPSDMD	52,64	Rendah	85,99	Tinggi
13.	BPBD	63,25	Rendah	90,24	Tinggi
14.	BPKAD	1038,01	Sangat Tinggi	79,68	Tinggi
15.	DINKES	57,84	Rendah	73,05	Sedang
16.	DINSOSPP	86,59	Tinggi	79,43	Tinggi
17.	DISBUDPARPORA	55,32	Rendah	70,46	Sangat Tinggi
18.	DISDIK	452,78	Sangat Tinggi	83,35	Tinggi
19.	DISDUKCAPIL	65,50	Rendah	83,81	Tinggi
20.	DISHUB	74,84	Sedang	89,93	Tinggi
21.	DISKOMINFO	1992,31	Sangat Tinggi	92,02	Sangat Tinggi
22.	DISNAKER	71,96	Sedang	88,20	Tinggi
23.	DISPANGTAN	58,83	Rendah	90,69	Tinggi
24.	DISPENMOPTSP	39,76	Sangat Rendah	18,11	Sangat Rendah
25.	DLH	531,83	Sangat Tinggi	89,95	Tinggi
26.	DPKP	285,50	Sangat Tinggi	83,68	Tinggi
27.	DPKUKMP	33,88	Sangat Rendah	50,66	Sangat Rendah
28.	DPUPR	96,95	Sangat Tinggi	39,54	Sangat Rendah
29.	INSPEKTORAT	120,27	Sangat Tinggi	97,56	Sangat Tinggi
30.	Kec Cimahi Selatan	110,36	Sangat Tinggi	87,57	Tinggi
31.	Kec Cimahi Tengah	342,60	Sangat Tinggi	88,05	Tinggi
32.	Kec Cimahi Utara	108,38	Sangat Tinggi	100,41	Sangat Tinggi
33.	Kesatuan Bangsa	79,60	Tinggi	65,57	Rendah
34.	RSUD Cibabat	63,95	Rendah	79,54	Tinggi
35.	SATPOLPP DAMKAR	41,49	Sangat Rendah	88,46	Tinggi
36.	SETWAN	122,46	Sanga Tinggi	80,94	Tinggi
Rata-Rata		232,30	Sangat Tinggi	74,36	Sedang

Sumber : hasil evaluasi Renja PD Tahun 2020 Kota Cimahi, diolah

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil pada tahun 2020 adalah program dan kegiatan yang capaiannya antara 0 persen sampai dengan 65 persen dengan predikat penilaian capaian kinerja sangat rendah sampai rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dapat dilihat pada tabel. Pada tabel tersebut dapat dilihat permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan realisasi program atau kegiatan tidak dapat memenuhi target kinerja.

Tabel 2.115.

Realisasi Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
BAG. ADM. KESRA	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN.	20%	
BAG. HUKUM	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0%	
BAG. ORGANISASI	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	0%	
		PENATAAN KELEMBAGAAN	0%	
		PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0%	
BAG. PEMERINTAHAN	PROGRAM KEMASYARAKATAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN, DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	PEMBINAAN ADMINISTRASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1%	
		FASILITASI KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	50%	
BAG. PEREKONOMIAN	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	FASILITASI KOORDINASI ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	0%	
		FASILITASI KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	0%	
		PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI LOKAL	0%	
BAG. TATA USAHA	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	0%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	0%	
		PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	40%	
		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	58%	
BAG. UMUM DAN PROTOKOL	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	FASILITASI KEGIATAN HARIAN DAN HARI BESAR	61%	
		KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	50%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENYEDIAAN RUMAH DINAS KDH DAN WAKDH	50%	
		PENYEDIAAN SERAGAM BESERTA PERLENGKAPANNYA KDH DAN WAKDH	30%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
Bapenda	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
BAPPEDA	PROGRAM FORMULASI DOKUMEN, KOORDINASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI, PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN	EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	0%	
		FASILITASI KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN	0%	
		KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN TATA RUANG	50%	
		KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN	0%	
		KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA	0%	
		KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN INVESTASI	0%	
		KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	0%	
		KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA	0%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG (RPJP, RPJMD, RKPD)	50%	
		PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP)	0%	
		PENGKAJIAN, KOORDINASI DAN PERUMUSAN RTRW DAERAH	0%	
		PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIK KADER PERENCANA	0%	
	PROGRAM KELITBANGAN UTAMA DAN PENDUKUNG	KOORDINASI DAN KERJASAMA DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0%	
		PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI SERTA EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0%	
		PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI SERTA EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI	17%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	0%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	50%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	33%	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	35%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
BKPSDMD	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	FASILITASI BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA KORPRI DAN PENYULUHAN HUKUM	0%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
		PELAYANAN SUMBER DAYA APARATUR (HUMAN CAPITAL CARE)	0%	
		PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT	0%	
		PENEMPATAN PNS	33%	
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	0%	
		PENINGKATAN DAN PENGAMALAN AGAMA	33%	
		PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI	0%	
		PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA BAGI APARATUR	0%	
		PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS	25%	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	0%	
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0%	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	25%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
BPBD	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI PRABENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA	FASILITASI DAN STIMULASI REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM	33%	
		PELATIHAN DASAR KEBENCANAAN BAGI APARATUR DAN RELAWAN	0%	
		PELATIHAN PENANKSIRAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM	0%	
		PELATIHAN PENERAPAN RANCANG BANGUN TAHAN BENCANA DAN PERALATAN YANG LEBIH BAIK	0%	
		PELATIHAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEJADIAN BENCANA	0%	
		PELATIHAN SIMULASI PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	0%	
		PELATIHAN TRAUMA HEALING BAGI KORBAN BENCANA ALAM	0%	
		PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN POTENSI BENCANA	0%	
		PERBAIKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN PASCA BENCANA	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	0%	
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	0%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	25%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	0%	
		PENGADAAN MEBELEUR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	0%	
BPKAD	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	50%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	25%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	16%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	58%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	58%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH, BARANG MILIK DAERAH, PENDAPATAN DAERAH DAN PERBENDAHARAAN DAERAH	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
		FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	0%	
		FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	0%	
		INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	0%	
		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	17%	
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM RKBMD	0%	
		PENILAIAN ASET DAERAH	0%	
		PENYUSUNAN KAJIAN DAN IDENTIFIKASI SUMBER DANA APBD	0%	
Dinas Pangan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
		PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN	ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI DAN SUPLAI PANGAN	0%	
		OPERASIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN	0%	
		PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN MASYARAKAT	0%	
		PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH	0%	
		PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	0%	
		PENYULUHAN SUMBER PANGAN ALTERNATIF	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUK PERTANIAN/PETERNAKAN/PERIKANAN	PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH	0%	
		PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH	0%	
		TEMU USAHA PERIKANAN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	0%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	0%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	0%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN /PETERNAKAN SERTA PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0%	
		PEMBELIAN DAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN DAN PAKAN TERNAK	0%	
		PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN	0%	
		PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN	33%	
		PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK HASIL PERIKANAN	0%	
		PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PERIKANAN/PENYULUH PERTANIAN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	45%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
DINKES	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN	JAMINAN PERSALINAN	45%	
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIBEBER	62%	
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIBEUREUM	18%	
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIGUGUR TENGAH	44%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH	27%	
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIMAHI UTARA	21%	
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIPAGERAN	14%	
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CITEUREUP	56%	
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	0%	
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS LEUWIGAJAH	52%	
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS MELONG ASIH	32%	
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS MELONG TENGAH	58%	
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS PADASUKA	8%	
		PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS PASIRKALIKI	52%	
		PEMBIAYAAN KESEHATAN KOTA CIMAHI	43%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	0%	
		EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	0%	
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS	17%	
		PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	0%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	0%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	25%	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
	PROGRAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN	Bantuan Operasional Kesehatan	10%	
		PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	60%	
		PELAYANAN PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	63%	
		PELAYANAN SUNATAN MASSAL	0%	
		PENANGGULANGAN HIV AIDS	56%	
		PENANGGULANGAN MASALAH GIZI MASYARAKAT	45%	
		PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	1%	
		PENINGKATAN KESEHATAN LANSIA	48%	
		PENINGKATAN KIE DAMPAK ASAP ROKOK	0%	
		PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN	33%	
		PENINGKATAN PELAYANAN IMUNISASI	60%	
		PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	30%	
		PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN / MASYARAKAT DI	0%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
		BIDANG OBAT DAN MAKANAN		
		PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	0%	
		PENINGKATAN PROMOSI OBAT BAHAN ALAMI ASLI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	0%	
		PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	0%	
		PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	0%	
		PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT	0%	
DinsosPP	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB	0%	
		PELAYANAN KIE	22%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
		PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA	0%	
		PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL	PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KLB	0%	
		PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETERAMPILAN ANAK TERLANTAR	0%	
		PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA	0%	
		PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PELATIH DAN PENDIDIK	0%	
		PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	0%	
		PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	0%	
		PENUNJANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN	0%	
		PENDUKUNG KOTA LAYAK ANAK	0%	
Disbudparpora	PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN	MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN	0%	
		PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	0%	
		PEMBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN DAN KERJASAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN	0%	
		PEMBINAAN ORGANISASI KEBUDAYAAN DI KOTA CIMAHI	0%	
		PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM	0%	
		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL DAERAH	0%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	PAMERAN PRESTASI HASIL KARYA PEMUDA	0%	
		PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA	40%	
		PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR KEAMANAN LINGKUNGAN	0%	
		PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN	0%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	0%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
		PELATIHAN PEMANDU WISATA	0%	
		PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFORMASI DAN DATABASE	0%	
		PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET WISATA UNGGULAN	0%	
		PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA	0%	
		PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	15%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	0%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	0%	
		PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	0%	
		PENGADAAN MEBELEUR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA OLAHRAGA	PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN YANG BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI	0%	
		PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT	0%	
		PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT	0%	
		PENGADAAN PERALATAN OLAHRAGA	0%	
		PENGEMBANGAN OLAHRAGA LANJUT USIA DAN PENYANDANG CACAT	0%	
		PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN	0%	
Disdik	PROGRAM PENDIDIKAN DUA BELAS TAHUN	BANTUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI (DSP)	0%	
		BANTUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI (SPP)	0%	
		BANTUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA/SMK/MA (DSP)	0%	
		BANTUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA/SMK/MA (SPP)	0%	
		BANTUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP/MTS (DSP)	0%	
		BANTUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP/MTS (SPP)	0%	
		OPTIMALISASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JENJANG SD	4%	
		PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY JENJANG SD	0%	
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary jenjang SMP	0%	
		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir jenjang SMP	0%	
		PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA, DAN FASILITAS PARKIR JENJANG SD	0%	
		PEMBINAAN SMP TERBUKA	0%	
		PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU SD/MI/SDLB	0%	
		Penambahan ruang kelas baru SMP	0%	
		PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH JENJANG SD	0%	
		PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH JENJANG SMP	0%	
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Belajar dan Ruang Penunjang Belajar jenjang SMP	0%	
	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	OPTIMALISASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL	50%	
		PEMASYARAKATAN MINAT DAN	0%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
		KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR		
		PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN	0%	
		PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR, DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	0%	
		PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	38%	
		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL	0%	
		PERLUASAN AKSES PROGRAM INKLUSIF JENJANG PAUD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	DISTRIBUSI/PEMERATAAN GURU KELAS/MAPEL	0%	
		FASILITASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN FUNGSIONAL NON PNS DAN TUNJANGAN KUALIFIKASI S1/D4 JENJANG PAUD	0%	
		FASILITASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN FUNGSIONAL NON PNS DAN TUNJANGAN KUALIFIKASI S1/D4 JENJANG SD	0%	
		FASILITASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN FUNGSIONAL NON PNS, DAN TUNJANGAN KUALIFIKASI S1/D4 JENJANG SMP	0%	
		PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK	0%	
		PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PAUD DAN DIKMAS	0%	
		PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG SD	0%	
		PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI JENJANG PAUD	0%	
		PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI JENJANG SD	0%	
		PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI JENJANG SMP	0%	
		PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI JENJANG SD	0%	
		PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI JENJANG SMP	0%	
		PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM JENJANG SMP	0%	
		PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH	0%	
		PEMBINAAN MGMP SMP	0%	
		PEMBINAAN MINAT, BAKAT, DAN KREATIVITAS SISWA JENJANG SD	0%	
		PEMBINAAN MINAT, BAKAT, DAN KREATIVITAS SISWA JENJANG SMP	22%	
		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA SMP	0%	
		PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN KARAKTER BANGSA SD	0%	
		REVITALISASI KKG SD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	13%	
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
DisdukCapil	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI	PEMUTAKHIRAN DATA	0%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	KEPENDUDUKAN	KEPENDUDUKAN		
		PENGENDALIAN PENDUDUK NON PERMANEN	0%	
		PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0%	
		SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	50%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	0%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	45%	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
DISHUB	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS	PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN	0%	
		PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM	0%	
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	0%	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	PELAKSANAAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR	0%	
		PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PERPARKIRAN	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMANTAU KESELAMATAN	6%	
		PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG	0%	
		SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SARANA PRASARANA ANGKUTAN	KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	0%	
		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN HALTE/SHELTER	0%	
		PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL	0%	
		PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN	0%	
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	50%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	24%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	23%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	7%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	0%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
Diskominfo	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	OPERASIONAL PERPUSTAKAAN UMUM KOTA CIMAHI	44%	
		PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA	33%	
		PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGELOLA PERPUSTAKAAN	16%	
		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	0%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM PENGELOLA DATA/INFORMASI/STATISTIK	49%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	0%	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	0%	
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	0%	
		PENINGKATAN PELAYANAN KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAERAH	0%	
		PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	26%	
		PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT	41%	
		PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR TEHNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	0%	
		PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	0%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PEYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	33%	
		PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KOTA	0%	
	PROGRAM SISTEM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEARSIPAN	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	0%	
		PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEARSIPAN	0%	
		PENGEMBANGAN SDM KEARSIPAN	0%	
		PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KEARSIPAN	0%	
		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS	0%	
		PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN ARSIP INAKTIF	0%	
Disnaker	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH	PENYUSUNAN KAJIAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK KOTA CIMAHI	0%	
		SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG KETENAGAKERJAAN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI KEMANDIRIAN DAN KREATIFITAS PENCARI KERJA	0%	
		KERJA SAMA PENEMPATAN TENAGA KERJA DENGAN PERUSAHAAN	0%	
		MONITORING DAN EVALUASI KETENAGAKERJAAN	0%	
		PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA	0%	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA	0%	
		SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	0%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	0%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENATAAN ARSIP DAERAH	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	0%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
DispenmoPTSP	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	25%	
		PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	0%	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	35%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	3%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	0%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	FASILITASI PENANGANAN PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL	0%	
		MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN PEMBANGUNAN	0%	
		MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	0%	
		PEMBUATAN MEDIA INFORMASI PERIZINAN	0%	
		PENDATAAN DAN PELAPORAN PERUSAHAAN NON-SPIPISE	4%	
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0%	
		PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	0%	
		PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA	0%	
		PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	0%	
		PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN PEMBANGUNAN	0%	
		PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI	0%	
		PENYUSUNAN BAHAN PROMOSI UNGGULAN DAERAH	0%	
		SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERIZINAN PEMBANGUNAN	0%	
		SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	0%	
DLH	PROGRAM PENANGANAN TIMBULAN SAMPAH	KERJASAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0%	
		PENINGKATAN KINERJA PENGANGKUTAN SAMPAH TERPILAH	0%	
		PENINGKATAN KINERJA PENGUMPULAN SAMPAH TERPILAH	27%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	0%	
		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU	PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU	0%	
		PEMELIHARAAN RTH	0%	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA	0%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
		KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL	10%	
		PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP	54%	
		PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	30%	
		PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	0%	
		PENGEMBANGAN PRODUKSI RAMAH LINGKUNGAN	0%	
		PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN	50%	
		PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)	0%	
	PROGRAM PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH	PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PER KAPITA	39%	
		PENINGKATAN KINERJA DAUR ULANG SAMPAH NON ORGANIK	0%	
		PENINGKATAN KINERJA DAUR ULANG SAMPAH ORGANIK	9%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AIR PERMUKAAN	PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN LABORATORIUM	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS UDARA	PEMANTAUAN KUALITAS UDARA	0%	
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	56%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	50%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	0%	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	22%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM	0%	
		PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR	0%	
DPKP	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PEMBANGUNAN DEKORASI KOTA BARU	0%	
		PEMELIHARAAN DEKORASI KOTA	0%	
		PENGADAAN PEMAKAMAN	0%	
		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERUMAHAN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AIR BERSIH	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
DPKUKMP	PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN	KAJIAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN	0%	
		PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN	0%	
	PROGRAM PEMBENTUKAN SENTRA JASA/PERDAGANGAN	KAJIAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA JASA/PERDAGANGAN	0%	
		PEMBENTUKAN SENTRA JASA DAN PERDAGANGAN	0%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI KECIL MENENGAH	PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLUSTER INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	28%	
		PEMBINAAN KETERKAITAN INDUSTRI INDUSTRI HULU HINGGA KE HILIR	0%	
		PEMBINAN KEMAMPUAN, PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI	21%	
		PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI KOTA (RPIK)	0%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	30%	
		FASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	0%	
		PEMETAAN DAN PENDATAAN UKM	25%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	0%	
		PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PENGLOLAAN PERGUDANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG	0%	
		PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PASAR MODERN DAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA	0%	
		PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	0%	
		PEMETAAN DAN PENDATAAN KOPERASI	0%	
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI KOPERASI	0%	
		PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA USAHA KOPERASI	0%	
		PENINGKATAN POLA USAHA KOPERASI	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	33%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	0%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	40%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	4%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	9%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	36%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	0%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	49%	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetroteologian daerah	18%	
DPUPR	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	PEMBANGUNAN JALAN	0%	
		PEMBANGUNAN JEMBATAN	0%	
	PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	0%	
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN	0%	
	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	PELATIHAN APARAT DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	0%	
		PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KONSTRUKSI	PEMBERDAYAAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI	0%	
		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN	50%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	0%	
		PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	0%	
		PENGADAAN MEBELEUR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI	KETERAMPILAN DAN PROFESIONALISME	25%	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN	0%	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PEMERIKSAAN TERTENTU	0%	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PENANGANAN KASUS PENGADUAN	1%	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI	32%	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA REVIU RKA	0%	
		PEMBINAAN PEGAWAI	0%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN	24%	
KEC CIMAHI SELATAN	PROGRAM KEMASYARAKATAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN, DUKUNGAN MANAJEMEN	PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN CIBEBER	20%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN CIBEUREUM	35%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN LEUWIGAJAH	28%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN MELONG	16%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN UTAMA	51%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI SELATAN	0%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MELONG	19%	
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN	43%	
		PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT	0%	
	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN TATA RUANG	50%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	50%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	3%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
KEC CIMAHI TENGAH	PROGRAM KEMASYARAKATAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN, DUKUNGAN MANAJEMEN	PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KECAMATAN CIMAHI TENGAH	0%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN BAROS	0%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN CIGUGUR TENGAH	0%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN CIMAHI	0%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN KARANGMEKAR	0%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN PADASUKA	0%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN SETIAMANAH	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	0%	
		PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	0%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	3%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
KEC CIMAHI UTARA	PROGRAM KEMASYARAKATAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN URUSAN	PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN CIPAGERAN	0%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI	0%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	PEMERINTAHAN, DUKUNGAN MANAJEMEN	KELURAHAN CITEUREUP		
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN DI KELURAHAN PASIRKALIKI	0%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN KECAMATAN CIMAHI UTARA	0%	
		PELAKSANAAN PHBA DAN PHBN KELURAHAN CIBABAT	0%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CIBABAT	15%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CIPAGERAN	14%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CITEUREUP	15%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PASIRKALIKI	13%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	6%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERLJINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0%	
KESBANG	PROGRAM KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Pemantauan Pileg dan Pilpres Tahun 2019	0%	
		PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	0%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	0%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	0%	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	0%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	50%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
RSUD CIBABAT	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUJUKAN	PENINGKATAN PELAYANAN RSUD CIBABAT	43%	
Satpol PP dan Damkar	PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	FASILITASI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0%	
		PEMBINAAN LINMAS	0%	
		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	6%	
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	13%	
		PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	0%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	25%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	0%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	0%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	0%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN	3%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
		PERALATAN KANTOR		
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	0%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	0%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	33%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	0%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	42%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0%	
SETWAN	PROGRAM ADMINISTRASI, DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	RESES	33%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	8%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	0%	
RATA-RATA CAPAIAN			7%	

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil pada tahun 2020 adalah program dan kegiatan yang capaiannya antara 76% sampai dengan 100% dengan predikat penilaian realisasi kinerja tinggi dan sangat tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.116.
Realisasi Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
BAG. ADBANG	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	EVALUASI DAN PELAPORAN	100%	
		PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA	100%	
BAG. ADM. KESRA	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	FASILITASI KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN	97%	
		PELAYANAN KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN.	75%	
		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA	100%	
		SINERGITAS PELAKSANAAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.	86%	
		SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN	75%	
		SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100%	
BAG. HUKUM	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN	FASILITASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA(RANHAM)	100%	
		FASILITASI SOSIALISASI	100%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	PELAYANAN ADMINISTRATIF	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
		KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAERAH	100%	
		PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100%	
BAG. ORGANISASI	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	100%	
		PENATAAN KELEMBAGAAN	100%	
		PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	
BAG. PEMERINTAHAN	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	FASILITASI /PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENYEDIAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK	98%	
		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN	100%	
		PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	75%	
	PROGRAM KEMASYARAKATAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN, DUKUNGAN MANAJEMEN	FASILITASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	67%	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	PENATAAN BATAS WILAYAH	100%	
Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	PELAYANAN PENGADAAN	100%	
		PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PENGADAAN	100%	
		TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN PENGADAAN	100%	
BAG. PEREKONOMIAN	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	FASILITASI KOORDINASI ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	93%	
BAG. TATA USAHA	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	82%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	FASILITASI PERSURATAN PIMPINAN DAERAH	77%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
BAG. UMUM DAN PROTOKOL	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	DIALOG / AUDIENSI DENGAN TOKOH MASYARAKAT	100%	
		KUNJUNGAN KERJA /INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	100%	
		PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAG A PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI	100%	
		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KDH DAN WAKDH	100%	
		PENYEDIAAN TENAGA PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI KDH DAN WAKDH	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN KOMPONEN LISTRIK/PENERANGAN KANTOR	100%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%		
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%		
Bapenda	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	100%		
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH, BARANG MILIK DAERAH, PENDAPATAN DAERAH DAN PERBENDAHARAAN DAERAH	PENGAWASAN PENERIMAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	95%		
		PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI	100%		
		PENYUSUNAN TARGET PENDAPATAN	100%		
BAPPEDA	PROGRAM FORMULASI DOKUMEN, KOORDINASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI, PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN	PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN	100%		
		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJP, RPJMD, RKPD)	86%		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	100%		
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	75%		
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	75%		
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	83%		
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	75%		
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	75%		
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	75%		
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	75%		
	BKPSDMD	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	85%	
			PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI	93%	
PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT			66%		
PENEMPATAN PNS			100%		
PENGADAAN PNS			96%		
PENGEMBANGAN DATA KEPEGAWAIAN			99%		
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI			100%		
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI			81%		
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI			100%		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%		
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%		
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%		
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	100%		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	75%			

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	APARATUR	PENATAAN ARSIP DAERAH	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	75%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	75%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
BPBD	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI PRABENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA	MITIGASI BENCANA	100%	
		PENGEMBANGAN APLIKASI IT KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN TANGGAP BENCANA	100%	
		PENINGKATAN KAPASITAS TANGGAP DARURAT BENCANA	100%	
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA		100%	
			100%	
			100%	
			100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
			100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	100%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	100%	
BPKAD	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	75%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	83%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENATAAN ARSIP DAERAH	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	82%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	83%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	100%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH, BARANG MILIIK DAERAH, PENDAPATAN DAERAH DAN PERBENDAHARAAN DAERAH	FASILITASI PENGANGGARAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN	100%	
		MONITORING DAN EVALUASI BARANG MILIK DAERAH	100%	
		MONITORING DAN EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN KAS DAERAH	100%	
		PENETAPAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG APBD	100%	
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAN SISTEM INFORMASI HIBAH DAN BANSOS	100%	
		PENYUSUNAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	100%	
		PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	100%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN PEDOMAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	100%	
		SOSIALISASI PERATURAN KEUANGAN DAERAH	77%	
Dinas Pangan	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN	PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENINGKATAN PENGEMBANGAN PANGAN	100%	
		PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN MASYARAKAT	100%	
		PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	100%	
		PENYULUHAN SUMBER PANGAN ALTERNATIF	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN /PETERNAKAN SERTA PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100%	
		PEMBELIAN DAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN DAN PAKAN TERNAK	84%	
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN	100%	
		PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN	100%	
		PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL	100%	
		PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN HIAS	100%	
		PENYULUHAN PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN	PEMELIHARAAN RUMAH DAN	100%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	SARANA DAN PRASARANA APARATUR	GEDUNG DINAS		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	97%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	75%	
DINKES	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIMAHI SELATAN	90%	
		PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN	PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	95%	
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	100%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	92%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	67%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	75%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	67%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	67%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	75%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	75%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	71%	
	PROGRAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN	PELAYANAN KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH	89%	
		PENINGKATAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT	79%	
		PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN	84%	
		PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	69%	
		PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	75%	
		PENINGKATAN SURVEILANCE EPIDEMIOLOGI	100%	
		PENANGGULANGAN WABAH		
DinsosPP	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	PELAYANAN KB MEDIS OPERASI	100%	
		PELAYANAN KIE	100%	
		PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI KB	100%	
		PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	100%	
		PROMOSI PELAYANAN KHIBA	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN LAPORAN	100%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	KINERJA DAN KEUANGAN	KEUANGAN		
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	100%	
		PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PPRG	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL	PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KLB	100%	
		PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	100%	
		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS	100%	
		PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	100%	
		PENUNJANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN	100%	
		PENYEDIAAN BPNT/RASTRADA	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	100%	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	100%	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN	FASILITASI PENYELENGGARAAN GELAR SENI BUDAYA	100%	
		MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN	100%	
		PENYELENGGARAAN MISI KESENIAN KE LUAR DAERAH	100%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	100%	
		PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN GENERASI MUDA	100%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	FASILITASI PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR PELAKU INDUSTRI PARIWISATA DAN BUDAYA	100%	
		PELATIHAN PEMANDU WISATA	100%	
		PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA	100%	
		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA	100%	
		PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PARIWISATA	100%	
Disbudparpora	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	100%	
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	100%	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	100%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA OLAHRAGA	PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	100%	
		PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI	100%	
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	100%	
		PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA	100%	
Disdik	PROGRAM PENDIDIKAN DUA BELAS TAHUN	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH JENJANG SD	100%	
		PERLUASAN AKSES PROGRAM INKLUSIF JENJANG SD	100%	
	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP	100%	
		PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	PENYELENGGARAAN AKREDITASI JENJANG SMP	100%	
		PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR	87%	
		UJIAN SEKOLAH/MADRASAH JENJANG SD	100%	
DisdukCapil	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN, UPDATING DAN PEMELIHARAAN)	100%	
		PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SISTEM KONEKSI (INTERPHASE TAHAP AWAL) NIK	100%	
		PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU	75%	
		PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	100%	
		PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK	96%	
		PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT	100%	
		SOSIALIASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	90%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
DISHUB	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	100%	
		PENGADAAN MARKA JALAN	100%	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PERPARKIRAN	100%	
		PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN	100%	
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN PRASARANA BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	100%	
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	100%	
		REKAYASA LALU LINTAS	88%	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SARANA PRASARANA ANGKUTAN	PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN PENUMPANG DI JALAN RAYA	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	75%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	75%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	75%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	75%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	83%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	75%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	75%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	100%	
		PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN	100%	
		PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	100%	
		SOSIALISASI/PENYULUHAN TENTANG PENGEMBANGAN MINAT BACA	100%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	KOORDINASI PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATSTIK DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK KOTA CIMAHI	100%	
Diskominfo	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI	PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	76%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	DAN MEDIA MASSA			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	71%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	100%	
	PROGRAM PEYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	100%	
Disnaker	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA	92%	
		OPTIMALISASI KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN	100%	
		PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	99%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	100%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	100%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
DispenmoPTSP	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	100%	
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	100%	
		PENYUSUNAN LAPORAN	100%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
		KEUANGAN		
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	100%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	100%	
		PENGARSIPAN PERIZINAN PEMBANGUNAN	100%	
		PENGARSIPAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	100%	
		PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	100%	
		PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN	100%	
		PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN PEREKONOMIAN	100%	
		PENYUSUNAN DOKUMEN PENGOLAHAN HASIL SURVEY KRK	100%	
		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEREKONOMIAN	100%	
DLH	PROGRAM PENANGANAN TIMBULAN SAMPAH	PELAYANAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	75%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU	PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU	100%	
		PEMELIHARAAN RTH	100%	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP	91%	
		PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	100%	
	PROGRAM PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH	PENINGKATAN KINERJA DAUR ULANG SAMPAH NON ORGANIK	70%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AIR PERMUKAAN	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	67%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	67%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	83%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	75%	
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN	75%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
		GEDUNG DINAS		
		PENATAAN ARSIP DAERAH	75%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	75%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	80%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	75%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	75%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	75%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	75%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	75%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	75%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	100%	
DPKP	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU	100%	
		PENETAPAN KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM PERUMAHAN	100%	
		PENGLOLAAN PEMAKAMAN	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	100%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	100%	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	94%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	100%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
DPKUKMP	PROGRAM KERJASAMA PENINGKATAN POTENSI SUMBER DAYA PERDAGANGAN	PEMBINAAN KELOMPOK PEDAGANG INFORMAL	100%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI KECIL MENENGAH	FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA	75%	
		PENDUKUNG OPERASIONAL TECHNOPARK KOTA CIMAHI	75%	
		PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI	100%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF	FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBATOR TEKNOLOGI DAN BISNIS	94%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	USAHA KECIL MENENGAH			
	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	OPERASIONAL UPTD PASAR KOTA CIMAHI	75%	
		PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	71%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	89%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	75%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	75%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	75%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	75%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	75%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	100%	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	75%	
DPUPR	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN TATA RUANG	100%	
		PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KONSTRUKSI	PEMBANGUNAN BANGUNAN/GEDUNG	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	100%	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	100%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH	100%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
INSPEKTORAT	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	TANGGA		
		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL BERKALA EVALUASI LKIP	100%	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA MONEV BANRPROV JABAR	100%	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PRANATA PENGAWASAN	100%	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA REVU LKPD	100%	
		PENYELENGGARAAN MATURITAS SPIP	100%	
KEC CIMAHI SELATAN	PROGRAM KEMASYARAKATAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN, DUKUNGAN MANAJEMEN	PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN	100%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KELURAHAN CIBEBER	100%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KELURAHAN CIBEUREUM	100%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KELURAHAN LEUWIGAJAH	100%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KELURAHAN MELONG	100%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KELURAHAN UTAMA	100%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LEUWIGAJAH	100%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN	100%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN CIBEBER	100%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN CIBEUREUM	100%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN LEUWIGAJAH	100%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN MELONG	100%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN UTAMA	100%	
	PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN	100%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIBEBER	70%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIBEUREUM	100%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI	100%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
		KELURAHAN LEUWIGAJAH		
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MELONG	100%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN UTAMA	100%	
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI SELATAN	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	88%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL	FASILITASI PKH	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	100%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
KEC CIMAHI TENGAH	PROGRAM KEMASYARAKATAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN, DUKUNGAN MANAJEMEN	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BAROS	100%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIGUGUR TENGAH	100%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIMAHI	100%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KARANGMEKAR	100%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADASUKA	100%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SETIAMANAH	100%	
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI TENGAH	100%	
	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN TATA RUANG	75%	
	PROGRAM PENINGKATAN	PENGEMBANGAN KAPASITAS	100%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	SUMBERDAYA PEGAWAI		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	70%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	89%	
KEC CIMAHI UTARA	PROGRAM KEMASYARAKATAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN, DUKUNGAN MANAJEMEN	PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN CIMAHI UTARA	100%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN CIBABAT	100%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN CIPAGERAN	100%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN CITEUREUP	100%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN PASIRKALIKI	100%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIBABAT	100%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIPAGERAN	100%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CITEUREUP	100%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PASIRKALIKI	100%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KECAMATAN CIMAHI UTARA	97%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN CIBABAT	98%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN CIPAGERAN	94%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN CITEUREUP	98%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN PASIRKALIKI	98%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI UTARA	100%	
	PROGRAM PENATAAN	PENINGKATAN PELAYANAN	76%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN		
		SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI UTARA	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL	FASILITASI PKH	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	75%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	73%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	75%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	100%	
KESBANG	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	PENYUSUNAN DATABASE PARTAI POLITIK	100%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	94%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	75%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
RSUD CIBABAT	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUJUKAN	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	100%	
		PENINGKATAN PELAYANAN RSUD CIBABAT	76%	
Satpol PP dan Damkar	PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	88%	
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	88%	
		PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	100%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN
	NEGARA			
	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	100%	
		PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	100%	
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAHAN	98%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	92%	
SETWAN	PROGRAM ADMINISTRASI, DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA	100%	
		KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR DAERAH	75%	
		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	67%	
		PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	100%	
		PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	100%	
		PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD	100%	
		RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	100%	
		RAPAT-RAPAT PARIPURNA	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	100%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	100%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	100%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	100%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	100%	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	100%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	100%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	83%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	96%		
RATA-RATA CAPAIAN			96%	

Sumber : Bappeda

3.
Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil pada tahun 2018 adalah program dan kegiatan yang capaiannya lebih dari 100%.

Tabel 2.117.

Realisasi Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIN KINERJA	PERMASALAHAN
BAG. HUKUM	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	160%	
BAG. TATA USAHA	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	140%	
BAG. UMUM DAN PROTOKOL	PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH	300%	
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	160%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	389%	
Bapenda	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	576%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	600%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	433%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	229%	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	175%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	700%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	175%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	1700%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	175%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	175%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	175%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	175%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	175%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIN KINERJA	PERMASALAHAN
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH, BARANG MILIK DAERAH, PENDAPATAN DAERAH DAN PERBENDAHARAAN DAERAH	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	133%	
		OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH	199%	
		PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	235%	
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI PAJAK DAERAH	150%	
		PENINGKATAN KEPATUHAN PERPAJAKAN	179%	
		PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	194%	
		VERIFIKASI DATA WAJIB PAJAK	199%	
BAPPEDA	PROGRAM FORMULASI DOKUMEN, KOORDINASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI, PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PERENCANAAN DAERAH BERBASIS IT	300%	
	PROGRAM KELITBANGAN UTAMA DAN PENDUKUNG	KOORDINASI DAN KERJASAMA DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	300%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	500%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	300%	
BKPSDMD	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	138%	
		PENYELESAIAN PENSIUN DAN KPP	132%	
BPBD	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI PRABENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA	PENGELOLAAN LOGISTIK BAGI KORBAN BENCANA	269%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	120%	
BPKAD	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	127%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	188%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	125%	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH, BARANG MILIK DAERAH, PENDAPATAN DAERAH DAN PERBENDAHARAAN DAERAH	MONITORING DAN EVALUASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	150%	
		PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	150%	
		PEMUTAKHIRAN DATABASE GAJI PNSD	60000%	
		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH	300%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIN KINERJA	PERMASALAHAN
		PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	160%	
		PENILAIAN ASET DAERAH	600%	
		PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG APBD	500%	
Dinas Pangan	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN	PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	900%	
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN /PETERNAKAN SERTA PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	116%	
		PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN	219%	
		PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN HIAS	115%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	386%	
DINKES	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN	PENGEMBANGAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	299%	
	PROGRAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN	PENANGGULANGAN MASALAH GIZI MASYARAKAT	1604%	
		PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK & EPIDEMIK	277%	
		PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	105%	
DinsosPP	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	210%	
		PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA KIE KB	125%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	300%	
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS	181%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	250%	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	250%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	250%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	250%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	250%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	250%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	250%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	250%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	250%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIN KINERJA	PERMASALAHAN
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	FASILITASI HARI ANAK NASIONAL DAN PEMBINAAN FORUM ANAK	400%	
		FASILITASI P2TP2A	150%	
		PEMBINAAN POSYANDU	300%	
Disbudparpora	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	300%	
Disdik	PROGRAM PENDIDIKAN DUA BELAS TAHUN	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan jenjang SMP	469%	
		PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD	614%	
		PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP	600%	
		PENYELENGGARAAN PAKET C SETARA SMA	439%	
		PERLUASAN AKSES PROGRAM INKLUSIF JENJANG SMP	300%	
	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT	2483%	
		PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL	25600%	
		PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN	130%	
		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN	400%	
		PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL	2338%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	158%	
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN	250%	
		PELAKSANAAN PENETAPAN ANGKA KREDIT	300%	
		PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG SMP	2384%	
		PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM JENJANG SD	396%	
		Pemberian Insentif buat PTK Non PNS Jenjang TK	342%	
		PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PTK NON PNS JENJANG SD	299%	
		PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PTK NON PNS JENJANG SMP	400%	
		PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN	133%	
		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR JENJANG SD	400%	
		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR JENJANG SMP	460%	
		PENGAWASAN PELAKSANAAN APBS JENJANG SD	382%	
		PENGAWASAN PELAKSANAAN APBS JENJANG SMP	400%	
		PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM	119%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIN KINERJA	PERMASALAHAN
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PAUD DAN DIKMAS		
		PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG SD	130%	
		PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG SMP	133%	
		PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN KARAKTER BANGSA SMP	125%	
		UJIAN NASIONAL JENJANG SMP	307%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	700%	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	350%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANA KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	167%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	150%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	175%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	175%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	175%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	300%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	175%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	175%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	175%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	175%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	175%	
DisdukCapil	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PENCATATAN SIPIL	129%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	170%	
DISHUB	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS	PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM	155%	
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	133%	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PERPARKIRAN	300%	
		PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DIJALAN RAYA	300%	
		PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG	300%	
		SOSIALISASI/PENYULUHAN	300%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIN KINERJA	PERMASALAHAN
		KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN		
		UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG	144%	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SARANA PRASARANA ANGKUTAN	KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	250%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	122%	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	150%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	300%	
Diskominfo	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	MONITORING DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	640%	
		PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	112%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	400%	
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	397%	
		PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	275%	
		PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	450%	
		PENINGKATAN PELAYANAN KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAERAH	300%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	660%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	300%	
		PENATAAN ARSIP DAERAH	120200%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	450%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	386%	
Disnaker	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	366%	
	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	FASILITASI PENYALURAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SIAP PAKAI	117%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	103%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	300%	
DLH	PROGRAM PENANGANAN TIMBULAN SAMPAH	PELAYANAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11072%	
		PENINGKATAN KINERJA PENGANGKUTAN SAMPAH	123%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIN KINERJA	PERMASALAHAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU	TERPILAH		
		PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU	678%	
		PEMELIHARAAN RTH	22642%	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL	108%	
		PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN	177%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AIR PERMUKAAN	PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN LABORATORIUM	151%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	7575%	
DPKP	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT	125%	
		PEMBANGUNAN TAMAN BARU	2880%	
		PEMELIHARAAN TAMAN	5145%	
		PENGELOLAAN RUSUNAWA	291%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUNGAI DAN PENGENDALI BANJIR	PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI	269%	
		PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	320%	
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI	309%	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AIR BERSIH	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM	110%	
		PENGELOLAAN PELAYANAN AIR BERSIH	299%	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA AIR LIMBAH	150%	
		PENGELOLAAN PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK	380%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	150%	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	133%	
	PROGRAM PENINGKATAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	352%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	400%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	180%	
DPUPR	PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	INSPEKSI KONDISI JALAN	300%	
		INSPEKSI KONDISI JEMBATAN	311%	
		REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	896%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KONSTRUKSI	REHABILITASI BANGUNAN/GEDUNG	300%	
	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG	300%	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	210%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	400%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	175%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIN KINERJA	PERMASALAHAN
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	400%	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	400%	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	120%	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	133%	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA MONITORING DAN EVALUASI	355%	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PEMERIKSAAN REGULER	300%	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA SABER PUNGLI	268%	
		PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA TLHP	286%	
		PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	206%	
KEC CIMAHI SELATAN	PROGRAM KEMASYARAKATAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN, DUKUNGAN MANAJEMEN	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIBEBER	400%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIBEUREUM	300%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MELONG	300%	
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN UTAMA	400%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CIBEBER	275%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CIBEUREUM	266%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN LEUWIGAJAH	353%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN UTAMA	260%	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	248%	
KEC CIMAHI TENGAH	PROGRAM KEMASYARAKATAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN, DUKUNGAN MANAJEMEN	PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN CIMAHI TENGAH	111%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN BAROS	230%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN CIGUGUR TENGAH	230%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN CIMAHI	230%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN KARANGMEKAR	230%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIN KINERJA	PERMASALAHAN
		PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN PADASUKA	230%	
		PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN SETIAMANAH	230%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KECAMATAN CIMAHI TENGAH	3077%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN BAROS	2500%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN CIGUGUR TENGAH	2353%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN CIMAHI	2353%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN KARANGMEKAR	2667%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN PADASUKA	2222%	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PERDESAAN DI KELURAHAN SETIAMANAH	2500%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI TENGAH	300%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BAROS	175%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CIGUGUR TENGAH	175%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CIMAHI	175%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KARANGMEKAR	175%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PADASUKA	175%	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SETIAMANAH	175%	
	PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI TENGAH	400%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN BAROS	400%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN CIGUGUR TENGAH	400%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN CIMAHI	400%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN KARANGMEKAR	400%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN PADASUKA	400%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN	400%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIN KINERJA	PERMASALAHAN
		PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN SETIAMANAH		
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN	140%	
		PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT	140%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	133%	
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL	FASILITASI PKH	400%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	400%	
KEC CIMAHI UTARA	PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN CIMAHI UTARA	400%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN CIBABAT	400%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN CIPAGERAN	400%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN CITEUREUP	400%	
		FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN PASIRKALIKI	400%	
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT	144%	
	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN TATA RUANG	107%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	300%	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	148%	
KESBANG	PROGRAM KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	PEMANTAUAN DAN PENGAMANAN WILAYAH	175%	
		PENINGKATAN KOORDINASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	175%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LSM	153%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	167%	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIN KINERJA	PERMASALAHAN
	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	300%	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	167%	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	175%	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	400%	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	175%	
Satpol PP dan Damkar	PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	175%	
		PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	129%	
		PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	225%	
	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	155%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	130%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	356%	
SETWAN	PROGRAM ADMINISTRASI, DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PENUNJANG KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI	400%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	313%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	357%	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	275%	
RATA - RATA CAPAIAN			1322%	

2.2.2. Realisasi RPJMD

Tahun 2020 merupakan tahun kedua penyelenggaraan pemerintahan dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022. Kota Cimahi memiliki 24 buah indikator kota yang menjadi IKU Wali Kota terpilih. Selain itu ada beberapa indikator yang belum menampilkan nilai capaian tahun 2020, sehingga perlu ada evaluasi kembali mengenai ketersediaan makro pembangunan. Berikut ini hasil evaluasi capaian IKU Wali Kota Cimahi tahun 2020.

Tabel 2.118.

Nilai Capaian IKU Wali Kota Cimahi Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2020		Target 2021	Target 2022
				Target	Realisasi		
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul							
MisiMeningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	74,15	74,87	74,84	74,90
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	82,49	83,12	82,94	83,12
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,20	0,81		
Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik							
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	SAKIP	Kategori	BB			
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi			
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	Opini	WTP			
	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	54	53.23	58	62
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	80			
Misi 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan							
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	Persen	0,0566			
	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	Poin	0,40			
		Indeks Williamson	Poin	0,33			
	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan TPT	Persen	0,056			
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan							
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)		D	C	C	
Meningkatkan kualitas permukiman	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Persen	100,00			
	Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	Persen	83,41			
	Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	Persen	0,23			
	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase cakupan pelayanan air bersih	Persen	72,02			

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2020		Target 2021	Target 2022
				Target	Realisasi		
	Mengurangi luas kawasan kumuh	Rasio luas kawasan kumuh	Persen	3,79			
Meningkatkan ketahanan bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko bencana	Kelas Risiko	Sedang			
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	33,30			
Misi 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan							
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	80,00			
	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	73,75			
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	92,50			

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bencana non alam pandemi Covid-2019 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Kota Cimahi disikapi dengan menerapkan social and physical distancing telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan baik kesehatan, sosial maupun perekonomian.

Di Kota Cimahi berdasarkan data sampai dengan 31 Mei 2021 telah terkonfirmasi 5.881kasus positif Covid-19 dengan 5.406 sembuh, 137 orang meninggal dunia, dan 338 kasus aktif. Selain itu ada 16 kasus meninggal dunia dengan status *probable*, 3.067 kasus suspek, dan 14.265 kasus kontak erat.

Berdasarkan jenis kelamin kasus positif ternyata paling banyak terjadi pada perempuan sebanyak 3.309 atau 56,27% dan laki - laki 2.572 atau 43,73%. Berdasarkan kelompok umur ternyata banyak terjadi pada usia produktif khususnya pada kelompok umur 20-29 tahun sebesar 1142 atau 19,42%.

Tabel 2.119.
Tabel Distribusi Kasus Covid-19 Berdasarkan Umur

NO	USIA	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	≤ 5 thn	212	3,60
2.	6-19 th	748	12,72

NO	USIA	FREKUENSI	PERSENTASE
3.	20-29 th	1142	19,42
4.	30-39 th	991	16,85
5.	40-49 th	988	16,80
6.	50-59 th	1085	18,45
7.	60-69 th	537	9,13
8.	70-79 th	156	2,65
9.	80 thn	22	0,37
JUMLAH		5881	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, data diolah Bappeda 2021

Terkait penanganan pandemi Covid-19 di Kota Cimahi, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Cimahi terdapat beberapa kendala, yaitu : antrian panjang tes laboratorium; terbatasnya reagen untuk tes, keterbatasan tenaga puskesmas untuk melakukan tes dan tracing kontak erat; kapasitas rumah sakit yang penuh; minimnya tempat isolasi khusus; dan belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Terdapat harapan positif akan membaiknya kondisi perekonomian dan sosial melalui vaksinasi massal yang akan mulai dilakukan pada triwulan ke-1 tahun 2021 dan diharapkan tuntas pada akhir tahun 2021 akan tetapi ketidakpastian dan kekhawatiran masih tetap ada karena adanya kemunculan varian baru (mutasi) virus Covid 19 dan mulai menyebar secara global pada februari tahun 2021.

Dalam menghadapi pandemic Covid 19 beberapa seperti Taiwan dan Singapore telah berhasil menekan kasus karena mereka telah belajar dari pengalaman pandemi sebelumnya yaitu SARS. Walaupun belum ada satu cara yang pasti manjur yang dapat diterapkan oleh seluruh negara di dunia ini dalam menghadapi pandemic covid 19 akan tetapi sikap kesiapsiagaan, keterbukaan, kehati-hatian serta penanganan yang cepat tampaknya menjadi kunci utama untuk bisa melanjutkan kehidupan dan pembangunan pasca vaksinasi massal.

Berjalannya waktu harapan membaiknya kondisi ekonomi global dan nasional juga Kota Cimahi berubah seiring dengan adanya mutasi virus varian Brazil, Inggris dan India yang disinyalir lebih ganas dan mudah menyebar. Masih terus diupayakan kampanye 3M dan vaksinasi massal untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Upaya untuk menangani dampak dan melakukan pemulihan akibat pandemi Covid-19 serta visi misi pimpinan daerah terpilih Kota Cimahi periode 2017 – 2022 menjadi latar belakang perumusan masalah pembangunan Kota Cimahi tahun 2022. Adapun masalah pembangunan Kota Cimahi tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut.

Isu strategis Kota Cimahi dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan Kota Cimahi yang dianggap paling prioritas untuk segera diselesaikan, isu internasional, isu/kebijakan nasional, isu/kebijakan provinsi, dan isu/kebijakan Kota Cimahi, termasuk hasil KLHS. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan stakeholder, maka ditetapkan sejumlah isu strategis pembangunan Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2022, meliputi :

1. Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 serta Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi;
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Penanggulangan Pengangguran;
4. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan;
5. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertransportasi;
7. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
9. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
10. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan;
11. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
12. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat;
13. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk;

14. Optimalisasi Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta Sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah; dan
15. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan.

2.3.1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.3.1.1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pada tahun 2018, Kota Cimahi telah memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah daerah RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 sedangkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

2.3.1.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan Kota Cimahi sudah menunjukkan kinerja yang baik, hal ini tercermin dari opini BPK atas LKPD Kota Cimahi dengan opini WTP dalam 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun demikian APBD Kota Cimahi masih sangat tergantung kepada dana transfer yang dilihat dari porsi PAD terhadap pendapatan daerah yang rendah dan indeks kapasitas fiskal yang masih dalam kategori sedang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, nilai indeks kapasitas fiskal Kota Cimahi sebesar 0,942 poin (sedang) masih tertinggal dari indeks Provinsi Jawa Barat dengan 4,676 poin dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

2.3.1.3. Kepegawaian dan Pendidikan Latihan

Upaya untuk merealisasikan pembangunan harus diawali dengan penataan internal pemerintahan Kota Cimahi baik dalam konteks penataan organisasi pemerintahan maupun dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cimahi. Penataan tersebut termasuk di dalamnya upaya pembinaan hukum, pengembangan sumber daya manusia aparatur (PNS), penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban. Peningkatan kuantitas PNS belum diikuti dengan peningkatan kualitas PNS itu sendiri, sehingga perlu adanya reformasi birokrasi. Jumlah PNS Daerah di Kota Cimahi berdasarkan golongan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.120.
Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Golongan
Tahun 2016 – 2020

TAHUN	GOLONGAN			
	I	II	III	IV
2016	100	1.144	2.127	2.348
2017	62	849	1.910	1.655
2018	52	780	2.003	1.573
2019	48	717	2.235	1.442
2020	41	673	2.288	1.289

Sumber : BKPSDMD Tahun 2021 (juni)

Berdasarkan jumlah PNS Kota Cimahi baik secara kuantitas maupun kualitas belum merata, namun demikian kinerja aparatur sudah relatif baik yang dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Cimahi. Perencanaan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah harus tetap diperhatikan mengingat kondisi dan persoalan pembangunan yang menuntut kinerja aparatur pemerintah yang lebih baik, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis.

2.3.1.4. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain : pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

2.3.1.5. Sekretariat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Nilai SAKIP Kota Cimahi pada tahun 2020 adalah B (65,07) nilai ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 yang masih mendapatkan nilai B (66,00) walaupun ada perbedaan nilai sejumlah 0,93.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

2.3.2. Angka Kriminalitas

Isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi salah satu isu yang penting untuk diselesaikan karena berkaitan dengan keamanan. Angka kriminalitas di Kota Cimahi menjadi salah satu fokus perhatian baik oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Berdasarkan data dari kepolisian resort Kota Cimahi terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di

Kota Cimahi. Ada enam titik rawan kriminalitas di Kota Cimahi, dimana semuanya berada di wilayah kecamatan Cimahi Utara.

Tabel 2.121.
Lokasi Rawan Konflik di Kota Cimahi

NO	LOKASI TITIK RAWAN KRIMINALITAS
1.	Jalan pesantrean, Cimahi Utara
2.	Jalan Sentral, Cimahi Utara
3.	Jalan Permana, Cimahi Utara
4.	Jalan Cipageran, Cimahi Utara
5.	Jalan Setiamah, Cimahi Utara
6.	Jalan Padasuka, Cimahi Utara

Sumber : Pemerintah Daerah Kota Cimahi, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Cimahi masih berpotensi konflik dan rawan terjadi tindak kriminalitas. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kesiapsiagaan dan pengawasan dari aparat keamanan Kota Cimahi, terlebih posisi Kota Cimahi sebagai daerah perlintasan area metropolitan. Selain itu, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering muncul dan berpotensi berkembang di Kota Cimahi adalah konflik antar buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Hal tersebut dikarenakan Kota Cimahi merupakan kota yang memiliki banyak perusahaan industri yang melibatkan masyarakat sebagai pegawainya.

2.4. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs KOTA CIMAHI

Pencapaian tujuan SDGs di Kota Cimahi sampai dengan tahun 2019 dilakukan pada indikator-indikator yang datanya telah tersedia. Analisis tersebut dilakukan atas dasar data pencapaian SDGs di Kota Cimahi tahun 2019 yang pencapaiannya secara umum disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.122.

Evaluasi Indikator SDGs Tahun 2019

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
1	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.1 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR.	ANGKA KEMISKINAN	5,61	4,39	Tercapai
2	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.1 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR.	JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) YANG DIFASILITASI	1500 RTS (APBD Kota	1500 RTS (APBD Kota dan 16641 (APBN)	Tercapai
3	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.2 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	2.1 Meningkatkan persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019.	PROPORSI PESERTA JAMINAN KESEHATAN MELALUI SJSN BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	90	90	Tercapai
4	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.2 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada	2.3 Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019	JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN BANTUAN TUNAI BERSYARAT/ PROGRAM KELUARGA HARAPAN	JUMLAH PKH	9279kk	10000	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	(2015: 3 juta).					
5	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.2 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	2.4 Meningkatkan Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	PROPORSI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.	PERSENTASE KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA/BURU H	78	70,21	Belum Tercapai
6	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	3.1 Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%.	PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	100%	97.31	Tercapai
7	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama	3.10 Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	PERSENTASE PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DENGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	CAKUPAN PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	98,79	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						
8	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	3.2 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	PERSENTASE ANAK UMUR 12-23 BULAN YANG MENERIMA IMUNISASI DASAR LENGKAP	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP	94%	93.61	Belum Tercapai
9	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan	3.4 Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN.	PERSENTASE AKSES PENDUDUK TERHADAP AIR MINUM BERKUALITAS	82%	87.51	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						
10	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	3.5 Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN.	PERSENTASE AKSES PENDUDUK TERHADAP JAMBAAN SEHAT	70.5%	72.6	Tercapai
11	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk	3.6 Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	PERSENTASE RUMAH TANGGA KUMUH PERKOTAAN	RASIO RUMAH LAYAK HUNI	-	3,16	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		keuangan mikro						
12	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	3.8 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTS/SEDERAJAT	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP	76,10%	78,90	Tercapai
13	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	4.1 Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	DOKUMEN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH	DOKUMEN KAJIAN MITIGASI KEBENCANAAN	1	1	Tercapai
14	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi,	1.1 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% 92013 : 19,6 %)	PREVALENSI KEKURANGAN GIZI (UNDERWEIGHT) PADA ANAK BALITA.	PREVALENSI KURANG GIZI	<10%	5.58%	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		dan cukup sepanjang tahun						
15	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	1.2 menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 , menjadi 8,5% (2015:17,4%)	PREVALENSI PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT, BERDASARKAN PADA SKALA PENGALAMAN KERAWANAN PANGAN	KETERSEDIAAN POLA PANGAN HARAPAN	96.4%	92,9	Belum tercapai
16	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.1 Menurunnya prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 2 tahun /balita pada thun 2019 menjadi 28% (2013 :32,9%).	PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA ANAK DI BAWAH DUA TAHUN/BADUTA	PREVALENSI STUNTING PADA BADUTA	<12.04 %	6.29	Tercapai
17	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2 menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita pada thun 2019 menjadi 9,5% (2013:12%).	PREVALENSI MALNUTRISI (BERAT BADAN/ TINGGI BADAN) ANAK PADA USIA KURANG DARI 5 TAHUN, BERDASARKAN TIPE	PREVALENSI KURANG GIZI	<10%	6.29%	Tercapai
18	II. Menghilang	Target 2.2 Pada tahun 2030,	2.3 Menurunnya	PREVALENSI ANEMIA	PERSENTASE IBU HAMIL KEK	2.39%	3.53	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	kan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28%(2013:37,1%).	PADA IBU HAMIL.				
19	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.4 Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun(2013:38%)	PERSENTASE BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN YANG MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF.	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	100%	94.95	Belum Tercapai
20	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.5 Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang di indikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5(2014:81,8),dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015:40,9 kg /kapita /tahun).	KUALITAS KONSUMSI PANGAN YANG DIINDIKASIKAN OLEH SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) MENCAPAI; DAN TINGKAT KONSUMSI IKAN	TINGKAT KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT	13	31,16	Tercapai
21	II. Menghilangkan	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan	2.5 Meningkatkan kualitas	NILAI TAMBAH PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI,	23%	9,43%	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	konsumsi pangan yang di indikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5(2014:81,8),dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015:40,9 kg /kapita /tahun).	DIBAGI JUMLAH TENAGA KERJA DI SEKTOR PERTANIAN (RUPIAH PER TENAGA KERJA)	PETERNAK DAN PEMBUDIDAYA IKAN YANG MENDAPATKAN PELATIHAN TERSTANDARIS ASI			
22	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	3.1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan	JUMLAH VARIETAS UNGGUL TANAMAN DAN HEWAN UNTUK PANGAN YANG DILEPAS	PRODUKSI HASIL PETERNAKAN (DAGING DAN SUSU)	Daging : 102 ton/tahun; Susu : 800 l/tahun	Daging : 712 ton/tahun; Susu : 823.482 liter/tahun	Tercapai
23	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem,	3.1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan	PENETAPAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	LUASAN LAHAN PANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	-	+15	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan						
24	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	3.1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan	PROPORSI HEWAN TERNAK DAN SEJENISNYA, DIKLASIFIKASIKAN MENURUT TINGKAT RISIKO KEPUNAHAN: BERISIKO, TIDAK BERISIKO, DAN RISIKO YANG TIDAK DIKETAHUI	RASIO JUMLAH TERNAK SAKIT YG DITANGANI TERHADAP JUMLAHPOPULASI TERNAK YG TERJANGKIT PENYAKIT	1:1	"1 : 4,24	Belum Tercapai
25	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	1.1 Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup tahun 2019 menjadi 306(2010:346).	ANGKA KEMATIAN IBU (AKI).	AKI (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)	101	120.26	Belum Tercapai
26	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	1.2 Meningkatnya persentase persalinan Pemerintah Daerah oleh tenaga kesehatan terampil pada Kabupaten/Kota tahun 2019 menjadi	PROPORSI PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN DITOLONG OLEH TENAGA	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	100%	97,31%	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
			95 % (2015: 91,51%).	KESEHATAN TERLATIH				
27	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	1.3 Meningkatnya presentase persalinan difasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN DI FASILITAS KESEHATAN	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	100%	97,31%	Belum Tercapai
28	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000	2.1 Menurunnya angka kematian per1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP	AKB (PER 1000 KELAHIRAN HIDUP)	7.1	5,83	Tercapai
29	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000	2.2 Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI.	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP	93. %	93.61	Tercapai
30	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit	3.1 Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi<0,5% (2014;0,46%)	JUMLAH PENDERITA HIV/ AIDS	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	100%	60. %	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		menular lainnya.						
31	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	JUMLAH KABUPATEN/ KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA	ANGKA BEBAS JENTIK (ABJ)	>= 95%	89,05	Belum Tercapai
32	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	4.1 Menurunnya persentase merokok pada	PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR <=18TAHUN	CAKUPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	7%	18,14	Tercapai
33	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	4.2 Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	PREVALENSI TEKANAN DARAH TINGGI.	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	100%	72,96	Belum Tercapai
34	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	4.3 Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK UMUR >=18 TAHUN	PERSENTASE PENINGKATAN KATEGORI KELUARGA SEHAT	3	2.9	Belum Tercapai
35	III. Menjamin kehidupan yang sehat	Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal	7.1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	TOTAL FERTILITY RATE (TFR).	TFR	1.98	1.98	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	pada tahun 2019 menjadi 2,28(2012;2,6)					
36	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, KB informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	7.2 Pemakaian tahun;61,9%) Meningkatnya 2019 kontrasepsi menjadi angka 66% prevalensi	ANGKA PREVALENSI PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI (CPR) SEMUA CARA PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) USIA 15-49 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN	RASIO AKSEPTOR KB	78.70%	78.89	Tercapai
37	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	8.1 Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	JUMLAH PENDUDUK YANG DICAKUP ASURANSI KESEHATAN ATAU SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT PER 1000 PENDUDUK.	PERSENTASE PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI PBI JKN KOTA CIMAHI (60 % DARI PREMI)	100%	85,35	Belum Tercapai
38	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar	8.2 Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN).	PERSENTASE PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI PBI JKN KOTA CIMAHI (60 % DARI PREMI)	100%	85,35	Belum tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang						
39	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	4.1 Menurunnya persentase merokok pada	PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS	PERSENTASE OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR (SESUAI FORNAS) YANG TELAH DIAJUKAN OLEH PUSKESMAS	100%	100	Tercapai
40	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	4.1 Menurunnya persentase merokok pada	PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR >=15 TAHUN.	CAKUPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	7%	18,14	Tercapai
41	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.2 Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 86% (2015:72,5%).	PERSENTASE SD/MI BERAKREDITASI MINIMAL B.	SD AKREDITASI A (50 SEKOLAH DARI 125/ 40%)	52.80	49,6	Belum Tercapai
42	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.2 Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	PERSENTASE SMP/MTS BERAKREDITASI MINIMAL B.	PERSENTASE SMP YANG TERAKREDITASI A	61,11	97%	Tercapai
43	IV. Menjamin kualitas pendidikan	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua	1.4 Meningkatnya Angka Partisipasi	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD	102,23	104,14	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	SEDERAJAT				
44	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.5 Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/ MTS/SEDERAJAT	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP	89,27	99,60	Tercapai
45	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.7 Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK UMUR >= 15 TAHUN	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	11,2	10,94	Belum Tercapai
46	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang	2.1 Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PAUD DAN TK/RA	76,54	35,24	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar						
47	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan	4.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/1 aki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019.	RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN /LAKI-LAKI DI (1) SD/MI/ SEDERAJAT	RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI (1) SD/MI/ SEDERAJAT		98%	Tercapai
48	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan	4.2 Rasio APM perempuan/1 aki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019.	RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN /LAKI-LAKI DI (2) SMP/MTS/SEDERAJAT	RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI (2) SMP/MTS/SEDERAJAT		99%	Tercapai
49	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa laki-laki dan perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numeras	5.1 Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR => 15 TAHUN	ANGKA MELEK HURUF (AMH)	99,982	99,99	Tercapai
50	V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan	1.1 Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif	JUMLAH KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER MENDUKUN	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PPRG	80	36,25	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		dimanapun	gender mendukung pemberdayaa n perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	G PEMBERDAY AAN PEREMPUAN				
51	V. Mencapai kesetaraan gender dan memberday akan kaum perempuan	Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eks ploitasi lainnya	2.1 Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN	CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPAT PENANGANAN TERPADU	100	100	Tercapai
52	V. Mencapai kesetaraan gender dan memberday akan kaum perempuan	Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eks ploitasi lainnya	2.2 Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019	PERSENTASE KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MENDAPAT LAYANAN KOMPREHEN SIF	CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPAT PENANGANAN TERPADU	100	100	Tercapai
53	V. Mencapai kesetaraan gender dan memberday akan kaum perempuan	Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	3.1 Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20-24 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN ATAU BERSTATUS HIDUP BERSAMA SEBELUM UMUR 15 TAHUN DAN SEBELUM UMUR 18 TAHUN	RATA-RATA USIA KAWIN PERTAMA KAWIN	21.5	21.5	Tercapai
54	V. Mencapai kesetaraan gender dan memberday akan kaum perempuan	Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan	4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DI PARLEMEN TINGKAT PUSAT, PARLEMEN DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH	KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN	20	29,87	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		masyarakat						
55	V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	4.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	PROPORSI PEREMPUAN YANG BERADA DI POSISI MANAGERIA	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LEMBAGA EKSEKUTIF (ESELON II DAN III)	-	Eselon 2 18,52%, Eselon 3 42,27 %	Tercapai
56	VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	3.2 Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota	PROPORSI RUMAH TANGGA YANG TERLAYANI SISTEM PENGELOLAAN LUMPUR TINJA	PROPORSI RUMAH TANGGA YANG TERLAYANI SISTEM PENGELOLAAN LUMPUR TINJA	-	-	Belum Tercapai
57	VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	1.1 Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK	PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN AIR BERSIH	72,02	70,35	Belum Tercapai
58	VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar	2.1 Meningkatnya yang 100% layak (2014: pada 60,9%).akses tahun terhadap 2019 menjadi sanitasi	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK	-	-	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan						
59	VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	2.2 yang Berbasis 45.000 Meningkatnya melaksanakannya pada Masyarakat tahun jumlah 2019 Sanitasi (STBM) desa/kelurahan (2015: Total 25.000).	JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG OPEN DEFECATION FREE (ODF)/ STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)	ODF		2 kelurahan	Belum Tercapai
60	VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	2.2 yang Berbasis 45.000 Meningkatnya melaksanakannya pada Masyarakat tahun jumlah 2019 Sanitasi (STBM) desa/kelurahan (2015: Total 25.000).	PROPORSI RUMAH TANGGA (RT) YANG TERLAYANI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT	PROPORSI RUMAH TANGGA (RT) YANG TERLAYANI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH OFF SITE	-	-	Belum Tercapai
61	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan	Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 % pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang	1.1. Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	LAJU PERTUMBUHAN PDRB PER KAPITA. (ADHK)	PDRB (ADHK)	22281,76	22641,83	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	yang layak untuk semua.	berkembang						
62	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	2.1. Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	PDRB PER KAPITA. (ADHB)	PDRB (ADHB)	32081,82	32226,02	Tercapai
63	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	9.1. Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	JUMLAH KANTOR BANK	JUMLAH KANTOR BANK	26	30	Tercapai
64	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	3.1 Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	PERSENTASE TENAGA KERJA FORMAL	JUMLAH TENAGA KERJA FORMAL (BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI)	184038	174552	Belum Tercapai
65	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan	3.1 Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019	PERSENTASE TENAGA KERJA INFORMAL SEKTOR PERTANIAN	JUMLAH PEKERJA BEBAS (PERTANIAN DAN NON PERTANIAN)	6393	11249	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh , serta pekerjaan yang layak untuk semua.	produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	(2015: 42,2%).Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).					
66	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh , serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	3.1 Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL SEKTOR NON PERTANIAN, BERDASARKAN JENIS KELAMIN	JUMLAH TENAGA KERJA INFORMAL (PENDUDUK YANG BERUSAHA BAIK SENDIRI MAUPUN DIBANTU BURUH TIDAK TETAP)	72776	68738	Belum Tercapai
67	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh , serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	4.1 Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun.	PERSENTASE SETENGAH PENGANGGURAN	ANGKA KESEMPATAN KERJA	285108	272553	Belum Tercapai
68	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang	Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi	4.1 Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun.	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR.	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	7,52	8,08	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	produktif dan menyeluruh , serta pekerjaan yang layak untuk semua.	pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya						
69	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh , serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	4.1 Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun.	UPAH RATA-RATA PER JAM PEKERJA	UPAH MINIMUM KOTA (UMK) (RP)	2916373	2893074	Belum Tercapai
70	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh , serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.2. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA	JUMLAH WISATAWAN DOMESTIK	4270	43707	Tercapai
71	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh , serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.2. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA	600	899	Tercapai
72	IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh,	1.2. Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019	JUMLAH DERMAGA PENYEBERANGAN	TINGKAT PELAYANAN JALAN (LEVEL OF SERVICE)	D	C	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	(2014: 954 km).					
73	IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	1.5. Terbangunnya pelabuhan strategis Pemerintah Daerah Provinsi; untuk menunjang tol laut pada 24 Pemerintah Daerah pelabuhan pada tahun 2019.	JUMLAH PELABUHAN STRATEGIS	JUMLAH GEDUNG TERMINAL	1	0	Belum Tercapai
74	IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	3.1. Berkurangnya emisi CO mendekati 26% pada tahun 2019.	PERSENTASE PERUBAHAN EMISI CO2/EMISI GAS RUMAH KACA	INDEKS KUALITAS UDARA	42	70,23	Tercapai
75	IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri	Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada	3.1. Berkurangnya emisi CO mendekati 26% pada tahun 2019.	PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/ MEMILIKI TELEPON GENGAM	CAKUPAN LAYANAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	45	48	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang						
76	X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara .	Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut	2.1. Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil Kementerian Koordinator Bidang menjadi 87 pada tahun 2019 (2015; 80,3).	JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM).	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN RANHAM	4	4	Tercapai
77	X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara .	Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	1.1. Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	KOEFISIEN GINI.	INDEKS GINI	0,4	0,365	Tercapai
78	X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara .	Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat	1.2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR.	ANGKA KEMISKINAN	5,61	4,39	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		yang lebih tinggi dari rata-rata nasional						
79	X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara .	Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai ke setaraan yang lebih besar	3.1. Meningkatkan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	PROPORSI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA/BURU H	78	70,21	Belum Tercapai
80	XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	4.1. Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	JUMLAH KOTA PUSAKA DI KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN, KOTA BESAR, KOTA SEDANG DAN KOTA KECIL	JUMLAH CAGAR BUDAYA YANG TERVERIFIKASI		13	Tercapai
81	XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	4.1. Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	JUMLAH KOTA PUSAKA DI KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN, KOTA BESAR, KOTA SEDANG DAN KOTA KECIL	JUMLAH OBJEK WISATA YANG DIKEMBANGKAN (BUDAYA)	1	1	Tercapai
82	XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman,	Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan	4.1. Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui	JUMLAH KOTA PUSAKA DI KAWASAN PERKOTAAN METROPOLIT	JUMLAH PAKET WISATA UNGGULAN (BUDAYA)		1	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	tangguh, dan berkelanjutan.	alam dunia	pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	AN, KOTA BESAR, KOTA SEDANG DAN KOTA KECIL				
83	XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang karena bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang - orang rentan	5.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG	CAKUPAN KORBAN BENCANA YANG MENDAPAT BANTUAN DASAR	100	100	Tercapai
84	XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	6.1. Meningkatkan cakupan penanganan Kementerian sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	PERSENTASE SAMPAH PERKOTAAN YANG TERTANGANI	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH	94	96,06	Tercapai
85	XII. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan	2.1 Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	JUMLAH LIMBAH B3 YANG TERKELOLA DAN PROPORSI LIMBAH B3 YANG DIOLAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG AN (SEKTOR INDUSTRI)	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN SELF MONITORING	75	68,6	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan						
86	XII. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	3.1 Meningkatkan pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH YANG DIDAUR ULANG	PERSENTASE PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH	8.22	34,15	Belum Tercapai
87	XII. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	3.1 Meningkatkan pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	JUMLAH TPS3R YANG DIBANGUN	JUMLAH TPS3R YANG TERBANGUN	-	9 unit	Tercapai
88	XIII. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	1.1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	DOKUMEN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH	DOKUMEN KAJIAN MITIGASI KEBENCANAAN	1	1	Tercapai
89	XIII. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam	1.1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana	JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG	CAKUPAN KORBAN BENCANA YANG MENDAPAT BANTUAN DASAR	100	100	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		di semua negara.	tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.					
90	XIII. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	2.1 Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1).	DOKUMEN BIENNIAL UPDATE REPORT (BUR) INDONESIA	PERSENTASE KELURAHAN YANG PRO IKLIM	7	13.33	Tercapai
91	XV. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khusus nya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019.	PROPORSI TUTUPAN HUTAN TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN.	INDEKS TUTUPAN LAHAN	-	30,31	Belum Tercapai
92	XV. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari,	Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khusus nya ekosistem hutan, lahan	2.1 Tercapainya luas kawasan konservasi Kementerian terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019 (2015:10.000 ha).	LUAS TAMAN KEHATI	LUAS KAWASAN TERKONSERVASI	15000	208,50	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.						
93	XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.	2.1 terhadap 38,62% untuk Menurunnya anak untuk anak perempuan).p revalensi anak pada laki-laki tahun kekerasan 2019 dan (2013: 20,48%	PROPORSI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MUDA UMUR 18-24 TAHUN YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL SEBELUM UMUR 18 TAHUN	CAKUPAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN DI UNIT TERPAD	100	100	Tercapai
94	XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	3.1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.	JUMLAH ORANG ATAU KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN YANG MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGAS	JUMLAH BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT		0	Belum Tercapai
95	XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan	Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	5.1 Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/	PERSENTASE PENINGKATAN OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OPINI BPK	WTP	WTP	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	n akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.		Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60 %, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	DAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/K ABUPATEN/ KOTA)				
96	XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	5.2 Meningkatkan persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/ Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	PERSENTASE PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA).	SAKIP	B	B	Tercapai
97	XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	5.4 Meningkatkan persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/ Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH YANG MEMILIKI NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI BAIK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA).	JUMLAH DOKUMEN LPPD, DOKUMEN SPM	100	100	Tercapai
98	XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	6.1 Meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD	KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN	20	28,87	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.							
99	XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	6.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LEMBAGA EKSEKUTIF (ESELON I DAN II)	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LEMBAGA EKSEKUTIF (ESELON II DAN III)	-	Eselon 2 18,52%, Eselon 3 42,27 %	Tercapai
100	XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	6.3 Meningkatnya Indeks Lembaga Demokrasi menjadi 71 pada tahun 2019 (2015: 66,87).	INDEKS LEMBAGA DEMOKRASI.	TERVERIFIKASINYA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SESUAI PERUNTUKANNYA	100	100	Tercapai
101	XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	6.4 Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,30).	INDEKS KEBEBASAN SIPIL	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN RANHAM	4	4	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.							
102	XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	6.5 Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik menjadi 68 pada tahun 2019 (2015: 70,63).	INDEKS HAK-HAK POLITIK	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU	80	87,6	Tercapai
103	XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	7.2 Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN.	CAKUPAN PENERBITAN AKTE KELAHIRAN	78	47.54	Belum Tercapai
104	XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk	Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	7.2 Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN.	CAKUPAN PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK	96	98,79	Tercapai

No	Tujuan SDGS	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGS Provinsi	Indikator SDGS KOTA CIMAHI	Tahun 2019		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.							

2.5. INOVASI DAERAH

Penatalaksanaan dan pembinaan urusan ini diarahkan kepada 3 hal yaitu penelitian untuk penyusunan kebijakan pembangunan dan kerjasama kelitbangan, pengembangan atau penelitian yang bersifat terapan dan pengembangan inovasi dan teknologi. Masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan penelitian untuk penyusunan kebijakan pembangunan dan kerjasama penelitian dan pengembangan baik dalam maupun luar negeri.
Fokus penelitian (kajian) di bidang litbang adalah untuk memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan pembangunan. Kegiatan penelitian masih bisa dilakukan dalam tema yang lebih bersifat fundamental (grounded) jika dinilai perlu dan tersedia sumber daya manusia penelitiannya. Salah satu penelitian mendasar yang dilakukan adalah pengemabngan kultur jaringan dan DNA Durian Kamajaya Kota Cimahi bekerja sama dengan UNPAD.
Sebagai sebuah bidang urusan maka perlu dilakukan penataan dan koordinasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang urusan penelitian, pengemabngan, inovasi dan teknologi yang dilaksanakan di berbagai SKPD. Untuk kegiatan penelitian (kajian) dan pengembangan di Kota Cimahi akan dilaksanakan pada 3 kelompok tugas yaitu penelitian/kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyusunan kebijakan, penelitian/kajian bagi perencanaan pembangunan dan kajian teknis seperti *feasibility studies* (FS) maupun DED. Kajian bagi penyusunan kebijakan pembangunan (termasuk Indeks Inovasi Daerah/IID, Indeks Daya Saing Daerah/IDSD dan indeks pengelolaan keuangan

daerah/IPKD) dan pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan oleh Bidang Litbang Bappeda, sementara kajian penyusunan perencanaan pembangunan oleh bidang-bidang perencanaan di Bappeda dan yang lebih teknis oleh SKPD terkait.

Kerjasama internasional pada tahun 2020 telah dituntaskan melalui program Inspire + Kewirausahaan Sosial dari Uni Eropa melalui hibah riset terapan Gastrodiplomasi Cireunde dan juga *Value-chain Capacity Building Network* (VCBN). Selain itu diperoleh juga hibah penelitian berupa Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT) dari Kemenristek/BRIN bekerjasama dengan UNPAR Bandung selama 3 tahun yaitu 2019 - 2021 untuk mendukung pengembangan *virtual tourism* (360o Cireunde) dan *exit strategy* Gastrodiplomacy Cireunde. Selain itu kerjasama internasional juga dilakukan dalam bidang pengembangan kapasitas inovasi ASN Kota Cimahi dan umum bekerjasama dengan *Faculty of Engineering National University of Singapore* (NUS) dan UNPAR.

2. Pengembangan atau penelitian yang bersifat terapan/implementatif. Jenis penelitian terapan ini dilakukan dengan membuat *prototype*, pemodelan atau *pilot project*. Pada tahun 2020 Telah dilaksanakan beberapa *project* percontohan melalui kolaborasi dengan stakeholder terkait di antaranya :
 - a. Pengembangan *agroforestry* yang mengintegrasikan budidaya dan konservasi Durian Kamajaya durian asli dataran tinggi Kota Cimahi yang bersama dengan Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Terdapat dua lokasi pilot project yaitu di Bukit Padakasih Kelurahan Cibeber dan Hutan Kota Kelurahan Cipageran. *Pilot project* ini didampingi oleh UNPAD dan IPB. Untuk pengembangan lebah trigona belum dapat dilaksanakan karena kendala Covid 19, diharapkan dapat diteruskan pada tahun 2021 dan 2022;
 - b. Pengembangan kewirausahaan sosial melalui pemanfaatan larva *maggot* BSF untuk mengolah sampah organik dengan DLH Kota Cimahi di Kelurahan Padasuka bersama Universitas Muhammadiyah Bandung (UMBdg). Pengembangan produk

kesehatan dari larva BSF belum dapat dilakukan karena rasionalisasi anggaran dan kendala tata laksana karena Covid- 19. Diharapkan dapat diteruskan pada tahun 2021 dan 2022;

- c. Pengembangan padi Organik antara komunitas petani dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
- d. Pendampingan kewirausahaan melalui kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) Tematik kepada 50 UMKM bekerjasama dengan Disdagkoperin, UKM serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI); dan
- e. Pengembangan konsep pengolahan air Kota Cimahi bekerjasama dengan ITB, BP2D Jabar, *Manchester University* dan DPKP Kota Cimahi.

3. Pengembangan inovasi dan teknologi

Untuk sub-bidang urusan inovasi dilakukan melalui penyusunan dan monev SIDA, pengukuran indeks daya saing (IDSD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan koordinasi bidang inovasi lainnya. Pada tahun 2020 dalam sub-bidang urusan teknologi yang dapat dilaksanakan baru dalam bentuk sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat. Terdapat kendala tidak adanya SDM fungsional perekayasa di Kota Cimahi.

Terjadinya pandemi Covid-19 mendorong dilaksanakannya rasionalisasi anggaran untuk urusan dan program kelitabangan. Walaupun demikian program dan kegiatan masih dapat dilaksanakan karena mendapatkan sumber bantuan dana hibah dalam dan luar negeri khususnya untuk pelaksanaan penelitian terapan. Oleh karenanya bidang urusan kelitabangan dapat dilaksanakan dengan baik bahkan memperoleh prestasi yang tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan prestasi tahun 2019.

Untuk mendorong peningkatan kapasitas inovasi organisasi dan sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bidang pelayanan publik di Kota Cimahi akan dikembangkan konsep *corporate university* (CorpU). Pelaksanaan CorpU bisa dilakukan

melalui kerjasama dengan Kantor Pemerintahan lainnya (Kementrian atau provinsi), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta baik nasional maupun internasional atau dengan lembaga *training* lainnya.

Kinerja bidang urusan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi ditunjukkan oleh indikator persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan sebagaimana ditunjukan dalam **Tabel 2.123**, yaitu pada tahun pada tahun 2018 sebesar 75%, tahun 2019 adalah 75% dan tahun 2020 sebesar 75%.

Tabel 2.123.
Indikator Penelitian dan Pengembangan di Kota Cimahi
Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	2018	2019	2020
1.	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan (%)	75	75	75

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021, diolah

Pada tahun 2018 dan 2019 melalui inovasi *gastrodiplomacy* Pemerintah Kota Cimahi bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi diantaranya UNPAD, UNPAR maupun ISBI dan Uni Eropa telah mengembangkan kewirausahaan sosial di 20 *homestay* di Cireundeu, Meskipun demikian, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian kota. Hal ini disebabkan wisata yang dikembangkan merupakan hal yang sakral dan tidak boleh dikomersialkan serta keterlibatannya pun sangat terbatas pada kelompok warga tertentu. Untuk itu perlu didorong inovasi pengembangan pariwisata profan yang dapat dikomersialkan tetapi masih tetap bercirikhaskan wilayah Cireundeu atau masih terkait dengan budaya konsumsi Rasi seperti seni pertunjukan dan ekowisata (*tracking dan camping*).

Selain itu keberadaan Kawasan Cimahi *Techno Park* di Kota Cimahi yang sudah dibangun dan dikembangkan sejak tahun 2017 hingga saat ini telah menjadi salah satu Kawasan pengembangan inovasi dan teknologi yang juga telah menjelma menjadi salah satu kawasan pengakselerasi ekonomi lokal di Kota Cimahi. Kawasan Cimahi *Techno Park* saat ini memiliki 2 (dua) Gedung yang letaknya tidak dalam 1 hamparan namun memiliki konsep terintegrasi yaitu Gedung Cimahi *Techno Park* dan Gedung BITC (Baros IT *Creative Centre*).

a. Program kegiatan utama di Cimahi *Techno Park* terdiri dari :

1) Inkubator Bisnis Teknologi

TAHUN	OUTPUT
2016 – 2017	14 <i>Start Up</i> 10 <i>Animator Graduate</i>
2018	5 Kelompok <i>Start Up</i> 12 Animator Pengembangan IP Animasi
2019	5 kelompok <i>Start Up</i> 12 Animator dalam Pendampingan IP Animasi
2020	22 kelompok <i>Start Up</i>
2021	11 Kelompok <i>Start Up</i> 13 Makerspace Digital Kreatif (Pra Inkubasi)

2) Akselerator IKM Inovatif | Program kegiatan yang diciptakan untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan daya saing para pelaku IKM eksisting dengan memberikan pendampingan, pelatihan yang intensif sesuai dengan kebutuhan. Bentuk kegiatan :

- a) Pelatihan;
- b) Pendampingan Singkat;
- c) Layanan Konsultasi Bisnis;
- d) Penguatan Komunitas;
- e) Fasilitasi Desain label, Uji Nilai Gizi, Kadaluarsa, dll;
- f) Pameran dan Festival.

3) Layanan Konsultasi Bisnis dan Teknologi :

- a) Klinik Teknokreatif agroindustri FTIP UNPAD;
- b) Klinik Konsultasi Animasi bagi pelaku UKM dan IKM; dan
- c) Klinik Teknologi Pengolahan Air bagi Pelaku IKM dari UNJANI.

- 4) *Makerspace* Digital Kreatif | *Makerspace* Digital Kreatif Pra-Inkubasi 2021 merupakan sub-kegiatan mentoring selama satu tahun bagi para creator potensial Kota Cimahi sehingga disaat memasuki tahap inkubasi, para *creator* sudah memiliki kemampuan dasar yang mumpuni serta penghasilan yang dapat membantu operasional creator disaat sub-kegiatan inkubasi berjalan.Pada tahap Pra-Inkubasi, para creator akan berpartisipasi sebagai tim yang diwajibkan untuk memproduksi asset digital kreatif serta memasarkan produk tersebut di *marketplace* yang tersedia. Pada sub-kegiatan ini, para *creator* akan dibantu proses mentoring selama satu tahun oleh tim dari Tepi Garis yang notabene sudah menjadi *author* di beberapa *marketplace* global selama 4 tahun.
- b. Adapun dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Cimahi Techno Park, terdapat beberapa produk yang sudah terkomersialisasi dengan baik, diantaranya :
- 1) Produk *Makerspace* Digital Kreatif (Pra Inkubasi)

No	Nama Studio	Total item produksi	Jumlah Pendapatan (\$)
1	Ramandhani	307	\$ 5,584
2	Lotus	162	\$ 4,569
3	Qiva	205	\$ 2,892
4	Kampung Konten Cimahi	173	\$ 1,982
5	Neermana	268	\$ 1,652
6	Roghib	58	\$ 1,582
7	TM Studio	116	\$ 938
8	Kendru	9	\$ 173,42
9	Pitchlook	33	\$ 138,96
10	The Jagur	20	\$ 133,46
11	Bejo	19	\$ 69,79
12	Lakaran	10	\$ 2,12
13	Atoh	1	\$ 1,64
14	Renjana	1	\$ 0,2

2) Produk *Start Up* Juara (dari Program Inkubasi)

- a) Ayena Studio | PT. Ayena Mandiri Sinema atau lebih dikenal dengan Ayena Studio adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa animasi, konten digital dan pengembang IT. Sejalan dengan perkembangan Kota Cimahi sebagai *Creative Cyber City*, lahirlah sekumpulan talenta muda yang mendirikan perusahaan pada Oktober 2011. Dalam perkembangannya, Ayena Studio telah bekerjasama dengan beberapa institusi dan komunitas kreatif di Cimahi dalam pengembangan sumber daya manusia. Salah satu IP animasi Ayena Studio yaitu **SUPERNELI** saat ini sudah berhasil menembus TV Nasional (NET TV);
- b) Kaaba *Virtual Experience* | Salah satu start up di Kota Cimahi yang saat ini sudah memulai menembus pasar internasional. Start up ini mengembangkan konten-konten digital melalui platform dan teknologi terkini seperti *virtual reality*, *augmented reality*, *mobile apps* dan *projection mapping* untuk memeenuhi kebutuhan pemasasran, pendidikan, simulasi maupun kebutuhan lainnya. Salah satu produk unggulan Kaaba adalah *virtual reality* panduan manasik haji dan umroh yang sudah tersedia di *play store*; dan
- c) Sekolah.id | *Start Up* yang memiliki pengembangan terintegrasi dengan perangkat IoT yang di kembangkan sekolah, dimana sekolah didorong untuk memiliki produk unggulan sehingga sekolah mampu mengenalkan kreatifitas siswa dalam bidang teknologi. Saat ini sekolah.id telah menjadi sebuah start up yang sedang naik daun di Kota Cimahi bahkan hingga level nasional dan mampu menyerap tenaga lulusan SMK cukup Signifikan.

3) Produk-Produk Tenant *Outwall* Binaan (Tenant Gedung BITC)

NO	NAMA PERUSAHAAN	DATA PRODUK
1	PT. DKSH INDONESIA	PENJUALAN ALAT-ALAT TEKNOLOGI, PEMBUATAN SISTEM, PEMASANGAN & PERAWATAN SISTEM
2	CV. SAMAYA INDONESIA	SANDERI, LINDERI, SMKP, FINTATEL, SISSTER, HALOPSI+, MICROSOFT CSP
3	PT. HURAH BERSAMA KAABA	KAABA BUKU SAKU, KAABA AUGMENTED REALITY, KAABA VIRTUAL EXPERIENCE (VR), WEBSITE COMPRO NETRA KLINIK, HEAR ME, IMAGE WALL
4	PT. HELPY MALINDO MAKMUR	HELPY APPS, INDIKOS, CITY GUIDE, SOEDIRMAN APPS
5	PT. WIRATAMA SISTEM INTEGRASI	PEMBUATAN SISTEM, PEMASANGAN & PERAWATAN SISTEM, KONSULTAN MEKANIKAL ELETRIKAL
6	QIMA DIGITAL	Aplikasi Wisata Cimahi, Aplikasi Absensi Sekolah
7	ADHITAMA DIGITAL	PEMBUATAN APLIKASI DAN WEB
8	QIVA PROJECT	SmaphAR 4D, Atmosphere 4D, Traditional Games 4D, Elipse 4D, Virtual Reality TEDC
9	SEED BOX	PEMBUATAN APLIKASI DAN WEB
10	KANAL DIGITAL	Kreasi, Aplikasi Ajarin
11	VOI - VOI OVER INDONESIA	EYE LEVEL INDONESIA
12	PT. KREANOVA JAGRA BALAWAN	PEMBUATAN SISTEM, WEB, APPS
13	PT. TANAH ELANG CAHAYA	MAPPING KLHK, MAPPING JALAN JAMBI, MAPPING JALAN BSD
14	INHARMONICS	PEMBUATAN MUSIK, PEMBUATAN AUDIO GAME, PELATIHAN MUSIK
15	PT. MEDIBLOK REKATAMA INDONESIA	PEMBUATAN APLIKASI UNTUK KESEHATAN
16	PT. GRAPNENE SOLUSI NAGARI (SNOW UP)	PERUSAHAAN MANAJEMEN TALENT KREATIF
17	CV. FORIT ASTA SOLUSINDO	PEMBUATAN DAN PEMASANGAN MESIN ABSEN
18	APLHA SEED	PEMBUATAN WEB, SOCIAL MEDIA MANAGEMENT, DIGITAL ADVERTISING, GRAFIK DESAIN, ANIMATION VIDEO PRODUCTION, MOTION VIDEO PRODUCTION
19	EMIFLY	JASA DRONE DAN JASA PEMETAAN
20	PT. AYENA MANDIRI SINEMA	PEMBUATAN ANIMASI, PEMBUATAN VIDEO GRAFIS, ASET GAME (MOBILE/PC)
21	PT. LEDINO MANDIRI PERKASA	SMART CITY CIMAHI, RW NET PROJECT, SMART SCHOOL PROJECT, INSTALASI CCTB KELURAHAN, WEB DISDIK CIMAHI, WEB SATPOL PP CIMAHI

Sejak dikelolanya bidang urusan kelitbangan pada tahun 2019 Kota Cimahi telah menerima banyak penghargaan tingkat nasional dalam bidang penelitian, pengembangan dan inovasi diantaranya :

- a) Juara I (tahun 2019) dan juara III (tahun 2020) tingkat nasional untuk perkotaan dengan indeks daya saing tertinggi (Budhipraja) dari Kemenristek/BRIN;

- b) Juara 5 Kota dengan indeks inovasi tertinggi di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri (tahun 2019) dan memperoleh apresiasi berupa Dana Insentif Daerah (DID);
 - c) Top 99 dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik melalui *Katerpillar Hi Park (Kolaborasi Antar Pilar di Cimahi Techno Park)* dari Kementerian PAN dan RB (tahun 2018) bahkan pada tahun 2020 inovasi *Katerpillar Hi Park (Kolaborasi Antar Pilar di Cimahi Techno Park)* memperoleh predikat *Top 5 Outstanding Achievement* sebagai penghargaan tertinggi inovasi pelayanan publik dari Kementerian PAN dan RB serta memperoleh apresiasi berupa Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - d) Top 99 dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik melalui *gastrodiplomacy* Cireundeu dari Kementerian PAN dan RB (tahun 2019) dan memperoleh apresiasi berupa Dana Insentif Daerah (DID).
- c. Menerima Penghargaan sebagai Kota Sangat Inovatif pada tahun 2020 dari Kemendagri.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Cimahi dalam kompetisi *Innovative Government Award* (IGA) tahun 2020 di Kementerian Dalam Negeri diketahui bahwa jumlah inovasi kota Cimahi dinilai masih rendah walaupun tingkat kematangannya cukup tinggi. Rata-rata jumlah inovasi dari 12 kota yang masuk tahap final adalah 100 buah, sementara itu Kota Cimahi jumlahnya jauh lebih kecil yaitu 58 buah. Tingkat kematangan inovasi yang tinggi dan relatif kecilnya jumlah inovasi di Kota Cimahi telah mengindikasikan kecenderungan mulai masuknya fase atau tahap kejenuhan dalam siklus inovasi sebuah produk atau layanan (*innovation cycle*). Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk menumbuhkan kembangkan iklim dan budaya berinovasi di Kota Cimahi.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui penyelenggaraan kompetisi inovasi antar SKPD, kelurahan, puskesmas, umum dan perguruan tinggi melalui kegiatan

Kompetisi Inovasi Cimahi Motekar Award (ChiMA). Cara ini diharapkan tidak hanya akan memunculkan inovasi-inovasi dan innovator-inovator baru tetapi juga mendorong perluasan cakupan kerja bidang urusan kelitbangan. Kendala dalam mengoptimalkan sub-bidang urusan inovasi dan teknologi di Kota Cimahi diantaranya adalah terbatasnya SDM fungsional peneliti, perekayasa dan analis kebijakan.

Pada bagian selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif daya saing Kota Cimahi berdasarkan hasil pengukuran indeks daya saing (IDSD) Kota Cimahi tahun 2020. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2020 dilakukan melalui pengisian kuesioner dan penyusunan laporan analisis yang diselenggarakan Ditjen Penguatan Inovasi, Direktorat Sistem Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia.

Indeks Daya Saing Daerah mempresentasikan tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Sehingga keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan Kota Cimahi yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif. Selain itu, IDSD diharapkan pula dapat menjadi komponen dalam merumuskan dan menetapkan model indeks daya saing nasional serta menjadi alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) terdiri dari empat aspek, yaitu Aspek Penguat/*Enabling Environment*, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pasar dan Aspek Ekosistem Inovasi. Keempat aspek tersebut selanjutnya didukung oleh 12 pilar, 23 dimensi data dan 97 indikator. Hasil capaian skor IDSD akan dapat menunjukkan indeks daya saing daerah Kota Cimahi Tahun 2020 dan akan memberikan gambaran ringkas mengenai potensi serta gap daya saing Kota Cimahi bagi pencapaian

tujuan pembangunan yaitu integrasi ke dalam laporan RPJMD Kota Cimahi. Kota Cimahi, sebagaimana daerah lainnya, diharapkan untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan daya saing dengan mengintervensi unsur-unsur yang paling lemah serta mengarahkan dan mensinergikan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki stakeholder terkait dengan didukung kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) Kota Cimahi pada tahun 2020 menggunakan data tahun 2018 dan 2019 menunjukkan angka sebesar 3,8196. Dengan demikian Kota Cimahi tergolong sebagai daerah dengan indeks daya saing daerah (IDSD) sangat tinggi menurut Kemenristek/BRIN. Adapun nilai masing - masing aspek (faktor) adalah Sumber Daya Manusia/ *Human Capital* (3.2292), Faktor Penguat/ *Enabling Environment* (3.5972), Faktor Pasar/ *Market* (3.9583) dan Ekosistem Inovasi (4.4938).

Perbandingan tiap aspek dan komponen pendukungnya akan dilakukan dengan membandingkan tiap nilai komponen terhadap nilai indeks daya saing daerah (IDSD). Aspek ekosistem menempati komponen tertinggi atau terkuat yang menunjukkan bahwa ekosistem inovasi di Kota Cimahi sudah sangat baik sekali dengan indeks sebesar 4,4938.

Hal ini bisa terjadi karena Kota Cimahi telah memiliki lembaga technopark pada tingkat pengelola UPT Cimahi *Technopark* dengan akreditasi Madya. Selain itu tingginya aspek ini karena telah tumbuhnya beberapa sentra produk unggulan dan Kota Cimahi dan juga telah memiliki pengampu bidang urusan kelitbangan pada level Eselon III di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tingginya nilai ekosistem inovasi juga dapat mencerminkan telah efektifnya kolaborasi riset dan teknologi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi lokal, komunitas dan media. Data ini konsisten dengan hampir sepenuhnya indeks Pilar Kesiapan Teknologi (5,0000) dan Pilar

Kapasitas Inovasi (4,8148). Akan tetapi, masih terdapat pekerjaan rumah yaitu belum optimalnya Kinerja Dinamika Bisnis (3,6667).

Upaya peningkatan dinamika bisnis yang telah dilakukan diantaranya melalui pemanfaatan teknologi yang lebih tinggi dalam *e-marketing* serta peningkatan kualitas produk dan standarisasi produk yang dihasilkan oleh sentra-sentra produk unggulan di Kota Cimahi. Pengembangan inkubasi bisnis untuk *technopreneurship* juga akan terus dilakukan termasuk di lokus-lokus sentra produk unggulan, sehingga mampu menciptakan pelaku usaha baru dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Aspek pasar merupakan komponen kedua tertinggi. Aspek ini didukung oleh Pilar Efisiensi Pasar Produk, Pilar Ketenagakerjaan, Pilar Akses Keuangan, dan Pilar Ukuran Pasar. Ukuran pasar Kota Cimahi memiliki nilai sebesar 4,3333 dan sudah termasuk sangat baik karena kegiatan ekonomi Kota Cimahi sudah mampu melakukan *export* produknya ke luar negeri khususnya produk-produk tekstil. Keuntungan absolut berupa posisi geografis yang dekat dengan ibu kota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung memberikan peluang besar bagi penjualan produk-produk daerah Kota Cimahi. Pemanfaatan IT dalam bidang *e-commerce* pun cukup tinggi karena memang didukung oleh tingkat melek internet (*internet literacy*) yang tinggi di kalangan UKM di Kota Cimahi.

Aspek keuangan Kota Cimahi sudah termasuk sangat tinggi dengan indeks sebesar 4,0000. Berhasilnya pengembangan *technopreneurship* dan pengembangan klaster-klaster (sentra ekonomi) mendorong pemanfaatan kredit untuk modal usaha. Kelebihan lainnya adalah bahwa pengembangan kewirausahaan baik kewirausahaan konvensional maupun kewirausahaan sosial telah didukung oleh *angel investor* khususnya bagi pelaku usaha animasi dan IT di Kota Cimahi. Pemanfaatan CSR pun telah cukup baik dilakukan oleh *startups* kewirausahaan sosial.

Efisiensi Pasar Produk di Kota Cimahi memiliki indeks sebesar 3,8333. Upaya meningkatkan efisiensi pasar dilakukan dengan memberikan fasilitas perizinan usaha dengan cepat dan pemanfaatan IT. Kota Cimahi sedang mengembangkan *Mall Pelayanan Publik* yang diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pelayanan publik. Selain meningkatkan rantai nilai produk lokal di klaster-klaster ekonomi yang ada, perlu juga dilakukan upaya pemangkasan jalur distribusi barang agar dapat sampai ke konsumen, sehingga harga produk bisa menjadi lebih kompetitif. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan *marketplace* oleh para UKM/pedagang/petani di Kota Cimahi.

Pilar Ketenagakerjaan merupakan komponen terendah dari Faktor Pasar/Market. Rendahnya indeks ini disebabkan masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Cimahi yaitu sebesar 7,935% pada tahun 2018 dan 8,08% pada tahun 2019. Belum optimalnya sertifikasi tenaga kerja dan masih terdapatnya *asymmetrical information* bagi pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang tersedia. Cimahi perlu meningkatkan *skill* angkatan kerjanya sesuai permintaan industri dan menerapkan sertifikasi serta menjembatani akses informasi lowongan pekerjaan melalui pengoptimalan sistem informasi Sistem *Link & Match* (SILIMA).

Aspek *Enabling*/Penguat menempati komponen ke-3 dengan indeks sebesar 3,5972. Sangat disayangkan aspek penguatan ini belum optimal di Kota Cimahi. Aspek ini didukung oleh Pilar Kelembagaan dengan nilai 3,8750 kemudian Pilar Perekonomian Daerah dengan nilai 3,5000 dan Pilar Infrastruktur dengan nilai 3,4167. Aspek Sumber Daya Manusia ternyata menjadi aspek terendah. Aspek ini berasal dari Pilar Pendidikan & Keterampilan dengan nilai 3.5833 dan Pilar Kesehatan dengan nilai 2.8750.

Terjadinya persaingan global dan juga antar daerah mendorong upaya bagi peningkatan indeks daya saing. Perhatian sebaiknya diberikan pada upaya meningkatkan kinerja aspek, pilar dan komponen yang memiliki nilai yang rendah dibandingkan nilai

total indeks daya saing daerah (IDSD). Diharapkan strategi ini akan mampu mendongkrak nilai indeks daya saing Kota Cimahi ke depan.

Terkait pengembangan inovasi dan teknologi dalam proses pembangunan daerah, tentu tidak terlepas dari konsep *Smart City* karena untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan *Smart City* tidak sekedar mengedapankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*. Pemerintahan berfungsi sebagai *server* (pemberi layanan), yang akan memberikan layanan-layanan terbaik bagi *client-client* (penduduk).

Namun perlu dipahami bahwa konsep *Smart City* adalah konsep yang unik dan dinamis. Inisiasi- inisiasi yang muncul sebagai solusi akan permasalahan kota yang satu tidak serta merta bisa diaplikasikan sebagai solusi akan permasalahan yang muncul di kota yang lain. Hal ini terjadi karena *Smart City* menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan data *analytic* sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (*enabling factor*). Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain. Ditengah-tengah cepatnya laju perkembangan teknologi, berbagai kota di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat dan terbaik dalam

implementasi *Smart City*. Tentu saja yang menjadi tujuan utama adalah untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga, namun lebih jauh kota-kota tersebut juga terus bersaing demi menyandang predikat atau penghargaan sebagai *Smart City* atau Kota Pintar. Dalam pengembangan *Smart City* ini, kami membagi dalam dimensi-dimensi yang menentukan keberhasilan pencapaian *Smart City* menjadi 6 dimensi atau pilar, yaitu :

- 1) *Smart Governance*;
- 2) *Smart Branding*;
- 3) *Smart Economy*;
- 4) *Smart Living*;
- 5) *Smart Society*;
- 6) *Smart Environment*.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan baseline pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2020. Dampak pandemi yang awalnya merupakan masalah kesehatan, telah berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi dampak Pandemi Covid-19 dan merespon dengan berbagai kebijakan penanganan.

Pada tahun 2020 pemerintah menyesuaikan kebijakan APBN guna mendukung percepatan pemulihan stabilisasi sosial-ekonomi, sektor keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan kebijakan tersebut, walaupun terjadi kontraksi pada semua komponen PDB dari sisi pengeluaran, tetapi konsumsi pemerintah mampu tumbuh positif seiring dengan akselerasi Program PEN. Program PEN dioptimalkan untuk menangani masalah kesehatan yang disebabkan oleh Covid-19 dan pada saat yang bersamaan disinergikan dengan kebijakan untuk melindungi kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, dan menahan perlambatan ekonomi nasional. Gerak perekonomian secara bertahap telah meningkat sebagaimana diindikasikan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan dunia usaha sejalan dengan relaksasi atas pembatasan sosial di berbagai daerah. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam dukungan penanganan kesehatan dan menjaga stabilitas perekonomian turut memberikan sentimen positif di pasar keuangan domestik.

Pada tahun 2021, Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan meningkat, walaupun masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi, karena pemulihan ekonomi global akan dipengaruhi oleh bagaimana

kecepatan distribusi vaksin, keberhasilan penanganan covid-19, alokasi stimulus ekonomi di tiap negara, faktor geopolitik, volatilitas di pasar keuangan, serta fluktuasi harga komoditas. Risiko ketidakpastian yang tinggi masih terlihat dari proyeksi ekonomi global 2021 yang terus mengalami perubahan. Dukungan stimulus yang masif dikeluarkan di banyak negara di dunia menjadi salah satu faktor yang mendukung perbaikan ekonomi di tahun 2021.

Upaya penanganan Covid-19 sejalan dengan ketersediaan vaksin akan memengaruhi kinerja perekonomian nasional tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan meningkat. Prospek membaiknya perekonomian nasional akan ditopang oleh dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi. Penguatan reformasi struktural juga akan dilanjutkan untuk membangun pondasi bagi pembangunan jangka menengah dan panjang menuju target Indonesia maju.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi dan investasi serta aktivitas perdagangan internasional akan tumbuh seiring dengan keyakinan masyarakat terhadap kesehatan dan membaiknya perekonomian. Konsumsi pemerintah akan diarahkan untuk mendukung sisi permintaan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial. Investasi diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi terutama karena dukungan belanja infrastruktur yang tetap dilanjutkan, utamanya untuk proyek strategis nasional serta investasi baru di tengah iklim investasi yang kondusif dan fundamental ekonomi yang semakin membaik. Sementara itu, ekspor dan impor diperkirakan tumbuh bertahap seiring dengan perbaikan demand dan supply global. Di sisi produksi, beberapa sektor yang terimbas Pandemi Covid-19 akan mulai bangkit sejalan dengan meningkatnya *Purchasing Manufacturing Index* (PMI). Sektor manufaktur dan perdagangan diperkirakan mulai berproduksi normal didukung reformasi struktural melalui perbaikan regulasi dan birokrasi. Sektor-sektor yang terkena imbas yang dalam seperti transportasi dan pariwisata, diperkirakan mulai bangkit pada tahun 2021. Dengan memerhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global serta faktor-faktor yang memengaruhi penanganan Covid-19,

reformasi struktural, serta ekspansi fiskal, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 diperkirakan mencapai kisaran 5,0 persen. Selanjutnya, kinerja perekonomian nasional akan didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjaga.

Mengacu kerangka ekonomi makro tahun 2021, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program-program pro-poor dan pro-employment pada tahun 2021 untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang telah menurun secara signifikan dalam periode lima tahun terakhir. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2021 diperkirakan berada pada kisaran 7,7-9,1 persen. Penurunan tingkat pengangguran diharapkan juga diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (rasio gini) pada tahun 2021 yang diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 9,2-9,7 persen dan 0,377-0,379. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 72,78-72,95. Sementara itu, kesejahteraan petani dan nelayan juga akan terus ditingkatkan yang tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan mencapai 102-104. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam kebijakan fiskal tahun 2021.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBK. Strategi di bidang perpajakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dengan melanjutkan insentif perpajakan secara selektif dan terukur antara lain, pembebasan PPh impor, dan percepatan restitusi PPN. Sementara itu, optimalisasi penerimaan negara akan ditempuh melalui perluasan basis pajak termasuk pengenaan barang kena cukai

(BKC) baru seperti cukai produk plastik untuk menghindari eksternalitas negatif. Reformasi perpajakan juga dilakukan mencakup perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan yaitu perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, database (core tax), organisasi, dan SDM.

Sementara itu, kebijakan di sektor PNBPN diarahkan untuk : (1) menyempurnakan tata kelola PNBPN termasuk sinergi pengawasan; (2) mendorong peningkatan iklim investasi sektor hulu migas dan dukungan harga gas untuk mendukung industri lebih kompetitif; serta (3) meningkatkan kualitas pelayanan yang terjangkau (*affordable*), tersedia (*available*), dan berkelanjutan (*sustainable*).

Momentum transisi menuju normal secara bertahap, penyelesaian permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial, serta penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap, membutuhkan reformasi kebijakan di bidang belanja negara. Arah kebijakan belanja pemerintah pusat ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain : (1) efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja; (2) optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*); serta (3) redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (*result based*) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan.

Seiring dengan pentingnya momentum membaiknya perekonomian, maka Program PEN dalam akan dilanjutkan untuk : 1) Penanganan kesehatan yang diarahkan antara lain untuk program vaksinasi Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta bantuan iuran BPJS untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP); 2). Perlindungan sosial

pada masyarakat menengah ke bawah melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, serta Bantuan Sosial Tunai; 3). Sektoral K/L dan Pemda yang ditujukan untuk mendukung sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, padat karya K/L, pengembangan kawasan industri, dan pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi; 4). Dukungan pada UMKM melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan investasi kepada KUMKM, penjaminan loss limit, penempatan dana di perbankan, serta antisipasi pemulihan ekonomi; 5). Pembiayaan korporasi yang diperuntukkan pada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan; penjaminan backstop loss limit; serta 6). Insentif usaha melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Selain itu pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi : 1. Industri 2. Pariwisata 3. Ketahanan Pangan 4. UMKM 5. Infrastruktur 6. Transformasi Digital 7. Pembangunan Rendah Karbon 8. Reformasi Perlindungan Sosial 9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan 10. Reformasi Kesehatan;

Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, maka pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan countercyclical dengan tetap memelihara kesinambungan fiskal. Strategi fiskal tersebut berdampak pada konsekuensi defisit anggaran, namun dengan besaran yang semakin menurun. Pada tahun 2023, defisit direncanakan sudah kembali di bawah 3 persen terhadap PDB sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selain itu, sebagai komitmen untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang

fleksibel dan sustainabel, maka rasio utang senantiasa dijaga dalam batas aman.

Apabila Indonesia segera dapat melepaskan diri dari pandemi Covid-19 dan berbagai upaya *countercyclical* yang ditempuh dapat berjalan efektif, dimana sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja, maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian diharapkan akan kembali pulih menuju normal secara bertahap dalam periode 2022-2024.

Pembangunan dalam jangka menengah difokuskan untuk mendukung pemulihan sekaligus secara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari *middle income trap* menuju Indonesia Maju di tahun 2045. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan kembali melanjutkan momentum perbaikan. Pembangunan infrastruktur, terutama rangkaian proyek strategis nasional yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan ekonomi sehingga mampu menopang dan mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis dan produktif seperti investasi dan ekspor serta didukung oleh konsumsi masyarakat yang terjaga. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi diperkirakan akan menjadi salah satu penggerak investasi dan mendorong peningkatan kualitas SDM. Selain itu, Pemerintah juga mempunyai kesempatan melakukan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut sehingga dapat mengalihkan sebagian belanja konsumsi untuk mendukung jenis belanja yang produktif.

Peningkatan aktivitas ekonomi di sisi penawaran melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan mendukung kinerja ekonomi dari sisi pengeluaran sehingga konsumsi masyarakat juga akan mengalami perbaikan dan memberikan prospek ekonomi yang tinggi bagi pelaku usaha. Dengan mempertimbangkan potensi dan risiko tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2022 hingga 2024 diperkirakan dalam kisaran 5,4 – 6,3 persen.

Tabel 3.1.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2020-2024

	2020	2021f*	2022f*	2023f*	2024f*
Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	-2,1	5,0	5,4 – 6,0	5,2 – 6,1	5,2 – 6,3
Investasi	-4,9	4,3	6,5 – 7,2	8,1 – 9,1	5,8 – 7,0
Ekspor	-7,7	7,3	6,5 – 7,1	5,6 – 6,5	5,2 – 6,3
Industri Pengolahan	-2,9	5,2	5,6 – 6,3	5,2 – 6,2	5,2 – 6,4
Jasa-Jasa	-1,4	6,0	6,2 – 6,9	5,9 – 6,9	6,0 – 7,1
Stabilitas Makro-Ekonomi					
Inflasi (% akhir periode)	1,7	2,5	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0	1,5 – 3,5
Nilai Tukar (USD/IDR)	14.577	14.450	13.900 – 15.000	13.800 – 15.000	13.600 – 15.000
Defisit Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,5	-1,0	(1,6) – (1,7)	(1,8) – (2,1)	(2,2) – (2,7)
Cadangan Devisa (USD Miliar)	135,9	136,1	138,2 – 141,4	138,5 – 144,4	140,3 – 141,2

Posisi cadangan devisa tahun 2022 diperkirakan setara dengan pembiayaan 8,0-8,1 bulan impor yang berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sumber : BPS, BI, Kemenkeu, Perkiraan Bappenas
*) Angka Perkiraan Bappenas

Sejalan dengan asumsi indikator makro jangka menengah tahun 2022 -2024, maka sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %;
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48;
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %;
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104;
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105; dan
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Jawa Barat juga mengalami memburuknya beberapa indikator makro sejak merebaknya COVID-19 di Indonesia. Ekonomi Provinsi Jawa Barat triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar 4,08 persen (y-on-y) menurun dibanding capaian triwulan III-2019 yang besarnya 5,15 persen. Ekonomi Jawa Barat pada triwulan III ini terhadap mengalami pertumbuhan sebesar 3,37 persen (q-to-q) dari triwulan sebelumnya.

Indikator makro lain yang juga menunjukkan penurunan kinerja yaitu kemiskinan. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 544,3 ribu jiwa, dari 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019 menjadi 3,92 juta jiwa (7,88 persen) pada Maret 2020. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan dengan indeks gini mengalami peningkatan yakni dari 0,398 pada tahun lalu menjadi 0,403 pada Maret 2020.

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan. Indikator makro Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Jawa Barat dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian pembangunan Jawa Barat berdasarkan publikasi BPS.

Tabel 3.2.
Proyeksi Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2019		Target RPJMD				Target Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir
			2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,69	71,30	71,40-71,81	72,03	71,91-72,52	73,13-73,13	73,74-73,74	74,35-74,35	71,35-71,35	71,71-71,71	72,38-72,38	73,14-73,14	73,14-73,55
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,36	1,5	1,3	1,48-1,48	1,45-1,45	1,43-1,43	1,41-1,41	1,49-1,50	1,47-1,48	1,45-1,46	1,43-1,44	1,43-1,44
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,83	7,25	6,66-6,90	6,82	6,07-6,31	5,48-5,72	4,89-5,13	4,30-4,54	7,25-7,09	6,96-6,63	6,39-6,06	5,77-5,42	5,77-5,42
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,22	8,17	8,0-7,9	7,99	7,9-7,7	7,7-7,5	7,5-7,3	7,3-7,1	10,30-12,01	10,40-9,30	9,46-7,81	8,03-6,21	8,03-6,21
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,33	5,66	5,40-5,80	5,07	5,5-5,9	5,6-6,0	5,7-6,1	5,8-6,2	+2,77-+1,61	-3,33-4,49	5,20-5,20	5,50-5,50	5,50-5,50
6	Indeks Gini	Poin	0,393	0,405	0,38-0,39	0,398	0,37-0,38	0,37-0,38	0,36-0,37	0,36-0,37	0,39-0,41	0,39-0,40	0,39-0,40	0,38-0,39	0,38-0,39
7	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	37,22	40,3	*	43,35	*	*	*	*	42,66-43,17	44,73-45,77	48,10-49,22	52,09-53,30	52,09-53,30

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Sedangkan target indikator makro Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Target Indikator Makro Jawa Barat 2022

INDIKATOR	TARGET (PERSEN)
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5
Tingkat Kemiskinan	7.3 – 7.9
Tingkat Penganggura Terbuka	9.7

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Cimahi

3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2020

Rancangan kerangka ekonomi daerah berkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi. Kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun lalu dan tantangan perekonomian daerah ke depan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional maupun provinsi demi terjadinya keselarasan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi mengacu pada arahan Nasional dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan Analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi atau penyelarasan arah pembangunan antara pusat dan daerah.

Konstelasi arah pembangunan nasional, menuntut Kota Cimahi untuk bisa terlibat aktif dalam menyelaraskan prospek pembangunan yang senada dengan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Adapun Kota Cimahi menuangkan arah pembangunannya dalam dokumen ini yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Perubahan, dengan mencantumkan perkiraan target dari Indikator Makro Ekonomi untuk tahun 2019-2022 , yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Target Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2021– 2022

Uraian	Target Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6.84	-3,07	3.69	5.11
Indeks gini	0.437	0.38	0.39	0.38
TPT (%)	7.52	13.3	12.64	11.37
Angka kemiskinan (%)	4.39	5.21	5.07	5.02

Sumber : RPJMD Perubahan Cimahi

Target beberapa indikator makro ekonomi Kota Cimahi dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan perekonomian Kota Cimahi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Cimahi periode 2016-2019 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, namun memasuki tahun 2020 terkontraksi diangka -2,26 persen dikarenakan adanya pandemic Covid-19, namun angka ini masih tetap berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5.

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.33	0.82	0.54	2.38	1.32
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4.31	4.13	7.7	11.56	-4.96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.91	2.82	5.72	2.59	-1.01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.78	6.52	5.16	-7.93	6.88
F	Konstruksi	4.87	7.02	7.1	4.56	-5.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.67	4.32	2.91	3.76	-8.05
H	Transportasi dan Pergudangan	8.5	5.2	5.3	6.69	-1.1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.68	6.42	6.57	6.67	-7.42
J	Informasi dan Komunikasi	14.21	11.8	9.14	7.06	32.79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.12	6.81	7.13	2.51	1.65

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
L	Real Estate	5.78	7.28	8.44	8.46	1.24
M.N	Jasa Perusahaan	7.72	8.13	8.01	6.91	-17.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.84	4.01	1.35	2.88	-3.66
P	Jasa Pendidikan	8.23	8.37	4.17	4.14	4.28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.57	7.57	7.24	6.56	-5.75
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.34	7.46	5.68	6.29	-5.73
Produk Domestik Regional Bruto		5.63	5.43	6.46	7.85	-2.26

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021, BPS

Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB Atas dasar Harga Konstan menurut komponen pengeluaran Kota Cimahi dapat dilihat dari table 3.6 yang menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan dan konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB ADHK dari sisi pengeluaran di Kota Cimahi didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB, dari table 2.1 terlihat bahwa nilai PDRB ADHK meningkat kecuali di tahun 2020 yakni sebesar 18.882,16 miliar Rupiah (2016), 19.907,13 miliar rupiah (2017); 21.192,60 milyar rupiah (2018); 22.856,04 miliar rupiah (2019); dan 22.340,56 milyar rupiah (2019).

Tabel 3.6.

PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Cimahi
Tahun 2016-2020 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018 R	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	14,250.22	14,815.38	15,505.45	16,138.02	15,696.18
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	43.07	45.59	51.78	53.41	52.25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	983.75	1,058.15	1,079.54	1,133.88	1,111.04
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6,469.50	6,846.37	7,284.43	7,550.13	7,033.98
Perubahan Inventori	629.65	632.51	654.25	664.84	277.13
Net Ekspor Barang dan Jasa	(3,394.03)	(3,490.87)	(3,382.86)	(2,684.23)	(1,830.01)
Jumlah	18,882.16	19,907.13	21,192.60	22,856.04	22,340.56

Sumber : PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluaran 2016-2020 (BPS,2021)

R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

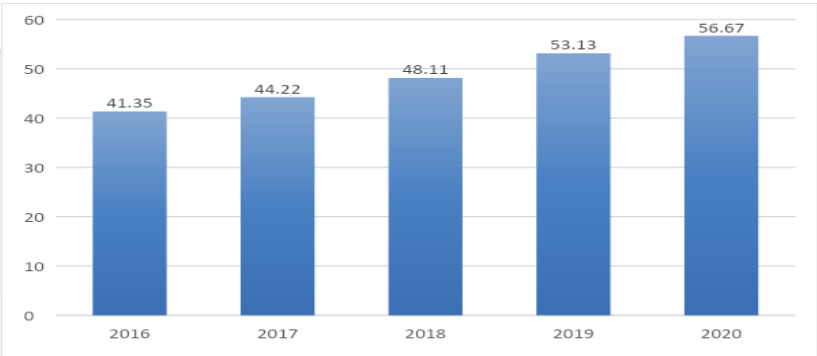
** Angka Sangat Sementara

2. PDRB Perkapita

Indikator lain yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita atau *Percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (*transfer in*) maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya memperoleh data pendapatan faktor produksi yang masuk dan keluar wilayah kota. Angka pendapatan per kapita dengan asumsi tersebut di atas diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Secara umum perkembangan PDRB perkapita Kota Cimahi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 41,35 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 56,67 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Perkembangan PDRB Perkapita Penduduk Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Gambar 3.1.
PDRB Perkapita Kota Cimahi Tahun 2016-2020



Sumber : PDRB Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (BPS Cimahi,2021)

3. Inflasi

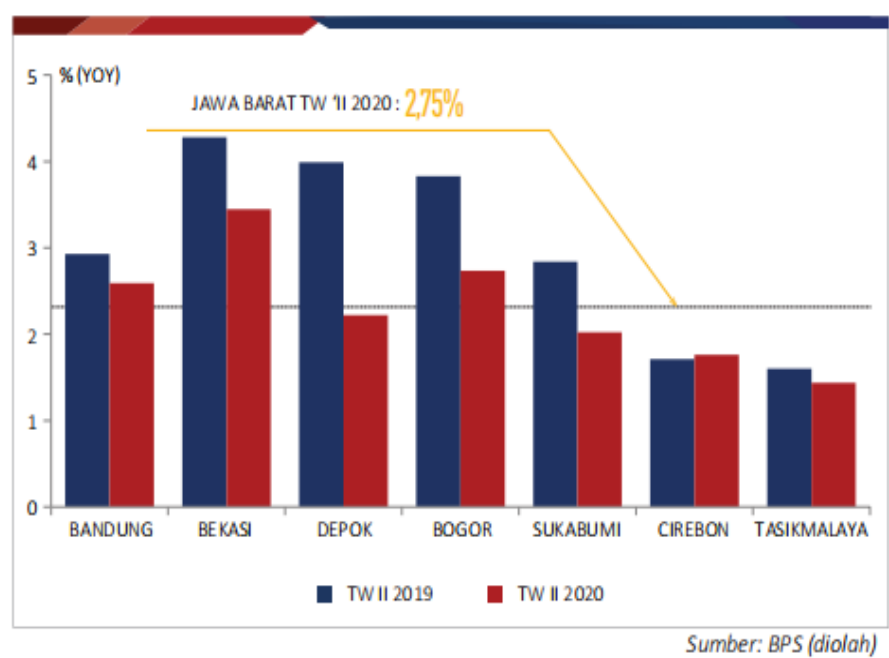
Inflasi Jawa Barat pada triwulan II 2020 tetap terkendali dan berada pada rentang sasaran inflasi $3\% \pm 1\%$, yakni sebesar 2,21% (yoy). Realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan II 2019 yang mencapai sebesar 3,48% (yoy) maupun triwulan I 2020 yang sebesar 3,94% (yoy). Tekanan permintaan yang berkurang karena kondisi perekonomian yang berkontraksi dan terjaganya pasokan pangan strategis akibat panen raya padi dan hortikultura, mendorong laju inflasi yang cenderung rendah. Meskipun demikian, capaian inflasi IHK Jawa Barat pada triwulan II 2020 masih lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang sebesar 1,54%(yoy). Tekanan inflasi tersebut berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terutama sub kelompok Makanan yang menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Nilai inflasi di Kota Cimahi mengacu kepada kota terdekat di Provinsi Jawa Barat yang diperhitungkan nilai inflasinya oleh Bank Indonesia, yaitu Kota Bandung. Di wilayah Jawa Barat, terdapat 3 (tiga) kota dengan laju inflasi yang lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Barat, yaitu Kota Bekasi sebesar 3,45% (yoy), Kota Bogor sebesar 2,74% (yoy), dan Kota Bandung sebesar 2,59% (yoy). Sementara itu, Kota Tasikmalaya menjadi kota dengan level inflasi terendah yaitu sebesar 1,44%(yoy).

Tiga kota dengan inflasi tertinggi di Jawa Barat memiliki karakteristik yang serupa yaitu berperan sebagai wilayah konsumen dan bukan wilayah produsen. Hal ini menyebabkan ketiga wilayah tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap daerah pemasok bahan-bahan kebutuhan konsumsi, sehingga tekanan inflasi ketiga wilayah ini sangat bergantung pada terjaganya pasokan dari daerah lain. Kota Bandung yang merupakan daerah dengan bobot inflasi terbesar, cukup sensitif terhadap pergerakan harga. Keberadaan BUMD Pangan yang difungsikan sebagai distributor dan Oß Taker dan disinergikan dalam kerangka Kerjasama Antardaerah untuk menjaga pemenuhan

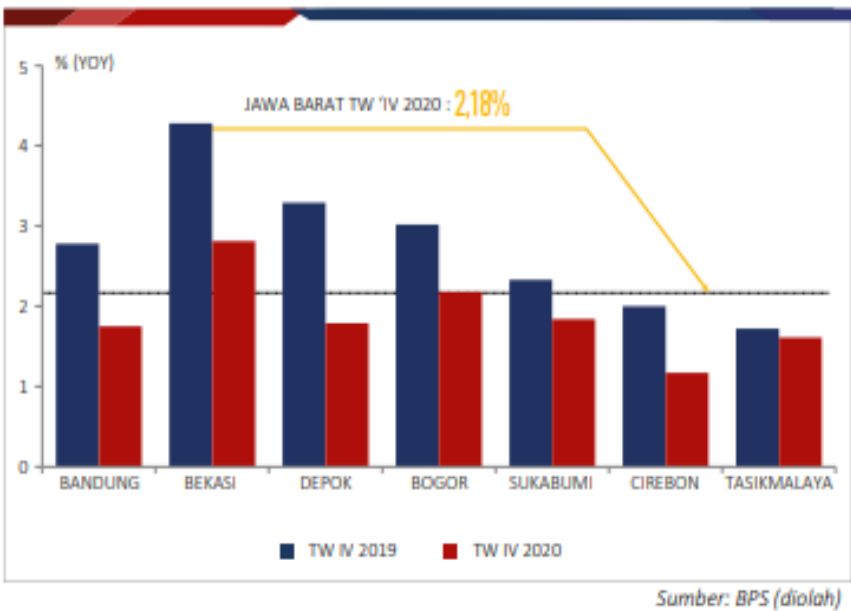
kebutuhan di wilayah Jawa Barat sangat diperlukan untuk mengendalikan inflasi.

Gambar 3.2.
Inflasi Kota Perhitungan IHK Jabar TW II 2020



Sedangkan pada Triwulan IV Berdasarkan kota pembentuk IHK di Jawa Barat, Kota Bekasi tercatat mengalami inflasi tertinggi yakni 2,81% (yoy) sementara Kota Cirebon merupakan yang terendah sebesar 1,17% (yoy) (Grafik Dibawah). Inflasi yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan oleh peningkatan harga komoditas cabai merah, telur ayam ras, pisang, daging ayam ras, dan angkutan antar kota. Adapun tekanan inflasi yang terjadi di Kota Cirebon dengan inflasi terendah disebabkan oleh kenaikan harga komoditas telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, beras, dan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Gambar 3.3.
Inflasi Kota Perhitungan IHK Jabar TW IV 2020



Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai inflasi Kota Cimahi di November 2020 merupakan nilai terendah yang Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai inflasi Kota Cimahi di November 2020 merupakan nilai terendah yang dicapai. Tekanan permintaan yang berkurang karena kondisi perekonomian yang berkontraksi akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, dan terjaganya pasokan pangan pangan strategis akan mendorong laju inflasi yang cenderung rendah di Kota Cimahi.

4. Investasi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya ditentukan oleh nilai investasi. *Trend* pertumbuhan realisasi investasi di Kota Cimahi fluktuatif pada tahun 2016 hingga 2020. Potensi yang dimiliki baik sektor unggulan maupun fondasi iklim investasi seperti mekanisme investasi perlu dikembangkan. Belum optimalnya investasi disebabkan kurang kondusifitas iklim investasinya. Terdapat 14 peraturan daerah yang mendukung iklim usaha tetapi belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang investasi. Selain itu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk DPMPSTSP kota Cimahi

pada tahun 2020 termasuk kategori C (Kurang baik), sehingga perlu adanya perbaikan.

Tabel 3.7.

Realisasi Investasi berdasarkan LKPM Kota Cimahi Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	38	125	178	141	216
Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Rp7.213.669.420.186,55	Rp8.953.319.609.542,00	Rp.9.744.433.463.274,00	Rp.24.410.560.302.066,00	Rp.5.785.630.739.622,00

Sumber : DPMPTSP Kota Cimahi, 2020

5. Tenaga Kerja

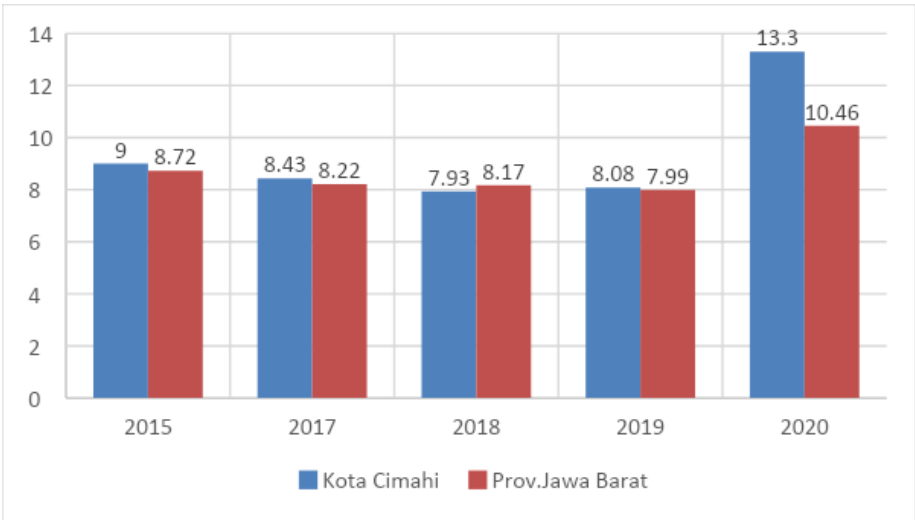
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting digunakan untuk menganalisis dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Sementara itu, TPT di Kota Cimahi pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 memiliki kecenderungan penurunan, namun pada Tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 TPT Cimahi sebesar 9 persen dan pada tahun 2018 angkanya menjadi 7,93 persen. Selanjutnya pada tahun 2019, TPT Kota Cimahi mengalami peningkatan menjadi 8,08 persen dan meningkat kembali menjadi 13,3 persen di tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan adanya beberapa perusahaan yang menutup usahanya di Cimahi dan menyisakan masalah pengangguran, dan dampak dari pandemic Covid 19 yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan industri pengolahan di Kota Cimahi dimana sektor tersebut merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja.

Sebaliknya, TPT Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari 8,17 pada Tahun 2018 menjadi 7,99 di tahun 2019 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 menjadi 10,46 persen. Namun angka TPT di Kota Cimahi berada diatas angka TPT Jawa Barat, yang artinya Pemerintah Kota Cimahi perlu mewaspadai jumlah pengangguran di Kota Cimahi yang terus meningkat terutama pasca Pandemi Covid 19, sehingga perlu dilakukan intervensi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut. Adapun TPT di Kota Cimahi dan Jawa Barat Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3.4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Cimahi (2021)

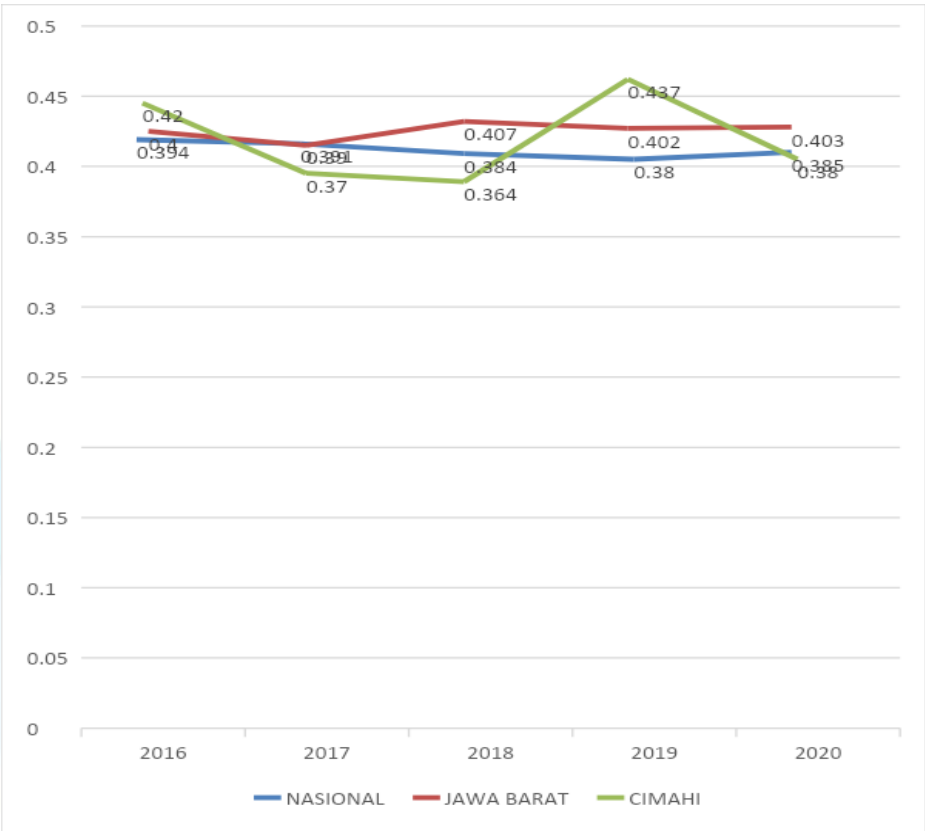
6. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan/ ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dijelaskan salah satunya dengan menggunakan Indeks Gini. Kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi memiliki kecenderungan meningkat. Selama periode 2015-2016 indeks gini Kota Cimahi menurun sebesar 0,021 poin, yang semula 0,41 di tahun 2015 menjadi 0,42 di tahun 2016.

Selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan 2018 indeks gini Kota Cimahi terus mengalami penurunan, dan meningkat kembali di tahun 2019 hingga mencapai 0,437 di tahun 2019 dan menurun kembali di tahun 2020 menjadi 0.380. Dengan kecenderungan penurunan indeks gini ini, dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi semakin merata. Hal ini sejalan dengan persentase penduduk miskin di Cimahi yang beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Penurunan indeks gini juga terjadi diduga sebagai dampak dari keberhasilan program-program bantuan sosial dan subsidi yang digulirkan oleh Pemerintah pusat, provinsi dan Kota Cimahi terhadap golongan masyarakat

berpendapatan rendah di Kota Cimahi. Penurunan Indeks Gini di tahun 2020 diduga juga sebagai dampak menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dampak Pandemi Covid-19, dimana masyarakat menahan konsumsi nya sebagai akibat menurunnya pendapatan, hal ini sejalan dengan menurunnya pengeluaran perkapita Kota Cimahi di tahun 2020 yang semula 12.448.000 orang/tahun (2019) menjadi 12.025.000 orang/tahun (2020).

Gambar 3.5.
Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BRS BPS (2021) diolah

Bila dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka Indeks Gini Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berada dibawah Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa Cimahi memiliki

kesenjangan pendapatan yang lebih kecil dibanding Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

3.1.3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2022

Dilihat dari akses potensi dan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi, ada beberapa tantangan dan prospek bagi perekonomian Kota Cimahi yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Cimahi. Adapun tantangan dan prospek tersebut diantaranya adalah :

1. Berdasarkan analisis *Location Quotient (LQ)* Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan merupakan sector dengan kontribusi besar dan berkategori prospektif karena merupakan sektor basis, namun potensi perkembangan menjadi lebih lambat terutama setelah memasuki tahun 2020, hal ini dimungkinkan sebagai akibat dampak dari Pandemi Covid-19, sedangkan untuk sektor jasa Pendidikan bukan merupakan sektor basis namun tumbuh lebih cepat sehingga terkategori andalan. Oleh karena itu ketiga sektor tersebut masih memiliki potensi untuk menjadi penggerak perekonomian Cimahi. Namun khusus untuk sektor-sektor basis yang berkontribusi besar untuk Kota Cimahi perkembangannya menjadi lambat, maka hal tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk meningkatkan produktivitasnya;
2. Berdasarkan analisis *Shift Share (SS)* beberapa sektor dominan di Kota Cimahi yang mampu kompetitif dan memiliki spesialisasi di periode 2019-2020 adalah sektor konstruksi dan sektor jasa keuangan & asuransi. Kedua sektor tersebut dikatakan kompetitif karena kedua sektor tersebut di Cimahi mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di Jawa Barat, sementara dikatakan spesialisasi karena konsentrasi kedua sektor tersebut di Cimahi lebih besar dibandingkan dengan proporsi sektor yg sama di Jawa Barat;
3. Berdasarkan analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP) dan *Tipologi Klassen*, di Kota Cimahi pada periode 2019-2020 terdapat sektor

basis dan non basis yang mampu tumbuh positif di saat pandemik, hal ini menunjukkan bahwa sektor unggul di masa pandemic yaitu sector Informasi dan Komunikasi, sektor jasa administrasi pemerintahan dan sector jasa Pendidikan; dan

4. Aktivitas penanaman modal atau investasi di Kota Cimahi perlu mengacu kepada UU Cipta Kerja, dimana saat ini sistem perizinan berbasis resiko (*Risk Base Approach*), oleh karena itu perlu adanya review terhadap semua Perda perizinan yang disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, perubahan tersebut diantaranya terkait perubahan nomenklatur dan mekanisme perizinan; sehingga Perangkat Daerah diharapkan mendukung dalam melakukan review peraturan tersebut.

3.1.3.3. Arah Kebijakan Perekonomian Kota Cimahi

Berdasarkan kondisi dan tantangan perekonomian Kota Cimahi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka arah kebijakan ekonomi saat ini adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sektor Industri Pengolahan dan perdagangan, karena kedua sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Cimahi. Adapun Industri pengolahan dan perdagangan yang dikembangkan di Kota Cimahi adalah Industri Pengolahan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dengan berdasarkan potensi lokal, khususnya IKM dan UMKM di Kota Cimahi yang bergerak di sektor basis, agar dapat beradaptasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)/ teknologi digital untuk mendukung usahanya;
3. Meningkatkan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran terbuka, melalui Pengembangan IKM dan UMKM;

4. Mengembangkan sektor-sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang terbukti dapat bertahan positif selama masa pandemic covid-19, yakni sektor Informasi dan Komunikasi, sektor jasa administrasi pemerintahan, dan sektor jasa Pendidikan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi selama dan pasca pandemic Covid-19;
5. Meningkatkan peran sektor informasi dan komunikasi untuk menunjang produktivitas sektor-sektor lainnya khususnya **sektor-sektor basis** yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian kota Cimahi, karena di tahun 2020 sector tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi (32,25%) dan signifikan dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Cimahi secara keseluruhan (-2,26%);
6. Meningkatkan daya saing angkatan kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta meningkatkan kesempatan kerja dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi;
7. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Cimahi melalui penyesuaian regulasi perijinan yang sudah disesuaikan dengan amanat pada Undang-Undang Cipta Karya dan peraturan turunannya, sehingga perlu disusun regulasi di tingkat daerah yang bersinergi dengan peraturan perijinan dari pusat maupun provinsi. **(Pemantapan implementasi perijinan berbasis resiko (OSS-RBA));**
8. Terdapat 57 perizinan dan 7 non perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Karya dan peraturan turunannya. Terdapat beberapa izin yang belum masuk dalam Surat Keputusan Wali Kota Nomor 503/Kep.276-DPMPTSP/2021 Tanggal 11 Januari 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, oleh karena itu perlu disusun Peraturan Walikota untuk penyesuaian dengan peraturan perijinan terbaru dari pusat untuk implementasi perijinan berbasis resiko (OSS-RBA) di Kota Cimahi; dan

9. Pemulihan sosial dan ekonomi di tahun 2022 masih harus terus dilakukan dengan pengalokasian anggaran yang lebih terkonsentrasi khususnya di sektor kesehatan, tenaga kerja, IKM/UMKM, Perdagangan, Pendidikan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kota Cimahi didasarkan pada asumsi dasar kebijakan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah tahun sebelumnya. Asumsi dasar kebijakan keuangan daerah terdiri dari Asumsi dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta Asumsi Lain-lain. Sedangkan kinerja keuangan daerah terdiri dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang terlihat dari capaian realisasi kinerja keuangan daerah.

3.2.1. Asumsi Dasar Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1.1. Asumsi Dasar dalam APBN

Kinerja perekonomian domestik di tahun 2022 diperkirakan mengalami pemulihan seiring meredanya pandemi Covid-19, meskipun dampak dari ketidakpastian ekonomi global masih tetap perlu diwaspadai. Kondisi “*new normal*” perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh sebesar 5,4 - 6,0 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan dari basis angka yang rendah di tahun 2021 sehingga kinerja ekonomi di tahun 2022 mengalami pemulihan, meskipun mayoritas komponen ekonomi dan sektor produksi belum sepenuhnya kembali pada kinerja kapasitas normal sebelum terdampak pandemi Covid-19. Di samping proses pemulihan, kinerja ekonomi domestik di tahun 2022 juga akan didorong oleh upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi nasional akan mulai terlihat.

Permintaan domestik (konsumsi dan investasi) diperkirakan kembali menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, setelah pulih dari krisis akibat Pandemi Covid-19. Penanganan pandemi dan pelaksanaan program PEN yang efektif, serta komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi diharapkan mampu mengembalikan level kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas belanja dan mobilitas secara normal. Investasi (PMTB) diperkirakan naik tajam sejalan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta upaya untuk melakukan reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha dan daya saing investasi. Konsumsi pemerintah juga didorong untuk mendukung momentum pertumbuhan, melanjutkan kebijakan countercyclical, dan mengakselerasi program PEN pascapandemi Covid-19. Kinerja ekspor diperkirakan akan lebih baik, seiring pemulihan kinerja ekonomi global yang juga akan didorong melalui perluasan negara tujuan potensial ekspor serta pengembangan pariwisata. Sementara itu, impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku dan barang modal.

Konsumsi rumah tangga dan LNPRT pada tahun 2021-2022 diperkirakan tumbuh sebesar 4,1 hingga 5,3 persen seiring dengan aktivitas belanja dan mobilitas masyarakat yang kembali berjalan, tercermin dari peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran. Penguatan efektivitas program perlindungan sosial dilakukan melalui integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program yang relevan.

Di sisi lain, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk tetap dapat *countercyclical* di tahun 2022. Dengan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional, diharapkan akselerasi proses pemulihan dunia usaha dapat lebih cepat tercapai. Selain itu, kebijakan konsumsi Pemerintah akan diarahkan pada peningkatan value for money agar lebih efektif, efisien, dan produktif sehingga dapat menstimulasi perekonomian lebih baik. Pada tahun 2021, konsumsi Pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 4,5 – 7,0 persen.

Sementara itu, dengan memberikan fasilitas kemudahan usaha dan investasi, meningkatkan kepastian hukum, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, investasi diperkirakan akan tumbuh tinggi sebesar 6,0 hingga 7,1 persen. *Omnibus Law* Perpajakan dan Cipta Kerja diperkirakan sudah berjalan sehingga dapat meningkatkan investasi. Selain itu, kontribusi pembangunan berbagai pemusatan industri yang dibangun Pemerintah baik dalam bentuk kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri yang diharapkan menarik minat untuk berinvestasi pada sektor riil diharapkan memberikan lonjakan kepada investasi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor diperkirakan terus membaik dengan perkiraan pertumbuhan ekspor di kisaran 2,7 – 6,2 persen dan pertumbuhan impor di kisaran 3,2 – 8,5 persen. Risiko permintaan global yang masih lemah pasca pandemi Covid-19 masih akan membayangi upaya peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor dan impor. Hal itu juga akan tercermin dari fluktuasi harga komoditas ekspor

utama yang perlu diwaspadai. Pemerintah perlu melakukan upaya diversifikasi ekspor demi menciptakan stabilitas eksternal melalui revitalisasi sektor industri pengolahan.

Sebagai langkah mitigasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor, perluasan negara tujuan yang merupakan pasar potensial ekspor terus diupayakan melalui kerjasama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Peningkatan ekspor juga akan didorong melalui pengembangan sektor pariwisata yang lebih menekankan pada kualitas dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Promosi destinasi wisata yang disertai dengan peningkatan sarana prasarana pendukung juga tetap menjadi program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk bahan baku dan barang modal dengan tetap memperhatikan kondisi neraca perdagangan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun 2016-2019 serta proyeksinya di tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.8.

Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral 2016 – 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020	RAPBN 2021
<i>Pengeluaran</i>						
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPKT	5,0	5,0	5,1	5,2	(1,3) - 0,0	4,1 - 5,3
Konsumsi Pemerintah	(0,1)	2,1	4,8	3,2	2,0 - 4,0	4,5 - 7,0
PMTB	4,5	6,2	6,6	4,4	(4,2) - (2,6)	6,0 - 7,1
Ekspor Barang dan Jasa	(1,7)	8,9	6,5	(0,9)	(5,6) - (4,4)	2,7 - 6,2
Impor Brg & Jasa	(2,4)	8,1	11,9	(7,7)	(10,5) - (8,4)	3,2 - 8,5
<i>Lapangan Usaha</i>						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,4	3,9	3,9	3,6	1,1 - 1,3	3,3 - 3,9
Pertambangan dan Penggalian	0,9	0,7	2,2	1,2	(1,0) - (0,5)	0,3 - 1,7
Industri Pengolahan	4,3	4,3	4,3	3,8	(2,4) - (0,5)	4,7 - 5,5
Pengadaan Listrik dan Gas	5,4	1,5	5,5	4,0	(0,1) - 0,7	4,8 - 5,8
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,6	4,6	5,6	6,8	4,6 - 4,8	4,8 - 5,8
Konstruksi	5,2	6,8	6,1	5,8	(0,9) - (0,3)	5,3 - 6,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,0	4,5	5,0	4,6	(3,3) - (1,0)	4,3 - 5,3
Transportasi dan Pengudangan	7,4	8,5	7,1	6,4	(15,4) - (12,7)	5,6 - 6,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,2	5,4	5,7	5,8	(12,7) - (7,3)	3,5 - 7,9
Informasi dan Komunikasi	8,9	9,6	7,0	9,4	10,7 - 11,2	8,3 - 10,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,9	5,5	4,2	6,6	4,3 - 4,7	5,6 - 6,8
Real Estate	4,7	3,6	3,5	5,7	3,0 - 3,2	3,4 - 4,8
Jasa Perusahaan	7,4	8,4	8,6	10,3	(1,4) - (0,3)	6,6 - 7,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,2	2,0	7,0	4,7	1,0 - 1,5	3,7 - 5,5
Jasa Pendidikan	3,8	3,7	5,4	6,3	3,0 - 3,6	4,0 - 5,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,2	6,8	7,1	8,7	5,8 - 6,4	4,6 - 6,1
Jasa lainnya	8,0	8,7	9,0	10,6	(3,0) - (0,2)	7,8 - 8,3

Sumber: BPS, Bappenas dan Kementerian dalam

Kinerja sektor produksi didorong untuk lebih cepat pulih dengan program PEN, meskipun Pemerintah juga akan mengantisipasi proses pemulihan yang lambat dan bertahap. Pemerintah pada tahun 2022 akan fokus terhadap upaya akselerasi pemulihan kinerja sektor produksi tertentu serta melanjutkan momentum reformasi struktural guna mendorong produktivitas dan daya saing industri. Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi *engine of growth* dengan dukungan berbagai upaya kebijakan pemulihan dan upaya revitalisasi. Sementara ketahanan pangan dan ketahanan energi tetap menjadi fokus Pemerintah, sehingga pertumbuhan sektor terkait dapat dijaga supaya tetap positif seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta sebagian jasa perdagangan ritel diharapkan untuk tumbuh di atas rata-rata nasional yang akan didorong oleh akselerasi pembangunan infrastruktur digital yang merata di seluruh Indonesia.

Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah sektor industri pengolahan. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan berat pada sebagian besar industri manufaktur nasional, terutama industri garmen, alas kaki, alat angkutan, serta elektronik yang merupakan pilar utama dalam mendorong peningkatan produktivitas dan menciptakan dampak pengganda perekonomian. Untuk itu, berbagai upaya kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini akan ditempuh dan diharapkan mampu mengembalikan perannya sebagai *engine of growth* perekonomian nasional. Kinerja industri pengolahan di tahun 2021 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 4,7 – 5,5 persen.

Sektor lainnya yang diperkirakan dapat mendukung kinerja perekonomian nasional adalah sektor jasa terkait pariwisata khususnya penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta transportasi. Sektor tersebut memiliki potensi untuk dapat mendukung kinerja ekonomi nasional melalui peningkatan penerimaan devisa Pemerintah dari kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor ini memang menjadi sektor utama yang paling parah terdampak pandemi Covid-19. Namun, Pemerintah mengharapkan proses pemulihan kinerja sektor ini dapat berlangsung cepat dan kembali ke zona pertumbuhan tinggi. Dengan

kondisi baseline pertumbuhan rendah di tahun 2020, kinerja sector ini di tahun 2021 diperkirakan tumbuh tinggi masing-masing sebesar 5,5 – 7,9 persen untuk sektor penyediaan akomodasi makan-minum, dan 5,6 – 6,9 persen untuk sektor transportasi dan perdagangan.

Selanjutnya, sektor yang diprediksi memberikan peran penting pada kinerja ekonomi adalah sektor jasa-jasa yang mengadopsi teknologi tinggi, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta sebagian jasa perdagangan ritel. Perubahan paradigma ekonomi saat berlangsungnya pandemi mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar, dan belanja dari rumah diperkirakan menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial. Dengan demikian, hal ini mendorong kinerja sektor-sektor terkait tumbuh di atas rata-rata nasional. Sektor informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 8,3 – 10,1 persen, sementara jasa keuangan diharapkan tumbuh sebesar 5,6 – 6,8 persen.

3.2.1.2. Lain-lain Asumsi

Perekonomian Kota Cimahi akan sangat terkait dengan kondisi perekonomian pada tingkat nasional dan global, oleh karena itu kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi harus diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional, dan Regional Jawa Barat terutama pada kebijakan kewilayahan.

Pendekatan pembangunan ekonomi di Kota Cimahi harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi perekonomian lokal, dari hasil analisis struktur ekonomi Kota Cimahi diperoleh beberapa gambaran sebagai berikut : (1) sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian adalah sektor industri pengolahan dan perdagangan, namun kedua sektor tersebut menunjukkan trend yang menurun secara presisten; dan (2) Sektor potensial yang terlihat dari nilai pertumbuhan yang cukup tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan dan asuransi dan jasa keuangan.

Menurunnya sektor-sektor unggulan ini mengharuskan Kota Cimahi untuk mengembangkan potensi lain diantaranya melalui

pengembangan IKM serta perdagangan dan jasa. Metode yang digunakan untuk menjawab kebutuhan lokal dijawab dengan menggunakan sebuah pendekatan yang memadukan pengembangan sektor-sektor ekonomi dengan memperhatikan aspek spasial. Pemaduan antara sektor ekonomi dan lokasi menyebabkan pengembangan perekonomian dilaksanakan dengan menggunakan konsep pengembangan IKM dan kewirausahaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, Dampak dari pembangunan ekonomi dengan memperhatikan sektor dan lokasi perkembangannya akan memberikan implikasi bahwa pembangunan perekonomian harus dipandang dari sudut potensi-potensi yang ada di daerah.

Pada tahun ini dilakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2021, disebabkan adanya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Hal ini merupakan salah satu amanat pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah sebagai implementasi dari beberapa peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh beberapa Kementerian/Lembaga untuk menerbitkan peraturan pelaksanaannya, antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Bila Pendapatan berdasarkan hasil Penyesuaian APBD Tahun 2020 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan pada APBD Tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 3,7 persen. Sisi Belanja juga mengalami kenaikan pada Penyesuaian APBD Tahun 2020 sebesar 1,4 persen dari target pada APBD Tahun 2020. Bila Penyesuaian Belanja pada APBD 2020 dibandingkan dengan Realisasi Belanja pada APBD Tahun 2019 maka terjadi kenaikan sebesar 5,7 persen.

Dengan menggunakan baseline Penyesuaian APBD tahun 2020, maka disusun proyeksi APBD sampai dengan 2022. Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2022, Pendapatan diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,39%. Dari penurunan 5,39% tersebut terdapat beberapa kelompok Pendapatan yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Komponen yang mengalami kenaikan yaitu kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,88%. Sementara kelompok pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Dana Perimbangan yakni sebesar 2,35%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 20,95%.

Pada sisi Belanja, rata-rata pertumbuhan periode tahun 2015-2019 sebesar 8,9%. Dengan pertimbangan realisasi belanja periode tersebut, maka disusun APBD Tahun 2020. Namun dengan adanya kondisi luar biasa akibat pandemi COVID-19 maka dilakukan penyesuaian berupa *refocussing* maupun realokasi anggaran pada tahun ini. Langkah ini diambil untuk mengimbangi kebijakan penghitungan kembali pendapatan sebagaimana arahan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menyebabkan proyeksi Belanja Daerah tahun 2020-2022 rata-rata mengalami penurunan sebesar 5,97%.

Upaya untuk pemutusan dan pencegahan penyebaran Covid-19 antara lain dengan pembatasan sosial (*social distancing*), pelarangan/pembatasan perjalanan, pembatasan/penutupan perbatasan antardaerah di beberapa daerah di Indonesia, penutupan sekolah, kantor (*work from home*), dan tempat ibadah, telah menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun dari sisi penawaran (*supply*). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi

terkendala, dan rantai pasokan terganggu. Kondisi menyebabkan memburuknya perekonomian, kondisi sosial, dan pembangunan secara umum.

Dengan pertimbangan kondisi tersebut, maka skenario keuangan sampai dengan akhir periode RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 diupayakan dengan memprioritaskan belanja untuk :

1. Penerapan pelayanan dasar;
2. Percepatan penanganan wabah COVID-19; percepatan penanganan dampak pandemi; dan pemulihan pasca pandemi. Alokasi belanja mulai Tahun 2020 sampai dengan 2022 diarahkan untuk eskalasi belanja bidang kesehatan, peningkatan belanja dan cakupan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan dukungan terhadap dunia usaha termasuk UMKM;
3. Mendukung pencapaian visi, misi dan prioritas wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022; dan
4. Program-program yang mendukung prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah Kota Cimahi berasal dari 3 (tiga) komponen pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sampai dengan Tahun 2020, kontribusi terbesar pada Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan, hal ini menggambarkan bahwa pembangunan Kota Cimahi masih bergantung pada dana dari pusat, oleh karena itu arah kebijakan pendapatan daerah Kota Cimahi di tahun 2022 masih berfokus pada upaya peningkatan desentralisasi fiskal Kota Cimahi, yang dituangkan dalam dokumen Renstra dan Renja Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi.

Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Tahunan Bappenda Kota Cimahi, realisasi capaian penerimaan hasil pajak daerah Kota Cimahi pada tahun 2017-2022 adalah diatas 100 persen, artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Persentase capaian realisasi penerimaan hasil pajak daerah Kota Cimahi di tahun 2020 adalah

sebesar 116,40% atau mencapai Rp. 158.937.237.899 dari target sebesar Rp. 136.545.238.041.

Tabel 3.9.
Capaian Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah Tahun 2017-2020

TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2017	116.923.551.744	165.391.683.082	141,45
2018	132.108.046.123,69	134.770.330.583	102,02
2019	161.488.910.896,42	163.136.977.065	101,02
2020	136.545.238.041	158.937.237.899	116,40

Sumber : Bappenda (2021)

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Bappenda Kota Cimahi di tahun 2022, menargetkan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 2 (dua) persen dari tahun sebelumnya, dan persentase realisasi Pajak daerah sebesar 95 (Sembilan puluh lima) persen. Lebih lanjut realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2019-2020 disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 3.10.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2020

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi		Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	
4	PENDAPATAN	1.429.423.973.103	1.388.077.730.962,86	97,11%
04.01	Pendapatan Asli Daerah	379.683.622.773	357.898.574.176	94,26%
04.01.01	Pajak daerah	163.137.074.872	158.937.237.899	97,43%
04.01.02	Retribusi daerah	15.856.395.921	15.246.319.690	96,15%
04.01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.297.600.000	9.778.080.000	105,17%
04.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	191.392.551.980	173.936.936.586,86	90,88%
04.02	Pendapatan Transfer	1.019.292.270.330	1.030.038.317.221	101,05%
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	840.578.443.727	1.029.897.477.655	122,52%
4.2.01.01	Dana perimbangan	798.486.304.727	887.011.935.731	111,09%
	- Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	60.483.901.742	89.106.849.828	147,32%
	- DAU	596.026.304.000	539.717.972.000	90,55%
	- DAK	141.976.098.985	160.457.085.903	113,02%
4.2.01.02	Dana insentif daerah	42.092.139.000	97.730.028.000	232,18%
04.02.02	Transfer antardaerah	178.713.826.603	142.885.541.924	79,95%
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	129.853.567.820	118.963.390.897	91,61%
4.2.02.02	Bantuan keuangan	48.860.258.783	23.922.151.027	48,96%
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	30.448.080.000	140.839.566	0,46%
04.03.01	Hibah	1.764.000.000	140.839.566	7,98%
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	28.684.080.000		

Berdasarkan kondisi di atas, perumusan arah kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya agar capaian target pendapatan daerah bisa optimal. Adapun arah kebijakan pendapatan dalam kebijakan pendanaan Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Perangkat Daerah didorong untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah, khususnya penerimaan retribusi dan pajak daerah;
2. Optimalisasi sumber pendapatan dan penerimaan daerah melalui intensifikasi (seperti penagihan, pengawasan, penelitian dan pemeriksaan atas Objek Pajak maupun Wajib Pajak yang sudah ditetapkan) dan ekstensifikasi (seperti pendataan dan penyuluhan hingga penetapan atas Objek Pajak maupun Wajib Pajak yang belum ditetapkan) yang berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya;
3. Penentuan Target Pendapatan Daerah, dengan memperhitungkan potensi riil secara cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum;
4. Penentuan Target PAD, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian sebelumnya, target indikator makro ekonomi dan realisasi penerimaan PAD minimal 3 tahun sebelumnya, sehingga memiliki prosedur operasional baku dalam penetapan target proyeksi pendapatan;
5. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Optimalisasi pendapatan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui revisi Peraturan tentang penyesuaian dasar Pengenaan Pajak daerah dan retribusi daerah;

- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam memacu pendapatan dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- Meningkatkan Potensi Pendapatan melalui Pemanfaatan Aset Milik Daerah;
- Penyesuaian NJOP disertai dengan pemberian Stimulus berupa pengurangan pajak yang harus dibayar dengan memberikan pengurangan pajak secara masal;
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan perpajakan;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah (provinsi, kabupaten/kota) dalam upaya peningkatan kinerja;
- Penghapusan sanksi administrasi; dan
- Penghapusan piutang.

Dari arah kebijakan pendapatan di atas, dihitung proyeksi target dari pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 – 2022

Kode Akun	Uraian Akun	APBD	Proyeksi
		2021	2022
4	PENDAPATAN	1.293.373.842.498	1.080.785.014.364
4.1	Pendapatan Asli Daerah	344.133.306.653	345.126.746.519
4.1.01	Pajak daerah	145.285.001.230	149.306.538.666
4.1.02	Retribusi daerah	13.441.644.012	13.446.340.000
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000	9.391.200.000
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	176.015.461.411	172.982.667.853
4.2	Pendapatan Transfer	949.240.535.845	735.658.267.845
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	820.769.545.501	607.187.277.501
4.2.01.01	Dana perimbangan	820.769.545.501	607.187.277.501
4.2.01.02	Dana insentif daerah	-	-
4.2.01.03	Dana otonomi khusus	-	-
4.2.01.04	Dana keistimewaan	-	-
4.2.01.05	Dana desa	-	-
4.2.02	Transfer antardaerah	128.470.990.344	128.470.990.344
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	128.470.990.344	128.470.990.344
4.2.02.02	Bantuan keuangan	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-
4.3.01	Hibah	-	-
4.3.02	Dana darurat	-	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah.

Belanja Daerah tahun 2022 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah (belanja langsung maupun tidak langsung) yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2022 adalah :

1. Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2022 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, *accress* dan kenaikan tunjangan-tunjangan;
2. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) di tahun 2022 berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. TKD merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja PNS. TKD ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TKD ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah;
4. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya; dan

5. Hibah dan bansos di tahun 2022 dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 3.12.

Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2020

Kode Akun	Uraian	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	BELANJA	1,074,961,450,668	1,358,743,658,898	1,339,382,098,733	1,489,072,968,877	1,501,760,938,252	1,029,292,260,246
5.1	Belanja Tidak Langsung	526,116,891,003	607,627,563,859	501,702,378,675	592,738,168,300	607,397,864,512	538,613,477,253
5.1.1	Belanja Pegawai	522,500,128,253	553,346,545,361	483,803,464,386	570,330,482,845	586,764,369,789	496,567,997,735
5.1.2	Belanja Bunga	748,094,650	893,522,830	1,519,531,175	518,723,151	687,088,955	580,029,038
5.1.4	Belanja Hibah	2,200,000,000	52,345,818,800	13,947,887,750	16,159,150,000	15,355,225,000	13,016,471,450
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	50,000,000	160,000,000	-	344,250,000	3,227,128,000	2,845,575,000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah desa	618,668,100	723,393,018	1,112,117,364	926,912,304	1,133,383,686	-
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	178,916,425	1,319,378,000	4,458,650,000	230,669,082	25,603,404,030
5.2	Belanja Langsung	548,844,559,665	751,134,063,142	837,679,720,058	896,334,800,577	894,363,073,740	490,678,782,993
5.2.1	Belanja Pegawai	79,014,364,196	95,107,639,784	113,042,912,108	88,719,622,895	81,599,837,059	76,649,139,044
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289,047,103,053	380,857,789,689	454,312,088,607	531,594,947,618	552,425,239,111	349,382,214,704
5.2.3	Belanja Modal	180,783,092,416	275,139,538,669	270,324,719,343	276,020,230,064	260,337,997,570	64,647,429,245

Sumber : TAPD Kota Cimahi (diolah), 2021

Melihat dari realisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.13.

Kebijakan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2020

Kode Akun	Uraian Akun	APBD	Proyeksi
		2021	2022
5	BELANJA	1.524.593.549.263	1.456.603.610.506
5.1	Belanja operasi	1.326.436.826.675	
5.1.01	Belanja pegawai	774.916.162.307	
5.1.02	Belanja barang dan jasa	524.921.603.780	
5.1.03	Belanja bunga	1.000.000.000	1.000.000.000
5.1.04	Belanja subsidi	-	-
5.1.05	Belanja hibah	11.116.326.450	13.400.000.000
5.1.06	Belanja bantuan sosial	14.482.734.138	
5.2	Belanja modal	174.276.636.698	
5.2.1	Belanja Modal	174.276.636.698	
5.3	Belanja tidak terduga	23.880.085.890	25.000.000.000
5.3.1	Belanja tidak terduga	23.880.085.890	25.000.000.000
5.4	Belanja transfer	-	
5.4.01	Belanja bagi Hasil	-	-
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	-	
	Surplus Defisit	(231.219.706.765)	(375.818.596.1420)

Sumber : hasil analisis TAPD, 2021

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pengertian pembiayaan menurut peraturan perundangan adalah sebagai berikut :

- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (UU No.23/2014); dan
- Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Permendagri No.13/2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011).

Istilah pembiayaan berbeda dengan pendanaan (*funding*). Pendanaan diartikan sebagai dana atau uang dan digunakan sebagai kata umum, sedangkan Pembiayaan diartikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan

untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit. Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang dan Pemberian pinjaman.

Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD.

Dilihat dari sisi pelaksanaan anggaran adanya peningkatan SILPA yang cukup besar dipandang tidak baik karena menggambarkan adanya anggaran yang tidak terserap secara optimal di luar adanya efektifitas penggunaan anggaran.

Melihat pada realisasi kinerja pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan di Kota Cimahi sangat terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah hanya mencakup pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Agar pembiayaan daerah tidak hanya bergantung pada SILPA maka peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan peningkatan sumber lain pembiayaan salah satunya dengan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Atas dasar arah kebijakan tersebut maka proyeksi target pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2021 – 2022

Kode Akun	Uraian Akun	APBD	Proyeksi
		2021	2022
6	PEMBIAYAAN	231.219.706.765	66.228.020.598,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	233.649.515.102	78.657.828.935
6.1.01	SiLPA	233.649.515.102	78.657.828.935
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.429.808.337	12.429.808.337
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.02	Penyertaan modal daerah	-	10.000.000.000
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337	2.429.808.337
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-	-

Sumber : hasil analisis, 2021

3.2.5. Struktur Keuangan Daerah

Perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara lengkap dapat dilihat pada struktur APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.15.
Perkiraan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kota Cimahi Tahun 2022

Kode Akun	Uraian Akun	Proyeksi
		2022
4	PENDAPATAN	1.080.785.014.364
4.1	Pendapatan Asli Daerah	345.126.746.519
4.1.01	Pajak daerah	149.306.538.666
4.1.02	Retribusi daerah	13.446.340.000
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	172.982.667.853
4.2	Pendapatan Transfer	735.658.267.845
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	607.187.277.501
4.2.01.01	Dana perimbangan	607.187.277.501
4.2.01.02	Dana insentif daerah	-
4.2.01.03	Dana otonomi khusus	-

Kode Akun	Uraian Akun	Proyeksi
		2022
4.2.01.04	Dana keistimewaan	-
4.2.01.05	Dana desa	-
4.2.02	Transfer antardaerah	128.470.990.344
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	128.470.990.344
4.2.02.02	Bantuan keuangan	-
		-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-
4.3.01	Hibah	-
4.3.02	Dana darurat	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-
5	BELANJA	1.456.603.610.506
5.1	Belanja operasi	
5.1.01	Belanja pegawai	
5.1.02	Belanja barang dan jasa	
5.1.03	Belanja bunga	1.000.000.000
5.1.04	Belanja subsidi	
5.1.05	Belanja hibah	13.400.000.000
5.1.06	Belanja bantuan sosial	
		-
5.2	Belanja modal	
5.2.1	Belanja Modal	
		25.000.000.000
5.3	Belanja tidak terduga	25.000.000.000
5.3.1	Belanja tidak terduga	
5.4	Belanja transfer	
5.4.01	Belanja bagi Hasil	
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	
	Surplus Defisit	(375.818.596.142)
6	PEMBIAYAAN	66.228.020.598,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	78.657.828.935
6.1.01	SiLPA	78.657.828.935
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.429.808.337
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02	Penyertaan modal daerah	10.000.000.000
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-
	SILPA BERKENAAN	-309.590.575.544,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Dalam rangka menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan serta keterbatasan sumberdaya daerah maka prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022; Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022; Sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Rancangan Akhir perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022; Hasil evaluasi kinerja RKPD Kota Cimahi Tahun 2020.

Prioritas pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kelima RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD dengan penjabaran dari Visi dan Misi Kota Cimahi.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah sehingga dapat mendukung relevansi misi dengan program pembangunan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi diturunkan berdasarkan misi pembangunan pada Rancangan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang masih relevan dengan perkembangan yang terjadi. Selain itu dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan,

juga memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena RPJMN Tahun 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Empat pilar yang terkandung dalam RPJMN ke-4 Tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan nasional yaitu : (1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) Struktur ekonomi yang maju dan kokoh; (4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Tema pembangunan yang diusung dalam RPJMN ke-IV ini adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Ada tujuh agenda pembangunan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui :

- a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- b. Memajukan kebudayaan;

- c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
 - e. Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :
- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :
- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
- Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

4.1.1.1. Tema Pembangunan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan juga terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022.

Oleh karena itu tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*) dengan tema “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.**”

4.1.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah :

1. Percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator : pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca; dan
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator : indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 dapat ditunjukkan dengan gambar di bawah ini :

Gambar 4.1.
Target Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2022



4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut :

1. **Jabar Juara Lahir Batin** : Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri;

2. **Inovasi** : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan; dan
3. **Kolaborasi** : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi :

“Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas : Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Berikut ini Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 :

Tabel 4.1.

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban	Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
		2. Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk
		3. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
		4. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan



MISI	TUJUAN	SASARAN
		5. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional
		6. Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan
		7. Menurunnya Tingkat Pengangguran
		8. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal
		9. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah	Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
		2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat pusat perekonomian
		3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
		4. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan
	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat

MISI	TUJUAN	SASARAN
		2. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik
		3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	1. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan
		2. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
		3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
		4. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya good governance dan whole of government	1. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel
		2. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah :

“Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis Dan Berbudaya”

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yaitu : Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

1. **Maju**

Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan.

Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

2. **Agamis**

Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius dalam pemerintahan karena amanah merupakan proses dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda

satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketentuan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

3. **Berbudaya**

Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan

realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tersebut, maka misi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan; dan
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Berikut ini tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022.



Tabel 4.2.
Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET 2022
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul			
Tujuan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,41
Sasaran: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	74,9
Sasaran: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	83,12
Sasaran: Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persen	1
Misi 2: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik			
Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	60,73 (B)
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Predikat	Tinggi
Sasaran: Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	Opini	WTP
Sasaran: Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	62
Sasaran: Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,20
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,19
Misi 3: Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan			
Tujuan: Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	PDRB perkapita	Juta Rupiah	37,77
Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,11
Sasaran: Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,38



TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET
			2022
Sasaran: Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	5,02
Sasaran: Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	11,37
MISI 4: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan			
Tujuan: Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / <i>Level of Service</i> (LOS)	Predikat	C
Sasaran: Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / <i>Level of Service</i> (LOS)	Predikat	C
Tujuan: Meningkatkan kualitas permukiman	Rasio luas kawasan kumuh	Persen	0,18
Sasaran: Meningkatnya kualitas pemukiman	Rasio luas kawasan kumuh (%)	Persen	0,18
Tujuan: Meningkatkan ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	Kelas Resiko Sedang
Sasaran: Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	Kelas Resiko Sedang
Tujuan: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	Indeks	36,07
Sasaran: Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	Indeks	36,07
MISI 5 : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan			
Tujuan: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	75,00
Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	82,00
Sasaran: Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan hak anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	Indeks	75,00
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,60

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Terdapat tujuh prioritas nasional yang merupakan agenda pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024, dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Lebih lanjut terkait prioritas nasional yaitu :

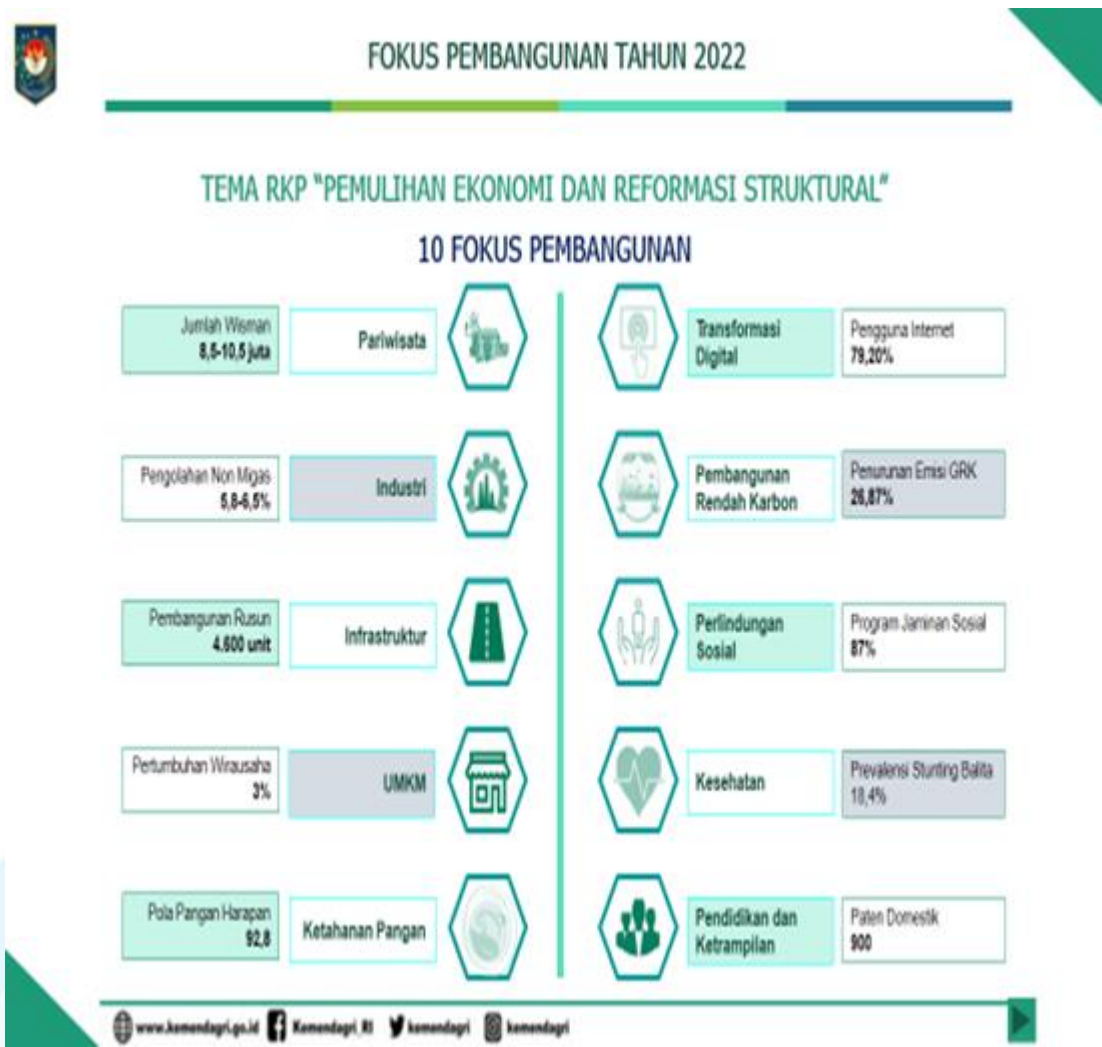
1. **PN 1** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. **PN 2** Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. **PN 3** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. **PN 4** Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. **PN 5** Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. **PN 6** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. **PN 7** Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan dalam RKP Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah :

1. Stakeholders pembangunan agar mensinergikan rencana kerja (baik renja K/L maupun RKPD) dengan RKP 2022;
2. Pentingnya mensinergikan Rencana Pusat dan Daerah dengan memaksimalkan forum-forum rapat koordinasi dan musyawarah dalam menentukan proyek-proyek prioritas;
3. RKP 2022 tidak saja menampilkan pendanaan yang bersumber dari APBN, namun juga pendanaan dari sumber lainnya seperti BUMN dan Swasta;
4. Untuk menjamin amanat presiden "*making delivered*", penyusunan RKP 2022 diperkuat melalui mekanisme *Clearing House* pada proyek prioritas khususnya *Major Projects*; dan

5. Prioritas kegiatan perlu diidentifikasi kerangka kebijakan dan regulasi serta kerangka pendanaannya.

Gambar 4.2.
Fokus Pembangunan Tahun 2022



4.2.2. Tema Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih dihadapkan pada tantangan penanganan pandemi COVID-19. Seperti dipahami bahwa penyebaran pandemic COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia yang sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda berkurang, bahkan ada di beberapa negara timbul varian baru. Sehingga diprediksi tahun 2022 pandemi COVID-19 ini masih ada di Indonesia dan baru baru akan terkendali pada tahun 2022, dengan syarat bahwa vaksin telah tersedia dan

dibagikan kepada sebagian besar masyarakat Indonesia serta telah memberikan hasil sesuai harapan. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini yang menjadi tema atau fokus pembangunan sebagai tahun ke empat RPJMD Provinsi Jawa Barat adalah :

“Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian”

Prioritas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19, Pemulihan Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial, masih menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat disamping prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat lainnya.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID-19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 terdiri dari 1 + 9, meliputi :

- 1+** Penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID- 19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial;
- 1. Akses pendidikan untuk semua;
- 2. Desentralisasi pelayanan kesehatan;
- 3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi;
- 4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
- 5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
- 6. Pengembangan Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa);
- 8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah); dan
- 9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2022 dengan isu strategis pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	
Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	P1	Akses Pendidikan untuk semua
	P2	Desentralisasi pelayanan kesehatan
	P5	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
	P1+	Penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial
Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	P3	Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
	P4	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
	P1+	Penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial
Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	P6	Infrastruktur konektivitas wilayah
	P7	Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	P8	Subsidi gratis golekmah
	P1+	Penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial
Reformasi birokrasi	p9	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Sumber : Hasil analisis, 2021



4.2.3. Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Kota

Tabel 4.4.
Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Kota Cimahi

NO	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA CIMAHI TAHUN 2022
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	P1. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi P3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Pemulihan Ekonomi akibat pandemic Covid-19 2. Pemulihan Sosial akibat Pandemic Covid-19
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	P8. Gerakan Membangun Desa	
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	P1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah P4. Reformasi sistem Perlindungan Sosial P5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan P9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat dalam penanganan pandemic covid-19 4. Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	P5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan P9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	-
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	P11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	6. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	7. Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi 8. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik



NO	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA CIMAH TAHUN 2022
7.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	P6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan resiko Bencana P10. Pengembangan infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9. Meningkatnya Ketahanan Bencana 10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber : Paparan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi pada Tahun 2022 sesuai dengan dokumen perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah **Melanjutkan Pemulihan Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera yang didukung dengan Infrastruktur Berkelanjutan**”.

Selanjutnya berdasarkan pedoman penyusunan dokumen RKPD pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa untuk Bab IV pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran dari RPJMD., serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Kota Cimahi pada Tahun 2022, fokus pembangunan daerah diberikan perhatian khusus pada :

1. Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 dan kebijakan Nasional melalui RPJMN;
3. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Jawa Barat Tahun 2022; dan
4. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan pemenuhan Janji Wali Kota yang tertuang pada RPJMD Tahun 2017-2022.

Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan fokus pada pemulihan dan pembangunan kembali kota dengan menuntaskan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota serta memprioritaskan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Adapun permasalahan dan

isu strategis pembangunan Kota Cimahi yang terangkum antara lain sebagai berikut :

Terdapat 21 permasalahan pembangunan di Kota Cimahi :

1. Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal;
 2. Masih terjadi ketimpangan pendapatan;
 3. Kurangnya penyerapan tenaga kerja;
 4. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
 5. Menurunnya Kualitas Jalan Dalam Kondisi Baik;
 6. Masih rendahnya tingkat pelayanan jalan dan transportasi di Kota Cimahi;
 7. Masih rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
 8. Belum optimalnya akses terhadap air bersih;
 9. Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik;
 10. Belum optimalnya penanganan genangan dan banjir di Kota Cimahi;
 11. Belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 12. Tingginya potensi bencana;
 13. Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup;
 14. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
 15. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan;
 16. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat;
 17. Belum optimalnya pengendalian kependudukan;
 18. Belum Optimalnya Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK);
 19. Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan sarana prasarana olahraga;
 20. Belum optimalnya peran sektor industri, perdagangan dan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian kota; dan
 21. Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal.
- 1 + Penanganan dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi dan sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka isu strategis pembangunan Kota Cimahi antara lain :

1. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan;
2. Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 serta Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi;
3. Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 serta Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Penanggulangan Pengangguran;
6. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan;
7. Optimalisasi Peran Sektor Industri Kecil Menengah, Perdagangan Dan Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah;
8. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
9. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertransportasi;
10. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
13. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat;
14. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk; dan
15. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun, tema pembangunan Kota Cimahi tahun 2022 adalah :

“Mempercepat Pemulihan Sosial dan Ekonomi Melalui Partisipasi Masyarakat yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas”

Berdasarkan permasalahan, isu strategis dan tema pembangunan Kota Cimahi maka disusun prioritas pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022 yang ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19;
2. Pemulihan sosial akibat pandemi Covid-19;

3. Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19;
4. Meningkatnya ketahanan bencana;
5. Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi;
6. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
8. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
10. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Selain itu, prioritas pembangunan ini harus diselaraskan dengan Prioritas Wali Kota yang tertuang dalam janji politik dan tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022, yaitu : (1) 1.000 Lapangan Kerja; (2) Penanganan Banjir dan Pengurai Kemacetan; (3) Gratis Raskin; (4) Santunan Kematian Masyarakat Ber-KTP; (5) Gratis Izin Usaha Khusus UMKM, Kemudahan Birokrasi; (6) Tambahan Insentif RT/RW; (7) Alokasi Anggaran Rp.100.000.000,- di setiap RW Per-Tahun; (8) Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance di Setiap Kelurahan; (9) Tambahan Penghasilan Guru; (10) Tambahan Insentif Guru Ngaji; (11) Tambahan Fasilitas dan Insentif Guru PAUD; (12) Bebas SPP; (13) Keringanan DSP SMU/SMK; (14) Kesejahteraan Buruh; (15) Kestabilan Keberlangsungan Industri; (16) Kemudahan Birokrasi; (17) Pembangunan Sekolah Negeri Baru dan Universitas Negeri; (18) Pengembangan Pasar Tradisional; (19) Optimalisasi Sarana Olahraga; (20) Pembangunan "Imah Seni Budaya" Cimahi; dan (21) Pembangunan Taman dan Fasilitas Terbuka Publik.

Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2022 ini merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan 2021 yang merupakan tahun kelima dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dengan strategi dan arah kebijakan pada table berikut :



Tabel 4.5.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikan yang sesuai standar dan merata	Meningkatkan kemudahan memperoleh pendidikan untuk semua golongan masyarakat	
			Meningkatkan Mutu Pendidikan	
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pengelolaan kesehatan yang sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah	Mengembangkan upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan	
			Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan	
			Meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan	
			Meningkatkan Pelayanan Rujukan	
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Penguatan dan pepaduan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas	Mengembangkan Inovasi Promosi Keluarga Berencana	
Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah		Mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi	
			Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
				Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
			Meningkatnya profesionalitas aparatur	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan barang milik daerah
	Meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN			



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang prima
			Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
			Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Meningkatkan pelayanan publik kecamatan
			Meningkatkan kualitas dan sarana prasarana pelayanan publik
			Meningkatkan kualitas dan integrasi Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK) daerah
			Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat
			Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan
Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan iklim dan realisasi investasi	a. Meningkatkan iklim dan promosi penanaman modal b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal c. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
		Peningkatan daya saing industri kecil menengah	Meningkatkan perencanaan, pembangunan dan pengendalian serta pengawasan industri kecil menengah
		Pengembangan sektor perdagangan,	a. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas distribusi b. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk buatan dalam negeri
		Peningkatan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Mengembangkan kawasan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Optimalisasi pengembangan UMKM	a. Meningkatkan fasilitasi bagi pengembangan UMKM b. Meningkatkan skala usaha UMKM



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Menjaga ketersediaan dan konsumsi pangan serta meningkatkan distribusi dan akses pangan masyarakat	a. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat b. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan
		Peningkatan kapasitas dan kualitas koperasi	a. Meningkatkan sistem dan manajerial koperasi b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengelola koperasi
		Peningkatan kesejahteraan petani/peternak	Meningkatkan penyuluhan pertanian
		Peningkatan produk dan produktivitas pertanian/peternakan	a. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian b. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner c. Meningkatkan budidaya perikanan
		Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Hasil Produk turunan Pertanian	Meningkatkan pengolahan dan pemasaran produk hasil pertanian
	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan dan menciptakan kesempatan kerja	a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja b. Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan tenaga kerja c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja d. Meningkatkan informasi pasar kerja
		Peningkatan kesejahteraan buruh	a. Meningkatkan Perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja b. Meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja
	Menurunnya kemiskinan	Peningkatan perlindungan dan pelayanan sosial	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial terutama penerapan Jaring Pengaman Sosial (JPS), pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dan dan Meningkatkan inovasi penanggulangan kemiskinan pada kelembagaan masyarakat melalui teknologi tepat guna dan media lainnya.
Pemulihan sosial akibat pandemi Covid-19			

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur Akses Pelayanan Dasar
		Menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan penanganan kerawanan pangan
Meningkatnya Meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi	Meningkatkan kinerja pelayanan, sarana dan prasarana perhubungan
			Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan
			Meningkatkan pelayanan angkutan umum
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan
Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	Mengurangi dan menangani timbunan sampah
	Meningkatnya pelayanan air limbah domestik		Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah domestik
	Meningkatnya pelayanan drainase permukiman		Mengurangi titik dan luas genangan
	Meningkatnya pelayanan air bersih		Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih
	Mengurangi luas kawasan kumuh	Pengentasan permukiman kumuh perkotaan	Mengembangkan permukiman layak huni
Meningkatnya ketahanan bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
			Meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana
Peningkatan kualitas	Meningkatnya pembangunan	Menjaga kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas udara dan air permukaan



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
lingkungan hidup	yang berkelanjutan	untuk meningkatkan daya dukung lingkungan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
			Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan Meningkatkan inovasi Masyarakat dalam penggunaan teknologi tepat guna dan media lainnya.
			Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda
			Melestarikan, memajukan dan mempromosikan kebudayaan
			Meningkatkan sumber daya keolahragaan
	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender
			Meningkatkan perlindungan dan hak hak anak
			Meningkatkan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya

4.2.5. Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Penyebaran Covid-19 di Indonesia termasuk di Kota Cimahi diasumsikan masih akan terus berlanjut di tahun 2022. Untuk itu maka dalam upaya melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dan penanganan kesehatan terhadap masyarakat Kota Cimahi yang terdampak Covid-19 terus akan dilakukan berbagai upaya kesehatan pada tahun 2022, yaitu :

1. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat berupa sosialisasi dan promosi pelaksanaan PHBS di masyarakat yang terkait erat dengan pelaksanaan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid-19 seperti mencuci tangan dengan

- sabun, pengadaan dan penggunaan disinfektan dan Alat Pelindung Diri (APD) serta penanganannya, penjagaan jarak aman antar individu;
2. Penguatan vaksinasi Covid-19 di Kota Cimahi berupa sosialisasi kepada masyarakat, pengadaan, pendistribusian, dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penguatan pengawasan dan tindakan terhadap pelaksanaan kejadian ikutan pasca imunisasi/vaksinasi (KIPI) juga dilakukan secara komprehensif;
 3. Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan untuk penguatan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19;
 4. Peningkatan kapasitas tenaga medis dan non medis dalam upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19; dan
 5. Dukungan koordinasi, penguatan sistem terintegrasi dan tata laksana upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

4.2.6. Percepatan Penurunan Stunting

Data terakhir pada tahun 2020 menunjukkan bahwa angka stunting di Kota Cimahi adalah sejumlah 10,89 persen. Angka ini perlu diturunkan untuk mewujudkan Kota Cimahi *Zero Stunting*. Untuk itu upaya percepatan penurunan stunting akan terus dilakukan pada tahun 2022 melalui berbagai upaya komprehensif mengingat upaya ini merupakan upaya multi sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Upaya-upaya tersebut akan dilakukan melalui 8 Aksi Konvergensi Terintegrasi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Cimahi meliputi :

1. Analisis Situasi, untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan eksisting;
2. Rencana Kegiatan, sebagai rencana tindak lanjut dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi;
3. Rembuk *Stunting*, untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi antara pemerintah Kota Cimahi dengan non-pemerintah dan masyarakat luas;

4. Peraturan Wali Kota tentang Peran Kelurahan, untuk menjelaskan peran dan kewenangan wilayah dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran yang tersedia;
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang membantu di wilayah kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi;
6. Sistem Manajemen Data, sebagai upaya pengelolaan data di tingkat kota sampai tingkat kelurahan untuk mendukung pelaksanaan aksi integrasi;
7. Pengukuran dan Publikasi, untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan kelurahan; dan
8. Reviu Kinerja Tahunan, dilakukan oleh pemerintah kota terhadap kinerja program penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Upaya-upaya yang akan dilakukan pada tahun 2022 melalui 8 Aksi Konvergensi Terintegrasi tersebut antara lain meliputi :

1. Intervensi Gizi Spesifik

Upaya-upaya intervensi gizi spesifik ini ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yang dilakukan dengan penekanan di bidang kesehatan berupa promosi dan pengelolaan kesehatan masyarakat, gizi, ibu, anak, dan lingkungan. Upaya intervensi ini akan sangat terkait erat dengan Dinas Kesehatan dan pihak-pihak lain yang dapat mendukungnya;

2. Intervensi Gizi Sensitif

Upaya-upaya intervensi ini ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan namun sangat berpengaruh dalam upaya penurunan stunting. Upaya-upaya yang akan dilakukan meliputi penguatan program Keluarga Berencana di masyarakat, peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat, peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sanitasi dan air minum, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah. Upaya-upaya ini akan sangat terkait dengan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan; Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; serta perangkat-perangkat daerah dan pihak-pihak pemangku kepentingan lain yang dapat memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam mendukung upaya-upaya tersebut.

4.2.7. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan SDGs

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Optimalisasi Penanganan PMKS	Peningkatan cakupan penanganan PMKS
	Peningkatan Pengelolaan Modal Sosial
	Optimalisasi Sistem Informasi PMKS
	Meningkatkan dan memperluas cakupan perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang rentan
	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan gizi termasuk pelayanan keluarga berencana, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.
	Memperbaiki dan mempertajam pengeluaran Pemerintah Daerah agar lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan
	Meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan berusaha yang lebih luas agar mampu menjangkau masyarakat miskin.

2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan keamanan pangan	Pengawasan pangan
	Sosialisasi Menu Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)
Meningkatkan stok cadangan pangan daerah	Optimalisasi penerapan teknologi tepat guna
Mengoptimalkan akses pangan masyarakat	Stabilisasi harga beras
	Distribusi pangan
Perlindungan Luas Lahan Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM Pengolah Hasil Pertanian
	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
	Pemanfaatan lahan pertanian untuk destinasi agrowisata



3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, balita, dan anak.	Meningkatkan Pelayanan kesehatan ibu dan Anak di wilayah kerja puskesmas
	Peningkatan kunjungan neonatal
	Pemberian dan pemantauan bantuan makanan tambahan bagi balita kurang gizi
	Inovasi Promosi upaya preventif sejak usia dini
Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat	Promosi hidup sehat dan bersih khususnya bagi masyarakat
	Pemantauan kesehatan makanan dan minuman khususnya yang beredar di sekolah-sekolah
	Pengembangan pelayanan konsultasi kesehatan yang bersifat 'jemput bola'
	Pembinaan dan pemantauan pengelolaan pemukiman bersih (intervensi di perubahan perilaku melalui penyuluhan dan pemicuan)
	Identifikasi dan pencegahan penyakit menular
	Peningkatan cakupan imunisasi
Mengembangkan mekanisme pelayanan kesehatan inklusif	Optimalisasi program-program kesehatan inklusif
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasyankes
	Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional di semua puskesmas
Mengembangkan Inovasi Promosi Keluarga Berencana	Pengembangan aturan usia nikah
	Advokasi pengembangan metode kontrasepsi
	Optimalisasi insentif bagi MOP
	Optimalisasi paguyuban KB Pria
	Pengembangan layanan motivator pria
	Kerjasama dengan kelompok-kelompok sosial masyarakat dalam sosialisasi dan pemantauan penyelenggaraan KB
	Optimalisasi peran duta remaja (sudah ada) pengawalan dan sinergitas dengan urusan di OPD lain

4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kemudahan memperoleh pendidikan untuk semua golongan masyarakat	Pembebasan SPP dan keringanan DSP
	Penuntasan Wajib Belajar sembilan tahun menuju Pendidikan Dua Belas Tahun
	Menyelenggarakan pendidikan inklusi
	Pemberian bantuan pendidikan



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Mutu Pendidikan	Peningkatan Manajemen, profesionalisme, dan kompetensi Guru dan tenaga kependidikan
	Melakukan redistribusi kualitas tenaga pendidik
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Formal dan Non Formal
	Penguatan kualitas pelayanan Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Pembelajaran
	Penguatan Pendidikan Karakter
	Peningkatan penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terutama bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	sinergitas penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada perangkat daerah
Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya	pelibatan perempuan dalam tahapan pembangunan
	peningkatan keberdayaan perempuan

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan air bersih	Pembangunan Sistem pengelolaan air bersih
	Pengelolaan Sistem pelayanan air bersih
	Peningkatan pemberdayaan pengelolaan air bersih
Mengembangkan permukiman layak huni	Pembangunan Rusun
	Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni

7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menciptakan dan meningkatkan kesempatan kerja	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan padat karya yang mendukung infrastruktur kota
	Peningkatan akses kesempatan kerja
	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan
	Peningkatan kualitas tenaga kerja



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Ketersediaan database ketenagakerjaan
Meningkatkan akses kesempatan kerja	Bursa tenaga kerja
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja
Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi di sektor Industri Pengolahan (Non TPT)	Pengembangan jaringan pemasaran IKM sektor Industri Pengolahan (Non TPT)
Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi di Sektor Perdagangan	Pengembangan jaringan pemasaran IKM Sektor Perdagangan
Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi di sektor Kontruksi	Pengembangan jaringan pemasaran IKM Sektor Kontruksi
Pencptaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil	Pengembangan kewirausahaan dan kompetitif UKM
Peningkatan kelembagaan koperasi	meningkatkan koperasi untuk pemerataan pendapatan
Mengurangi ketimpangan antar wilayah	Menumbuhkan Perekonomian Sektor Perdagangan di wilayah Selatan dan Tengah Kota Cimahi
Peningkatan Kerjasama antara Industri besar dan IKM	Menumbuhkan Perekonomian Sektor Industri Pengolahan di wilayah Selatan
	Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Produk Unggulan
	Meningkatkan ketrekaitan produksi Industri Hulu hingga hilir
Peningkatan iklim dunia usaha	Menjaga Iklim /Kondusifitas berusaha bagi Industri Besar
Pengembangan kapasitas produksi IKM	Peningkatan Akses Bantuan Permodalan, Bahan baku, sistim Manajemen Produksi, dan pengembangan teknologi Bagi IKM

8. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (lalu lintas dan angkutan jalan)	Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Kelengkapan Jalan
Meningkatkan kuantitas jalan dan jembatan	Peningkatan kuantitas jalan penghubung Pusat Kegiatan Kota
	Peningkatan kuantitas jembatan penghubung Pusat Kegiatan Kota
Reinvestasi Industri Besar dan Menengah	Peningkatan Industri yg padat karya ramah lingkungan
Pembenahan kelembagaan perizinan investasi	Penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal
Pembenahan sistem perizinan investasi	Penyusunan kebijakan pengalihan teknologi dari PMA
	Penyusunan kebijakan tata ruang yang jelas
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah

9. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.

STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Pengembangan Kewirausahaan bagi masyarakat miskin
	Bantuan stimulan masyarakat miskin



10. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

STRATEGI	KEBIJAKAN
Mengurangi timbulan sampah	Pembatasan timbulan sampah
	Pendaurulangan sampah
	Pemanfaatan kembali sampah
Meningkatkan pelayanan air limbah domestik	Pembangunan Sistem pengelolaan air limbah domestik
	Pengelolaan Sistem pelayanan air limbah domestik
	Peningkatan pemberdayaan pengelolaan air limbah domestik
Mengurangi titik dan luas genangan	Peningkatan drainase ramah lingkungan
	Pembuatan sodetan
	Peningkatan kapasitas saluran
Meningkatkan pelayanan air bersih	Pembangunan Sistem pengelolaan air bersih
	Pengelolaan Sistem pelayanan air bersih
	Peningkatan pemberdayaan pengelolaan air bersih
Mengembangkan permukiman layak huni	Pembangunan Rusun
	Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni

11. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

STRATEGI	KEBIJAKAN
Perlindungan Luas Lahan Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM Pengolah Hasil Pertanian
	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
	Pemanfaatan lahan pertanian untuk destinasi agrowisata

12. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana
	Meningkatkan tanggap bencana
	Meningkatkan kualitas penganggulangan bencana

13. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti- kan kehilangan keanekaragaman hayati.



STRATEGI	KEBIJAKAN
Mengurangi titik dan luasan banjir	Peningkatan Kapasitas Sungai
	Peninggian talud / refretment
	Normalisasi sungai
	Pembangunan pengendali banjir
Meningkatkan kualitas udara	Pengendalian polusi udara dari sumber bergerak
	Pengendalian polusi udara dari sumber tak bergerak
	Pengendalian polusi udara ambien
	Pemantauan kualitas udara
Meningkatkan kualitas air permukaan	Pengendalian pencemaran air permukaan
	Pemantauan kualitas air permukaan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air
	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Mengembangkan Kebijakan lingkungan hidup	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	Penyusunan rencana bidang lingkungan hidup
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Koordinasi AMDAL
	Koordinasi penilaian ADIPURA
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
	Pengendalian dampak perubahan iklim
	Penegakan hukum lingkungan hidup
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3
	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)
	Pengembangan produksi ramah lingkungan
Menyusun perencanaan tata ruang daerah	Penyusunan RTRW
	Penyusunan RDTR
	Penyusunan RTBL
Mengendalikan tata ruang daerah	Pencegahan kawasan kumuh baru
	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas pelayanan Laboratorium lingkungan
Meningkatkan kualitas konstruksi	Pembangunan bangunan gedung
	Pemeliharaan bangunan gedung
	Peningkatan Pengawasan Konstruksi

14. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan sinergitas dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan dengan tingkat pusat, provinsi, kota dan wilayah sekitar
Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan	Perbaikan tugas dan fungsi perangkat daerah
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penilaian Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan (SKM)
	Optimalisasi LAMPID (Laporan Lahir Mati Pindah Datang) untuk pemutakhiran data kependudukan
	Peningkatan kuantitas aparatur pelayanan kependudukan
Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan	Meningkatkan administrasi kependudukan
Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan pencegahan gangguan kamtibmas
	Peningkatan penindakan gangguan kamtibmas
	Peningkatan pemahaman masyarakat dalam kamtibmas
	Peningkatan Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan
	Penegakkan Perda

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

TAHUN 2022

Berdasarkan Sasaran, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022 yang dibahas pada Bab 4, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, disusun program dan kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 oleh perangkat daerah.

Pembahasan substansi pada Bab 5 diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Tahun 2022 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2022. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan dengan berbagai pendekatan. Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, *bottom up*, *top-down*, dan politis serta unsur

inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademisi yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan FGD untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan Tahun 2022;
2. Pendekatan partisipatif dan *bottom-up* dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui SIPD, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara *real time*;
 - c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal;
 - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Cimahi; dan
 - e. Pelibatan secara aktif warga dalam Forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan pada Forum Musrenbang Kelurahan.
3. Pendekatan *top-down* yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap tujuan global seperti SDG's dan pemenuhan SPM;
4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui :
 - a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah;

- b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana, diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

5.1. RINGKASAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Ringkasan anggaran Perangkat Daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2022. Hal-hal yang menjadi perhatian Perangkat Daerah dalam menetapkan anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri adalah sebagai berikut :

1. **Prioritas I**, merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. **Prioritas II**, merupakan prioritas program di tingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan



memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan Perangkat Daerah terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani; dan

3. **Prioritas III**, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Secara rinci rumusan program prioritas Perangkat Daerah beserta ringkasan anggarannya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Belanja Program pada Anggaran Tahun 2022

PROGRAM	PAGU INDIKATIF (2022)
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	258.513.697.076
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	34.207.108.049
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	200.000.000
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.813.196.081
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	212.168.487.262
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.542.400.100
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	125.925.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	409.816.000
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.617.377.872
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.151.483.099
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.634.749.300
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.863.439.400
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.412.970.000
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	973.352.400
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.297.800.000
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	25.353.650.300
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	192.000.000
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.729.520.000
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.488.035.064
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.996.440.500



PROGRAM	PAGU INDIKATIF (2022)
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.437.099.800
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.091.254.500
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.390.085.400
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.213.048.461
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.274.588.384
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.128.280.500
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.023.390.600
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.035.932.448
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.685.826.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.919.189.000
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.199.962.100
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.007.983.000
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.068.037.124
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	93.538.000
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.219.556.600
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	746.745.181
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.477.347.000
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	964.536.000
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	215.866.000
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	264.785.400
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	158.820.000
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	233.813.800
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.491.663.667
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	550.622.700
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	39.832.400
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.160.000
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.069.944.036
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	450.804.900
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.645.013.550
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.228.976.000
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	52.194.300
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	933.288.800
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	129.826.300
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	242.416.900
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	29.204.241.782
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.205.314.732
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	339.208.000
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	360.000.000



PROGRAM	PAGU INDIKATIF (2022)
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	727.955.600
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	16.799.900
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	266.715.400
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.066.275.400
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	412.853.100
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.811.382.065
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.548.673.335
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.653.306.240
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.036.999.800
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.970.418.750
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.044.952.700
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	105.579.800
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	772.572.800
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	107.342.200
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	76.950.000
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	326.257.600
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.480.959.800
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.557.818.174
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	382.499.600
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	300.000.000
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.266.577.700
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	90.100.000
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	685.467.460
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.670.225.498
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	945.000.000
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	18.150.615.700
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	283.000.000
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	462.500.000
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	683.000.000
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	709.000.000
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	575.837.867
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	225.800.000
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	14.692.000
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	699.866.800
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	86.740.200
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	300.000.000
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	275.000.000
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	150.000.000
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	55.000.000
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	791.010.200



PROGRAM	PAGU INDIKATIF (2022)
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	215.052.900
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	297.250.000
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	12.344.647.247
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	497.985.000
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	521.935.000
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	455.000.000
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	451.665.000
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.584.987.200
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	48.768.300
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	124.653.200
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.914.317.292
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.634.178.000
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.565.606.900
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.347.364.662
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.746.727.150
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.636.593.917
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.757.516.700
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.608.557.300
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.619.086.781
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	28.443.422.800
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.180.000.000
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.334.732.400
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.634.303.612
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.668.310.000
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.160.800.000
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	960.000.000
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.702.151.910
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.700.000.000
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.250.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.650.018.224
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.635.690.200
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.219.298.460
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.988.000.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.390.303.900
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.903.754.368
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	572.031.276



PROGRAM	PAGU INDIKATIF (2022)
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.146.326.450
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	420.000.000
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	316.000.000
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.261.187.800
TOTAL	1.456.603.610.506

Pada Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 dan capaian kinerja yang direncanakan di dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran
Tahun 2022
(Tabel terlampir pada Buku II)

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dapat dilihat pada Tabel 6.1. dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2022
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	78,58
			78,12
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (Indeks)	74,9
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Indeks)	83,12
	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1
Misi 2: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah		Indeks reformasi birokrasi (Indeks)	60,73 (B)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	BB
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD (Predikat)	Sangat Tinggi
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK (Predikat)	WTP
	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	83,2
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	3,19

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2022
Misi 3: Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan			
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi		PDRB Perkapita (juta rupiah)	37,77
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,11
	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini (Indeks)	0,38
	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	5,02
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)		11,37	
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan			
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi			
	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS) (Predikat)	C
Meningkatkan kualitas permukiman			
	Meningkatnya kualitas permukiman	Rasio luas kawasan kumuh	0,00
Meningkatkan ketahanan bencana			
	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	Kelas Resiko Sedang
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan			
	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	35,48
Misi 5: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkesinambungan dan Berkelanjutan			
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	93
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	99,4
	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	80,48

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target 2022
1	2	3	5
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
01.01	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
01.01.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,64%	5,82%
01.01.02	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah)	26.829.041	42.059.989
01.01.03	PDRB atas Dasar Harga Konstan (dalam Juta Rupiah)	19.945.299	26.378.019
01.01.04	Laju Pertumbuhan Investasi	n/a	3,04%
01.01.05	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	5,68%	5,82%
01.01.06	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,81%	5,86%
01.01.07	PDRB per kapita (juta rupiah)	43,65	57,73
01.01.08	Indeks Gini	0,41	0,38
01.01.09	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Juta Rp/Tahun)	11.204	11.981
01.01.10	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	0,17%	0,17%
01.01.11	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) per kecamatan	0,35	0,3
01.01.12	Kontribusi PDRB Per Kecamatan terhadap PDRB Kota	CS:58,76%	CS:53%
		CT:25.36%	CT:28%
		CU:15.88%	CU:19%
01.01.13	Angka Kemiskinan	5,92%	4,99%
01.01.14	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,00%	5,31%
01.01.15	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	0,76%	2,95%
01.01.16	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49%	7,70%
01.01.17	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,16%	6,16%
01.01.18	Jumlah KK yang terverifikasi dan tervalidasi untuk menerima BPNT	18724	18724

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target 2022
1	2	3	5
01.01.19	Persentase PAD terhadap pendapatan	22,32%	35,91%
01.01.20	SAKIP	CC	A
01.01.21	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
01.01.22	Indeks Profesionalitas ASN	75%	85%
01.01.23	Survey Kepuasan Masyarakat	76	86
01.01.24	Persentase Prolegda yang disahkan	89%	95%
01.01.25	Nilai LAKIP	60,68 (B)	85 (A)
01.01.26	Persentase Penyelesaian atau penanganan permasalahan hukum	100%	100%
01.01.27	Level APIP sesuai standar kompetensi menuju level APIP/IACM (Internal Audit Capability Model) berkelanjutan	Level 1	Level 3
01.01.28	Nilai Maturitas SPIP	01.02	3
01.01.29	Persentase Kenaikan PAD dari Sektor Pariwisata	15%	20%
B	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Layanan Urusan Wajib Dasar		
02.01	Pendidikan		
02.01.01	Indeks Pendidikan	74	74
02.01.02	Angka rata-rata lama sekolah	10,98	11,5
02.01.03	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	101,69	103,04
02.01.04	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	95,73	97,08
02.01.05	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	96,38	97,73
02.01.06	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	88,73	90,08
02.01.07	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	75,29	76,64
02.01.08	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	78,24	79,59
02.01.09	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	76	77,35
02.01.10	Persentase TK terakreditasi	Akreditasi TK A (1,79%)	46,43%
02.01.11	Persentase PAUD terakreditasi	Akreditasi PAUD B (3,10%)	44,25%
02.01.12	Angka Melek Huruf (AMH)	99,98	99,99
02.01.13	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	PKBM 28, LKP 52, yang terakrditaSI pkbm 7, lkp 1 (10%)	85%
02.01.14	Nilai Rata-rata Ujian Sekolah SD	215	240

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target 2022
1	2	3	5
02.01.15	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan TK yang memenuhi standar kompetensi	75	80
02.01.16	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memenuhi standar kompetensi	SD (rata-rata UKG 52)	80
02.01.17	Persentase SD yang terakreditasi A	SD akreditasi A (50 sekolah dari 125/40%)	76,00%
02.01.18	Persentase SD yang terakreditasi B	SD akreditasi B (57,6%)	24,00%
02.01.19	Persentase angka kelulusan SD	100%	100%
02.01.20	Nilai Rata-rata UN SMP	216	285
02.01.21	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang memenuhi standar kompetensi	SMP (rata-rata UKG 55,5)	80
02.01.22	Persentase SMP yang terakreditasi A	SMP akreditasi A 22 dari 36 (61%)	86,11%
02.01.23	Persentase sekolah SMP yang terakreditasi B	SMP akreditasi B (27,78%)	11,11%
02.01.24	Persentase sekolah SMP yang terakreditasi C	SMP akreditasi C (2,78%)	2,78%
02.01.25	Persentase angka kelulusan SMP	100%	100%
02.01.26	% siswa kelas II paham literasi	N.A	90%
02.01.27	Tingkat capaian kota layak anak	500 (Pratama)	600
02.01.28	Peningkatan Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Madya	Madya
02.01.29	Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar	0	6
02.01.30	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	91,82	100
02.01.31	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91,09	100
02.01.32	Persentase rematri mendapat Tablet Tambah darah (TTD)	32,60%	36
02.01.33	Persentase Ibu hamil KEK	2,41%	< 10 %
02.01.34	persentase stunting pada Batuta	12,04%	< 12,04%
02.01.35	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100
02.01.36	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	52,66	75
02.01.37	Cakupan pembinaan Sekolah ber-PHBS	100	100
02.01.38	Cakupan RW Siaga Aktif yang meningkat stratanya	37,18	63
02.01.39	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasyankes	NA	13
02.01.40	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat bermain anak	NA	13



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target 2022
1	2	3	5
02.01.41	Persentase sarana IRTP yang diaudit	100 % (100 unit)	100%
02.01.42	Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas	81,99	86
02.01.43	Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat	70,5	72,5
02.01.44	Persentase rumah sehat	63,96%	68
02.01.45	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB	109,89	100
02.01.46	Angka Bebas Jentik (ABJ)	81,17	≥95%
02.01.47	Penemuan Kasus AFP ≥ 2 per 100.000 pddk < 15 tahun	6,15	≥ 2/100000
02.01.48	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	100
02.01.49	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93,6	94,5
02.01.50	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	3,08	100
02.01.51	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	7,88	100
02.01.52	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	15,62	100
02.01.53	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	72,63	100
02.01.54	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	6 pos	15
02.01.55	Jumlah pengadaan sarana kendaraan operasional (ambulans) di Kelurahan	0	15
02.01.56	Terjaminnya perlindungan kesehatan bagi 40 % PBI JKN Kota Cimahi	95,91%	100
02.01.57	Persentase kepesertaan ke FKTP Puskesmas Kota Cimahi	57,37%	65%
02.01.58	1. Pelayanan Gawat Darurat (Jumlah Pasien)	46.429	51.261
02.01.59	2. Pelayanan Rawat Jalan (Jumlah Pasien)	180.890	199.720
0,084722222	3. Pelayanan Rawat Inap (Jumlah Pasien)	28.994	32.011
0,084733796	4. Pelayanan Bedah Sentral (Jumlah Tindakan)	4.137	4.568
0,08474537	5. Pelayanan Persalinan (Jumlah Pasien)	2.352	2.597
0,084756944	6. Pelayanan ICU (Jumlah Pasien)	649	716
0,084768519	7. Pelayanan Radiologi (Jumlah Tindakan)	23.119	25.525
0,084780093	8. Pelayanan Lab Klinik (Jumlah Tindakan)	387.876	478.841
0,084791667	9. Pelayanan Lab PA (Jumlah Tindakan)	2.065	2.280

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target 2022
1	2	3	5
0,084803241	10. Pelayanan Farmasi (Jumlah Resep)	227.493	276.519
0,084814815	11. Pelayanan UTD RS ((Jumlah Labu Darah)	13.300	14.684
0,084826389	12. Pelayanan Hemodialisa (Jumlah Tindakan)	7.549	16.128
0,084837963	13. Pelayanan Rehabilitasi Medis (Jumlah Pasien)	19.552	21.587
03.01	Kesehatan		
03.01.01	Indeks Kesehatan	82,45	82,55
03.01.02	AKI	113,98	99
03.01.03	AKB	6,17	6,8
03.01.04	Angka Kesakitan	41,9	40
03.01.05	Indek Keluarga Sehat	NA	42
03.01.06	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	88%	100%
03.01.07	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	46,15	92,31
03.01.08	Kepuasan pelanggan Pelayanan Kesehatan Dasar	73,25%	80%
03.01.09	Prevalensi kurang gizi	6,91	< 10 %
04.01	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
04.01.01	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi	17%	83%
04.01.02	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	D	C
04.01.03	Rasio volume kapasitas (VCR)	0,84	0,7
04.01.04	Kapasitas jalan se-Kota Cimahi	105.193 m	108.373
04.01.05	Kapasitas Jembatan se-Kota Cimahi	2,660 m	3.634
04.01.06	% kondisi jalan dan jembatan yang mantap	92,40%	95%
04.01.07	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	1,51%	0,26%
04.01.08	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk	73,53	74,95
04.01.09	Persentase luas taman terhadap luas kota	0,19%	0,37%
04.01.10	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	58,82%	100,00%
04.01.11	Persentase bangunan berizin	29,60%	34,90%



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target 2022
1	2	3	5
04.02	Penataan Ruang		
04.03	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
04.03.01	Persentase pengelolaan sampah	87%	99%
04.03.02	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	76,50%	98,31%
04.03.03	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0,38%	0,00%
04.03.04	Persentase cakupan pelayanan air bersih	68,42%	79,84%
04.03.05	Rasio Luas Kawasan Kumuh	4,39%	0,00%
04.04	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
04.04.01	Persentase penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	54%	84%
04.04.02	Persentase Penanganan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%
04.04.03	Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
04.04.04	Waktu Tanggap Bencana	15 menit	15 menit
04.04.05	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	100%	100%
04.04.06	Persentase luasan banjir terhadap luas kota	1,04%	0,00%
04.04.07	dokumen kajian mitigasi bencana	0	0
04.04.08	jumlah kejadian bencana yang ditangani	130 kejadian	60
C	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
04.05	Tenaga Kerja		
04.05.01	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616 orang	319,159
04.06	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
04.06.01	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,23%	93,00%
04.06.02	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100%	100%
04.06.03	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,38%	75,00%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target 2022
1	2	3	5
04.06.04	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,30%	32%
04.06.05	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	24%	20%
04.06.06	Persentase perempuan sebagai tenaga manager profesional administrasi teknisi	45,94%	47,50%
04.06.07	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	70%	100%
04.07	Pangan		
04.07.01	Pola Pangan Harapan (PPH)	82,1	84,6
04.07.02	PPH ketersediaan	96,2	97,2
04.07.03	Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	11	15
04.07.04	Penguatan cadangan pangan	0	18 ton
04.08	Pertanahan		
04.08.01	Penyelesaian izin lokasi	100%	100%
04.09	Lingkungan Hidup		
04.09.01	Indeks Kualitas Udara	39,24	46
04.09.02	Indeks Kualitas Air	38,8	41,29
04.09.03	Indeks Tutupan Lahan /Vegetasi	34,15	34,97
04.09.04	Persentase Ruang Terbuka Hijau	11,15%	12,14%
04.09.05	Tersusunnya RPPLH Kota	0	1
04.10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
04.10.01	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	95.2%	99.9%
04.10.02	Cakupan penerbitan akte kelahiran	69%	90%
04.10.03	Cakupan penerbitan akte kematian	58.1%	85%
04.10.04	Cakupan penerbitan kartu keluarga	95.2%	99.9%
04.11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
04.11.01	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,31%	1,05%
04.11.02	Total Fertility Rate (TFR)	1,98	1,96
04.11.03	Rasio Akseptor KB	78,51%	79,00%
04.11.04	Persentase lembaga yang berdaya	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target 2022
1	2	3	5
04.11.05	Tingkat keswadayaan masyarakat	NA	50%
04.12	Perhubungan		
04.12.01	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	65%	73 %
04.12.02	Persentase Angkutan yang Layak jalan	51,50%	55 %
04.12.03	Persentase titik kemacetan	72%	30 %
04.12.04	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	11,94%	78,09 %
04.13	Komunikasi dan Informatika		
04.13.01	Cakupan pengembangan e-Government daerah	10%	70%
04.13.02	Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	40%	65%
04.14	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
04.14.01	Prosentase kenaikan omset IKM/UKM selama mengikuti pameran promosi	5%	24%
04.14.02	Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional	23 IKM/UKM	143 IKM/UKM
04.14.03	Jumlah wirausaha baru	15 WUB	65 WUB
04.14.04	Jumlah Koperasi aktif	90	115
04.14.05	Jumlah IKM yang memenuhi standar mutu	120 IKM	1120 IKM
04.14.06	Regulasi kebijakan pengembangan industri kota	0	1
04.15	Penanaman Modal		
04.15.01	jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	2	6
04.15.02	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	125	225
04.15.03	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Rp8.953.319.609.542	Rp9.225.170.000.000
04.16	Kepemudaan dan Olah Raga		
04.16.01	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	50%	100%
04.16.02	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	18,18%	70,00%
04.16.03	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pelatih)	49,14%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target 2022
1	2	3	5
04.16.04	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pembina)	3,03%	66,70%
04.16.05	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik pemerintah)	0%	100%
04.17	Statistik		
04.17.01	Persentase ketersediaan data statistik daerah	NA	80%
04.18	Persandian		
04.18.01	Persentase informasi yang aman	NA	5%
04.19	Kebudayaan		
04.19.01	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24%	61%
04.20	Perpustakaan		
04.20.01	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota	78,6	78,9
04.20.02	Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	60	75
04.21	Kearsipan		
04.21.01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	NA	15%
D	LAYANAN URUSAN PILIHAN		
04.22	Pariwisata		
04.22.01	Rasio Destinasi Wisata Baru		-
04.22.02	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		-
04.22.03	Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	0	3
04.22.04	jumlah Wisatawan mancanegara (wisman)	546	700
04.22.05	jumlah wisatawan nusantara (wisnus)	3526	5680
04.23	Pertanian		
04.23.01	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	305 ton	310 ton
04.23.02	Produksi Hasil Peternakan (Daging dan Susu)	Daging : 100 ton/tahun; Susu : 750 l/tahun	Daging : 108 ton/tahun; Susu :950 l/tahun
04.23.03	Produksi hasil tanaman padi(ton)	1674,13	1682,52

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target 2022
1	2	3	5
04.23.04	Produktivitas hasil tanaman padi(ton/Ha)	6,5	6,8
04.26	Perdagangan		
04.26.01	Cakupan Bina Kelompok pedagang	N/A	6 kelompok
04.26.02	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	17,73%	17,82%
04.26.03	Jumlah sentra jasa dan perdagangan	0	2
04.27	Perindustrian		
04.27.01	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB	45,71%	45,83%
04.27.02	Persentase kenaikan UMK	8,71%	9,89%
04.27.03	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2	5
E	PENUNJANG URUSAN		
04.30	Perencanaan Pembangunan		
04.30.01	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%
04.30.02	Persentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%	100%
04.31	Keuangan		
04.31.01	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
04.31.02	Persentase SILPA	32,21%	6,99%
04.31.03	Persentase SILPA terhadap APBD	n.a	4,58%
04.31.04	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung	69,97%	52,64%
04.31.05	Persentase dokumen anggaran yang tepat waktu	70%	85%
04.31.06	Persentase dokumen pelaporan yang tepat waktu	90%	100%
04.31.07	Persentase kelengkapan dokumen milik daerah	90%	100%
04.31.08	Persentase peningkatan pajak daerah	5-10%	7-11%
04.31.09	Realisasi target Pendapatan Daerah Total	89,00%	92%
04.32	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
04.32.01	Persentase ASN yang kompeten	75%	80%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target 2022
1	2	3	5
04.32.02	Persentase gap tunjangan kinerja dalam jabatan yang sama	30%	20%
04.32.03	persentase pelanggaran disiplin	10%	5%
04.33	Penelitian dan pengembangan		
04.33.01	Persentase kajian, penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan	NA	80%

BAB VII

PENUTUP

Dokumen RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dan merupakan Rencana Pembangunan Tahun ke 5 (lima) dari Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017–2022. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rencana pembangunan haruslah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, untuk mencapai sasaran program-program yang telah direncanakan di dalam Dokumen RKPD Kota Cimahi Tahun 2022, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip tersebut di dalam melaksanakan seluruh kegiatannya serta memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 menjadi pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Cimahi Tahun 2022, dokumen RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2022. Dokumen RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.



RKPD TAHUN 2022